

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/318727843>

STUDI MASYARAKAT INDONESIA

Book · May 2015

CITATION

1

READS

54,448

1 author:



Eko Handoyo

Universitas Negeri Semarang

82 PUBLICATIONS 247 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

STUDI MASYARAKAT INDONESIA

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta
Pasal 2 :

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundangan undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72 :

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarakan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

STUDI MASYARAKAT INDONESIA

Tim Penulis

Dr. Eko Handoyo, M.Si.

Prof. Dr. Tri Marhaeni Pudji Astuti, M.Hum.

Dra. Rini Iswari, M.Si.

M. Yasir Alimi, Ph.D.

Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.Si.



PENERBIT OMBAK

www.penerbitombak.com

2015

STUDI MASYARAKAT INDONESIA
Copyright©Eko Handoyo, dkk., 2015

Terbitan I, UNNES PRESS 2007
Diterbitkan kembali oleh Penerbit Ombak (**Anggota IKAPI**), 2015
Perumahan Nogotirto III, Jl. Progo B-15, Yogyakarta 55292
Tlp. (0274) 7019945; Fax. (0274) 620606
e-mail: redaksiombak@yahoo.co.id
website: www.penerbitombak.com
facebook: Penerbit Ombak Dua

PO. 544.10.'15

Penulis: Eko Handoyo, dkk.

Editor: Eko Handoyo

Tata letak: Adik Mustofa Tamam

Sampul: Dian Qamajaya

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

STUDI MASYARAKAT INDONESIA

Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015

x + 218 hlm.; 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-602-258-234-2

DAFTAR ISI

PRAKATA

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I HETEROGENITAS MASYARAKAT INDONESIA

- A. Masyarakat Indonesia
- B. Struktur Masyarakat Indonesia
- C. Kemajemukan Etnik di Indonesia
- D. Rangkuman

BAB II PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

- A. Dari Masyarakat Majemuk Menuju Masyarakat Multikultural
- B. Budaya Multikultural
- C. Pendidikan Multikultural
- D. Kesetaraan dalam Perbedaan
- E. Rangkuman

BAB III SISTEM SOSIAL INDONESIA

- A. Konsep Dasar Sistem Sosial
- B. Nilai-nilai dan Norma-norma Sosial
 - 1. Nilai Sosial
 - 2. Norma Sosial
 - 3. Fungsi Norma Sosial
- C. Struktur Sosial Indonesia
- D. Manusia Sebagai Makhluk Sosial
 - 1. Konsep Kelakuan
 - 2. Jenis Pola Kelakuan
- E. Diskriminasi dalam Masyarakat Indonesia
- F. Rangkuman

BAB IV SISTEM BUDAYA INDONESIA

- A. Pengertian Kebudayaan

- B. Kebudayaan Sebagai Pedoman Hidup
- C. Kebudayaan dan Kepribadian Masyarakat Indonesia
 - 1. Pola Hidup Masyarakat Peramu
 - 2. Pola Masyarakat Petani Ladang
 - 3. Pola Hidup Masyarakat Petani Sawah
 - 4. Pola Hidup Masyarakat Pesisir
 - 5. Integrasi Pola-pola Hidup dan Kepribadian Bangsa
- D. Keanekaragaman Kebudayaan Indonesia
- E. Orientasi Nilai Budaya Masyarakat Indonesia
- F. Budaya dan Integrasi Sosial
- G. Rangkuman

BAB V PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA INDONESIA

- A. Pengertian Perubahan Sosial Budaya Indonesia
 - 1. Perubahan Sosial
 - 2. Perubahan Kebudayaan
- B. Kesenjangan Sosial Budaya
- C. Rangkuman

BAB VI INTEGRASI DAN KONFLIK

- A. Konsep Dasar Integrasi dan Konflik
 - 1. Integrasi
 - 2. Konflik
- B. Teori Integrasi dan Konflik
 - 1. Teori Integrasi
 - 2. Teori Konflik
- C. Manajemen Konflik
- D. Rangkuman

BAB VII LINGKUNGAN HIDUP, PENDUDUK , BUDAYA, DAN ETIKA HIDUP

- A. Lingkungan Hidup
- B. Penduduk
- C. Urbanisasi
- D. Ledakan Penduduk dan Kemajuan Teknologi
- E. Lingkungan dalam Desain Pembangunan Berkelanjutan
- F. Kebudayaan dan Etika Lingkungan
- G. Gaya Hidup Konsumtif
- H. Kesadaran dan Etika Lingkungan
- I. Pendekatan Masalah Kependudukan dan Lingkungan

J. Rangkuman

BAB VII GENDER DAN PEMBANGUNAN

- A. Konsep Gender dan Pembangunan
 - 1. Pendahuluan
 - 2. Konsep Gender, Jenis Kelamin, dan Kodrat
 - 3. Sosialisasi Peran Gender
- B. Pendekatan Gender dalam Pembangunan
 - 1. Perempuan dan Pembangunan
 - 2. Gender dalam Pembangunan
- C. Ketimpangan Gender di Berbagai Bidang
 - 1. Ketimpangan Gender di Bidang Politik
 - 2. Ketimpangan Gender dalam Bidang Ekonomi
 - 3. Ketimpangan Gender dalam Dunia Kerja
 - 4. Ketimpangan Gender dalam Pendidikan
 - 5. Ketimpangan Gender di Bidang Hukum
- D. Rekonstruksi Gender di Era Globalisasi
- E. Rangkuman

DAFTAR PUSTAKA

GLOSARIUM

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1. Tingkat Analisis Perubahan Sosial

Tabel 5.2. Lima Masalah Dasar yang Menentukan Orientasi Nilai Budaya

Tabel 6.1. Perbandingan Teori Konsensus dan Teori Konflik

Tabel 7.1. Jumlah Penduduk per Provinsi dilihat dari Proporsi Laki-laki
dan Perempuan

Tabel 7.2. Sanksi terhadap Pelanggaran Lingkungan Berdasarkan UU No.
32 Tahun 2009

DAFTAR GAMBAR

Gambar 6.1. Tiga Unsur Konflik

Gambar 7.1. Alur Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

PRAKATA

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang luar biasa kompleks, demikian pula struktur sosial yang dimilikinya. Aspek politik, ekonomi, sosial-kultural, dan hukumnya sangatlah dinamik. Bahkan wilayah teritorial yang dihuni oleh masyarakat suku bangsa yang cenderung statis pun turut mengalami perubahan terutama sejak Timor Timur lepas dari wilayah politik dan hukum Indonesia pada pemerintahan Presiden Habibi.

Masyarakat Indonesia yang sangat heterogen dengan beraneka ragam sistem sosial dan budaya rentan mengalami konflik baik yang sifatnya vertikal maupun horizontal. Konflik demikian tidak jarang menimbulkan perubahan serius yang jika tidak dikelola dengan baik akan dapat mengganggu bahkan mengkoyak integrasi bangsa. Kondisi disintegrasi yang pernah dialami negara-negara kawasan Balkan, tentu saja tidak diharapkan terjadi di Indonesia. Namun demikian, konflik dalam kadar tertentu dapat memberi energi baru bagi terwujudnya integrasi bangsa.

Tantangan global yang dihadapi masyarakat Indonesia memberikan dampak positif bagi perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia. Di sisi lain, dampak negatif globalisasi mendorong kelompok-kelompok suku bangsa, politik, etnik maupun sosial di wilayah lokal bangkit membentuk pemerintahan sendiri (*home rule*) dengan menempati wilayah lokal sendiri (*home land*). Perkembangan demikian, jika tidak diantisipasi dengan baik dapat melunturkan komitmen berbangsa dan bernegara di kalangan masyarakat lokal, bahkan bukan tidak mungkin integrasi bangsa bisa terkoyak.

Materi studi masyarakat Indonesia yang disajikan di dalam buku ini diharapkan mampu mencerahkan pemahaman para mahasiswa

dan pembaca pada umumnya mengenai kondisi masyarakat Indonesia termasuk *social-capital* yang masih dimilikinya. Pemahaman dan komitmen kebangsaan akan bertambah kuat dengan mempelajari konsep maupun pendekatan budaya dan gender dalam pembangunan.

Dalam edisi revisi ini ditambahkan materi baru, yaitu pendidikan multikultural. Materi ini dipandang perlu, karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia sejak merdeka hingga hari ini. Permasalahan itu berkaitan dengan kondisi kemajemukan Indonesia yang sering menimbulkan konflik dan ketegangan di antara warga bangsa, dikarenakan lemahnya pemahaman dan *sense of belonging* terhadap nilai-nilai kebangsaan. Itulah sebabnya, kehadiran materi pendidikan multikultural diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap keanekaragaman Indonesia sekaligus diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bahwa perbedaan merupakan rahmat Ilahi yang harus diapresiasi demi terciptanya kerukunan dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa Indonesia.

Materi kajian dalam buku ini tentu saja belum bisa dikatakan mewakili substansi kajian Studi Masyarakat Indonesia, karena mengkaji masyarakat Indonesia dengan seluruh aspeknya tidak cukup hanya ditulis dengan ratusan lembar. Ribuan lembar pun belum bisa mewakili kajian masyarakat Indonesia yang potensi maupun problema yang dihadapi senantiasa mengalami perkembangan. Buku ini hanya menampilkan pokok-pokoknya saja, dengan harapan sumber-sumber lain dapat dicari sendiri oleh mahasiswa dan pembaca.

Akhirnya, penulis menyampaikan terima kasih atas dukungan dan bantuan dari semua pihak, khususnya dari Dekan FIS Unnes Semarang karena atas kearifan dan perhatian yang luar biasa, buku ini dapat diselesaikan.

Semarang, Mei 2015

Penulis,

BAB I

HETEROGENITAS MASYARAKAT INDONESIA

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat heterogen. Untuk mengkaji heterogenitas masyarakat Indonesia akan dibahas berturut-turut pengertian masyarakat Indonesia, struktur masyarakat Indonesia, dan kemajemukan masyarakat Indonesia. Dalam membahas masyarakat Indonesia terlebih dahulu dikemukakan konsep masyarakat dan selanjutnya perbedaan masyarakat dan warga negara. Dalam membahas struktur masyarakat Indonesia dikaji aspek yang unik secara vertikal maupun horizontal. Selanjutnya, dalam membahas kemajemukan masyarakat Indonesia ditekankan pada keanekaragaman etnik di Indonesia.

A. MASYARAKAT INDONESIA

Definisi “masyarakat” sangat beragam. Dalam telaah sosiologi, biasanya definisi dibuat berdasarkan hasil penelitian ataupun dari pengalaman sehari-hari. Hendropuspito OC (1989: 75) mendefinisikan masyarakat sebagai kesatuan yang tetap dari orang-orang yang hidup di daerah tertentu dan bekerja sama dalam kelompok-kelompok berdasarkan kebudayaan yang sama untuk mencapai kepentingan yang sama. Masyarakat dengan demikian memiliki ciri-ciri: (1) mempunyai wilayah dan batas yang jelas, (2) merupakan satu kesatuan penduduk, (3) terdiri atas kelompok-kelompok fungsional yang heterogen, (4) mengembangkan fungsi umum, dan (5) memiliki kebudayaan yang sama.

Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang di bawah tekanan serangkaian kebutuhan dan di bawah pengaruh seperangkat kepercayaan, ideal dan tujuan tersatukan dan terlebur dalam suatu

rangkaian kesatuan kehidupan bersama (Muthahhari (1998: 15). Kalimat kunci dari definisi tersebut adalah kehidupan bersama. Yang dimaksud kehidupan bersama adalah kehidupan yang di dalamnya kelompok-kelompok manusia hidup bersama-sama di suatu wilayah tertentu, berbagi iklim, berbagi identitas, berbagi kesenangan maupun kesedihan.

Koentjaraningrat sebagaimana dikutip oleh Sudikan (2001: 6) memaknai masyarakat sebagai kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Dalam definisi tersebut, unsur-unsur pokok yang membentuk masyarakat adalah interaksi, sistem adat istiadat, dan identitas bersama.

Dengan mengutip pendapat Marion Leat, Sudikan (2001: 7) mengemukakan empat kriteria yang harus dipenuhi agar suatu kelompok dapat disebut masyarakat, yaitu: (1) kemampuan bertahan melebihi masa hidup seorang individu, (2) rekrutmen seluruh atau sebagian anggota melalui reproduksi, (3) kesetiaan pada suatu sistem tindakan utama bersama, (4) adanya sistem tindakan utama yang bersifat swasembada.

Talcott Parsons (dalam Garna 1996: 57) memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang harus memenuhi empat syarat agar berfungsi, yaitu (1) penyesuaian masyarakat dengan lingkungan, (2) anggota masyarakat harus sepakat akan ketentuan untuk memilih, mengetahui, dan memahami tujuan kolektif dengan menyusun struktur tertentu, (3) penentuan anggota masyarakat agar dapat memainkan peranan dan mematuhi nilai-nilai serta menyelesaikan konflik dalam berinteraksi, (4) terjadi integrasi dari keadaan masyarakat, individu, dan institusi dikontrol oleh unsur atau bagian tertentu agar sistem sosial terpelihara.

Raph Linton sebagaimana dikutip Mutakin, dkk. (2004: 25) memberi batasan masyarakat sebagai setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama dalam waktu yang cukup lama, sehingga mereka dapat mengorganisasi diri dan sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang jelas. Unsur penting dari definisi ini adalah kelompok manusia, bekerja sama dalam waktu lama, dan hidup dalam wilayah dengan batas-batas yang jelas.

Kesumohamidjojo (2000: 26) memahami masyarakat sebagai kelompok manusia yang hidup relatif sebagai kebersamaan berdasarkan suatu tatanan kebudayaan tertentu. Definisi ini memuat unsur pokok, yaitu kelompok manusia, hidup dalam kebersamaan, berdasarkan tatanan kebudayaan tertentu.

Masih banyak pemikir yang membuat definisi tentang masyarakat, seperti Edward Shill, Hassan Shadily, Bertrand, Sukanto, Horton dan Hunt, Pareto, dan yang lain. Akan tetapi, disadari bahwa setiap definisi yang dikemukakan tidak akan pernah lengkap karena sifat definisi itu sendiri yang harus dinyatakan secara singkat. Bahkan, Soerjanto mengingatkan bahwa setiap definisi berbasis pada pendekatan realitas, artinya menyoroti salah satu aspek realitas manusia, kerena itu mengandung kebenaran (Kusumohamidjojo, 2000: 27).

Daripada membuat definisi baru yang belum tentu lengkap sebagaimana sudah disusun oleh para pemikir atau pemerhati masyarakat, maka lebih baik mengidentifikasi unsur-unsur menonjol yang merupakan ciri-ciri dari masyarakat, yaitu sebagai berikut.

1. Kelompok manusia yang disebut masyarakat memiliki suatu perasaan bersatu, bahkan *sense of belonging* yang relatif sama sampai tingkat kepentingan tertentu.
2. Kelompok manusia tersebut hidup dan bekerja dalam suatu kerangka yang sama untuk waktu yang lama.
3. Kelompok manusia tersebut menyelenggarakan hidupnya dalam suatu kerangka organisatoris yang tumbuh dari kebiasaan atau kesepakatan diam-diam.
4. Kelompok manusia tersebut terdiri dari kelompok-kelompok yang lebih kecil baik kelompok dalam alur genealogis maupun dalam alur organisatoris (Kusumohamidjojo, 2000: 28).

Sebagai pengelompokan sosial, Faisal (dalam Mutakin, dkk. 2004: 29) menyebutkan tiga ciri yang menandai suatu masyarakat, yaitu sebagai berikut.

1. Pada masyarakat terdapat sekumpulan individu yang jumlahnya cukup besar.

2. Individu-individu tersebut harus mempunyai hubungan yang melahirkan kerja sama di antara mereka minimal satu tingkatan interaksi.
3. Hubungan individu-individu itu sedikit banyak sifatnya harus permanen.

Apakah setiap individu bersifat kemasyarakatan atau tidak, Muthahhari (1998: 17) mengeksplorasi tiga pandangan, yaitu: (1) manusia bersifat kemasyarakatan, (2) manusia terpaksa bermasyarakat, (3) manusia bermasyarakat berdasarkan pilihannya sendiri. Menurut pandangan pertama, kehidupan bermasyarakat manusia sama dengan kerekahan seorang pria dan seorang wanita dalam kehidupan berumah tangga di mana masing-masing merupakan bagian dari suatu keseluruhan dan masing-masing bersifat ingin bersatu dengan keseluruhan itu. Pandangan kedua meyakini bahwa kehidupan bermasyarakat itu seperti kerja sama, yaitu suatu fakta antara dua negara yang karena tak mampu mempertahankan diri dari serangan musuh terpaksa membuat suatu persetujuan bersama. Pandangan ketiga berpendapat bahwa kehidupan bermasyarakat serupa dengan kerekahan dua orang bermodal yang bersepakat membentuk suatu badan usaha untuk memperoleh keuntungan-keuntungan lebih besar.

Dari ketiga pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pandangan pertama, faktor utama pembentuk kehidupan bermasyarakat adalah fitrah manusia itu sendiri; sedangkan menurut pandangan kedua, faktor utama membentuk kehidupan bermasyarakat adalah sesuatu yang berada di luar dan lepas dari manusia dan pandangan ketiga percaya bahwa faktor utama pembentuk kehidupan bermasyarakat adalah kemampuan akal dan kemampuan memperhitungkan yang dimiliki manusia.

Veeger (1993: 86–87) menyajikan dua pandangan mengenai masyarakat, yaitu pandangan organisme dan pandangan mekanisme. Organisme memandang masyarakat sebagai kesatuan hidup di mana individu-individu menempati kedudukan bawahan (*subordinate*) dan fungsional bagaikan organ-organ badan. Keseluruhan didahulukan

atas kepentingan individual, ketunggalan atas kejamakan (pluralitas); keseragaman atas keanekaragaman yang penuh persaingan dan konflik baik yang masih terpendam maupun terbuka. Mekanisme memandang masyarakat sebagai perhimpunan individu-individu yang masing-masing berdiri sendiri dan hanya atas cara lahiriah berinteraksi satu dengan yang lain. Apa yang disebut masyarakat menurut pandangan tersebut tidak lain adalah jaringan relasi-relasi yang ditambahkan dari luar kepada individualitas, para pelaku bagaikan perangkaian atom-atom atau ketunggalan, perbedaan atau konflik atas perpaduan atau kesesuaian paham (konsensus).

Batas masyarakat, dalam konteks tempat menjadi jelas ketika dikaitkan dengan tempat atau sifat tertentu, misalnya masyarakat Indonesia. Istilah Indonesia sudah banyak yang menulis, yang paling terkenal adalah pendapat John Richardson Logan dan Adolf Bastian. Nama Indonesia menurut Logan berasal dari kata “*Indo*” dan “*Nesie*”, yang artinya kepulauan Hindia. Nama Indonesia dipakai dalam bukunya berjudul *The Indian Archipelago and Eastern Asia* yang diterbitkan pada tahun 1850. Adolf Bastian memopulerkan nama Indonesia dalam bukunya berjudul *Indonesian oder die Inseln des Malayaschen Archipelago* (1884-1889). Yang belum pernah ditulis secara khusus adalah apa dan bagaimana masyarakat Indonesia. Baru diketahui secara luas adalah istilah Warga Negara Indonesia (WNI). Istilah WNI tersebut bahkan sudah diakui secara yuridis sebagaimana terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

Mengenai pengertian masyarakat Indonesia, Kusumahamidjojo (2000: 30) mengemukakan empat komponen yang dapat dimasukkan dalam pengertian masyarakat Indonesia.

Pertama, kelompok masyarakat yang berproses dalam yuridiksi negara Republik Indonesia, namun yang juga mengakui kenyataan-kenyataan berikut sebagaimana ditulis pada nomor dua.

Kedua, tidak semua suku yang menghuni desa-desa di kepulauan Indonesia, tetapi juga mereka yang tidak dapat digolongkan kepada salah

satu suku (terutama karena semakin banyaknya perkawinan campuran antarsuku) dan yang terutama hidup di kota-kota.

Ketiga, di samping itu mereka yang menjadi penghuni di wilayah RI untuk jangka panjang dan menjalankan kehidupannya berdasarkan prinsip organisatoris di Indonesia, karena itu meliputi baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

Keempat, warga negara Indonesia yang menjadi penghuni wilayah negara lain untuk jangka pendek.

Pengertian masyarakat Indonesia seperti diungkapkan oleh Kusumohamidjojo tersebut masih mencampuradukkan kategori yuridis dan kategori sosiologis-antropologis. Kategori pertama terlihat pada komponen tiga dan empat, sedangkan kategori sosiologis-antropologis dikesanakan oleh komponen pertama dan kedua. Pengertian masyarakat sesungguhnya lebih bersifat sosiologis-antropologis daripada bersifat yuridis. Namun pada bagian lain dari tulisannya, Kusumohamidjojo menyadari bahwa pengertian masyarakat Indonesia lebih bersifat sosiologis-antropologis, sebagaimana dapat dicermati dari pernyataannya berikut.

Masyarakat tidak dapat dibayangkan tanpa kebudayaan dan sebaliknya kebudayaan hanya relevan karena masyarakat yang menciptakannya (Kusumohamidjojo, 2000: 31).

B. STRUKTUR MASYARAKAT INDONESIA

Dilihat dari faktor-faktor pembentuknya, masyarakat Indonesia memiliki struktur yang bercorak majemuk. Kusumohamidjojo (2000: 45) melihat masyarakat Indonesia dan kompleks kebudayaan masing-masing bersifat plural (jamak) sekaligus juga heterogen (aneka ragam). Pluralitas sebagai kontraposisi dari singularitas menunjukkan adanya suatu situasi yang terdiri dari kejamakan, bukan ketunggalan. Artinya, dalam masyarakat Indonesia dapat dijumpai berbagai subkelompok masyarakat yang tidak bisa disatukelompokkan dengan lainnya. Tidak kurang dari 500 suku bangsa di Indonesia menegaskan kenyataan itu. Demikian pula dengan kebudayaan mereka. Heterogenitas yang

merupakan kontraposisi dari homogenitas mengindikasikan suatu kualitas dari keadaan yang menyimpan ketidaksamaan dalam unsur-unsurnya. Artinya, masing-masing subkelompok masyarakat itu beserta kebudayaannya benar-benar berbeda satu dari yang lainnya.

Menurut Nasikun (1993: 28), struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua cirinya yang bersifat unik, yaitu: (1) secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan kedaerahan, (2) secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam.

Perbedaan-perbedaan secara horizontal dimaknai sebagai perbedaan yang tidak diukur berdasarkan kualitas dari unsur-unsur yang membuat keragaman tersebut (Awan Mutakin, dkk. 2004: 246–247). Sebagai contoh, perbedaan bahasa daerah tidak diartikan, bahwa bahasa daerah (suku bangsa) tertentu lebih baik daripada bahasa daerah (suku bangsa) lainnya.

Dalam perbedaan vertikal, perbedaan dari unsur-unsur yang membuat keragaman tersebut dapat diukur berdasarkan kualitas atau kadarnya. Misalnya perbedaan karena aspek ekonomi akan melahirkan kelompok masyarakat berekonomi tinggi, menengah, dan rendah. Demikian pula muncul kelompok masyarakat berpendidikan tinggi, menengah, dan rendah. Terbentuk pula masyarakat berpenghasilan tinggi, menengah, dan rendah.

Perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan dalam struktur horizontal sering disebut sebagai ciri masyarakat majemuk (Nasikun, 1998: 28). Istilah masyarakat majemuk pertama kali diperkenalkan oleh Furnivall untuk menggambarkan masyarakat Indonesia pada masa Hindia Belanda. Masyarakat majemuk pada masa Hindia Belanda menurut Furnivall dipahami sebagai suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam suatu kesatuan politik (Nasikun, 1993: 29; Liliweri, 2001: 337). Sebagai masyarakat majemuk, masyarakat Indonesia ia menyebutnya sebagai suatu tipe

masyarakat daerah tropis di mana mereka yang berkuasa dan mereka yang dikuasai memiliki perbedaan ras. Orang-orang Belanda sebagai golongan minoritas kendati jumlahnya semakin bertambah terutama pada akhir abad ke-19 adalah penguasa yang memerintah sebagian besar orang Indonesia pribumi (bumiputra) yang merupakan warga negara kelas tiga di negerinya sendiri. Golongan timur asing baik Tionghoa maupun NonTionghoa menempati posisi kelas menengah di antara kedua golongan di atas.

Dalam kehidupan politik, pertanda yang paling jelas dari masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk adalah tidak adanya kehendak bersama (*common-will*). Masyarakat Indonesia sebagai keseluruhan terdiri dari elemen-elemen yang terpisah satu dengan lainnya karena perbedaan ras. Dalam hal ini, masing-masing elemen lebih merupakan kumpulan individu-individu daripada sebagai suatu keseluruhan yang bersifat organis dan sebagai individu kehidupan sosial mereka tidaklah utuh.

Orang-orang Belanda datang ke Indonesia untuk bekerja, tetapi mereka tidak tinggal menetap di sana. Kehidupannya semata-mata berada di seputar pekerjaannya. Mereka memandang masalah-masalah kemasyarakatan, politik, dan ekonomi yang tejadi di Indonesia tidak sebagai warga negara melainkan sebagai kapitalis atau majikan dari buruh-buruh mereka.

Orang-orang timur asing, terutama orang-orang Tionghoa seperti halnya orang-orang Belanda datang ke Indonesia semata-mata untuk kepentingan ekonomi. Demikian pula, orang-orang pribumi (bumiputra) seperti halnya orang-orang Belanda dan orang-orang Tionghoa tidak utuh pula. Kehidupan mereka tidak lebih daripada kehidupan pelayan di negerinya sendiri. Kerena hidup atas dasar pola pemikiran dan cara hidup sendiri-sendiri terpisah dari lainnya, maka masyarakat Indonesia zaman kolonial tidak memiliki suatu kehendak bersama (*commonwill*).

Dalam kehidupan ekonomi, tidak adanya kehendak bersama (*commonwill*) menemukan wujud kongkrit dalam bentuk tidak adanya permintaan sosial yang dihayati bersama oleh seluruh elemen masyarakat. Kebutuhan keagamaan, politik, seni, musik, sastra, dan

semua kebutuhan kultural memiliki aspek ekonomi, karenanya semua pada akhirnya menyatakan diri secara terorganisasi hanya sebagai kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam wujudnya yang paling nyata, yaitu permintaan (*demand*) masyarakat sebagai keseluruhan. Akan tetapi, di dalam masyarakat majemuk Indonesia pada masa Hindia Belanda, permintaan masyarakat tidak terorganisasi, melainkan bersifat sektoral, sehingga tidak ada permintaan sosial yang dihayati bersama oleh semua elemen masyarakat menjadi sumber yang membedakan karakter ekonomi majemuk (*plural-economy*) dari suatu masyarakat majemuk dengan ekonomi tunggal (*unitary-economy*) dari suatu masyarakat yang bersifat homogen. Pada masa kolonial, pembagian masyarakat berdasarkan ras memengaruhi pola-pola produksinya. Orang Belanda misalnya berproduksi di bidang perkebunan, penduduk pribumi di bidang pertanian dan orang-orang Tionghoa sebagai kelas pemasaran (*marketing-class*) menjadi perantara di antara keduanya. Konflik mudah terjadi pada masyarakat majemuk karena perbedaan ras yang secara alami sudah muncul ditambah pula oleh perbedaan kepentingan ekonomi.

Uraian di atas merupakan deskripsi dari keadaan masyarakat Indonesia pada masa Hindia Belanda sebagaimana dituturkan oleh Furnivall. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat majemuk menurut pandangan Furnivall adalah masyarakat dalam sistem nilai yang dianut oleh berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya adalah sedemikian rupa sehingga para anggota masyarakat kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai keseluruhan, kurang memiliki homogenitas kebudayaan atau bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain (Nasikun, 1993: 32).

Suatu masyarakat dikatakan bersifat majemuk sejauh masyarakat tersebut secara struktural memiliki sub-subkebudayaan yang bersifat *diverse* atau berbeda. Masyarakat demikian ditandai oleh kurang berkembangnya sistem nilai atau konsensus yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat dan sering timbul konflik-konflik sosial atau setidak-tidaknya oleh kurangnya integrasi dan saling ketergantungan

di antara kesatuan-kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya. Dengan meminjam konsep Clifford Geertz, masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam sub-subsistem yang kurang lebih berdiri sendiri-sendiri dalam mana masing-masing subsistem terikat ke dalam oleh ikatan-ikatan yang bersifat primordial (Nasikun, 1993: 33).

MB. Smith (dalam Garna, 1996: 165) menganalisis bahwa masyarakat majemuk juga memiliki berbagai kelompok yang kebudayaannya berbagai ragam, sering berlangsung perpecahan dan pertentangan. Dari sisi politik, masyarakat majemuk dikuasai oleh satu kelompok minoritas yang juga memiliki kebudayaan sendiri. Masyarakat majemuk ini berwujud bukan atas dasar sistem nilai yang sama, tetapi oleh adanya konflik dan paksaan.

Berghe (dalam Garna 1996: 165) membedakan kemajemukan sosial dan kemajemukan budaya. Kemajemukan sosial berwujud juga masyarakat dipecahkan dalam kelompok kerja sama atas dasar lainnya, bukan atas dasar kebudayaan. Kemajemukan budaya adalah masyarakat majemuk yang timbul atas berwujudnya beberapa kelompok etnik. Selanjutnya, Berghe (dalam Garna 1996: 166) mengemukakan ciri-ciri masyarakat majemuk sebagai berikut:

1. ketiadaan konsensus nilai-nilai
2. beranekaragam kebudayaan
3. terjadi konflik di antara kelompok yang berlainan
4. otonomi atau kebebasan di antara bagian-bagian dalam sistem sosial
5. diperlukan paksaan dan saling ketergantungan dalam ekonomi sebagai dasar integrasi sosial
6. terjadi dominasi politik oleh golongan-golongan tertentu
7. relasi antarkelompok lebih merupakan *secondary segmental* dan *utilitarian*, sedangkan relasi dalam kelompoknya lebih merupakan *primary*.

Mutakin, dkk. (2004: 250) berpendapat bahwa masyarakat majemuk dalam proses interaksi sosial mirip dengan diferensiasi sosial. Dengan mengutip pandangan Kaare Svalastoga, Mutakin, dkk. (2004:

250) mengartikan diferensiasi sosial sebagai perbedaan tingkatan yang merupakan salah satu ciri yang sangat universal dari organisasi sosial. Dalam diferensiasi sosial, ada kecenderungan ke arah perkembangan sosial yang berlawanan seperti pembedaan menurut ciri-ciri biologis antara manusia. Perkembangan sosial yang berlawanan ini cenderung memudahkan munculnya konflik dan konflik sebagai dampak ikutan dari diferensiasi sosial merupakan salah satu karakter dari masyarakat majemuk.

Secara horizontal, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk atau masyarakat plural karena masyarakatnya terbagi-bagi menurut kebudayaan, kekerabatan, suku bangsa, etnik, ras, dan agama. Berbeda dengan Furnivall yang mengartikan pluralitas masyarakat Indonesia dalam konteks masyarakat kolonial yang menggolong-golongkan masyarakat kolonial ke dalam tiga kategori, yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing (Tionghoa dan Non-Tionghoa) dan golongan Pribumi (Bumiputra); maka pluralitas masyarakat Indonesia pasca kolonial harus dipahami dalam konteks perbedaan-perbedaan internal di antara golongan pribumi.

Meskipun konsep masyarakat majemuk disusun berdasarkan fakta-fakta sosial yang ada, para teoretiisi fungsional memberikan kritik terhadap konsep masyarakat majemuk.

Pertama, teori tentang masyarakat mengabaikan persatuan dasar yang berbentuk dalam masyarakat.

Kedua, dilihat dari kaidah sosial, teori masyarakat majemuk melakukan analisis sistem sosial berdasarkan kebudayaan yang dianggap membuat kekeliruan.

Ketiga, mengabaikan kenyataan sosial karena teori masyarakat majemuk tidak memedulikan berbagai ikatan yang terbentuk di antara anggota masyarakat dari kelompok yang berlainan.

Keempat, apabila memberi perhatian utama kepada persatuan yang ada di setiap kelompok masyarakat, maka perhatian tersebut tidak melihat terjadinya perpecahan.

Kelima, masyarakat majemuk sebenarnya bukanlah suatu masyarakat yang unik karena bentuknya tidak berbeda dengan masyarakat yang memiliki stratifikasi sosial kompleks atau suatu masyarakat yang menghadapi masalah etnik dan minoritas.

Perbedaan suku bangsa, etnik, ras, budaya, dan agama sebagai dimensi horizontal dari struktur masyarakat Indonesia merupakan fakta sosial yang tak terbantahkan dan hingga kini menjadi persoalan klasik bagi upaya integrasi nasional Indonesia. Berbeda dengan dimensi horizontal, dimensi vertikal struktur masyarakat Indonesia yang menjadi semakin penting artinya dari waktu ke waktu, dapat dicermati dari semakin tumbuhnya polarisasi sosial berdasarkan kekuatan politik dan kekayaan. Dengan semakin meluasnya pertumbuhan sektor pelapisan sosial antara sejumlah besar orang-orang yang secara ekonomis dan politis berposisi lemah pada lapisan bawah dan sejumlah kecil orang-orang yang relatif kaya dan berkuasa pada lapisan atas menjadi semakin mengeras. Proses timbulnya ketimpangan tersebut memiliki akarnya di dalam struktur ekonomi Indonesia pada zaman Hindia Belanda yang oleh Boeke diistilahkan sebagai *dual economy*.

Dalam struktur ekonomi dualis (*dual-economy*), dua macam sektor ekonomi yang berbeda watak saling berhadapan satu dengan lainnya. Sektor yang pertama berupa struktur ekonomi modern, secara komersial canggih sifatnya, banyak bersentuhan dengan lalu lintas perdagangan internasional, dibimbing oleh motif-motif maksimalisasi keuntungan dan dalam konteks masyarakat kolonial hampir sepenuhnya dikuasai oleh orang-orang beserta keturunannya termasuk di dalamnya golongan Tionghoa. Berseberangan dengan sektor modern, eksistensi struktur ekonomi tradisional yang bersifat tradisional menurut teori ekonomi modern merupakan struktur ekonomi yang berorientasi kepada sikap-sikap konservatif, dibimbing oleh motif-motif untuk memelihara keamanan dan kelanggengan sistem yang sudah ada, kurang berminat pada usaha-usaha untuk memperoleh keuntungan dan penggunaan sumber-sumber secara maksimal, lebih berorientasi kepada motif-motif untuk memenuhi kepuasan dan kepentingan-kepentingan sosial daripada menanggapi rangsangan-rangsangan dari kekuatan-kekuatan internasional dan kurang

mampu mengusahakan pertumbuhan perdagangan secara dinamis. Sebagian besar orang Indonesia hidup di dalam sektor ekonomi tradisional. Perbedaan antara kedua sektor (modern dan tradisional) berakar pada keseluruhan struktur masyarakat Indonesia yang mengandung perbedaan tajam antara struktur masyarakat kota yang bersifat modern dengan struktur dalam masyarakat pedesaan yang bersifat tradisional. Sebagaimana disimpulkan Edward Shils, dalam masyarakat majemuk, jurang perbedaan terjadi antara sekelompok orang-orang yang bergairah, penuh inspirasi, relatif kaya, berpendidikan serta berpengaruh dari kota-kota besar dengan orang-orang desa yang kurang bergairah, melarat, kurang berpendidikan serta tidak berdaya (Nasikun, 1993: 48).

Kemajemukan masyarakat terutama dilihat dari aspek vertikal terbentuk karena tiga jenis diferensiasi sosial, yaitu: (1) diferensiasi tingkatan, muncul karena ketimpangan distribusi barang sesuatu yang dibutuhkan yang terbatas persediaannya; (2) diferensiasi fungsional atau pembagian kerja, muncul karena orang melakukan pekerjaan yang berlainan; (3) diferensiasi adat, muncul karena aturan berperilaku yang tepat berbeda menurut situasi tertentu (Svalastoga, 1989: 1).

Tingkatan-tingkatan sosial yang ada di masyarakat turut membentuk kemajemukan sosial masyarakat. Menurut Weber (dalam Svalastoga, 1989: 12), tingkatan sosial dimaksud meliputi:

1. Tingkatan kekayaan yang menimbulkan kelas-kelas kekayaan. Kelas atas adalah orang yang hidup dari hasil kekayaannya, sedangkan kelas bawah adalah orang yang terbatas kekayaannya atau mereka menjadi milik orang lain.
2. Tingkatan menurut kekuatan ekonomi yang menimbulkan kelas-kelas pendapatan. Kelas atas adalah bankir dan pemodal (kapitalis) dan kelas bawah adalah buruh.
3. Tingkatan yang tercermin menurut kekayaan dan pendidikan, yang menimbulkan kelas-kelas sosial, terdiri dari posisi antara individu yang bergerak secara bebas selama hidupnya atau melebihi satu generasi. Kelas atas adalah orang kaya dan berpendidikan tinggi, sedangkan kelas bawah adalah mereka yang tidak kaya dan berpendidikan rendah.

4. Tingkatan Status Sosial, dalam hal mana kelas atas adalah orang yang memiliki gaya hidup yang paling dapat diterima, berpendidikan tinggi dan memegang posisi dengan gengsi sosial yang tinggi pula serta anak keturunan orang yang berstatus sosial tinggi; sementara kelas bawah adalah kontras dari ciri-ciri kelas atas.

C. KEMAJEMUKAN ETNIK DI INDONESIA

Sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya bahwa struktur masyarakat Indonesia dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek horizontal dan aspek vertikal. Aspek horizontal lebih bersifat alamiah (natural) karena berasal dari unsur bawaan, orang-orangnya menerima ketentuan (hukum) Sang Pencipta terhadap identitas mereka tanpa bisa memilih, dan kemajemukan secara horizontal ini tidak dapat diukur berdasarkan kualitas dari unsur-unsur yang membuat keragaman. Mobilitas atas pertukaran identitas hampir tidak mungkin terjadi, apalagi jika unsur penentunya adalah faktor keturunan. Berbeda dengan aspek horizontal yang cenderung menempatkan kemajemukan masyarakat sebagai sesuatu yang alamiah, dimensi vertikal melihat kemajemukan sosial sebagai sesuatu yang diciptakan manusia atau masyarakat. Dimensi vertikal ini menunjuk pada kualitas: atas-bawah, tinggi-rendah, dan kualitas lain yang muncul sebagai hasil penilaian (*judgement*) masyarakat. Kemajemukan vertikal tercipta karena adanya perbedaan kekayaan, perbedaan pendidikan, bahkan mungkin perbedaan akses terhadap informasi dan teknologi. Mobilitas dan pertukaran posisi lebih mudah terjadi pada kemajemukan jenis ini ketimbang kemajemukan horizontal.

Tidak bermaksud menafikan realitas kemajemukan masyarakat berdasarkan dimensi vertikal, uraian berikut mengelaborasi realitas kemajemukan etnik sebagai bagian dari struktur masyarakat bercorak horizontal secara mendalam. Pertimbangan utamanya adalah bahwa kemajemukan sosial bercorak vertikal sebagai hasil peradaban modern (industrialisasi dan modernisasi) tidak menimbulkan persoalan yang berarti dalam konteks pembangunan bangsa (*nation-building*) dan pembangunan negara (*state-building*). Sementara itu, keberadaan etnik atau suku bangsa di berbagai negara khususnya di Indonesia acap kali menjadi sumber

masalah bagi integrasi nasional. Menurut perkiraan terakhir, 184 negara merdeka di dunia ini terdiri atas 600 kelompok bahasa hidup dan 5000 kelompok etnik (Kymlicka, 2003: 1).

Keanekaragaman etnis menimbulkan sejumlah persoalan serius dan secara potensial mudah terpecah. Kaum minoritas dan mayoritas semakin banyak berselisih mengenai berbagai hal, seperti hak berbahasa, otonomi daerah, perwakilan politik, kurikulum pendidikan, tuntutan lahan, imigrasi, kebijakan naturalisasi bahkan lambang-lambang nasional seperti lagu kebangsaan dan hari-hari besar nasional. Sejak berakhirnya perang dingin, konflik etnokultural menjadi sumber kekerasan politik yang paling umum di dunia dan tidak tampak tanda-tanda akan mereda (Kymlicka, 2003: 1–2). Data terakhir menunjukkan bahwa jumlah etnik di dunia ada 5000 dan seperlimanya terdapat di Indonesia. Dalam survei tentang etnik dan agama di Indonesia, Suryadinata, dkk. (2003: 6) menemukan bahwa masyarakat Indonesia yang multi etnik memiliki lebih dari 1000 etnis atau subetnis.

Studi tentang etnik, yaitu mengenai sekelompok manusia yang mempunyai kebudayaan yang sama tampaknya berkembang dari aspek biologis kepada aspek kebudayaan, untuk akhirnya berhenti pada aspek politik, yaitu peranannya dalam kehidupan kenegaraan. Ada kesan bahwa persoalan etnik merupakan persoalan masa lampau, persoalan sebelum datangnya modernisasi. Dari sisi politik, perhatian lebih difokuskan pada partai politik, pemilu, pemerintahan, birokrasi, demokrasi, dan hak asasi manusia. Etnik baru menjadi perhatian ilmu politik setelah etnik tersebut mengorganisasi diri menjadi kekuatan politik untuk memengaruhi kebijakan pemerintah.

Sebelum dipaparkan lebih jauh kemajemukan etnik di Indonesia, perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian etnik. Istilah etnik berasal dari bahasa Yunani “*etnichos*” yang secara harfiah digunakan untuk menerangkan keberadaan sekelompok penyembah berhala atau kafir. Dalam perkembangannya, istilah etnik mengacu pada kelompok yang fanatik dengan ideologinya. Para ahli ilmu sosial umumnya memahami kelompok etnik sebagai sekelompok penduduk yang mempunyai

kesamaan sifat-sifat kebudayaan; misalnya bahasa, adat-istiadat, perilaku budaya, karakteristik budaya, dan sejarah.

Narrol (dalam Barth, 1988: 11) memandang kelompok etnik sebagai suatu populasi yang: (1) secara biologis maupun berkembang biak dan bertahap, (2) mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya, (3) membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, (4) menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain.

Barth dan Zastrow (dalam Sudikan, 2001: 335) memahami etnik sebagai himpunan manusia karena kesamaan ras, agama, asal usul bangsa ataupun kombinasi dari kategori tersebut yang terikat pada sistem nilai budayanya.

Abner Cohen dalam bukunya *Two Dimension of Man* (1978) beranggapan bahwa kelompok etnik adalah suatu kesatuan orang-orang yang secara bersama-sama menjalani pola-pola tingkah laku normatif atau kebudayaan dan yang membentuk suatu bagian dari populasi yang lebih besar, saling berinteraksi dalam kerangka suatu sistem sosial bersama (Hidayah, 1997: xxii).

Burkey sebagaimana dikutip oleh Suryadinata, dkk. (2003: 10) mendefinisikan etnik sebagai keturunan yang sama (*common ancestry*), entah kenyataan ataupun hanya khayalan. Hal tersebut juga merujuk kepada identitas budaya yang meliputi bahasa, tradisi, dan pola tingkah laku.

Konsep etnis sering disepadankan dengan konsep suku bangsa. Dalam penggunaannya, istilah etnis dan suku bangsa dapat saling mengganti karena konsep dasarnya sama. Dalam ensiklopedi bahasa Indonesia, istilah suku bangsa lebih tepat dipakai dalam rangka melihat bangsa Indonesia dari sudut pandang kebangsaan dan yang menyebabkan adanya paruh-paruh (suku-suku) bangsa. Istilah kelompok etnik tampaknya cenderung dipakai di lingkungan akademik terutama untuk membiasakan pemakainya dengan konsep tentang kelompok-

kelompok sosial yang berkembang di lingkungan ilmu-ilmu sosial-kebudayaan.

Konsep suku bangsa khususnya untuk kasus Indonesia tampaknya lebih dominan dan bermakna ketimbang istilah etnik. Istilah suku bangsa menjadi penting artinya untuk menutup ruang kosong yang ditinggalkan oleh kesatuan-kesatuan hidup yang semula dikenal sebagai "bangsa", yaitu ketika "bangsa Indonesia" muncul sebagai suatu kesatuan hidup pengisi negara Indonesia. Dengan demikian, posisi "bangsa" yang semula dimiliki oleh orang Aceh, Batak, Minangkabau, Sunda, Jawa, Bali, Bugis, Ambon, dan yang lain menjadi suku-suku bangsa.

Kemunculan bangsa Indonesia dalam pengertian kolektivitas suku-suku bangsa dalam wadah negara kesatuan Indonesia menimbulkan persoalan dalam hal interaksi antarsuku bangsa maupun interaksi suku bangsa dengan bangsa secara keseluruhan (dalam arti negara). Persoalan yang menyangkut hubungan antarsuku bangsa adalah: (1) suatu suku bangsa tertentu ingin memaksakan unsur-unsur kebudayaan khusus yang dianutnya kepada suku-suku bangsa lain baik secara nyata maupun tidak, (2) suatu suku bangsa tertentu mencoba memaksakan unsur-unsur agama yang dianutnya terhadap suku bangsa lain yang berbeda agamanya, (3) suatu suku bangsa tertentu ingin atau mencoba mendominasi suku bangsa lain secara politis, (4) suku bangsa tertentu bersaing keras untuk mendapatkan lapangan mata pencaharian yang sama dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, (5) adanya potensi konflik yang terpendam (Mutakin, dkk 2004: 259).

Persoalan interaksi antara suku bangsa dengan bangsa atau negara umumnya menyangkut dominasi kekuasaan negara terhadap suku bangsa. Dominasi ini bisa menimbulkan dampak yang berbeda. Dampak pertama, suku-suku bangsa yang dikuasai berada di bawah dominasi negara dan tidak memunculkan perlawanan. Kedua, suku-suku bangsa yang dikuasai menjadi "*resistence*" dan melakukan perlawanan baik secara politik maupun militer. Kondisi suku-suku bangsa yang rukun dan bersatu di Indonesia merupakan contoh dari dampak pertama yang sifatnya positif. Contoh dari dampak kedua tentu lebih banyak. Kasus

konflik etnik di Ukraina, Myanmar, Philipina, Rwanda, India, Sri Lanka, dan masih banyak lagi di tempat lainnya merupakan contoh dari sikap melawan dan berontak dari suatu suku bangsa terhadap kekuasaan negara yang dominan.

Loyalitas etnik atau suku bangsa terhadap negara multietnik bukan sesuatu yang mudah. Secara kultural, umumnya anggota suku bangsa atau etnik lebih loyal kepada suku atau etniknya ketimbang terhadap entitas politik yang lebih besar yaitu negara. Dalam kasus di Afrika, semangat emosional dalam perasaan cinta kepada negara baru (negara nasional) memang dangkal kalau dibandingkan dengan dalam dan vitalnya perasaan terhadap sesama anggota suku (SE. Goldthorpe, 1992: 397). Amerika memiliki pengalaman etnisitas yang tidak jauh berbeda dengan negara-negara Asia-Afrika, di mana ikatan etnis merupakan sesuatu yang permanen, tidak terhapuskan dan bahwa pembagian ke dalam komunitas-komunitas etnis menghasilkan penyusunan struktur dari masyarakat Amerika (Schlesinger, Jr, 1997: xi). Roosevelt dan Wilson merasa cemas jangan-jangan dalam suatu kemerdekaan orang-orang Amerika yang disambung-sambung melalui panci peleburan akan lebih setia kepada negara asalnya ketimbang kepada negara yang diadopsinya (Schlesinger, Jr, 1997: 11).

Didorong oleh berbagai kekecewaan berlarut dalam negara nasionalnya masing-masing, muncul gerakan-gerakan etnik yang mengajukan beraneka ragam tuntutan politik minimal untuk mendapatkan perhatian dan otonomi secara maksimal untuk mendirikan negara etnik sendiri (*home-rule*) seperti halnya yang dialami Indonesia pada masa pemerintahan reformasi. Toffler melihat abad ke-21 sebagai abad penuh masalah etnik.

Koentjaraningrat termasuk sedikit orang yang percaya bahwa loyalitas etnik dan loyalitas nasional dapat saling melengkapi terutama untuk kasus Indonesia. Dalam bukunya berjudul *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*, Koentjaraningrat (1993: 5) memiliki pandangan positif bahwa loyalitas etnik dan loyalitas nasional mendominasi dua bidang kehidupan yaitu kehidupan pribadi dan kehidupan umum

(publik). Koentjaraningrat (1993: 6) menunjukkan 3 (tiga) kasus dalam sejarah nasional untuk memperkokoh pandangannya.

Pertama, dua kerajaan Indonesia telah mempersatukan secara sosial ekonomi dan mungkin juga politik negara-negara kecil yang sebelumnya saling bersaing yaitu kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 M dan 8 M yang berpusat di Sumatra Selatan dan Majapahit yang pusatnya di Jawa Timur pada abad ke-14 M.

Kedua, seluruh rakyat Indonesia telah mengalami dominasi kolonial oleh suatu negara Eropa Barat (Belanda) selama satu setengah hingga tiga setengah abad merasakan penderitaan yang sama, sehingga mereka merasa bersatu mengesampingkan pernik-pernik kesukuan.

Ketiga, selama periode pergerakan nasional untuk kemerdekaan pada tahun 1920-an dan 1930-an pemuda Indonesia menolak menonjolkan isu kesukubangsaan dan tepatnya pada tahun 1928 mereka memilih bahasa dari suku bangsa kecil yakni bahasa Melayu dan bukan dari suku bangsa Jawa yang penduduknya paling besar.

Pandangan Koentjaraningrat cenderung meyakini adanya keselarasan antara loyalitas etnik dan loyalitas nasional. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya benar. Tanpa ada usaha keras untuk mewujudkan integrasi antara etnik atau suku bangsa tidak mungkin loyalitas nasional terwujud. Sebagaimana diyakini oleh Hidayah (1997: xxv) bahwa pembentukan negara dan bangsa Indonesia tidak menjadikan masing-masing suku bangsa menjadi punah atau tenggelam, karena masing-masing masih tetap mempertahankan identitas kesukubangsaan tertentu dalam rangka interaksi mereka dengan dan dalam lingkungan kesatuan hidup yang lebih luas. Indonesia memiliki moto hidup berbangsa dan bernegara yaitu Bineka Tunggal Ika yang dalam kaitan kesukubangsaan menjelaskan bahwa meskipun berbeda-beda suku bangsa, tetapi tetap merasa sama-sama satu bangsa Indonesia, namun dalam realitas pergaulan antaretnik menyatakan perasaan satu Indonesia tidaklah mudah. Bahkan ada yang meyakini bahwa proses menjadi Indonesia tidak akan pernah selesai.

Ketika Sumpah Pemuda 1928 sebagai simbol pengakuan kebangsaan diterima oleh masyarakat majemuk Indonesia, di sisi lain orang makin

menyadari asal usulnya. Pengakuan terhadap adanya nusa, bangsa, dan bahasa yang sama sebagai atribut utama warga suatu bangsa “baru” mendorong timbulnya pemikiran tentang posisi nusa, bangsa, dan bahasa aslinya. Era global yang sarat dengan muatan modernisasi teknologi dan informasi, yang membongkar sekat-sekat bangsa dan negara menjadi satu pergaulan global tanpa sekat, justru dalam praktiknya di berbagai negara di belahan dunia ini bukannya memperkokoh integrasi nasional melainkan memunculkan kesadaran akan identitas lokal (etnik, suku bangsa, atau daerah) yang memberikan kepada anggota kelompok kesukuan tersebut merasa aman dan nyaman terutama dalam interaksinya dengan etnik atau suku lain dalam lingkup nasional. Bukan tidak mungkin prasangka etnik muncul dalam pergaulan antaretnik.

Alport mengemukakan pendekatan historis sebagai perangkat teleskop intraetnik untuk meneropong antaretnik. Pendekatan yang lebih mengandalkan pada catatan sejarah warisan suatu kelompok etnik menyatakan bahwa setiap kelompok etnik seolah-olah merasa bebas menginterpretasikan diri sebagai suku yang besar dan terhormat, sehingga mereka harus menjadi superior, mendominasi status dan peranan dalam bidang sosial, budaya, politik, dan ekonomi (Liliweri, 2001: 339). Itulah sebabnya tidak terlalu mengejutkan ketika etnik-etnik atau suku bangsa minoritas melakukan perlawanan terhadap kekuatan dominan yang berkuasa, seperti kasus-kasus hubungan antaretnik di negara-negara Asia dan Afrika.

Para pemimpin di negara-negara yang multietnik menyadari kondisi mudah terjadinya konflik dalam hubungan antaretnik. Mereka berupaya untuk melakukan “*state-building*” maupun “*nation-building*” secara serius. Soekarno adalah salah satu contoh pemimpin yang sangat serius mengupayakan integrasi nasional pada masa pemerintahannya. Untuk mewujudkan ambisi menyatukan bangsa Indonesia dalam suatu wadah yang disebut dengan negara kesatuan republik Indonesia, Soekarno mengajukan suatu musuh bersama bangsa atau *common-enemy*, yaitu liberalisme, individualisme, dan kapitalisme yang menurutnya merupakan sistem nilai yang dapat

merusak “*social capital*” Indonesia berupa nilai kolektivisme seperti kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Gaya Soekarno tersebut mirip dengan konsep Geertz, yaitu revolusi integratif dalam membangun suatu bangsa. Integrasi bangsa tidak tercipta dengan sendirinya. Integrasi dapat terwujud apabila: (1) anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil mengisi kebutuhan satu sama lain, (2) apabila tercapai semacam konsensus mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial, (3) apabila norma-norma yang berlaku di masyarakat bertahan lama (Mutakin, 2004: 275).

Upaya memperkokoh kohesivitas antaretnik dapat dicapai melalui peningkatan kesejahteraan. Sebagaimana dikatakan Koentjaraningrat (1993: 25), peningkatan kesejahteraan menghilangkan dasar bagi perasaan tidak puas regional dan dalam pusat-pusat individuatrialisasi yang baru dibentuk pada daerah-daerah pemukiman kembali dan berbagai kegiatan ekonomi yang masih intensif telah menyebabkan adanya kontak langsung antarkelompok etnik. Keberadaan kebudayaan nasional juga dapat menciptakan perasaan identitas nasional. Seperti dikemukakan Koentjaraningrat (1993: 29) bahwa suatu negara besar yang multietnik memerlukan suatu kebudayaan nasional untuk mengintensifkan identitas nasional dan solidaritas nasional di antara warganya.

D. RANGKUMAN

Konsep masyarakat pendefinisianya oleh para ahli secara beragam, dipengaruhi sudut pandang yang digunakan. Konsep masyarakat Indonesia perlu dibedakan dengan konsep Warga Negara Indonesia (WNI). Masyarakat Indonesia merupakan konsep yang bersifat sosiologis dan antropologis, sedangkan WNI lebih bersifat yuridis.

Struktur masyarakat Indonesia dapat dilihat secara horizontal dan secara vertikal. Terdapat perbedaan-perbedaan dalam masyarakat di Indonesia dilihat dari kategori tersebut di antaranya adalah perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Secara vertikal perbedaan dapat dilihat dari tingkatan-tingkatan sosial, misalnya tingkatan kekayaan dan status sosial

Kemajemukan masyarakat Indonesia ditekankan pada keragaman etnik di Indonesia. Loyalitas masyarakat Indonesia terwujud dalam loyalitas etnik dan loyalitas nasional, keduanya dapat saling melengkapi. Dalam masyarakat majemuk yang multietnik diakui mudah terjadi konflik, namun dapat diupayakan pencegahannya dengan memperkuat pengembangan kebudayaan nasional yang sumber-sumbernya dapat diambil dari budaya lokal dan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

BAB II

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Bangsa Indonesia hidup dalam sebuah masyarakat majemuk (*plural society*), yaitu sebuah masyarakat negara yang terwujud dari dipersatukannya masyarakat-masyarakat suku bangsa oleh sistem nasional menjadi sebuah bangsa dalam wadah negara kesatuan. Masyarakat majemuk Indonesia adalah produk sejarah, yaitu kelanjutan dari corak masyarakat jajahan Hindia Belanda dan Jepang. Masalah *pertama* yang paling kritis dalam masyarakat majemuk adalah hubungan antara sistem nasional atau pemerintahan nasional dengan masyarakat-masyarakat suku bangsa. Masalah ini muncul karena sistem nasional dianggap oleh masyarakat-masyarakat suku bangsa sebagai mengambil alih dan menguasai wilayah-wilayah suku bangsa yang secara tradisi menjadi hak ulayat mereka. Pengambilalihan dilakukan dengan menggunakan kekuatan politik dan kekuatan hukum yang didukung oleh militer dan polisi. Masalah ini memunculkan masalah yang *kedua*, yaitu, diperkuatnya sistem nasional yang otoriter dan militeristik, juga polisional, seperti yang terjadi dalam pemerintahan Presiden Soeharto. Bila sistem nasional menjadi lemah, muncul berbagai pemberontakan separatis (pemberontakan untuk memerdekakan diri dari kekuasaan negara), atau timbul konflik antarsuku bangsa atau antarkeyakinan keagamaan. Permasalahan *ketiga* muncul dari kedua permasalahan tersebut, bahwa masyarakat majemuk Indonesia telah dibangun secara aktual berdasarkan atas kekuasaan penguasa yang mau tidak mau bertindak otoriter dan militeristik agar dapat mempertahankan kekuasaannya. Permasalahan *keempat*, yakni munculnya corak administrasi pemerintahan dan birokrasi nasional yang paternalistik, yang pada dasarnya adalah pemerintahan feodal. Masalah *kelima* yang timbul dari masyarakat majemuk adalah potensi konflik

antarkomponen masyarakat yang menjadi representasi budaya yang beraneka ragam terutama kalau perbedaan itu tidak dikelola dengan baik. Tidak jarang karena kepentingan politik tertentu seperti pilkada perbedaan suku, agama, dan aliran kepercayaan dalam satu agama dibenturkan, sehingga terjadi konflik atau bahkan nyawa melayang.

Kegagalan dalam mengelola potensi kemajemukan dan pluralitas menyebabkan berbagai ketegangan, permusuhan, dan konflik yang tidak berujung pangkal, bahkan bukan tidak mungkin terjadi segregasi dan disintegrasi, sebagaimana dialami negara-negara Balkan.

Bab ini menguraikan bagaimana proses masyarakat majemuk menjadi masyarakat multikultural, bagaimana perkembangam budaya multikultural, dan bagaimana pendidikan multikultural dapat digunakan sebagai strategi untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan konflik yang terjadi dalam masyarakat majemuk Indonesia.

A. DARI MASYARAKAT MAJEMUK MENUJU MASYARAKAT MULTIKULTURAL

Salah satu jawaban untuk hidup dengan baik dan saling menghargai keanekaragaman adalah “multikulturalisme”. Multikulturalisme adalah ideologi yang menghargai perbedaan dan kesederajadan (Bennett, 1995; Jary and Kary, 1991; Nieto, 1992; Watson, 2000). Perbedaan individual maupun perbedaan kelompok dilihat sebagai perbedaan kebudayaan. Dalam perbedaan ada kesederajadan. Kesederajadan terutama ditekankan pada perbedaan-perbedaan askriptif, seperti perbedaan suku bangsa dan kebudayaannya, ciri-ciri fisik atau ras, keyakinan keagamaan, gender, dan umur. Menurut Willett (1998) multikulturalisme bukan hanya memperjuangkan kesetaraan kesukubangsaan, ras, gender, dan umur, tetapi juga memperjuangkan kelas-kelas sosial yang tertindas. Dengan kata lain, multikulturalisme adalah sebuah perjuangan ideologi dan politik untuk mereka yang terpinggirkan oleh sebuah sistem yang besar. Di samping sebagai sebuah visi normatif ideologis, multikulturalisme juga digunakan secara deskriptif untuk menyebut sebuah masyarakat yang memiliki keanekaragaman budaya (Heywood, 2007: 227).

Dalam bingkai multikulturalisme, masyarakat merasa “*at ease with the rich tapestry of human life and the desire amongst people to express their own identity in the manner they see fit*” (Bloor, 2010: 272). Artinya, masyarakat merasa ringan bahkan bangga dengan aneka ragam dan corak kehidupan manusia dan masyarakat juga menghargai dan mengelola dengan baik hasrat untuk mengekspresikan identitas mereka. Dari kasus perjuangan multikulturalisme di Amerika Serikat, Inggris, dan Eropa Barat, multikulturalisme menjadi acuan bagi terwujudnya pluralisme budaya dan kesetaraan hak di antara kebudayaan-kebudayaan yang berbeda terutama kesetaraan hak dari kelompok-kelompok yang tergolong minoritas, baik secara hukum maupun secara sosial. Dalam perjuangannya, multikulturalisme merupakan acuan yang paling dapat diterima dalam masyarakat demokratis karena yang diperjuangkan oleh multikulturalisme sejalan dengan perjuangan para pengaruh demokrasi (Suparlan, 2008b).

Dalam model multikulturalisme, sebuah masyarakat dilihat sebagai sebuah kebudayaan yang berlaku umum bagi kehidupan masyarakat tersebut, yang coraknya seperti sebuah mozaik. Mozaik tersebut adalah sebuah kebudayaan bangsa yang intinya adalah kebangsaan yang dipunyai oleh masyarakat tersebut. Di dalam mozaik tersebut tercakup semua kebudayaan dari masyarakat yang menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Jika masyarakat tersebut adalah sebuah masyarakat majemuk seperti halnya Indonesia, yang tercakup dalam mozaik tersebut adalah kebudayaan dari masyarakat-masyarakat suku bangsa. Selanjutnya, masing-masing masyarakat suku bangsa yang ada dalam mozaik tersebut merupakan sebuah bingkai mozaik, yang di dalamnya tercakup kebudayaan dari berbagai kelompok dan masyarakat yang tercakup dalam suku bangsa tersebut. Tom Burgess dan Ann Carroll Burgess (2005: 31) mengibaratkan masyarakat multikultural itu seperti “*cultural mosaic*”, atau sebuah “*salad bowl*”, bukan sebuah “*melting pot*”. Dalam masyarakat multikultural, masing-masing unsur kebudayaan tetap memelihara warna budayanya masing-masing.

Semua kebudayaan dalam mozaik tersebut mempunyai kesederajatan yang sama, dan semuanya terpusat pada kebudayaan

kebangsaan yang menjadi mozaik tersebut. Indonesia sebagai sebuah mozaik kebudayaan, dapat dilihat sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah, sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945.

Indonesia adalah masyarakat majemuk, yang secara bertahap harus diubah menjadi masyarakat multikultural yang landasan bangunannya adalah perbedaan kebudayaan dalam kesederajatan yang secara keseluruhan merupakan mozaik kebudayaan Indonesia yang terdiri dari mozaik-mozaik budaya di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Sangat penting melihat keanekaragaman suku bangsa, keyakinan keagamaan, kelas sosial, kelompok-kelompok dominan dan minoritas, dan kebudayaan-kebudayaan yang ada dalam kehidupan masyarakat setempat di Indonesia sebagai potensi bukan sebagai suatu ancaman.

Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang menekankan kesederajatan dalam perbedaan-perbedaan kebudayaan. Multikulturalisme bermula dari konsep yang digunakan sebagai acuan untuk memahami, memecahkan, dan menangani berbagai permasalahan yang muncul di negara Barat setelah Perang Dunia Kedua. Permasalahan-permasalahan muncul dikarenakan hilangnya kolonialisme dan negara-negara jajahan, dan adanya migrasi sebagian penduduk dari bekas negara-negara jajahan ke negara-negara bekas penjajah. Persoalan ini menimbulkan berbagai dampak baik rasial, akulturasi budaya maupun sentimen-sentimen minoritas (Suparlan, 2008b)

Multikulturalisme menawarkan adanya saling pemahaman dan penghargaan di antara kelompok-kelompok suku bangsa, ras, dan gender. Melalui saling pemahaman mengenai kebudayaan-kebudayaan mereka yang hidup bersama dalam sebuah masyarakat. Melalui saling pemahaman ini diharapkan tidak akan ada lagi berbagai stereotip yang membedakan secara tajam antara “kami” dengan “mereka”, di mana “kami” adalah yang lebih unggul atau superior, dan “mereka” adalah yang lemah atau inferior. Demikian pula pembedaan antara “saya” dengan “dia” atau dengan “kamu”. “Saya” yang serba baik, superior, sementara “dia” atau “kamu” adalah sebaliknya. Menghilangnya stereotip akan

menghilangkan prasangka yang biasanya menjadi acuan dari diskriminasi dan konflik dengan kekerasan yang dihasilkan oleh kebencian.

Masalahnya utama yang ada dalam multikulturalisme adalah kebudayaan yang beranekaragam dan kesederajadannya. Bila kita melihat kebudayaan sebagai “pedoman bagi kehidupan yang menyeluruh yang dipunyai manusia digunakan untuk memahami dan memanfaatkan lingkungan beserta isinya bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidupnya”, kita akan melihat kebudayaan sebagai pedoman hidup yang dinamis yang dipunyai oleh manusia dengan keluwesan dan kecairannya untuk berubah, berkembang, dan beradaptasi terhadap lingkungan-lingkungan di mana manusia pemilik kebudayaan itu hidup. Kebudayaan sebagai pedoman hidup dipunyai oleh manusia secara individual, yaitu sebagai pengetahuan, keyakinan-keyakinan, dan nilai-nilai budaya. Sering kali kita di Indonesia meremehkan makna kebudayaan dalam kehidupan orang per orang. Padahal dari hasil penelitian Hall (1959) menunjukkan bahwa 80% kepribadian orang per orang itu dipengaruhi oleh kebudayaan yang dipunyai. Masalahnya adalah bahwa setiap kebudayaan menyajikan nilai-nilai budaya yang menurut pemiliknya lebih baik dari kebudayaan lainnya, sehingga para pemiliknya merasa dirinya lebih unggul dari orang lain yang mempunyai kebudayaan yang berbeda. Padahal kebudayaan itu sendiri bersifat relatif.

B. BUDAYA MULTIKULTURAL

Kebudayaan sebagai pedoman hidup juga dipunyai oleh masyarakat manusia dalam bentuk pranata-pranata atau institusi, seperti keluarga, sekolah, pasar, pemerintahan, dan sebagainya. Dalam dan melalui pranata, yaitu sebuah sistem antarhubungan peranan-peranan dan norma-norma untuk pemenuhan kebutuhan yang dianggap penting oleh masyarakatnya, kebutuhan-kebutuhan manusia yang khusus dan penting tersebut dipenuhi sesuai dengan kebudayaan yang dimilikinya. Norma-norma yang merupakan pedoman-pedoman budaya itu berisikan pengetahuan, keyakinan-keyakinan, dan nilai-nilai budaya dari masyarakat yang bersangkutan (Suparlan, 2008a).

Pengetahuan yang samar-samar dan sepotong-sepotong tentang kebudayaan orang lainnya itu sering kali dianggap sebagai kebenaran oleh yang bersangkutan, padahal sering kali salah atau tidak benar. Inilah yang dinamakan stereotip. Sebuah stereotip biasanya berkembang menjadi prasangka. Sebuah prasangka selanjutnya berkembang menjadi diskriminasi dan pengkambing hitaman. Mereka yang tergolong sebagai minoritas atau mereka yang posisi sosial budaya, ekonomi, dan politiknya lemah, biasanya menjadi sasaran stereotip dan prasangka, dan tindakan-tindakan diskriminasi. Orang Jawa mengungkapkan pikirannya yang stereotip biasanya dimulai dengan kata “*pokane.....*” atau mengungkapkan keyakinannya dengan penuh prasangka dengan kata “*dasar....*” Ungkapan-ungkapan seperti ini biasanya merupakan kata “*pakem*” yang tidak bisa dibantah oleh lawannya berbicara. Berbagai konflik antarsuku bangsa, antarkelompok, dan antarkomunitas muncul dengan menggunakan acuan stereotip dan prasangka oleh para pelakunya.

Bila kebudayaan itu tidak sederajat dan hubungan antarbudaya dalam masyarakat setempat itu yang dominan adalah hubungan stereotip dan penuh prasangka, potensi konflik sosial dalam masyarakat juga besar. Ini adalah salah satu ciri utama dari masyarakat majemuk, termasuk Indonesia. Multikulturalisme menyajikan solusi dengan cara memberikan pengetahuan dan pemahaman antarbudaya sesuai perspektif kebudayaan dan keyakinan keagamaan masing-masing yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan dan melalui kebijakan pemerintah, membuat kebijakan-kebijakan kesederajatan dalam perbedaan-perbedaan kebudayaan. Pemahaman antarbudaya ini dilakukan menurut perspektif masing-masing yang mengikuti alur paradigma relativisme budaya, menekankan pentingnya makna budaya, menghormati dan menghargai makna tersebut dalam konteks masing-masing. Kemunculan penghargaan atas kebudayaan lain, berarti juga kemunculan penghargaan atas orang-orang dan kelompok-kelompok budaya yang lain atau berbeda dari kebudayaan yang dipunyainya, dapat diartikan sebagai kemunculan kesederajatan dan kebudayaan dalam hubungan antarbudaya (Suparlan, 2008a).

Pemahaman antarbudaya atau saling memahami kebudayaan masing-masing dari dua orang atau dua kelompok yang ada dalam sebuah masyarakat setempat, tidak mungkin akan dapat tercapai bila tidak ada kesederajatan di antara yang saling memahami. Oleh karena itu, di dalam multikulturalisme ditekankan adanya prinsip kesederajatan. Kesederajatan dalam kebudayaan, kesederajatan dalam akses terhadap sumberdaya politik, ekonomi, sosial, dan terhadap perlakuan hukum. Kesedarajatan ini diberikan kepada orang per orang, kepada pranata, dan kepada kelompok-kelompok yang tergolong sebagai minoritas secara askriptif yaitu suku bangsa, ras, keyakinan keagamaan, dan gender.

Permasalahan yang muncul dalam ideologi multikulturalisme tidak hanya masalah kesederajatan dalam perbedaan kebudayaan, tetapi juga mencakup permasalahan kesederajatan produk-produk budaya sebagaimana yang muncul dalam politik, hukum, ekonomi, dan kehidupan sosial. Tanpa adanya keputusan politik yang menjamin adanya kesedarajatan warga negara Indonesia dengan berbagai asal kesukubangsaan dan keyakinan keagamaan dengan masing-masing corak kebudayaannya, maka penerapan multikulturalisme di Indonesia tidak mungkin dapat dijalankan. Bila pemerintah Indonesia mengadopsi ideologi multikulturalisme, keputusan politik tersebut harus dilaksanakan melalui lembaga-lembaga atau pranata-pranata administrasi pemerintahan nasional maupun lokal.

Sasaran utama bagi pelaksanaan ideologi multikulturalisme adalah pada pranata-pranata hukum dan penegakan hukum, yang harus dimulai dengan meniadakan stereotip dan prasangka dalam lingkungannya sendiri, mengganti ketentuan-ketentuan hukum peninggalan jajahan Hindia Belanda atau disemangati oleh corak masyarakat majemuk dengan semangat demokrasi yang mengacu pada reformasi dan keadilan yang beradab.

Bersamaan dengan upaya menciptakan kesederajatan seperti tersebut, upaya-upaya juga harus mencakup kesederajatan dalam hal akses berbagai pelayanan ekonomi dan kesejahteraan hidup bagi mereka yang tergolong sebagai minoritas atau yang terpuruk kehidupannya, karena tiadanya akses terhadap pelayanan-pelayanan yang disediakan pemerintah yang orientasinya pada kekuasaan para pejabat dan

membatasi berbagai akses pelayanan tersebut bagi mereka sendiri dan kroni-kroninya akan menjauhkan jarak masyarakat dengan pemerintah dan pada gilirannya dapat membahayakan kelangsungan masyarakat yang bercorak multikultural.

C. PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Dalam masyarakat multikultural dibutuhkan adanya pendidikan multikultural. Hal ini dipandang penting karena dalam masyarakat multikultural mudah terjadi gesekan dan konflik, sehingga dibutuhkan ikhtiar kebudayaan berupa pendidikan yang mampu menangkap spirit keanekaragaman, menumbuhkan motivasi hidup dan sikap positif dalam kebersamaan, serta menampilkan keterampilan sosial dalam menganalisis dan memecahkan masalah sosial dalam pergaulan masyarakat multikultural.

Dalam *Encyclopedia of Multicultural Education* (1999) ditulis oleh Mitchell dan Robert E. Salsbury, yang dimaksud dengan pendidikan multikultural adalah pendidikan multietnik, pendidikan antirasis, dan pendidikan multirasial yang digunakan oleh negara-negara di dunia yang merujuk pada usaha pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai positif tentang pluralisme kehidupan manusia dan mengembangkan potensi belajar untuk seluruh siswa. Melalui pendidikan multikultural, guru diharapkan memiliki kepekaan atau sensitivitas terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak-hak siswa dalam kebudayaan yang beranekaragaman.

Pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan kultural yang ada para siswa, seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, klas sosial, ras, kemampuan, dan umur agar proses belajar menjadi efektif dan mudah (Yaqin, 2005). Pendidikan multikultural diselenggarakan sekaligus juga untuk melatih dan membangun karakter siswa agar mampu bersikap demokratis, humanis, dan pluralis dalam lingkungan mereka, khususnya di sekolah.

Al Arifin (2012) mengartikan pendidikan multikultural sebagai wujud kesadaran tentang keanekaragaman multikultural, hak-hak asasi manusia

serta pengurangan atau penghapusan jenis prasangka (*prejudice*) untuk suatu kehidupan masyarakat yang maju dan adil.

Sutjipto (2005) secara singkat memaknai pendidikan multikultural sebagai proses kulturasi tentang multikultur. Makna dari definisi tersebut adalah bahwa dalam proses pendidikan terjadi *shared meaning* yang terjadi akibat adanya interaksi dengan lingkungan, termasuk interaksi dalam dunia pendidikan. Pendidikan itu sendiri juga merupakan proses pembentukan kultur multikultur.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan multikultural mengandaikan adanya penghargaan, penghormatan, dan pengakuan terhadap perbedaan kultural yang ada pada diri siswa dalam kegiatan pembelajaran, dengan tujuan agar siswa terbiasa dalam kehidupan multikultural baik di sekolah, di keluarga, maupun di masyarakat.

Pendidikan multikultural bertujuan agar siswa dari berbagai latar belakang suku bisa mempunyai konsep diri yang positif mengenai kelompok lain dan berkontribusi dalam kehidupan sosial yang beranekaragam. Pendidikan multikultural ingin memastikan agar semua siswa dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda bisa mendapatkan kesempatan yang sama dan situasi yang kondusif untuk mencapai prestasi yang sebaik-baiknya. Dengan sikap yang saling menghargai di sekolah, diharapkan siswa menjadi pribadi yang positif melihat perbedaan dan mampu bekerja dengan konteks masyarakat yang semakin beraneka ragam.

Yaqin (2005) membagi tujuan pendidikan multikultural dalam dua bagian. Pertama adalah tujuan awal, yakni membangun wacana pendidikan multikultural di kalangan guru, dosen, ahli pendidikan, pengambil kebijakan dalam dunia pendidikan, mahasiswa jurusan di fakultas ilmu pendidikan, dan mahasiswa jurusan lainnya. Apabila wacana pendidikan multikultural dipahami oleh banyak pihak, diharapkan siswa atau mahasiswa yang memperoleh kecakapan kognitif multikultural dapat menjadi transformator pendidikan multikultural yang mampu menanamkan nilai-nilai pluralisme, humanisme, dan demokrasi kepada

komunitas masyarakat di lingkungan terdekat. Tujuan kedua atau tujuan akhir dari pendidikan multikultural adalah terdidiknya siswa atau mahasiswa yang mampu memahami dan menguasai materi ajar, sekaligus mempunyai karakter yang kuat untuk bersikap demokratis dan humanis dalam masyarakat plural.

Pendidikan multikultural memiliki lima dimensi utama: (1) *integrasi content*, (2) proses konstruksi pengetahuan, (3) dihilangkannya prasangka, (4) pedagogi yang setara, dan (5) struktur sosial dan budaya sekolah yang memberdayakan (Banks 1995). Banks menjelaskan kelima aspek tersebut sebagai berikut.

Integrasi content berkaitan dengan sejauh mana guru menggunakan contoh dan substansi dari beragam budaya dan kelompok sosial untuk mengilustrasikan konsep, generalisasi dan masalah-masalah dalam bidang studi.

Proses konstruksi pengetahuan menggambarkan bagaimana membantu siswa untuk memahami, meneliti, dan menjelaskan bagaimana bias, *frame of reference* dan perspektif dalam suatu disiplin memengaruhi cara-cara pengetahuan dikonstruksikan. Siswa juga belajar bagaimana membangun pengetahuan dalam dimensi tersebut.

Penghilangan prasangka menggambarkan pelajaran dan aktivitas yang digunakan guru membantu siswa untuk mengembangkan sikap yang positif terhadap perbedaan budaya, etnik dan rasial. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang sekolah cenderung datang dengan membawa sikap negatif dan miskONSEPsi mengenai kelompok atau suku lain (Phinney & Rotheram, 1987). Penelitian juga menunjukkan bahwa pelajaran, unit, dan materi pembelajaran dapat membantu siswa mengembangkan sikap positif mengenai perbedaan jika syarat-syarat tertentu dipenuhi (Banks, 1995b). Kondisi ini meliputi citra positif mengenai masyarakat yang berbeda dalam materi dan materi multietnik digunakan secara konsisten dan berurutan.

Sebuah pedagogi yang setara akan mewujud kalau guru mengajar memodifikasi mengajar mereka dengan cara memfasilitasi agar siswa dari kelompok ras, budaya, dan kelas sosial yang beragam bisa mencapai

prestasi yang sebaik-baiknya (Bank & Bank, 1995). Penelitian menunjukkan pula bahwa prestasi akademik siswa Amerika, Afrika Amerika, dan Meksiko meningkat saat kegiatan pembelajaran kooperatif dan strategi daripada pembelajaran yang menekankan kompetisi yang disertai instruksi (Aronson & Gonzalez, 1988). Kegiatan pembelajaran kooperatif juga membantu semua siswa, termasuk kelas menengah siswa putih, untuk mengembangkan sikap rasial yang lebih positif. Namun, untuk mencapai hasil-hasil yang positif, kegiatan pembelajaran kooperatif harus memiliki beberapa karakteristik penting (Allport, 1954). Para siswa dari kelompok ras dan etnis yang berbeda harus merasa bahwa mereka memiliki status yang sama dalam hubungan antarkelompok, interaksi dengan guru dan administrator dan adanya dukungan lintas-ras. Demikian pula, mahasiswa dari kelompok ras yang berbeda harus bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan bersama.

Struktur dan budaya sekolah memberdayakan terwujud ketika budaya dan organisasi sekolah ditransformasikan dengan cara-cara yang memungkinkan siswa dari kelompok ras, etnis, dan gender yang beragam mengalami dan merasakan kesetaraan dan status yang sama. Pelaksanaan dimensi ini mensyaratkan bahwa lingkungan total sekolah direformasi, termasuk sikap, keyakinan, dan tindakan guru dan administrator, kurikulum dan program studi prosedur, penilaian dan pengujian, serta gaya dan strategi yang digunakan oleh guru.

Bidang yang paling relevan bagi prinsip-prinsip pendidikan multikultural di atas adalah kurikulum. Sebuah kurikulum multikultural harus dapat memenuhi dua syarat.

Pertama, tidak boleh terlalu sempit. Tidak ada kurikulum yang dapat mencakup segala hal di dunia ini. Jika diumpamakan sebuah perjalanan keliling dunia, pendidikan akan menjadi terlalu semu, meremehkan peristiwa-peristiwa besar, tidak memiliki tujuan pendidikan, dan akan lebih banyak menimbulkan keburukan daripada kebaikan. Idealnya pendidikan haruslah membiasakan para siswa dengan bentuk-bentuk perwakilan utama pada pokok permasalahan, berkonsentrasi pada beberapa di antaranya, dan juga merangsang para murid sehingga mereka bisa mengembangkan diri.

Kedua, kurikulum harus disusun dengan tepat berhubungan dengan cara pengajaran. Tidaklah cukup memperluas kurikulum dengan memasukkan agama, kebudayaan, bacaan-bacaan, dan sistem kepercayaan yang berbeda-beda. Seorang guru harus dapat mengajak para siswa dalam sebuah dialog yang bermanfaat. Apakah dialog tersebut menyangkut tentang nilai, adat, kebiasaan, sosialisasi, enkulturasasi, kolonialisme, hak asasi, kedudukan perempuan, keluarga, revolusi industri, kelas sosial, perang saudara, beragam etnis, dan lain-lain. Dengan demikian, individu-individu yang terlibat akan memiliki pengalaman yang berbeda dan melihat masalah secara berbeda pula (Parekh, 2008).

Salah satu tujuan sentral pendidikan adalah mempersiapkan siswa terlibat dalam tema-tema dialog seperti di atas. Selanjutnya, untuk memperluas simpati, guru mengajak siswa menghargai kompleksitas kebenaran dan keanekaragaman penafsiran yang tidak dapat disederhanakan, tanpa rasa gugup dengan berusaha mencari sebuah jawaban final.

Pendidikan multikulturalisme seyogianya dapat menjelaskan transformasi dari masyarakat majemuk Indonesia ke masyarakat multikultural Indonesia. Hal tersebut harus dilakukan secara bertahap dari materi yang sederhana ke materi yang kompleks, dan berkesinambungan dari jenjang SD sampai dengan universitas. Proses transformasi ini tidak hanya dilakukan melalui pendidikan formal, tetapi seharusnya juga dilakukan melalui jalur komunikasi nonformal, yaitu pemberitaan informasi di media baik cetak maupun elektronik. Penyampaian pengetahuan mengenai multikulturalisme dan masyarakat multikultur Indonesia akan efektif bila didukung oleh berbagai kebijakan sosial, politik, dan hukum, terutama diperlihatkan dalam pelayanan pemerintahan terhadap golongan-golongan minoritas dan yang terpuruk kehidupannya.

Upaya memberikan pengetahuan bagi masyarakat umum melalui media masa dapat dilakukan melalui penerbitan tulisan-tulisan dan buku-buku mengenai multikulturalisme dan kebudayaan-kebudayaan yang

ada di Indonesia dan kelompok-kelompok suku bangsa serta kelompok-kelompok minoritas dan hak-hak budaya atau hak-hak hidup mereka. Hal ini dapat juga dilakukan dalam bentuk novel tentang kehidupan masyarakat-masyarakat suku bangsa dan kelompok-kelompok minoritas. Kesemuanya itu harus didukung oleh pemerintah, LSM, yayasan-yayasan, atau lembaga-lembaga lain yang memiliki perhatian terhadap masalah multikulturalisme. Pengendalian mutu aktivitas tersebut harus sesuai dengan ideologi multikulturalisme dan yang penting pula disediakan dana yang cukup.

Dalam pendidikan formal di sekolah, pengajaran mengenai multikulturalisme dapat dilaksanakan sebagai pelajaran multikulturalisme, atau pemahaman antarbudaya, atau apa pun namanya sesuai dengan konteks budaya lokal. Pendidikan multikulturalisme dapat dilakukan dengan memasukkannya ke dalam kurikulum sekolah dan dapat juga dijadikan mata ajar ekstrakurikuler atau di luar kurikulum, tergantung pada kebijakan sekolah yang bersangkutan.

Pada tingkat SD, mata ajaran multikulturalisme sebaiknya dilakukan dalam bentuk dongeng oleh guru, kegiatan bermain sesuai dengan ungkapan-ungkapan budaya yang ada dalam masyarakat setempat dan meluas mencakupi ungkapan-ungkapan budaya dari kebudayaan-kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia (seperti kegiatan bernyanyi, berpantun, melakukan kegiatan-kegiatan permainan dari berbagai kebudayaan yang ada dari masyarakat setempat maupun dari daerah lain), dan penjelasan-penjelasan penuh makna oleh guru yang membinanya.

Pada tingkat SMP, siswa mulai diberi bacaan mengenai kesederajatan, keanekaragaman budaya dan keyakinan keagamaan untuk dipelajari dan dipahami, di samping pelajaran dongeng mengenai keanekaragaman budaya yang ada dalam masyarakatnya dan masyarakat Indonesia lainnya. Model pembelajaran yang dikembangkan tidak jauh berbeda dengan pembelajaran multikultural di SD.

Pada tingkat SMA, para siswa mulai diberi kewajiban untuk mempelajari dan memahami kesederajatan, keanekaragaman budaya

dan keyakinan keagamaan, dan pemahaman antarbudaya dalam bentuk atau model pembelajaran yang ditekankan pada pengembangan wawasan kognitif atau analisis terhadap suatu kasus. Siswa bisa diminta membuat laporan terhadap suatu kasus atau menyusun paper mengenai kondisi multikultural masyarakat.

Pada tingkat SD sampai dengan SMP, pemahaman dan pemantapan keagamaan sesuai masing-masing agama yang diyakini penting ditekankan melalui mata pelajaran agama. Hal ini tentu tidak untuk mengajarkan absolutisme akan kebenaran agama tertentu. Pada tingkat SMA, para siswa mulai diberi pengetahuan tentang keanekaragaman keyakinan keagamaan yang ada dalam kehidupan keagamaan masing-masing dan tentang agama-agama lain yang ada dalam masyarakat Indonesia. Tujuan mata ajar tentang multikulturalisme dari tingkat SD sampai dengan SMA adalah agar siswa memahami jati diri budaya mereka masing-masing dan menghargai jati diri budaya dari orang-orang dan kelompok atau masyarakat lainnya. Dengan metode ini, diharapkan stereotip dan prasangka yang biasanya menjadi sumber bagi konflik antarsuku bangsa dan keyakinan keagamaan, serta konflik antarkomunitas atau konflik komunal dapat dihilangkan atau setidak-tidaknya dikurangi.

Pada tingkat sarjana atau jenjang pendidikan tinggi, pelajaran multikulturalisme dapat diberikan melalui mata kuliah Hubungan Antarsuku Bangsa, Studi Masyarakat Indonesia, atau nama lain. Pemahaman lebih lanjut juga dapat diajarkan melalui perkuliahan mengenai perbandingan antaragama atau yang judulnya sesuai dengan itu. Tujuannya adalah agar para mahasiswa dapat memahami kenyataan bahwa keyakinan keagamaan itu beranekaragam, bahkan dalam agama yang dipeluknya pun terdapat beberapa aliran atau mazhab. Melalui pemahaman ini diharapkan muncul dan berkembang saling memahami di antara mereka yang berbeda keyakinan keagamaannya, dan bersamaan itu juga akan saling menghormati masing-masing keyakinan keagamaan yang mereka punyai.

Singkatnya, pendidikan multikultural, sebagaimana dikemukakan Banks (1997), adalah “sebuah ide, sebuah gerakan pembaruan dan

juga sebuah proses.” Sebuah ide, karena ia merupakan gagasan dan cita-cita untuk mewujudkan kondisi yang saling menghargai. Sebuah pembaruan pendidikan, karena pendidikan multikultural bertujuan mentransformasikan lingkungan sekolah sedemikian rupa sehingga sekolah mencerminkan keanekaragaman budaya. Sebuah proses, karena tujuan itu harus senantiasa diupayakan secara terus menerus tanpa kenal lelah. Bila multikulturalisme akan diadopsi oleh pemerintah Indonesia, harus dipersiapkan organisasi yang secara aktif membuat kebijakan multikultural dan kegiatan operasionalnya. Bersamaan dengan itu, organisasi yang berada dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus didukung oleh tenaga-tenaga ahli yang akan membuat sejumlah kebijakan penyebarluasan multikulturalisme kepada masyarakat umum dan kebijakan pendidikan multikulturalisme di sekolah-sekolah.

D. KESETARAAN DALAM PERBEDAAN

Banyak diskusi tentang kesetaraan mengandung suatu kelemahan mendasar karena menggunakan teori yang salah tentang kodrat manusia. Banyak orang memandang kodrat manusia secara keliru. Bahwa manusia adalah makhluk kodrati dan ciptaan Tuhan itu tidak dapat dibantah. Akan tetapi, manusia selain sebagai makhluk kodrati juga makhluk kultural yang mempunyai identitas kemanusiaan umum, tetapi berada dalam perilaku yang dimediasikan secara kultural. Mereka sama dan berbeda. Kesamaan dan perbedaan mereka tidak pasif, tetapi saling menembus dan tidak saling mendahului secara ontologis atau lebih penting secara moral.

Kesetaraan bukan keseragaman. Untuk menunjukkan hal ini dengan lebih jelas, adalah tentang kesetaraan yang ada di masyarakat tentang sosok laki-laki dan perempuan. Kesetaraan manusia menjadi sangat penting dalam bahasan multikulturalisme karena memang masyarakat isinya adalah laki-laki dan perempuan. Keduanya tidak bisa dipisahkan, tetapi saling mendukung dan saling mengisi. Keduanya berada dalam suatu perspektif gender. Wacana gender sebenarnya sudah lama masuk

dalam kajian multikulturalisme (Furnivall, 1944; Geertz, 1961; Gramsci, 1971; Chopp, 1986; Amaladoss, 1991; Kedourie, 1993; Pyke, 1996; Alexander 1998).

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya bahwa pemahaman konsep yang melahirkan superioritas dan inferioritas dapat menimbulkan stereotip. Stereotip menimbulkan prasangka. Prasangka menimbulkan diskriminasi dan pembedaan-pembedaan pada kelompok tertentu, yakni mereka yang tergolong minoritas atau yang dianggap minoritas. Perbedaan kodrati antara laki-laki dan perempuan tidak lantas mereka harus juga dibedakan secara kultural dan kemampuan. Manusia berbagi sejumlah kemampuan dan kebutuhan umumnya, namun kebudayaan yang berbeda menentukan dan menstrukturkan perbedaan tersebut dan mengembangkan kemampuan dan kebutuhan baru yang mereka miliki. Selama manusia (laki-laki dan perempuan) serupa sekaligus berbeda, manusia harus diperlakukan setara. Pandangan harus didasarkan pada kesejajaran manusia, bukan keseragaman, dan harus dikembangkan kemampuan untuk saling menyapa di antara keseragaman dan keberbedaan, serta dapat membangun keberbedaan dalam konsep kesetaraan. Jadi, jika suatu saat dasar kesetaraan berubah, isinya juga akan berubah.

Kesetaraan melibatkan kebebasan atau kesempatan untuk menjadi berbeda, dan memperlakukan manusia secara setara yang menuntut kita mempertimbangkan kesamaan beserta keberbedaan. Hak yang setara bukan berarti hak yang identik. Hak “setara” bukan “sama rata sama rasa”, melainkan adanya penghargaan yang sama bagi individu (baik laki-laki maupun perempuan) dengan latar belakang budaya dan kebutuhan yang berbeda. Adakalanya juga mempertimbangkan adanya hak-hak yang berbeda di antara kedua jenis kelamin tersebut.

Kesetaraan diartikulasikan pada sejumlah tingkatan yang saling terkait. Pada level yang paling dasar, kesetaraan melibatkan penghargaan dan hak, pada level sedikit lebih tinggi melibatkan kesempatan, kepercayaan diri, harga diri. Pada level yang lebih tinggi lagi, kesetaraan melibatkan kekuasaan, kesejahteraan, dan kemampuan dasar yang

diperlukan untuk pengembangan manusia. Dalam masyarakat yang homogen secara kultural, individu sama-sama memiliki kebutuhan, norma-norma, motivasi, adat istiadat sosial, dan pola tingkah laku yang mirip secara luas. Sebaliknya, jika masyarakatnya heterogen, individu-individu juga mempunyai kebutuhan, adat istiadat, tradisi, dan pola tingkah laku yang beragam. Oleh karenanya, pemahaman kesetaraan bukanlah “sama persis”, tetapi “kembar identik” yang serupa, tetapi tidak sama. Pemahaman kesetaraan yang matang tentang manusia dan budayanya inilah yang diperlukan untuk membangun tumbuhnya nilai-nilai multikulturalisme.

E. RANGKUMAN

Multikulturalisme adalah ideologi yang menghargai perbedaan dan kesederajatan. Perbedaan individual maupun perbedaan kelompok dilihat sebagai perbedaan kebudayaan. Dalam perbedaan ada kesederajatan. Kesederajatan ditekankan terutama pada perbedaan-perbedaan askriptif, seperti perbedaan suku bangsa dan kebudayaannya, ciri-ciri fisik atau ras, keyakinan keagamaan, gender, dan umur. Multikulturalisme bukan hanya memperjuangkan kesetaraan kesukubangsaan, ras, gender, dan umur, tetapi juga memperjuangkan kelas-kelas sosial yang tertindas. Dengan kata lain, multikulturalisme adalah sebuah perjuangan ideologi dan politik untuk mereka yang terpinggirkan oleh sebuah sistem yang besar. Di samping sebagai sebuah visi normatif ideologis, multikulturalisme juga digunakan secara deskriptif untuk menyebut sebuah masyarakat yang memiliki keanekaragaman budaya.

Upaya untuk membangun multikulturalisme dalam masyarakat Indonesia yang majemuk sekaligus multikultural adalah melalui pendidikan multikultural, baik pada level SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi. Model pembelajaran yang dikembangkan dalam pengajaran multikulturalisme harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa/mahasiswa. Dengan pendidikan multikulturalisme yang tepat, peserta didik akan memiliki pemahaman yang benar dan apresiasi yang tepat berkaitan dengan keanekaragaman latar belakang etnis, kultur, sosial, dan agama.

BAB III

SISTEM SOSIAL INDONESIA

Sistem sosial merupakan sistem interaksi antara individu satu dengan individu lain atau antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain dalam suatu struktur tertentu. Tidak semua anggota atau subsistem sosial selaras dengan sistem secara keseluruhan. Namun demikian, sistem sosial memiliki kemampuan adaptasi dan mampu memelihara keseimbangan, sehingga stabilitas sistem tetap terjaga. Bab III hendak menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem sosial, nilai-nilai dan norma sosial, struktur sosial, dan diakhiri dengan kajian tentang diskriminasi sebagai sesuatu yang riil dalam kehidupan masyarakat.

A. KONSEP DASAR SISTEM SOSIAL

Istilah sistem paling sering digunakan untuk menunjuk pengertian metode atau cara dan sesuatu himpunan unsur atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain menjadi satu kesatuan yang utuh.

Sistem sosial adalah suatu sistem tindakan, terbentuk dari interaksi sosial yang terjadi di antara berbagai individu, yang tumbuh dan berkembang di atas standar penilaian umum yang disepakati bersama oleh para anggota masyarakat (Nasikun, 1995).

Standar penilaian umum yang paling penting adalah norma-norma sosial. Norma-norma sosial inilah yang membentuk struktur sosial. Di dalam masyarakat, setiap anggota masyarakat menganut dan mengikuti pengertian-pengertian yang sama mengenai situasi-situasi tertentu dalam bentuk norma-norma sosial, maka tingkah laku setiap anggota masyarakat kemudian terjalin sedemikian rupa ke dalam bentuk suatu struktur sosial tertentu.

Pengaturan interaksi sosial di antara para anggota masyarakat tersebut dapat terjadi karena komitmen mereka terhadap norma-norma

sosial menghasilkan daya untuk mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan di antara mereka, suatu hal yang memungkinkan mereka menemukan keselarasan satu sama lain di dalam suatu tingkat integrasi sosial tertentu.

Parson melihat sistem sosial sebagai satu dari tiga cara di mana tindakan sosial bisa diorganisasikan. Di samping terdapat dua sistem tindakan lain yang saling melengkapi yaitu sistem kultural yang mengandung nilai dan simbol-simbol serta sistem kepribadian para pelaku individual. Masyarakat menurut Parson (dalam Nasikun, 1995) adalah sistem sosial yang dilihat secara total. Jika sistem sosial dilihat sebagai sebuah sistem parsial, masyarakat dapat berupa setiap jumlah dari sekian banyak sistem yang kecil-kecil, seperti keluarga, sistem pendidikan, dan lembaga-lembaga keagamaan.

Pemikiran Talcott Parson (dalam Nasikun, 1995: 11–12) tentang pendekatan fungsionalisme struktural memiliki tujuh anggapan.

Pertama, masyarakat dilihat sebagai suatu sistem yang mana bagian-bagian saling berhubungan satu sama lain.

Kedua, hubungan tersebut saling memengaruhi di antara bagian-bagian tersebut dan bersifat ganda dan timbal balik.

Ketiga, secara fundamental sistem sosial cenderung bergerak ke arah *equilibrium* bersifat dinamis, menanggapi perubahan-perubahan yang datang dari luar dengan kecenderungan memelihara agar perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sebagai akibatnya hanya akan mencapai derajat minimal.

Keempat, walaupun mengalami disfungsi yaitu terjadinya ketegangan dan penyimpangan, tetapi melalui berjalannya proses waktu keadaan tersebut teratasi melalui penyesuaian dan proses institusionalisasi yaitu suatu proses yang dilewati suatu norma kemasyarakatan yang baru, sehingga norma tersebut oleh masyarakat dikenal, diakui, dihargai, dan ditaati.

Kelima, perubahan-perubahan dalam sistem sosial secara gradual, melalui penyesuaian dan tidak revolusioner. Perubahan-perubahan yang

terjadi secara drastis pada umumnya hanya terjadi pada bentuk luar, sedangkan unsur-unsur sosial budaya yang menjadi bangunan dasarnya tidak seberapa mengalami perubahan.

Keenam, perubahan-perubahan sosial tersebut melalui tiga kemungkinan, yaitu: (1) penyesuaian sistem sosial tehadap perubahan-perubahan dari luar, (2) pertumbuhan melalui proses diferensiasi struktural dan fungsional, dan (3) adanya penemuan-penemuan baru.

Ketujuh, faktor penting yang memiliki daya mengintegrasikan sistem sosial adanya konsensus di antara anggota masyarakat tentang nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. Di dalam setiap masyarakat selalu terdapat tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dasar tertentu, yang sebagian anggota masyarakat menganggap serta menerima sebagai hal yang mutlak benar.

Individu dengan sistem sosial dapat dihubungkan dan dianalisis melalui konsep status dan peranan. Status adalah kedudukan dalam sistem sosial, seperti guru, ibu, atau presiden, sedangkan peranan adalah perilaku yang diharapkan atau perilaku normatif yang melekat pada status guru, ibu, atau presiden tersebut. Dengan kata lain, di dalam sistem sosial, individu menduduki suatu tempat (status), dan bertindak (peranan) sesuai dengan norma atau aturan-aturan yang dibuat oleh sistem. Peranan bersifat timbal balik dalam arti mengandung pengharapan yang sifatnya timbal balik pula. Status sebagai seorang suami mengandung peranan normatif (misalnya sebagai pencari nafkah yang baik), namun ini bukan peranan satu-satunya. Peranan sebagai seorang suami bersifat timbal balik dan saling ketergantungan dengan peranan istri.

Menurut Parson, sistem sosial cenderung bergerak ke arah keseimbangan atau stabilitas, dengan kata lain keteraturan merupakan norma dalam sebuah sistem. Apabila terjadi kekacauan norma-norma, sistem akan mengadakan penyesuaian dan mencoba kembali mencapai keadaan normal (Poloma, 2004: 172).

Parson (dalam Poloma, 2004: 173–174) mengembangkan *pattern variables* yang terkenal sebagai sarana untuk mengategorikan tindakan atau untuk mengklasifikasikan tipe-tipe peranan dalam sistem sosial.

Pattern variables ini terdiri dari lima buah skema yang dapat dilihat sebagai kerangka teoretis utama dalam analisis sistem sosial, yaitu:

Pertama, Affective versus Affective Neutrality, di mana suatu hubungan sosial seseorang bisa bertindak untuk pemuasan afeksi atau kebutuhan emosional atau bertindak tanpa unsur afeksi (netral). Usaha memuaskan kebutuhan tersebut misalnya sesuai bagi suami istri, tetapi tidak dalam hubungan yang terjadi antara pelanggan dan penjual.

Kedua, Self-Orientation versus Collective-Orientation, di mana hubungan yang berorientasi hanya pada dirinya, seseorang mengejar kepentingan pribadi, sedangkan dalam hubungan berorientasi kolektif, kepentingan tersebut sebelumnya telah didominasi oleh kelompok. Misalnya dalam pembelian mobil baru, seorang pembeli yang menawar harga mobil itu bertindak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan demi kesejahteraan ekonomi *dealer* mobil atau masyarakat ramai.

Ketiga, Universalism versus Particularism. Dalam hubungan yang universalistik, para pelaku saling berhubungan menurut kriteria yang dapat diterapkan kepada semua orang, sedang dalam hubungan partikularistik digunakan ukuran-ukuran tertentu. Misalnya pemerintah yang akan mempekerjakan pegawai negeri dengan dasar kualifikasi pekerjaan, termasuk lulus ujian pegawai negeri. Namun apabila pemerintah tidak menyertakan seseorang karena termasuk anggota kelompok suku bangsa, jenis kelamin tertentu dan lain sebagainya merupakan hubungan partikularistik.

Keempat, Quality versus Performance. Dalam hubungan ini, *variabel quality* menunjuk pada status karena kelahiran (*ascribed status*), sedangkan *performance* berarti prestasi (*achievement*) atau apa yang telah dicapai oleh seseorang (*achieved status*). Sebagai contoh, hubungan kualitas adalah seorang pemuda kaya yang hanya membina persahabatan dengan pemuda kaya lainnya, sedangkan hubungan *performance* adalah berupa persahabatan yang berdasarkan suka atau tidak suka secara timbal balik, terlepas dari perbedaan dalam usia atau kelas sosial.

Kelima, Specificity versus Diffuseness. Dalam hubungan yang spesifik, seseorang dengan lainnya berhubungan dalam situasi yang terbatas atau *segmented*. Seorang penjual dan pelanggan merupakan ilustrasi hubungan sangat terbatas yang berdasarkan jual beli. Di pihak lain, hubungan keluarga adalah contoh dari hubungan *diffuse*, di mana seseorang yang karena bukan status tertentu terlibat dalam proses interaksi.

Untuk menjelaskan setiap tindakan dalam sistem sosial, *pattern variable* bisa digabungkan. Hubungan itu ditandai oleh efektivitas dan kualitas, seperti hubungan ayah dan anak, memuaskan kebutuhan-kebutuhan afeksi. Dalam suatu hubungan yang kurang intim, seperti antara sopir taksi dengan penumpangnya, terlihat ilustrasi hubungan spesifik dan hubungan yang secara afeksi netral. *Pattern variable* itu ditilik Parson sebagai landasan pengukuran teori bertindaknya dalam kompleksitas sistem sosial.

B. NILAI DAN NORMA SOSIAL

1. Nilai Sosial

Dalam setiap sistem sosial atau masyarakat baik masyarakat yang maju atau modern maupun masyarakat yang bersahaja atau tradisional selalu memiliki sejumlah nilai-nilai sosial dan norma-norma sosial yang digunakan sebagai patokan oleh sebagian besar anggota masyarakat. Nilai-nilai sosial dan norma-norma sosial tersebut diperlukan sebagai aturan hidup agar tercipta keteraturan sosial. Aturan hidup tersebut tidak selalu diwujudkan secara nyata, tetapi terdapat dorongan dalam diri manusia untuk melakukan atau untuk tidak melakukan hal-hal tertentu. Meskipun terlihat abstrak, tetapi dapat dirasakan manfaatnya, bahkan ada yang dapat dihayati secara mendalam dengan intensitas yang tinggi.

Nilai sosial erat kaitannya dengan kebudayaan dan masyarakat. Setiap masyarakat atau setiap kebudayaan memiliki nilai-nilai tertentu mengenai sesuatu. Kebudayaan dan masyarakat itu sendiri merupakan nilai yang tidak terhingga bagi seseorang yang memiliki.

Nilai sosial adalah sejumlah sikap perasaan ataupun anggapan terhadap suatu hal mengenai baik-buruk, benar-salah, patut-tidak

patut, mulia-hina, maupun penting-tidak penting. Pada kenyataannya, masyarakat mengakui adanya nilai individual, yaitu nilai-nilai yang dianut oleh individu sebagai orang-perorangan yang mungkin saja selaras dengan nilai-nilai yang dianut orang lain, tetapi dapat pula berbeda atau bahkan bertentangan. Nilai-nilai yang dianut oleh sebagian besar anggota masyarakat dinamakan sebagai nilai-nilai sosial.

Menurut Robert M.Z. Lawang, nilai sosial merupakan gambaran mengenai apa yang diinginkan, pantas, berharga, memengaruhi perilaku sosial dari orang yang memiliki nilai tersebut, sedangkan Karel J. Veeger memandang nilai-nilai sebagai pengertian-pengertian tentang baik tidaknya perbuatan-perbuatan, atau dengan kata lain, nilai adalah hasil penilaian atau pertimbangan moral.

a. Jenis-jenis Nilai Sosial

Notogegoro membedakan nilai menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) *Nilai Material*, yaitu nilai yang meliputi berbagai konsepsi mengenai segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia.
- 2) *Nilai Vital*, yaitu nilai yang meliputi berbagai konsepsi yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berguna bagi manusia dalam melaksanakan berbagai akitivitas.
- 3) *Nilai Kerohanian*, yaitu nilai yang meliputi berbagai konsepsi yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan rohani manusia, seperti:
 - a) nilai kebenaran, yaitu nilai yang bersumber pada akal manusia (cipta)
 - b) nilai keindahan, yaitu nilai yang bersumber pada unsur perasaan (estetika)
 - c) nilai moral, nilai yang bersumber pada unsur kehendak (karsa)
 - d) nilai keagamaan (religiusitas), yaitu nilai yang bersumber pada revelasi (wahyu) dari Tuhan

b. Ciri-ciri Nilai Sosial

- 1) Nilai sosial merupakan konstruksi masyarakat yang tercipta melalui interaksi di antara para anggota masyarakat. Nilai sosial tercipta secara sosial bukan secara biologis ataupun bawaan lahir.

- 2) Nilai sosial diimbaskan, artinya nilai dapat diteruskan dan diimbaskan dari satu orang atau kelompok ke orang atau kelompok lain melalui berbagai macam proses sosial seperti kontak sosial, komunikasi, interaksi, difusi, adaptasi, adopsi, akulterasi, maupun asimilasi.
- 3) Nilai sosial dipelajari, artinya nilai diperoleh, dicapai, dan dijadikan milik diri melalui proses belajar, yaitu sosialisasi yang berlangsung sejak masa kanak-kanak dalam keluarga.
- 4) Nilai sosial memuaskan manusia dan mengambil bagian dalam usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosial. Nilai yang disetujui dan yang telah diterima secara sosial itu menjadi dasar bagi tindakan dan tiangkah laku, baik secara pribadi, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan.
- 5) Nilai sosial merupakan asumsi-asumsi abstrak di mana terdapat konsensus sosial tentang harga relatif dari objek dalam masyarakat. Nilai-nilai sosial secara konseptual merupakan abstraksi dari unsur-unsur nilai dan bermacam-macam objek di dalam masyarakat.
- 6) Nilai sosial cenderung berkaitan satu dengan lain dan membentuk pola-pola serta sistem nilai dalam masyarakat. Dalam hal ini apabila tidak terjadi keharmonisan jalinan integral dari nilai-nilai, akan timbul problema sosial dalam masyarakat.
- 7) Sistem nilai beragam bentuknya antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, sesuai dengan penilaian yang diperlihatkan oleh setiap kebudayaan terhadap bentuk-bentuk kegiatan tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain, keanekaragaman kebudayaan dengan bentuk dan fungsi yang saling berbeda, menghasilkan sistem nilai yang berbeda pula.
- 8) Nilai sosial selalu memberikan pilihan dari sistem-sistem nilai yang ada, sesuai dengan tingkatan kepentingannya.
- 9) Masing-masing nilai sosial dapat mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap orang perorangan dan masyarakat sebagai keseluruhan.
- 10) Nilai-nilai sosial juga melibatkan emosi atau perasaan.
- 11) Nilai-nilai sosial dapat memengaruhi perkembangan pribadi dalam masyarakat secara positif maupun negatif.

c. Fungsi Nilai Sosial

- 1) Sebagai faktor pendorong, yakni berkaitan dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan cita-cita atau harapan.

- 2) Sebagai petunjuk arah, ialah cara berpikir, berperasaan, dan bertindak, serta panduan menentukan pilihan, sarana untuk untuk menimbang penilaian masyarakat, penentu dalam memenuhi peran sosial, dan pengumpulan orang dalam suatu kelompok sosial.
- 3) Nilai dapat berfungsi sebagai alat pengawas dengan daya tekan dan pengikat tertentu. Nilai mendorong, menuntun, dan kadang-kadang menekan individu untuk berbuat dan bertindak sesuai dengan nilai yang bersangkutan. Nilai menimbulkan perasan bersalah dan menyiksa bagi pelanggarnya.
- 4) Nilai dapat berfungsi sebagai alat solidaritas di kalangan kelompok atau masyarakat.
- 5) Nilai dapat berfungsi sebagai benteng perlindungan atau penjaga stabilitas budaya kelompok atau masyarakat.

2. Norma Sosial

Sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu membutuhkan orang lain dalam keberlangsungan hidupnya. Agar kehidupan bersama bisa berjalan teratur, manusia memerlukan aturan-aturan tertentu, karena tidak semua orang bisa berbuat menurut kehendak lainnya atau sebaliknya tidak semua orang secara otomatis berbuat sesuai aturan. Jika kemauan seseorang dipaksakan kepada orang lain, akan terjadi benturan dengan keinginan pihak lain. Agar mencapai keteraturan dan kenyamanan hidup bersama, manusia melakukan kesepakatan tentang apa yang boleh dilakukan, apa yang sebaiknya dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan kepada orang lain.

Norma sosial adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendali tingkah laku yang sesuai serta diterima. Menurut Robert M.Z. Lawang, norma adalah patokan perilaku dalam suatu kelompok tertentu. Norma memungkinkan seseorang untuk menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakan itu akan dinilai oleh orang lain. Norma juga merupakan kriteria bagi orang lain untuk mendukung atau menolak perilaku seseorang.

Menurut Soerjono Soekanto (2000), norma adalah suatu perangkat agar hubungan di dalam suatu masyarakat terlaksana sebagaimana

yang diharapkan. Norma-norma mengalami proses *institutionalized* (pelembagaan). Pelembagaan adalah suatu proses yang dilewati oleh suatu norma kemasyarakatan yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga masyarakat, sehingga norma tersebut dikenal, diakui, dihargai, dan kemudian ditaati dalam kehidupan sehari-hari.

Norma-norma dalam masyarakat memiliki kekuatan yang mengikat yang berbeda-beda, ada yang lemah, dan ada yang kuat. Oleh karena itu, pengertian norma-norma tersebut kemudian dibeda-bedakan. Berdasarkan kekuatan mengikatnya, norma dapat dibagi sebagai berikut.

- a. Cara (*Usage*), norma yang menunjuk pada suatu bentuk perbuatan dan memiliki kekuatan yang sangat lemah dibanding kebiasaan, Cara ini lebih menonjol di dalam hubungan antarindividu dan penyimpangan terhadapnya tidak mengakibatkan hukuman berat, tetapi mendapat celaan. Misalnya, cara makan yang berbeda-beda dalam setiap masyarakat. Jika dalam masyarakat tertentu rasa puas diungkapkan dengan sendawa, namun pada masyarakat lainnya cara tersebut dianggap tidak sopan.
- b. Kebiasaan (*Folkways*), kebiasaan merupakan norma yang memiliki kekuatan yang lebih besar dari cara dan merupakan perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, Menurut Mac Iver dan Page, kebiasaan merupakan perikelakuan yang diakui dan diterima masyarakat. Misalnya, kebiasaan memberi hormat kepada orang tua. Jika perbuatan tersebut tidak dilakukan, dianggap sebagai penyimpangan.
- c. Tata Kelakuan (*Mores*), merupakan norma yang berkembang dari kebiasaan, di mana kebiasaan tersebut tidak semata-mata dianggap sebagai cara berperilaku saja, tetapi bahkan diterima sebagai norma-norma pengatur. Tata kelakuan mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar atau tidak sadar oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya.
- d. Adat Kebiasaan (*Custom*), merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Anggota masyarakat yang melanggar akan menerima sanksi keras yang kadang-kadang secara tidak langsung diperlakukan. Misalnya, di

suatu masyarakat, perceraian merupakan hal yang tidak boleh terjadi sehingga apabila terjadi perceraian, seluruh keluarga akan merasa tercemar. Pria dan wanita *indekos* di suatu perkampungan dan ternyata mereka bukan suami istri, akan mendapat sanksi dari masyarakat, seperti digunjingkan, diusir, dan diarak keliling kampung ketika mereka melakukan perbuatan zina.

Di dalam masyarakat, norma-norma sosial dibagi berdasarkan bidang-bidang tertentu yang tidak selalu berdiri sendiri dan saling berhubungan satu dengan lainnya, yang terdiri atas:

- a. Norma Agama, merupakan norma yang mengandung peraturan-peraturan yang sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh seseorang atau masyarakat, yang mengandung kewajiban untuk melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan dalam ajaran agama.
- b. Norma Kesopanan, merupakan petunjuk yang mengatur bagaimana seseorang harus bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya, pada saat memberikan atau menerima sesuatu dari orang lain, sebaiknya dengan tangan kanan.
- c. Norma Kebiasaan, merupakan tata aturan seseorang atau kelompok dalam melakukan suatu kegiatan yang didasarkan pada tradisi atau perilaku yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan. Misalnya, Upacara Sekatenan di Yogyakarta.
- d. Norma Kesusilaan, merupakan salah satu aturan yang berasal dari akhlak atau dari hati nurani sendiri tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Misalnya berciuman di depan umum adalah hal yang tabu bagi masyarakat Indonesia.
- e. Norma Hukum, adalah tata aturan yang paling tegas sanksi dan hukumnya, terdiri dari norma tertulis seperti KUHP, KUH Perdata, dan norma tidak tertulis, yaitu hukum adat.

3. Fungsi Norma Sosial

- a. Norma sosial merupakan faktor perilaku dalam suatu kelompok tertentu yang memungkinkan seseorang untuk menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakannya akan dinilai orang lain.
- b. Norma sosial merupakan aturan dan sanksi-sanksi untuk mendorong seseorang, kelompok, atau masyarakat mencapai nilai-nilai sosial.

- c. Norma sosial merupakan aturan-aturan yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat sebagai unsur pengikat dan pengendali manusia dalam hidup bermasyarakat.

C. STRUKTUR SOSIAL INDONESIA

Struktur sosial secara etimologis berarti susunan masyarakat. Struktur sosial secara definitif merupakan skema penempatan nilai-nilai sosial-budaya dan organ-organ masyarakat pada posisi yang dianggap sesuai, demi berfungsinya organisme masyarakat sebagai suatu keseluruhan, dan demi kepentingan masing-masing bagian.

Skema dibangun secara objektif, agar dapat mengenal posisi yang diberikan masyarakat kepada nilai-nilai sosial budaya, dan organ-organ atau komponen sosial yang menjadi milik masyarakat. Nilai-nilai sosial-budaya terdiri dari ajaran agama, ideologi, dan kaidah-kaidah moral serta peraturan sopan santun. Organ masyarakat merupakan semua komponen yang bersama-sama mewujudkan masyarakat, seperti kelompok sosial maupun lembaga-lembaga sosial.

Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua cirinya yang bersifat unik. Secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat, serta perbedaan kedaerahan. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan vertikal antara lapisan atas dan bawah yang cukup tajam (Nasikun, 1995: 30).

Indonesia sebagai masyarakat multikultural, seperti telah disebutkan di atas menampakkan keanekaragaman dari berbagai aspek sosial budaya secara horizontal, seperti keanekaragaman dalam tata cara kehidupan, bahasa yang digunakan, seni budaya yang dimiliki, dan tradisi. Dalam berinteraksi, jika masing-masing anggota masyarakat tidak ada rasa toleransi serta rasa simpati dan empati, akan dihadapkan pada gesekan-gesekan yang disebabkan adanya keanekaragaman sosial budaya tersebut yang cenderung dapat menimbulkan konflik horisontal. Keanekaragaman secara vertikal mengandaikan bahwa dalam masyarakat Indonesia cenderung terjadi polarisasi secara ekonomi yang semakin

jelas. Sebagian anggota masyarakat yang kaya akan semakin kaya. Hal ini ditandai dengan bertambah banyaknya pemilikan barang-barang yang bersifat material atau ekonomis. Kepemilikan tersebut oleh sebagian anggota masyarakat dijadikan sebagai simbol status untuk lapisan sosial atas, sedangkan anggota masyarakat miskin akan cenderung semakin miskin. Hal ini ditandai bahwa mereka semakin tidak dapat mengakses fasilitas hidup dan sumber-sumber ekonomi yang dibutuhkan, seperti tanah, rumah yang layak, pendidikan, dan fasilitas kesehatan.

D. MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK SOSIAL

Hidup manusia di dunia sebagian besar berada dalam kehidupan bersama. Manusia yang wajar atau normal tidak akan pernah dapat melepaskan diri dari masyarakat dan hidup bermasyarakat sungguh pun di dalam dirinya terlekat dua sifat kodrat. Secara objektif, manusia terlahir sebagai makhluk sosial dan makhluk individu sekaligus. Sebagai makhluk sosial, manusia diakui eksistensinya ketika seseorang berada dalam lingkungan sosialnya, oleh Aristoteles disebut *zoon politicon*. Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat merupakan wadah atau tempat di mana manusia memperoleh pemuasan hasrat sosialnya.

Di samping sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*), manusia juga sebagai *needy creatures* atau makhluk kebutuhan atau istilah lainnya adalah makhluk individu. Sebagai *needy creatures*, manusia dikuasai oleh kebutuhan-kebutuhan pribadinya, oleh Epicurus dikatakan bahwa kepentingan pribadi mengatur dan menguasai semua manusia. Dari sudut pandang ini, masyarakat tidak dilihat sebagai wadah atau tempat untuk pemenuhan hasrat sosialnya, tetapi masyarakat dipandang sebagai gelanggang untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan pribadinya yang tidak pernah habis-habisnya, dan kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi sendiri. Dalam hal ini, manusia yang satu memandang manusia yang lain tidak sebagai tujuan, tetapi sebagai sarana. Oleh karena itu, manusia yang satu saling memanfaatkan dan memperalat yang lain guna pencapaian kebutuhan masing-masing.

Secara objektif, manusia mempunyai dua sifat kodrat. Di satu pihak, manusia mempunyai sifat sebagai “*zoon politicon*”, sedangkan di

lain pihak, manusia mempunyai sifat “*needy creatures*” atau makhluk kebutuhan. Sifat manusia sebagai *zoon politicon* menumbuhkan manusia sebagai makhluk sosial, sedangkan *needy creatures* menumbuhkan manusia sebagai makhluk individu. Posisi sebagai *zoon politicon* dan *needy creatures* tidak berikutub, dalam arti pada paruh waktu manusia adalah makhluk sosial, dan paruh waktu lainnya manusia sebagai makhluk individu. *Zoon politicon* dan *needy creatures* yang terlekat pada diri manusia, saling menjalin menjadi satu yang mengukuhkan keutuhan kendirian manusia sebagai manusia.

1. Konsep Kelakuan

Manusia sebagai anggota masyarakat dalam berpikir dan bertindak dengan cara-cara yang berpola. Pola adalah suatu ciptaan yang dijadikan model untuk membuat sesuatu yang lain namun serupa, misalnya dalam perusahaan batik dibuat lebih dari satu pola batik yang memiliki motif yang diinginkan, kemudian dipakai sebagai contoh atau pola untuk membuat kain batik bergambar sama. Pola kelakuan adalah suatu cara bertingkah laku yang diciptakan untuk ditiru banyak manusia. Suatu cara bertindak menjadi suatu pola bertindak yang tetap melalui proses pengulangan (peniruan) yang dilakukan banyak orang dalam waktu relatif lama sehingga terbentuk suatu kebiasaan.

2. Jenis Pola Kelakuan

Dari analisis yang sama dapat disimpulkan bahwa ada dua macam pola kelakuan, yaitu pola kelakuan lahiriah, yaitu tindakan seseorang yang dapat dilihat mengikuti suatu pola dan pola kelakuan batiniah yaitu apabila seseorang berpikir dan merasa menggunakan pola.

a. Pola Kelakuan Lahiriah

Pola kelakuan lahiriah adalah cara bertindak yang ditiru berulang-ulang oleh banyak orang. Kata bertindak berarti netral dalam arti bebas dari kaitan yuridis seperti tindakan hukum. Istilah lahiriah dikaitkan dengan kelakuan lahiriah yang menunjuk pada kelakuan atau tindakan yang dapat disaksikan orang lain, walaupun tidak selalu ada orang lain

yang melihatnya, seperti perbuatan seseorang yang sedang makan atau seorang guru yang sedang mengajar di depan kelas.

b. Pola Kelakuan Batiniah

Pola kelakuan batiniah dapat diteliti secara ilmiah oleh ilmu yang berkepentingan, dalam hal ini adalah sosiologi, karena yang diteliti bukanlah isi batin yang tidak dapat diamati, melainkan cara-cara pengungkapan apa yang terkandung dalam batin seperti cara berpikir, cara berkemauan, dan cara mengungkapkan perasaan. Ungkapan-ungkapan tersebut ternyata dapat dilihat atau didengar. Pola kelakuan batiniah tidak dapat dikenali secara langsung, tetapi melalui tanda-tanda lahiriah. Dari pengamatan terhadap ungkapan-ungkapan yang dilakukan seseorang untuk menyatakan isi hati kepada orang lain, dapat ditarik kesimpulan bahwa pernyataan-pernyataan itu dilakukan bukan tanpa aturan, tetapi mengikuti suatu pola yang tetap, yaitu cara-cara yang dilakukan orang banyak, sehingga setiap orang dapat mengerti apa yang dimaksudkan isi hati yaitu isi pikiran, perasaan, dan keinginan.

Ungkapan berpola yang paling penting untuk memperkenalkan isi hati antara lain: (1) bahasa, seseorang dalam menggunakan bahasa dan dapat dimengerti pihak lain, maka orang lain akan mengikuti pola bahasa yang baik, misal dalam menggunakan tata bahasa; (2) isyarat, seseorang dalam menggerakkan raut muka, tangan dengan gerakan berpola dan kemudian dimengerti orang lain; (3) tata tubuh, dalam hal mana tata tubuh tertentu digunakan untuk menyatakan rasa hormat kepada Tuhan, seperti ketika umat Islam menjalankan ibadah salat. Contoh lainnya adalah dalam tari-tarian, di mana seluruh tata tubuh dan gerakan dimaksudkan untuk mengekspresikan tujuan atau makna tertentu yang akan disampaikan kepada penonton.

Sebagian ungkapan batiniah yang berpola tersebut bersifat pribadi, dan merupakan ciri khas seseorang, walaupun terdapat pula ungkapan batiniah yang bersifat sosial, yang berarti diikuti umum. Meskipun demikian, cara berpola yang banyak diikuti orang belum membuktikan bahwa pola tersebut bersifat sosial. Suatu ungkapan batiniah bersifat

sosial jika bentuk ungkapan itu merupakan suatu keharusan yang berlaku dan sudah menjadi kebiasaan bagi setiap anggota masyarakat.

E. DISKRIMINASI DALAM MASYARAKAT INDONESIA

Dalam masyarakat yang terdiri dari kelompok mayoritas, yaitu kelompok yang jumlah anggotanya banyak dan kelompok minoritas, yakni kelompok yang jumlah anggotanya sedikit, disebabkan adanya perbedaan agama maupun keturunan, maka diskriminasi terhadap kelompok minoritas ada kecenderungan terjadi.

Masalah diskriminasi merupakan masalah dunia, sehingga Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Undang-Undang Anti Diskriminasi yang harus ditaati seluruh pemerintah negara anggotanya. Indonesia pada tahun 2008 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa diskriminasi ras dan etnis bertentangan dengan falsafah Pancasila, UUD 1945, dan Deklarasi Universal HAM, karena itulah harus dihapuskan.

Jika berbicara tentang diskriminasi yang ada di Indonesia, pusat perhatian ditujukan pada kaum etnis Tionghoa Indonesia yang acap kali mengalami diskriminasi. Perlakuan diskriminatif dialami pula oleh suku Bugis, Buton, maupun Makassar yang mencari hidup di Indonesia bagian Timur seperti Timor Timur (dulu sebelum memisahkan diri dari Indonesia) maupun Irian Jaya. Penduduk asli selalu mencurigainya sebagai kelompok pemeras kekayaan daerah. Sama halnya etnis Tionghoa yang juga dianggap sebagai penguasa dalam perekonomian.

Akar sosiologis pertama yang menimbulkan diskriminasi adalah adanya dua kelompok yang secara terpisah menguasai sektor kehidupan dalam masyarakat. Di Indonesia pada umumnya kelompok etnis Tionghoa menguasai sektor ekonomi, mulai dari perdagangan perantara sampai dengan perdagangan skala besar. Seperti halnya orang Makassar dan Bugis, di Irian Jaya dan Timor Timur (dulu) juga menguasai sektor ekonomi. Penguasaan mereka terhadap sektor ekonomi, menyebabkan rata-rata kehidupan mereka jauh lebih baik dari pada penduduk setempat.

Kebudayaan yang berbeda juga menjadi akar kedua dari masalah diskriminasi. Bagi orang Indonesia bukan keturunan Tionghoa, orang Tionghoa selalu dianggap sebagai suku yang jorok karena budayanya. Orang Jawa selalu mengatakan “*jegang koyo singkek*” yang artinya duduk dengan menaikkan kaki ke atas, bagi orang Jawa dianggap sangat tidak sopan. Perbedaan agama juga menjadi hal yang mendorong diskriminasi. Bagi orang Indonesia non-Tionghoa, orang Tionghoa dianggap kafir karena makan daging babi.

Prasangka etnis yang kemudian menimbulkan diskriminasi baik secara halus maupun kasar, dapat menyebabkan terjadinya konflik dan ketidakharmonisan hubungan antaretnis. Bagaimana mengatasi adanya permasalahan yang berkaitan dengan diskriminasi?

Pertama, pemerintah Indonesia harus memiliki pemerintahan yang bersih, adil, dan demokratis. Hal ini diperlukan untuk menjaga tegaknya etika pemerintahan, dalam arti tidak membedakan warganya dalam berusaha maupun mengembangkan kehidupan mereka.

Kedua, bangsa Indonesia harus meyakini dan membiasakan diri mereka pada kondisi kebhinnekaan bangsanya.

Ketiga, etnis Tionghoa harus diberi *affirmative action* dalam bidang politik, sedangkan *affirmative action* dalam bidang ekonomi dapat diberikan kepada orang Indonesia non-Tionghoa dan penduduk asli. Hal ini untuk mengurangi perasaan curiga, khawatir, iri hati, dan prasangka. Hal ini juga sekaligus untuk menghapus persepsi bahwa setiap suku bangsa yang terlibat dalam perdagangan retail yang sukses akan dicurigai penduduk asli yang merasa tidak mampu bersaing dengan para pedagang yang kebanyakan orang pendatang.

F. RANGKUMAN

Manusia secara kodrat merupakan makhluk sosial sekaligus makhluk individu. Manusia hidup dalam sebuah sistem sosial. Sistem sosial adalah suatu sistem tindakan terbentuk dari interaksi sosial yang terjadi di antara berbagai individu, tumbuh dan berkembang di atas standar penilaian umum yang disepakati bersama oleh para anggota

masyarakat. Standar penilaian umum yang terpenting adalah norma-norma sosial, dan norma-norma sosial inilah yang membentuk struktur sosial. Setiap anggota masyarakat menganut dan mengikuti pengertian-pengertian yang sama mengenai situasi-situasi tertentu dalam bentuk norma-norma sosial, maka tingkah laku setiap anggota masyarakat kemudian terjalin sedemikian rupa ke dalam bentuk suatu struktur sosial tertentu.

Pengaturan interaksi sosial di antara para anggota masyarakat tersebut dapat terjadi, karena adanya komitmen anggota masyarakat terhadap nilai-nilai dan norma-norma sosial yang menghasilkan daya untuk mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan di antara mereka. Tanpa kesepakatan tersebut, masyarakat dapat mengalami disintegrasi. Kepatuhan terhadap nilai-nilai dan norma-norma sosial tidak ada. Adanya diskriminasi yang dialami anggota masyarakat, khususnya mereka yang merupakan minoritas etnis dan kelompok kurang beruntung, merupakan bukti dari tidak adanya penilaian sosial yang tepat terhadap kelompok sosial tertentu. Pemerintah merupakan pihak pertama yang wajib menata hubungan sosial di antara anggota dan kelompok masyarakat, karena pemerintahlah yang memiliki *power* untuk mewujudkan integrasi sosial.

BAB IV

SISTEM BUDAYA INDONESIA

Budaya Indonesia dapat dilihat sebagai sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang saling berkaitan dan saling menjalin dari keseluruhan masyarakat Indonesia. Untuk memahami sistem budaya Indonesia diperlukan konsep dasar kebudayaan dari para ahli antropologi di antaranya dari Koentjaraningrat, Goodenaugh, dan Keesing. Selain itu, dibahas tentang kebudayaan sebagai pedoman hidup masyarakat. Dalam kaitan ini kebudayaan dilihat sebagai nilai-nilai yang mendasari perilaku manusia dan menjadi ukuran bersama dalam saling memahami perilaku dalam hidup bermasyarakat. Bertolak dari konsep kebudayaan dan fungsinya sebagai pedoman hidup, selanjutnya dibahas gambaran tentang pola hidup masyarakat Indonesia, keragaman kebudayaan Indonesia, beserta orientasi nilai budaya masyarakat Indonesia.

A. PENGERTIAN KEBUDAYAAN

Setiap masyarakat memiliki kebudayaan. Dalam kehidupan masyarakat, kebudayaan merupakan hal yang sangat diperlukan. Kebudayaan merupakan pedoman dalam penyelenggaraan berbagai aktivitas kehidupan. Apakah sesungguhnya kebudayaan itu? Dalam menjelaskan pengertian kebudayaan, para ahli memberikan bermacam-macam rumusan definisi. Menurut Koentjaraningrat kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta yang dihasilkan manusia dalam kehidupan masyarakat, yang dijadikan miliknya dengan cara belajar.

Dengan pengertian seperti itu, Koentjaraningrat menyatakan bahwa hampir semua tindakan manusia adalah kebudayaan. Tindakan manusia

hampir seluruhnya merupakan hasil kegiatan belajar. Tindakan manusia yang tidak dilakukan melalui belajar jumlahnya sangat terbatas. Berbagai tindakan yang bersifat naluri seperti makan, minum, dan berjalan juga telah di pengaruhi oleh manusia menjadi tindakan berkebudayaan.

Ahli antropologi umumnya mengartikan kebudayaan dalam arti luas. Kebudayaan dalam arti luas tidak saja pengkajian tentang seni dan keindahan. Kebudayaan dalam arti luas adalah himpunan pengalaman yang dipelajari. Suatu kebudayaan, misalnya kebudayaan Jepang mengacu pada pola-pola perilaku yang ditularkan secara sosial, yang merupakan kekhususan kelompok sosial tertentu.

Kebudayaan menurut Goodenough (dalam Keesing, 1989: 68) sering diartikan dalam dua arah pengertian yang berbeda, yaitu pola untuk perilaku dan pola dari perilaku. Oleh karena itu, kebudayaan sering diartikan dalam dua pengertian yang berbeda: *pertama*, pola kehidupan suatu masyarakat mencakup kegiatan dan pengaturan material dan sosial yang berulang secara teratur merupakan kekhususan suatu kelompok manusia tertentu; *kedua*, kebudayaan merupakan sistem pengetahuan dan kepercayaan yang disusun sebagai pedoman manusia dalam mengatur pengalaman dan persepsi mereka, menentukan tindakan, dan memilih di antara alternatif yang ada.

Roger M. Keesing sependapat dengan pengertian kebudayaan yang dikemukakan oleh Goodenough. Ia mengartikan kebudayaan sebagai sistem pemikiran. Kebudayaan dalam pengertian ini mencakup sistem gagasan yang dimiliki bersama, sistem konsep, aturan serta makna yang mendasari dan diungkapkan dalam tata cara kehidupan manusia. Kebudayaan dalam pengertian tersebut mengacu pada hal-hal yang dipelajari, bukan pada hal-hal yang dikerjakan (Keesing, 1989: 68–69).

Pengertian kebudayaan yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat juga mencakup sistem ide. Koentjaraningrat bertolak dari pendapat J.J.Honingmann, menjelaskan bahwa suatu kebudayaan mempunyai tiga wujud yaitu wujud ide, aktivitas, dan benda. Koentjaraningrat selanjutnya mengatakan bahwa setiap kebudayaan suatu masyarakat di dalamnya terkandung nilai budaya. Nilai budaya oleh Koentjaraningrat dikatakan

sebagai bagian dari wujud kebudayaan ide. Suatu sistem nilai budaya terdiri atas konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Karena suatu sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Sistem-sistem tata kelakuan lain yang tingkatnya lebih konkret seperti aturan-aturan khusus, hukum dan norma-norma, semuanya juga berpedoman kepada sistem nilai budaya itu.

Kebudayaan ide berupa sistem nilai budaya menurut Koentjaraningrat seolah-olah berada di luar dan di atas diri individu yang menjadi warga masyarakat yang bersangkutan. Para individu sejak kecil telah diresapi dengan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakatnya, sehingga konsepsi-konsepsi itu sejak lama telah berakar dalam alam jiwa mereka. Oleh sebab itu, nilai-nilai budaya sukar diganti dengan nilai-nilai budaya lain dalam waktu singkat.

Berdasarkan penjelasan di atas tampak bahwa meskipun terdapat rumusan yang berbeda, namun terdapat kesamaan, yaitu bahwa kebudayaan merupakan milik diri manusia dan diperoleh melalui belajar. Perbedaannya dalam rumusan definisi kebudayaan yang dikemukakan oleh Goodenough lebih sempit dibandingkan dengan yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat. Pengertian kebudayaan dari Goodenough dan Keesing mendekati sama dengan pengertian kebudayaan ide dalam penjelasan Koentjaraningrat.

B. KEBUDAYAAN SEBAGAI PEDOMAN HIDUP

Kebudayaan mengandung nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya merupakan sumber aturan dan merupakan pedoman hidup bagi suatu masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitasnya sehingga kehidupan masyarakat menjadi teratur. Oleh karena itu, dalam suatu kebudayaan yang sama terdapat banyak pemikiran, sikap, dan tindakan yang sama diperlihatkan oleh warga masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Sebagai contoh apa yang sering kita lakukan ternyata juga sering dilakukan oleh orang lain di sekitar kita. Jika kita bertemu ke

rumah seseorang, kita akan mengetuk pintu atau membunyikan bel rumah. Hal itu juga sering dilakukan oleh orang lain ketika mereka bertamu. Ketika ada seorang Jawa bertemu dengan orang yang lebih tua, ia menunjukkan sikap hormat dengan menggunakan bahasa *kromo inggil* (bahasa Jawa halus), hal itu juga dilakukan oleh orang Jawa lainnya. Harsya Bachtiar (1979: 67–68) mengatakan bahwa pemikiran yang kita wujudkan kebanyakan bukan merupakan pemikiran khusus kita sendiri. Kebanyakan pemikiran kita terdiri atas unsur-unsur budaya yang kita peroleh dari pengalaman hidup kita di tengah masyarakat dan melalui pendidikan. Banyak unsur-unsur kebudayaan telah menjadi pengatur pemikiran kita, sikap kita, dan tindakan-tindakan kita.

Di samping banyak pemikiran, sikap, dan tindakan yang sama, banyak pula pemikiran, sikap, dan tindakan yang berbeda. Pemikiran, sikap, dan tindakan yang berbeda sering kali karena mereka berasal dari masyarakat yang berbeda kebudayaannya. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa hal itu terjadi? Hal itu dapat dijelaskan dengan pemahaman berikut. Tiap-tiap masyarakat memiliki dan mengembangkan kebudayaan sendiri. Hal ini menyebabkan masyarakat dengan kebudayaan yang sama memiliki banyak kesamaan dalam pemikiran, sikap dan tindakan. Sebaliknya, masyarakat yang berbeda kebudayaan akan memiliki banyak perbedaan dalam hal pemikiran, sikap dan tindakan.

Di Indonesia yang memiliki banyak suku bangsa, tampak bahwa masing-masing suku bangsa tersebut memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Warga masyarakat yang berasal dari suku bangsa yang sama lebih banyak memiliki kesamaan pemikiran, sikap, dan tindakan dibandingkan dengan warga masyarakat dari suku bangsa yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa setiap masyarakat termasuk masyarakat suku bangsa mengembangkan kebudayaan tersendiri yang menyebabkan kebudayaannya memiliki ciri khas dibandingkan dengan suku bangsa yang lain.

Nilai-nilai budaya memuat pengertian-pengertian mana yang menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajibannya serta tata susila yang digunakan untuk mengukur apakah pemikiran-pemikiran, sikap-sikap,

dan tindakan-tindakan dianggap baik atau buruk dalam lingkungan kebudayaan masyarakatnya. Kebudayaan juga mengandung cara-cara mengekspresikan perasaan yang mengakibatkan terwujudnya bentuk-bentuk seni tertentu, seperti seni kesusasteraan, seni musik, seni tari, seni suara, seni drama, seni pahat, dan seni bangunan.

Pengaturan oleh kebudayaan mengakibatkan adanya status sosial dalam kehidupan masyarakat yang memiliki keterikatan dengan hak-hak, kewajiban-kewajiban, hubungan-hubungan sosial, dan organisasi-organisasi sosial. Oleh karena itu, struktur sosial pedesaan pada masyarakat Jawa bisa sangat berbeda dengan struktur masyarakat desa di luar Jawa. Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa masing-masing masyarakat melahirkan suatu kehidupan sosial dan budaya, bahasa, organisasi sosial, identitas, sistem solidaritas para warganya, yang khas berbeda dengan masyarakat yang kebudayaannya berbeda.

Dalam kaitan ini, Harsya Bachtiar juga menjelaskan bahwa dalam jangka waktu yang amat panjang masing-masing suku bangsa mengembangkan kebudayaan tersendiri yang diperoleh dari pengalaman hidup nenek moyang mereka dan diwariskan kepada generasi berikutnya secara turun temurun, sehingga membentuk kebudayaan suku bangsa yang ada saat ini. Kebudayaan suku bangsa mencakup berbagai unsur kehidupan, seperti bahasa, organisasi sosial, kepercayaan, kesenian, ilmu pengetahuan, peralatan hidup, dan mata pencarian.

Pada permulaan sampai dengan pertengahan abad ke-20, di nusantara muncul suatu kebudayaan baru dengan organisasi-organisasi baru. Kebudayaan ini adalah kebudayaan Indonesia. Kebudayaan yang mengatur struktur masyarakat baru yang tidak terbatas pada daerah tertentu, melainkan lambat laun, tetapi makin lama makin cepat menyebar keseluruh wilayah republik Indonesia. Kebudayaan Indonesia yang dimaksud oleh Harsya adalah kebudayaan bangsa (*nasion*) Indonesia, suatu kesatuan sosial yang baru dan yang berbeda dari masing-masing kebudayaan suku bangsa.

Kebudayaan Indonesia yang baru mencakup semua kebudayaan semua suku bangsa yang ada di Indonesia, tetapi berbeda dari

kebudayaan suku bangsa. Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu, tetapi tidak sama dengan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia telah berkembang dalam dinamikanya sendiri sehingga berbeda dari bahasa induknya, yaitu bahasa Melayu. Demikian pula nilai-nilai dan aturan-aturan tidak merupakan nilai-nilai dan aturan-aturan dari masyarakat suku bangsa tertentu, ungkapan perasaan keindahannya bukan lagi ungkapan perasaan keindahan suku bangsa tertentu melainkan nilai-nilai dan ungkapan perasaan yang dibentuk oleh kebudayaan baru yaitu kebudayaan Indonesia. Kebudayaan suku bangsa dan kebudayaan daerah yang ada di Indonesia tetap merupakan kekayaan kebudayaan yang perlu dijaga kelestariannya dan dikembangkan menjadi aset kebudayaan Indonesia. Namun demikian, kebudayaan suku bangsa tersebut tetap tidak boleh menggantikan kebudayaan Indonesia yang baru karena dapat menyebabkan terjadinya perpecahan di antara suku bangsa-suku bangsa yang ada di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan masyarakat Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa, kebudayaan dikatakan oleh Budhisantoso berperan sebagai perwujudan adaptasi aktif mereka di lingkungan kepulauan dan sekaligus merupakan pengenal kebudayaan suku bangsa satu dari yang lainnya. Keanekaragaman kebudayaan Indonesia menurut Budhisantoso disebabkan oleh perbedaan yang timbul karena pengalaman sejarah. Di samping itu, karena perbedaan intensitas kontak dengan kebudayaan asing. Kebudayaan suku bangsa tertentu akibat intensitas yang tinggi dalam kontak dengan kebudayaan asing menyebabkan kebudayaan tersebut dapat berkembang sangat pesat, sedangkan intensitas kontak dengan kebudayaan asing yang rendah menyebabkan kebudayaan suatu masyarakat kurang pesat dalam perkembangannya.

C. KEBUDAYAAN DAN KEPRIBADIAN MASYARAKAT INDONESIA

Kebudayaan merupakan pedoman hidup masyarakat yang memiliki peranan penting dalam mengembangkan pola-pola hidup masyarakat. Dalam waktu yang lama, kebudayaan memberikan arah dan dinamika

kehidupan masyarakat sehingga masyarakat memiliki berbagai pola hidup (Anas, 2002: 3–7). Di Indonesia secara garis besar terdapat empat pola hidup masyarakat masa lalu yang memiliki arti penting dilihat dari peranannya dalam pembentukan kepribadian bangsa. Keempat pola hidup tersebut adalah pola hidup peramu, pola hidup petani ladang, pola hidup petani sawah, dan pola hidup masyarakat pesisir.

1. Pola Hidup Masyarakat Peramu

Masyarakat peramu hidup di hutan dan berpindah-pindah. Mereka hidup dari berburu binatang dan meramu hasil-hasil tumbuhan. Mereka belum mengenal tradisi bercocok tanam. Masyarakat peramu masih bersifat menikmati apa-apa yang terdapat di alam. Keadaan seperti itu dimungkinkan karena hasil-hasil yang diperoleh dari alam masih melimpah dan jumlah manusia relatif masih sedikit. Hal itu menyebabkan masyarakat peramu memiliki mentalitas yang kurang produktif.

Namun masyarakat peramu dikenal memiliki ciri positif, yaitu sebagai improvisator, suatu masyarakat yang berimprovisasi melalui tindakan coba-coba. Mereka banyak melakukan tindakan coba-coba dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Di samping itu mereka telah mengembangkan kerja sama. Pada masa itu masyarakat peramu telah menunjukkan sikap saling menolong, tenggang rasa, dan cara hidup *resiprokitas* (balas membala). Ciri kultural dalam kehidupan mereka adalah pragmatis, keras, dan peka terhadap hasil-hasil usaha, serta gigih dalam perjuangan hidup.

Dilihat dari segi kepercayaan masyarakat peramu menganut kepercayaan animisme. Mereka berkeyakinan bahwa alam dengan segala isinya memiliki jiwa. Matahari, bulan, bintang, gunung, sungai, dan lain-lain memiliki jiwa.

2. Pola Masyarakat Petani Ladang

Masyarakat petani ladang berbeda dengan peramu karena mereka telah hidup menetap. Mereka bermukim secara berkelompok dan membentuk tempat tinggal yang berdekatan dengan ladang mereka. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka memproduksi sendiri

melalui cara berladang. Oleh karena itu, petani ladang merupakan masyarakat yang bersifat produktif. Mereka mendirikan desa-desa di pinggir hutan atau dekat dengan rawa-rawa. Mereka menyukai hidup bermukim secara tetap untuk mendapatkan kehidupan yang lebih tenteram.

Dalam mewujudkan ketenteraman dalam kehidupan bersama mereka telah mengembangkan suatu cara hidup yang di dasarkan atas prinsip-prinsip berikut.

- a. Pengutamaan kepentingan kehidupan bersama/umum.
- b. Pengakuan hak-hak asasi, seperti hak hidup, hak milik, hak perkawinan, hak atas kebenaran, dan hak atas nama baik.
- c. Pengakuan hak milik bersama (teritorial).
- d. Ada hierarki dalam kehidupan, yaitu kelas bangsawan dan rakyat biasa.

Prinsip-prinsip tersebut memengaruhi hak dan kewajiban serta tata krama (norma-norma) yang berlaku dalam masyarakat baik dalam mempertahankan hidup (mencari nafkah) maupun menjaga kelangsungan hidup (perkawinan).

Dari segi kepercayaan masyarakat petani ladang relatif sama dengan kepercayaan pada masyarakat peramu. Mereka mempercayai bahwa benda-benda yang ada di alam semesta ini memiliki jiwa atau roh. Mereka meyakini hukum alam itu mutlak dan mereka menghargainya.

3. Pola Hidup Masyarakat Petani Sawah

Pola hidup petani sawah banyak yang sama dengan pola hidup petani ladang, terutama cara hidup berkelompok dan menetap. Masyarakat petani sawah selalu berusaha mencari keseimbangan antara kebutuhan keluarga dengan kebutuhan relasinya di luar keluarga. Mereka memandang keseimbangan tersebut sebagai keseimbangan kosmis untuk dapat menyelamatkan hidup mereka.

Dalam hal keharmonisan masyarakat petani sawah berbeda dari petani ladang. Masyarakat petani ladang mengutamakan keharmonisan dalam arti luas, masyarakat petani sawah sebaliknya mengutamakan

keharmonisan dalam arti jiwa (kehidupan rohani). Hal ini dapat dilihat pada kehidupan masyarakat Bali yang sangat mengutamakan ketenteraman batin dan melebihi pengutamaan kebutuhan hidup duniawi.

4. Pola Hidup Masyarakat Pesisir

Ciri kehidupan masyarakat pesisir yang menonjol adalah mobilitas masyarakat yang tinggi. Mereka sangat mobil dan tidak terikat pada satu jenis mata pencaharian saja. Hal ini dapat dilihat pada kehidupan masyarakat Bugis, Makassar, dan Melayu. Di antara mereka ada yang menjadi nelayan, petani ladang, petani sawah, pedagang, dan lain-lain. Mereka mau mencari sumber-sumber kehidupan di berbagai tempat dan memanfaatkan semua fasilitas hidup yang dimiliki. Dalam mencari penghidupan mereka tidak hanya memproduksi untuk diri sendiri, tetapi juga untuk perdagangan. Sebagai contoh, dalam masyarakat Bugis sudah lama dikenal sebagai produsen beras tidak hanya untuk kebutuhan konsumsi sendiri, tetapi kebutuhan ekspor. Dalam menaati peraturan, masyarakat pesisir yang berjiwa dagang sangat memperhatikan segi untung dan rugi. Mereka juga dikenal sebagai masyarakat yang menjaga gengsi (harga diri) pribadi maupun kelompok.

5. Integrasi Pola-pola Hidup dan Kepribadian Bangsa

Cara hidup yang menjadi kepribadian dari berbagai masyarakat di Indonesia diwarnai oleh pola hidup masyarakat peramu antara lain tidak suka menonjolkan diri sendiri, menyukai kerja sama atau gotong royong, melakukan improvisasi, percaya kepada yang gaib dan meyakini hubungan orang yang hidup dan orang yang telah meninggal. Cara hidup masyarakat yang diwarnai oleh pola hidup masyarakat petani ladang dan petani sawah adalah kecintaan pada kampung halaman. Di samping itu, pola hidup petani memengaruhi pula pada cara hidup produktif dan kebersamaan serta religius, yang terakhir terutama berasal dari pola hidup masyarakat petani sawah. Keuletan dalam berdagang, semangat juang atau etos kerja yang tinggi merupakan ciri kepribadian masyarakat yang diwariskan oleh masyarakat pesisir.

D. KEANEKARAGAMAN KEBUDAYAAN INDONESIA

Sebagaimana sudah dijelaskan dalam bab 1, bahwa konsep masyarakat majemuk dipopulerkan oleh Furnivall, tetapi sebelumnya juga sudah diperkenalkan oleh M.G. Smith yang ditujukan untuk menyebut kelompok-kelompok etnik yang berbeda-beda “berbaur tetapi tidak larut” (Hidayah, 1999: 2). Masyarakat majemuk merupakan masyarakat yang terdiri atas aneka ragam kelompok masyarakat dilihat dari segi ras, etnik, kebudayaan, agama, dan bahasa. Berdasarkan pengertian tersebut, Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang dilihat dari segi keadaan masyarakatnya memiliki ciri majemuk. Di Indonesia terdapat aneka ragam ras: ada ras Mongoloid, Kaukasoid, Negroid dan campuran; ada aneka ragam suku bangsa yang jumlahnya mencapai puluhan, di antaranya yang tergolong besar adalah Jawa, Sunda, Madura, Bali, Batak, Minangkabau, Bugis, Makassar, Aceh, Melayu, Dayak, Flores, Maluku, dan Papua; ada berbagai pemeluk agama meliputi penganut agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Kong Hu Cu, dan agama lokal/aliran kepercayaan; dan amat banyak ragam bahasa daerah.

Kemajemukan tersebut sudah sejak lama disadari oleh pendiri negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, dalam semboyan yang terdapat dalam lambang burung garuda terdapat kalimat “Bineka Tunggal Ika” yang mengandung arti meskipun berbeda-beda, tetapi memiliki satu tujuan.

Sebagai bangsa yang masyarakatnya majemuk, Indonesia memiliki keanekaragaman kebudayaan. Hal itu dapat dilihat dari yang paling mudah disadari yaitu berbeda bahasa dan adat istiadat yang menjadi kerangka acuan dalam kegiatan sosial mereka sehari-hari. Di samping dari segi bahasa dan adat istiadatnya, dapat pula dilihat dari aspek-aspek yang lain.

Ahli antropologi Clifford Geertz mencoba menyederhanakan keanekaragaman kebudayaan yang berkembang di Indonesia menjadi dua tipe yang berbeda berdasarkan ekosistemnya, yaitu kebudayaan yang berkembang di “Indonesia dalam” dan kebudayaan “Indonesia luar”. Kebudayaan yang berkembang di “Indonesia dalam” yang dimaksud

adalah Jawa dan Bali; sedangkan kebudayaan yang berkembang di “Indonesia luar” yang dimaksud adalah kebudayaan yang berkembang di luar Jawa dan Bali.

Kebudayaan yang berkembang di Indonesia dalam ditandai oleh tingginya intensitas pengolahan tanah secara teratur dan telah menggunakan sistem pengairan dan menghasilkan pangan padi yang ditanam di sawah. Dalam kegiatan pertanian, di Indonesia dalam menggunakan tenaga kerja dalam jumlah yang besar disertai peralatan yang relatif lebih komplek. Kebudayaan yang berkembang di luar Jawa dan Bali selain Danau Toba, dataran tinggi Sumatra Barat, dan Sulawesi Barat Daya berkembang atas dasar pertanian perladangan. Kebudayaan di Indonesia luar ditandai oleh sedikitnya jumlah penduduk dan umumnya baru beranjak dari kebiasaan hidup berburu kearah pertanian.

Hildred Geertz (1963) mengklasifikasikan kebudayaan suku bangsa di Indonesia ke dalam tiga kategori, yaitu kebudayaan masyarakat petani beririgasi, kebudayaan pantai yang diwarnai oleh kebudayaan Islam, serta kebudayaan masyarakat peladang dan pemburu yang masih berpindah tempat. Kebudayaan masyarakat petani beririgasi berkembang di pulau Jawa dan Bali. Kebudayaan itu berkembang atas dasar pertanian padat karya di daerah yang paling dekat penduduknya. Penduduk tersebut sangat kuat dipengaruhi oleh Hinduisme, yang bercirikan sangat kuat pada status, mengembangkan kesenian yang sangat tinggi terutama di pusat-pusat kekuasaan (keraton-keraton) yang juga sebagai pusat peradaban.

Kebudayaan pantai ditandai dengan pengaruh Islam yang kuat serta kegiatan dagang yang menonjol. Kebudayaan tersebut tersebar di sepanjang pantai Sumatra dan Kalimantan yang didukung oleh orang-orang Melayu dan orang-orang Makassar dari Sulawesi Selatan. Pendukung kebudayaan pantai mengembangkan kegiatan berdagang sepanjang pantai dan bersama-sama dengan pedagang yang berdatangan dari berbagai penjuru dunia. Mereka berorientasi pada perdagangan dan mengutamakan pendidikan agama dan hukum, serta mengembangkan

seni tari, musik, dan kesusastraan sebagai unsur pemersatu utamanya. Beberapa pusat perdagangan di luar Jawa berkembang menjadi pusat-pusat kekuasaan dengan sistem pemerintahan yang relatif modern.

Bentuk kebudayaan ketiga merupakan bentuk aneka ragam kebudayaan yang tidak termasuk dalam dua kategori terdahulu. Kategori ketiga itu merupakan kebudayaan orang Toraja di Sulawesi Selatan, orang Dayak di pedalaman Kalimantan, orang Halmahera, suku-suku di pedalaman Seram, di Kepulauan Nusa Tenggara, orang Gayo di Aceh, orang Rejang di Bengkulu, dan orang Lampung di Lampung. Pada umumnya kebudayaan mereka berkembang di atas sistem pencaharian perladangan ataupun penanaman padi ladang, sagu, jagung, dan akar-akaran. Ikatan kekerabatan di daerah kebudayaan ketiga masih sangat kuat bila dibandingkan dengan ikatan wilayah ataupun politik yang feodal. Namun peningkatan intensitas dalam sistem administrasi pemerintahan menyebabkan kesatuan sosial yang berdasarkan atas kekerabatan menjadi semakin kendor. Keluarga luas yang memiliki tanah pusaka dan benda-benda upacara, serta kedudukan-kedudukan sosial yang tinggi dalam sistem sosial yang lama semakin hancur.

Berkaitan dengan keanekaragaman kebudayaan, Parsudi Suparlan mengemukakan bahwa di Indonesia terdapat tiga golongan kebudayaan yang masing-masing mempunyai corak sendiri-sendiri. Ketiga golongan tersebut satu dan yang lain berbeda, tetapi saling berkaitan, dan ketiganya merupakan satu kesatuan yang disebut kebudayaan Indonesia. Ketiga golongan tersebut terdiri atas: (1) kebudayaan suku bangsa; (2) kebudayaan umum lokal, dan (3) kebudayaan nasional.

Di antara ketiga golongan kebudayaan yang paling berakar adalah kebudayaan suku bangsa karena sejak kecil seseorang dibesarkan dalam suasana suku bangsa melalui proses sosialisasi dalam keluarga dan lingkungan kerabatnya. Setelah itu, kebudayaan umum lokal yang diperoleh melalui berbagai macam corak dan bentuk pergaulan dengan sesamanya dalam suasana umum yang berlaku setempat. Kebudayaan nasional Indonesia pada umumnya sudah dikenal oleh masyarakat sejak anak-anak mulai bersekolah.

Dibandingkan dengan dua golongan di atas, kebudayaan nasional Indonesia penggunaannya belum merata meliputi seluruh warga masyarakat Indonesia. Ketidakmerataan kebudayaan nasional Indonesia karena: (1) pusat-pusat kegiatan kebudayaan nasional adalah di kota-kota dan di pusat-pusat pemerintahan; (2) belum semua orang Indonesia berbahasa atau memahami bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi; (3) kebudayaan nasional Indonesia bersifat resmi atau formal khususnya yang berlaku di arena-arena sosial atau situasi-situasi sosial yang bersuasana nasional, seperti di kantor-kantor pemerintah, sekolah, universitas, dan sebagainya; (4) terwujudnya kebudayaan nasional adalah baru walaupun landasannya bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 sudah dimantapkan, tetapi perwujudan kebudayaan tersebut dalam pranata-pranata dan kelakuan para pelakunya belum mantap (Suparlan, 1982: 228–240).

E. ORIENTASI NILAI BUDAYA MASYARAKAT INDONESIA

Sistem nilai budaya sebagai bagian dari kebudayaan ide memuat beberapa masalah pokok dalam kehidupan umat manusia. Menurut Kluckhohn (dalam Koentjaraningrat, 1985: 28) sistem nilai budaya dalam semua kebudayaan di dunia sebenarnya mengenai lima masalah pokok dalam kehidupan manusia. Kelima masalah pokok itu adalah sebagai berikut.

1. Masalah mengenai hakikat dari hidup manusia (selanjutnya disingkat MH).
2. Masalah mengenai hakikat dari karya manusia (selanjutnya disingkat MK).
3. Masalah mengenai hakikat dari kedudukan manusia dalam ruang waktu (selanjutnya disingkat MW).
4. Masalah mengenai hakikat dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya (selanjutnya disingkat MA).
5. Masalah mengenai hakikat dari hubungan manusia dengan sesamanya (selanjutnya disingkat MM).

Berbagai cara kebudayaan di dunia itu mengkonsepsikan masalah-masalah universal tersebut secara berbeda-beda walaupun untuk

bervariasi itu terbatas adanya. Misalnya mengenai masalah pertama (MH), ada kebudayaan yang memandang hidup manusia itu pada hakikatnya suatu hal yang buruk dan menyedihkan, dan karena itu harus dihindari. Kebudayaan-kebudayaan yang terpengaruh oleh agama Buddha misalnya dapat disangka mengkonsepsikan hidup sebagai suatu hal yang buruk. Pola-pola kelakuan manusia akan mementingkan segala usaha yang menuju ke arah tujuan untuk bisa memadamkan hidup itu (*nirvan*, yang artinya meniup habis), dan meremehkan segala kelakuan yang hanya mengekalkan rangkaian kelahiran kembali (*samsara*). Kebudayaan-kebudayaan lain memandang hidup manusia itu pada hakikatnya buruk, tetapi manusia dapat mengusahakan untuk menjadikan hidup suatu hal yang baik dan menggembirakan.

Mengenai masalah kedua (MK), ada kebudayaan-kebudayaan yang memandang bahwa karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup; kebudayaan lain menganggap hakikat dari karya manusia itu untuk memberikannya suatu kedudukan yang penuh kehormatan dalam masyarakat; sedangkan kebudayaan lain lagi menganggap hakikat karya manusia itu sebagai suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi.

Berkaitan dengan masalah ketiga (MW), ada kebudayaan-kebudayaan yang memandang penting dalam kehidupan manusia itu sebagai masa lampau. Dalam kebudayaan-kebudayaan serupa itu, orang akan lebih sering mengambil pedoman dalam kelakuannya, contoh-contoh dan kejadian-kejadian dalam masa lampau. Sebaliknya, banyak pula kebudayaan yang hanya mempunyai suatu pandangan waktu yang sempit. Warga dari suatu kebudayaan serupa itu tidak akan memusingkan diri dengan memikirkan masa lampau maupun masa yang akan datang. Mereka hidup menurut keadaan yang ada pada masa sekarang ini. Kebudayaan-kebudayaan yang lain malah justru mementingkan pandangan yang berorientasi sejauh mungkin terhadap masa yang akan datang. Dalam kebudayaan serupa itu perencanaan hidup menjadi suatu hal yang amat penting.

Selanjutnya, mengenai masalah keempat (MA), ada kebudayaan-kebudayaan yang memandang alam itu suatu hal yang begitu dahsyat,

sehingga manusia pada hakikatnya hanya bisa menyerah saja tanpa ada banyak yang dapat diusahakan. Sebaliknya, banyak pula kebudayaan lain yang memandang alam itu sebagai suatu hal yang bisa dilawan oleh manusia, dan mewajibkan manusia untuk selalu berusaha menaklukkan alam. Kebudayaan yang lain menganggap bahwa manusia itu hanya bisa berusaha mencari keselarasan dengan alam.

Akhirnya, mengenai masalah kelima (MM), ada kebudayaan-kebudayaan yang amat mementingkan hubungan vertikal antara manusia dengan sesamanya. Dalam pola kelakuannya, manusia yang hidup dalam suatu kebudayaan serupa itu akan berpedoman kepada tokoh-tokoh pemimpin, orang-orang senior, atau orang-orang atasan. Kebudayaan lain lebih mementingkan hubungan horizontal antara manusia dengan sesamanya. Orang dalam suatu kebudayaan serupa itu akan amat merasa tergantung kepada sesamanya, dan usaha untuk memelihara hubungan baik dengan tetangga dan sesamanya merupakan suatu hal yang dianggap amat penting dalam hidup. Kecuali banyak kebudayaan lain yang tidak membenarkan anggapan bahwa manusia itu tergantung kepada orang lain dalam hidupnya. Kebudayaan-kebudayaan yang amat mementingkan individualisme serupa itu, menilai tinggi anggapan bahwa manusia itu harus berdiri sendiri dalam hidupnya dan sedikit mungkin mengandalkan bantuan dari orang lain.

Orientasi nilai budaya masyarakat Indonesia (khususnya Jawa) dikaitkan dengan penjelasan Kluckhohn tentang orientasi nilai budaya yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat sebagai berikut.

1. Orang Jawa memandang bahwa hidup sebagai rangkaian peristiwa-peristiwa yang penuh dengan kesengsaraan, yang harus dijalankan dengan tabah dan pasrah. Mereka menerima keadaannya sebagai nasib, tetapi harus berusaha untuk memperbaiki.
2. Rakyat kecil yang merupakan bagian terbesar masyarakat Jawa memiliki pandangan bahwa bekerja untuk dapat makan (*ngupaya upa*) karena itu muncul ungkapan *aja ngaya aja ngangsa* (jangan bekerja terlalu keras). Bagi priayi, bekerja dikaitkan dengan pahala yang akan diperoleh di akhirat kelak.

3. Hubungan antara manusia dengan alam diarahkan untuk menjaga keselarasan.
4. Masyarakat Jawa mempunyai persepsi waktu yang masih diarahkan kaitannya dengan masa lalu.
5. Hubungan antarsesama manusia diarahkan untuk menjaga solidaritas sosial, tolong-menolong, dan saling memberikan bantuan.

Orientasi nilai budaya seperti di atas terlihat dalam cara hidup masyarakat suku maupun bangsa Indonesia. Suatu kajian tentang stereotip cara hidup masyarakat Indonesia khususnya Jawa antara lain dikemukakan oleh Hariyono. Ia menunjukkan bahwa cara hidup masyarakat Indonesia (khususnya Jawa) meliputi suasana kebatinan yang melibatkan alam makrokosmos. De Jong (dalam Hariyono, 1994: 67) mengamati bahwa induk kebudayaan Jawa terletak pada tiga unsur yaitu *raja*, *tapabrata*, dan *kekuasaan*. Orientasi ideal manusia Jawa terletak pada posisi susunan hierarki sosial tertinggi, yaitu raja. Tapabrata merupakan jalan hidup yang dilakukan untuk memperoleh kekuasaan.

Kelestarian kekuasaan dalam budaya masyarakat Jawa didukung oleh kekuatan magis yang dianggap mampu mengikat kekuatan-kekuatan di luar konsentrasi kekuasaan. Dalam kehidupan modern magi digantikan oleh wibawa, materi, dan kekuatan-kekuatan sosial politik lainnya. Dengan terbentuknya konsentrasi kekuasaan, maka kebiasaan koordinasi dan delegasi jarang dilakukan. Oleh karena itu, budaya “minta petunjuk” akan terjadi untuk menjalankan suatu tugas.

Manusia Jawa akan berusaha mendekat dan kompromis pada pemegang kekuasaan, sehingga dalam budaya Jawa sering muncul sanjungan. Namun, orang Jawa umumnya mempunyai *unggah-ungguh* tidak mau disanjung terlalu tinggi karena ada keyakinan kalau “dipangku akan mati”. Selain itu, sikap penguasa dikenal suka menerima sanjungan, di sisi lain bawahan berusaha melakukan tindakan “asal bapak senang (ABS)”. Sikap kompromi orang Jawa terhadap perbedaan dengan penguasa sering diwujudkan dalam ungkapan: “*inggih boten kepanggih*” (suatu gambaran untuk menyatakan “ya” ketika berhadapan, tetapi kelak tidak akan dilaksanakan) (Hariyono, 1994: 67–71).

Cara hidup yang juga mengakar dalam sistem nilai budaya Indonesia juga dikemukakan oleh Koentjaraningrat. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, menurut Koentjaraningrat (1985) nilai budaya yang masih dianut secara luas antara lain nilai gotong royong. Dalam sistem nilai budaya orang Indonesia, nilai itu mengandung empat pemaknaan, yaitu sebagai berikut.

Pertama, manusia itu tidak hidup sendiri di dunia ini, tetapi dikelilingi oleh komunitasnya, masyarakatnya, dan alam semesta sekitarnya. Di dalam sistem makrokosmos tersebut ia merasakan dirinya hanya sebagai suatu unsur kecil saja, yang ikut terbawa oleh proses peredaran alam semesta yang Mahabesar itu.

Kedua, dengan demikian dalam segala aspek kehidupannya, manusia pada hakikatnya tergantung kepada sesamanya.

Ketiga, karena itu ia harus selalu berusaha untuk sedapat mungkin memelihara hubungan baik dengan sesamanya, ter dorong oleh jiwa sama rata, sama rasa.

Keempat, selalu berusaha untuk sedapat mungkin bersifat konform, berbuat sama dan bersama dengan sesamanya dalam komunitas, ter dorong oleh jiwa sama-tinggi sama-rendah.

Tema cara berpikir pertama berpangkal pada alam semesta dan masyarakat besar, sehingga memperkuat konsep nasib yang menjadi amat penting dalam pandangan hidup manusia Indonesia pada umumnya. Cara berpikir pertama tersebut juga membuat masyarakat Indonesia lebih mudah menerima penderitaan, kesedihan, kesukaran, bencana, dan kematian.

Dalam cara berpikir kedua mengenai ketergantungan kepada sesama memberikan keamanan nurani. Seseorang di Indonesia sering berpikir bahwa jika terjadi musibah pasti akan ada orang menolong, karena orang lain dalam masyarakat sekitarnya akan memberi pertolongan. Cara berpikir kedua menjadikan seseorang dalam kehidupannya tak pernah merasa terisolasi dan hidup sendiri.

Tema cara berpikir ketiga menjadikan nilai-budaya yang boleh dikata telah mendominasi kehidupan orang Indonesia sampai pada perikelakuan

dan perbuatan yang kecil-kecil sehari-hari dalam hal hubungan dengan sesama manusia. Nilai itu digunakan sebagai upaya untuk berbagi kesenangan dan kesedihan, misalnya apabila seseorang panen rambutan di kebunnya, ia akan membagi hasilnya kepada tetangga dekat.

Tema ketiga dalam gotong royong tersebut tentu amat baik dan sifatnya positif. Ada juga yang mengatakan bahwa nilai ini juga mempunyai segi negatif karena mencegah seseorang untuk maju secara ekonomis. Hal itu disebabkan karena setelah seseorang memiliki harta sedikit agak banyak saja daripada tetangga atau kaum kerabat, maka terdorong oleh tema sama-rata sama-rasa, segera membagi harta atau keuntungan yang diperolehnya. Mungkin hal itu benar, tetapi asalkan sifat itu dapat dikendalikan agar tidak menjadi terlalu ekstrem, maka tak perlulah sifat itu menghambat kemajuan ekonomi seseorang. Pada hakikatnya semua nilai, semua konsep, dan semua ide manusia apabila dilaksanakan dengan terlalu ekstrem, akan menjadi negatif dan kurang baik.

Lain daripada itu adalah tema keempat, yang juga amat kuat berakar dalam alam pikiran banyak orang dalam masyarakat Indonesia, terutama yang hidup dalam komunitas kecil seperti desa. Menurut Koentjaraningrat, tema inilah yang merupakan satu-satunya unsur negatif.

Orientasi nilai budaya dalam masyarakat Jawa menurut Koentjaraningrat jika dikaitkan dengan pembangunan memiliki beberapa kelemahan.

1. Nilai budaya yang berkaitan dengan hakikat hidup dan karya tidak berorientasi pada prestasi (*tidak achievement oriented*).
2. Nilai budaya yang berkaitan dengan waktu masih berorientasi kepada masa lalu dan masa kini dan kurang berorientasi pada masa depan.
3. Nilai budaya tentang hakikat hubungan manusia dan alam masih didasarkan pada cara hidup yang menggantungkan pada nasib.

Nilai budaya tentang hakikat hidup hubungan manusia dengan sesamanya mempunyai kelemahan, yaitu berorientasi pada orang-orang

berpangkat tinggi atau senior. Menurut Koentjaraningrat, nilai budaya yang berorientasi pada atasan, orang berpangkat tinggi, senior, dan orang tua mengakibatkan hasrat untuk berdiri sendiri dan disiplin pribadi yang murni akan mati. Demikian pula, nilai budaya yang menunggu restu dari atas tidak mendukung pembangunan (Koentjaraningrat, 1985: 41).

F. BUDAYA DAN INTEGRASI SOSIAL

Integrasi bagi masyarakat majemuk di Indonesia tetap memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh. Gejala yang ada di berbagai negara dan masyarakat menunjukkan bahwa integrasi pada masyarakat majemuk lebih sulit terwujud dibandingkan dengan integrasi dalam kehidupan masyarakat homogen. Di satu pihak, integrasi merupakan kebutuhan untuk kelangsungan hidup masyarakat, tetapi dipihak lain terdapat berbagai hambatan untuk mewujudkannya. Hal itu dapat dilihat dari kehidupan masyarakat majemuk yang lebih sering menghadapi persoalan konflik yang mengarah pada desintegrasi. Gejala ini dapat dilihat pada negara-negara yang masyarakatnya majemuk seperti Indonesia, Sri Lanka, India, dan Philipina. Di negara-negara tersebut, konflik sosial sering sekali mengarah pada timbulnya gerakan separatis dan peperangan antar kelompok masyarakat.

Di Indonesia misalnya terdapat Gerakan Separatis Aceh Merdeka, Organisasi Papua Merdeka, dan gerakan Republik Maluku Selatan (RMS). Timor Timur bahkan sudah lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Sri Lanka terdapat gerakan separatis Tamil yang masih terus menjadi ancaman bagi kesatuan negara tersebut. Di India terdapat gerakan separatis Kashmir yang sampai saat ini belum dapat diatasi. Di Philipina juga terdapat gerakan pembebasan nasional Moro yang bertahun-tahun melakukan perjuangan untuk mendirikan negara sendiri di wilayah Mindanau (Philipina Selatan).

Hubungan antarkelompok masyarakat dalam masyarakat majemuk memerlukan pengelolaan tersendiri baik oleh pemerintah maupun oleh warga masyarakat. Dalam masyarakat majemuk, hubungan-hubungan antarkelompok masyarakat harus memperhatikan keragaman nilai-nilai

budaya dan kepentingan-kepentingan dari semua kelompok masyarakat yang ada secara seimbang. Ketika keragaman nilai-nilai budaya dan kepentingan-kepentingan masyarakat tidak mendapatkan perhatian yang seimbang, ada kemungkinan masyarakat tersebut akan menghadapi ketegangan-ketegangan dalam hubungan sosial.

Sebagainegarayang masyarakatnya majemuk, Indonesia menghadapi kesulitan tersendiri dalam mewujudkan integrasi. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah konflik yang bersifat vertikal, misalnya gerakan separatis dan konflik horizontal antarkelompok etnik, antarkelompok keagamaan, antarpendukung partai politik, dan antarkelompok masyarakat yang berbeda aliran ideologi. Konflik horizontal gejalanya mudah dilihat di berbagai tempat, seperti kerusuhan di Ambon, Aceh, Poso, dan Sampit di luar Jawa dan beberapa kerusuhan insidental menjelang pemilu, seperti sering terjadi di daerah-daerah DKI, Pekalongan, Jepara, Solo, dan daerah “Tapal Kuda” di Jawa.

Di Indonesia berbagai upaya sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengokohkan integrasi. Pemerintah telah berupaya sejak dari penyelesaian melalui perundingan secara damai sampai dengan tindakan represif oleh polisi dan militer. Namun demikian, masalah integrasi masih saja menghadapi ancaman. Fenomena yang ada menunjukkan bahwa gerakan-gerakan yang mengarah pada disintegrasi masih juga belum surut di beberapa daerah di Indonesia.

Meskipun masyarakat majemuk sering menghadapi masalah konflik, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, namun sesungguhnya setiap masyarakat memiliki budaya yang telah dilengkapi dengan kelola konflik. Jika perhatian kepada kemajemukan dilakukan secara sungguh-sungguh, seharusnya konflik-konflik dalam masyarakat majemuk dapat dihindarkan. Berlangsungnya konflik di Indonesia yang sering kali terjadi menunjukkan bahwa selama ini perhatian pada kemajemukan masih kurang.

Menurut Harsya Bachtiar integrasi nasional di Indonesia sudah lama diusahakan sebagaimana diikrarkan melalui peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan dalam peristiwa Proklamasi Kemerdekaan

Republik Indonesia pada tahun 1945. Namun Harsya Bachtiar juga mengingatkan bahwa integrasi nasional masih menghadapi beberapa kendala. Beberapa kendala tersebut bersumber pada masalah-masalah berikut: perasaan kesukubangsaan, keberadaan golongan masyarakat keturunan asing, dan masalah keagamaan. Menurut Harsya Bachtiar (*Prisma*, 8 Agustus 1976: 3–13), bagi Indonesia kendala menuju integrasi nasional yang paling menjadi ancaman adalah kemungkinan salah satu golongan memisahkan dan mendirikan negara sendiri. Harsya Bachtiar menunjukkan bahwa sebagai bangsa, Indonesia merupakan kesatuan sosial yang baru, sedangkan daerah-daerah atau suku bangsa merupakan kesatuan sosial yang lebih tua. Suku bangsa merupakan kesatuan sosial yang memiliki ikatan dengan daerah asal mereka. Oleh karena itu, suku bangsa merupakan golongan sosial yang paling potensial menjadi ancaman bagi integrasi nasional.

Mely G. Tan mengkaji masalah integrasi dari segi hubungan mayoritas-minoritas di Indonesia yang harus diperhatikan agar tidak mengganggu terbentuknya integrasi nasional. Hubungan mayoritas-minoritas yang dimaksud Mely G. Tan yaitu masalah mayoritas dan minoritas yang mencakupi hubungan-hubungan minoritas orang perkotaan dan mayoritas orang pedesaan; minoritas orang terdidik dan mayoritas orang tidak terdidik; minoritas orang kaya dan mayoritas orang miskin; mayoritas dan minoritas dari segi kesukubangsaan.

Dalam hal hubungan antarkelompok masyarakat majemuk di Indonesia, khususnya yang menyangkut hubungan etnis Jawa dan Cina dikemukakan oleh sejumlah ahli, di antaranya adalah Peter Carey. Menurut Peter Carey (dalam Meutia, 1988: 558) hubungan antara etnik Jawa dan Cina telah diwarnai oleh benih-benih pertentangan sejak zaman pemerintahan Inggris di Jawa yaitu pada masa Raffles. Pertentangan itu berlanjut saat pemerintah kolonial Belanda di Indonesia menggolong-golongan masyarakat di Indonesia menjadi golongan orang Eropa, orang Timur Asing, dan orang pribumi. Dengan penggolongan tersebut pemerintah kolonial Belanda berarti menaikkan status orang Cina di atas orang pribumi. Selanjutnya, Mely G.Tan (1978: 35) mengatakan pula

bahwa faktor yang turut menimbulkan ketegangan hubungan etnik Jawa dan Cina adalah persaingan dalam bidang perdagangan dan ekonomi lainnya.

Hubungan antara etnik Cina dan Pribumi juga dikaji dalam sejarah pertentangan antara etnik Cina dan Pribumi di Pesisir Utara Pulau Jawa antara tahun 1900–1942. Kajian tersebut menunjukkan bahwa di antara kedua etnik tersebut sering timbul konflik karena beberapa sebab, yaitu politik diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah (kolonial Belanda); kebangkitan nasional dan timbulnya kesadaran diri sebagai bangsa yang sejajar dengan bangsa lain terutama berkat peranan organisasi SI (Sarikat Islam); penemuan identitas diri kelompok etnis Cina; dan kesenjangan serta persaingan dalam bidang ekonomi (Mustofa, 1996).

Kendala dalam upaya mewujudkan integrasi juga disebabkan oleh pertentangan antarpendukung partai politik. Mustofa (2000) dalam penelitian di Yogyakarta menunjukkan bahwa pertentangan antarpendukung partai politik khususnya pada saat menjelang pemilihan umum (pemilu) makin mempertegas garis kelompok dan mendorong pada timbulnya perpecahan, pertentangan, dan permusuhan serta tindakan kekerasan sosial di antara kelompok yang berbeda partai politik.

Hubungan-hubungan antarkelompok dalam masyarakat majemuk sering kali diwarnai oleh ketegangan-ketegangan dan konflik yang menjurus pada tindakan kekerasan yang pada dasarnya bukan karena perbedaan di antara masyarakat majemuk. Hubungan-hubungan yang diliputi ketegangan dan tindakan kekerasan sosial lebih disebabkan oleh pola dan interpretasi dalam hubungan-hubungan sosial di antara masyarakat yang dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat yang kurang memahami kemajemukan dari sisi kebudayaan. Hal itu dimungkinkan karena kemajemukan sering dipahami lebih banyak dari pendekatan politik dan kekuasaan. Padahal melalui pemahaman kemajemukan dari arah kebudayaan sangat penting. Dalam setiap kebudayaan terdapat sistem nilai budaya yang menekankan perlunya hidup toleran, menghargai perbedaan, dan mementingkan hubungan damai. Oleh karena itu, sistem nilai budaya dapat menjadi instrumen integrasi dalam masyarakat majemuk.

Pengembangan kebudayaan nasional menurut penjelasan Budhisantoso sangat penting untuk mendukung upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, terutama bagi negara yang masyarakatnya majemuk seperti Indonesia. Di berbagai negara yang baru merdeka pembangunan sering diarahkan pada pembangunan politik atau pembangunan ekonomi. Perhatian pada pembangunan perangkat nilai atau etos budaya bangsa yang dapat mengikat atau memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa sering kali dilupakan. Dalam masyarakat seperti Indonesia, proses pembangunan bangsa atau integrasi nasional justru menuntut perubahan, pergeseran, dan penyesuaian nilai-nilai budaya, yang oleh Clifford Geertz disebut "revolusi integratif". Revolusi integratif yaitu proses perluasan kesadaran akan kesamaan dan perbedaan primordial ke arah kesatuan yang lebih luas dalam kerangka keterpaduan masyarakat bangsa. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia revolusi integratif mengandung arti bahwa ikatan kelompok primordial yang dilandasai oleh hubungan kerabat, keagamaan, dan kebahasaan meluas ke arah kelompok yang lebih besar dalam masyarakat bangsa. Dilihat dari sisi tersebut, maka keberhasilan pembangunan bangsa atau integrasi nasional dalam masyarakat majemuk sering kali diartikan sebagai pergeseran ikatan primordial yang tradisional dan bersifat lokal ke arah identitas nasional yang baru.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diperlukan adanya kebudayaan nasional yang menjadi dasar atau landasan dalam mengembangkan hubungan-hubungan sosial dan kehidupan bersama sebagai bangsa. Ki Hadjar Dewantara (1993: 87–91) mengartikan kebudayaan nasional sebagai puncak-puncak dan sari-sari kebudayaan di Indonesia. Puncak-puncak dan sari-sari kebudayaan merupakan modal pertama yang disusul dengan ciptaan-ciptaan baru, yang timbul karena ada hasrat untuk membangun kebudayaan sendiri dan karena itu pasti akan berjiwa nasional. Modal pertama yang dimaksud Ki Hadjar Dewantara adalah pengakuan bahwa segala apa yang luhur dan indah di seluruh Indonesia adalah kekayaan rakyat Indonesia. Menurut Ki Hadjar Dewantara hal itu tak berarti bahwa kesenian dari daerah tertentu harus dijadikan kesenian daerah lain yang bukan daerahnya.

Ki Hadjar Dewantara bahkan mengatakan agar jangan sampai berusaha menyatukan hal-hal yang tidak dapat dan tidak perlu dipersatukan. Unsur yang disatukan cukup pokok dan dasar-dasarnya saja. Jika menuntut kesatuan pada aspek-aspek yang tak dapat dipersatukan, menurutnya justru dapat menimbulkan perpecahan, kecuali apabila seseorang atau kelompok sosial mengambil unsur kebudayaan lain secara sukarela.

Dilihat dari pendekatan kebudayaan, upaya menuju integrasi nasional dapat dilakukan melalui beberapa model, di antaranya adalah model “*melting pot*” dan “*cultural pluralism*” (Hess, dkk. dalam Joyomartono, 1995: 3). Model *melting pot* apabila golongan minoritas perlahan-lahan melepaskan keunikan kebudayaan mereka dan diasimilasikan ke dalam kebudayaan golongan yang dominan. “*Model Cultural Pluralisme*” dapat diterjemahkan “suatu kebudayaan dari banyak kebudayaan” merupakan interaksi sosial dan politik antarorang-orang yang berbeda cara hidup dan cara berpikirnya dalam masyarakat yang sama. Kelemahan model *melting pot* adalah ada kemungkinan kelompok minoritas melakukan gerakan separatis; dan kelemahan model *pluralism culturalism* adalah sedikit demi sedikit akan pudar jika tak diikat oleh lahirnya sistem ide yang didukung oleh semua pendukung kebudayaan dari kesatuan sosial-kesatuan sosial masyarakat yang bersangkutan. Pengikat model “*cultural pluralism*” adalah kebudayaan umum lokal yang berlaku dalam tempat dan kegiatan lokal dan kebudayaan nasional yang berlaku dalam tempat dan kegiatan nasional.

G. RANGKUMAN

Budaya Indonesia dapat dilihat sebagai sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang saling berkaitan dan saling menjalin dari keseluruhan masyarakat Indonesia. Untuk memahami sistem budaya Indonesia diperlukan konsep dasar kebudayaan dari ahli-ahli antropologi di antaranya dari Koentjaraningrat, Goodenough, dan Keesing. Menurut Koentjaraningrat kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta yang dihasilkan manusia dalam kehidupan masyarakat, yang dijadikan miliknya dengan cara belajar.

Goodenough mengartikan kebudayaan dalam dua hal yang berbeda: *pertama*, pola kehidupan suatu masyarakat yang mencakup kegiatan dan pengaturan material dan sosial yang berulang secara teratur yang merupakan kekhususan suatu kelompok manusia tertentu; *kedua*, sistem pengetahuan dan kepercayaan yang disusun sebagai pedoman manusia dalam mengatur pengalaman dan persepsi mereka, menentukan tindakan, dan memilih di antara alternatif yang ada.

Roger M. Keesing mengartikan kebudayaan sebagai sistem pemikiran, mencakup sistem gagasan yang dimiliki bersama, sistem konsep, aturan serta makna yang mendasari dan diungkapkan dalam tata cara kehidupan manusia. Kebudayaan dalam pengertian tersebut mengacu pada hal-hal yang dipelajari, bukan pada hal-hal yang dikerjakan.

Kebudayaan sebagai pedoman hidup masyarakat mengandung nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya merupakan sumber aturan dan merupakan pedoman hidup bagi suatu masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitasnya, sehingga kehidupan masyarakat menjadi teratur. Dalam kaitannya dengan masyarakat Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa, kebudayaan berperan sebagai perwujudan adaptasi aktif mereka di lingkungan kepulauan dan sekaligus merupakan pengenal kebudayaan suku bangsa satu dari yang lainnya.

Kebudayaan memengaruhi pola hidup bermasyarakat. Di Indonesia terdapat empat pola hidup masyarakat yang memiliki arti penting dilihat dari peranannya dalam pembentukan kepribadian bangsa. Keempat pola hidup tersebut adalah pola hidup peramu, pola hidup petani ladang, pola hidup petani sawah, dan pola hidup masyarakat pesisir.

Indonesia termasuk salah satu negara yang dilihat dari segi keadaan masyarakatnya memiliki ciri majemuk. Di Indonesia terdapat aneka ragam ras, yaitu ras Mongoloid, Kaukasoid, Negroid, dan campuran. Di samping terdapat berbagai ras, di Indonesia juga terdapat beraneka ragam suku bangsa yang jumlahnya mencapai puluhan, di antaranya yang tergolong besar adalah Jawa, Sunda, Madura, Bali, Batak, Minangkabau, Bugis, Makassar, Aceh, Melayu, Dayak, Flores, Maluku, dan Papua. Demikian pula, terdapat berbagai pemeluk agama, yaitu penganut agama Islam,

Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Kong Hu Cu, dan agama lokal/aliran kepercayaan; serta amat banyak ragam bahasa daerah yang digunakan sebagai alat komunikasi warga masyarakat daerah.

Pernik-pernik keanekaragaman kebudayaan dan ciri-ciri fisik tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga golongan kebudayaan yang masing-masing mempunyai corak sendiri-sendiri. Ketiga golongan tersebut satu dan yang lain saling berbeda, tetapi saling berkaitan, dan ketiganya merupakan satu kesatuan yang disebut kebudayaan Indonesia. Ketiga golongan tersebut terdiri atas: (1) kebudayaan suku bangsa; (2) kebudayaan umum lokal, dan (3) kebudayaan nasional.

Dalam kebudayaan suatu masyarakat terdapat sistem nilai budaya yang menjadi orientasi bagi anggota masyarakat. Sistem nilai budaya sebagai bagian dari kebudayaan ide memuat beberapa masalah pokok dalam kehidupan umat manusia. Menurut Kluckhohn, sistem nilai budaya dalam semua kebudayaan di dunia sebenarnya mengenai lima masalah pokok dalam kehidupan manusia. Kelima masalah pokok itu adalah sebagai berikut.

1. Masalah mengenai hakikat dari hidup manusia (selanjutnya disingkat MH).
2. Masalah mengenai hakikat dari karya manusia (selanjutnya disingkat MK).
3. Masalah mengenai hakikat dari kedudukan manusia dalam ruang waktu (selanjutnya disingkat MW).
4. Masalah mengenai hakikat dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya (selanjutnya disingkat MA).
5. Masalah mengenai hakikat dari hubungan manusia dengan sesamanya (selanjutnya disingkat MM).

Indonesia merupakan negara yang di dalamnya terdapat konfigurasi masyarakat multikultur dan majemuk, sehingga diperlukan pranata dan strategi untuk mengintegrasikan masyarakat multikultur tersebut agar tidak mudah berceraiberai. Strategi yang dikembangkan di antaranya adalah strategi kebudayaan. Pengembangan kebudayaan nasional menurut penjelasan Budhisantoso sangat penting untuk mendukung

upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, terutama bagi negara yang masyarakatnya majemuk seperti Indonesia. Di berbagai negara yang baru merdeka pembangunan sering diarahkan pada pembangunan politik atau pembangunan ekonomi. Perhatian pada pembangunan perangkat nilai atau etos budaya bangsa yang dapat mengikat atau memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa sering kali dilupakan. Dalam masyarakat seperti Indonesia, proses pembangunan bangsa atau integrasi nasional justru menuntut perubahan, pergeseran dan penyesuaian nilai-nilai budaya, yang oleh Clifford Geertz disebut “revolusi integratif”. Revolusi integratif yaitu proses perluasan kesadaran akan kesamaan dan perbedaan primordial ke arah kesatuan yang lebih luas dalam kerangka keterpaduan masyarakat bangsa. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia revolusi integratif mengandung arti bahwa ikatan kelompok primordial yang dilandasai oleh hubungan kerabat, keagamaan, dan kebahasaan meluas ke arah kelompok yang lebih besar dalam masyarakat bangsa. Dilihat dari sisi tersebut, maka keberhasilan pembangunan bangsa atau integrasi nasional dalam masyarakat majemuk sering kali diartikan sebagai pergeseran ikatan primordial yang tradisional dan bersifat lokal ke arah identitas nasional yang baru.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diperlukan adanya kebudayaan nasional yang menjadi dasar atau landasan dalam mengembangkan hubungan-hubungan sosial dan kehidupan bersama sebagai bangsa. Kebudayaan nasional harus merupakan puncak dari kebudayaan daerah yang memiliki nilai harmoni dari semua kebudayaan, yang dapat dijadikan acuan untuk mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat majemuk Indonesia.

BAB V

PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA INDONESIA

Kehidupan sosial budaya masyarakat tidak selamanya permanen. Seiring dengan perkembangan waktu dan tuntutan kebutuhan masyarakat, cara berinteraksi, cara hidup, dan nilai-nilai sosial budaya yang sudah lama dipegang teguh masyarakat dapat berubah. Apa yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya, bagaimana perubahan terjadi melalui proses akulturasi dan inovasi, apa yang menyebabkan terjadinya perubahan, serta hal-hal apa saja yang mendorong terjadinya kesenjangan sosial budaya, akan dijelaskan secara panjang lebar dalam bab ini.

A. PENGERTIAN PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA INDONESIA

Perubahan sosial merupakan proses wajar dan akan berlangsung secara terus menerus. Perubahan sosial tidak selalu mengarah ke perubahan yang positif saja terkadang juga negatif. Oleh karena itu, persoalan ini menjadi penting dibicarakan. Perubahan sosial tidak dapat dipisahkan dari perubahan budaya. Perubahan sosial (*sosial change*) dan perubahan budaya (*culture change*) hanya dapat dipisahkan untuk keperluan teori, sedangkan dalam kehidupan nyata keduanya tidak dapat dipisahkan.

Kebudayaan dihasilkan oleh masyarakat dan tidak ada masyarakat yang tidak berbudaya. Dengan kata lain, budaya ada karena adanya masyarakat dan dalam masyarakat pasti berbudaya. Perbedaan pengertian antara perubahan sosial dengan perubahan budaya terletak pada pengertian masyarakat dan budaya yang diberikan. Perubahan budaya lebih menekankan pada perubahan sistem nilai, sedangkan

perubahan sosial pada sistem pelembagaan yang mengatur tingkah laku anggota masyarakat.

1. Perubahan Sosial

Ruang lingkup perubahan sosial meliputi bidang yang sangat luas. Seperti dikemukakan oleh Selo Soemarjan (1992: 332) bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial bisa juga hanya meliputi bidang tertentu saja dan terbatas pula kedalamannya. Ada pula perubahan sosial pada bidang tertentu, tetapi dapat berlaku pada tingkat yang lebih luas, misal timbulnya kesadaran terhadap pelestarian lingkungan dalam pembangunan.

Luasnya lingkup perubahan sosial memerlukan adanya pembatasan pada saat membicarakan suatu masyarakat, sehingga analisinya menjadi jelas atau tidak kabur dan memudahkan pemahaman pada tingkat mana perubahan sosial itu terjadi. Louer (1978: 5) membuat deskripsi tingkat analisis perubahan sosial sebagai berikut.

Tabel 5.1.Tingkat Analisis Perubahan Sosial

Tingkat Analisis	Wakil Kawasan Studi	Wakil Unit-unit Studi
Global	Organisasi internasional, ketimpangan internasional	GNP, Data perdagangan
Peradaban	Lingkaran kehidupan peradaban atau pola-pola perubahan lain, misalnya evolusioner atau dialektika	Inovasi ilmiah, kesenian, dan inovasi lain-lain, institusi sosial
Kebudayaan	Kebudayaan material, kebudayaan nonmateriil	Teknologi, ideologi, nilai-nilai
Masyarakat	Sistem stratifikasi, struktur demografi, kejahatan	Pendapatan, kekuasaan, dan gengsi, peranan, pertumbuhan penduduk, tingkat pembunuhan

Komunitas	Sistem stratifikasi, struktur demografi, kejahatan	Pendapatan, kekuasaan, dan gengsi, peranan, pertumbuhan penduduk, tingkat pembunuhan
Institusi	Ekonomi, pemerintahan, agama, perkawinan dan keluarga, pendidikan	Pendapatan keluarga, pola pemilihan umum, jemaah gereja dan masjid, tingkat perceraian, proporsi penduduk di Perguruan Tinggi
Organisasi	Struktur, pola interaksi, struktur kekuasaan, produktivitas	Peranan, persahabatan , administrasi/tingkat produksi, <i>output</i> para pekerja
Interaksi	Tipe interaksi, komunikasi	Jumlah konflik, kompetisi atau kedekatan, identitas keserigan dan kejarangan partisipasi interaksi
Individu	Sikap	Keyakinan mengenai berbagai persoalan, aspirasi

Sumber: Robert H. Louer, *Perpective On Soscial Change*, 2 Edition, Boston, 1978: 5

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa perubahan sosial mempunyai skop yang luas, mulai dari tingkat global sampai dengan tingkat individu. Peradaban, kebudayaan, masyarakat, institusi, organisasi, dan interaksi juga dianalisis secara rinci. Dipandang dari sudut kawasan studi, berangkat dari masalah, yaitu mulai dari organisasi internasional, ketimpangan kehidupan masyarakat atau pola perubahan, kebudayaan materiil dan nonmateriil, sistem stratifikasi, struktur demografi, kriminal, ekonomi, politik, agama, perkawinan, keluarga, pendidikan, pola interaksi dan produksi. Di samping itu, tipe interaksi dan komunikasi serta sikap masih termasuk dalam kawasan

studi perubahan sosial. Mengkaji kawasan studi perubahan sosial yang begitu luas kita perlu memahami secara seksama agar dapat memperkecil timbulnya hal-hal yang tidak kita inginkan atau perubahan sosial yang negatif.

Dilihat dari sudut studi yang lebih representatif, perubahan sosial meliputi banyak jenis, seperti GNP, data perdagangan, aliansi politik, sains dan inovasinya, interaksi sosial, teknologi dan ideologi. Dari sudut kemasyarakatan, perubahan sosial juga dapat dilihat berbagai masalah, seperti pendapatan, kekuatan dan kelemahan, harga diri, kekuasaan, perkembangan imigrasi dan bunuh diri, serta pertumbuhan penduduk. Masalah pendapatan keluarga, pola pemilihan umum, kehadiran dalam ibadah bersama, proporsi penduduk yang mengunjungi sekolah, persahabatan, administrasi, produksi dan hasil kerja, konflik, kompetisi hidup bertetangga yang rukun, frekuensi dan jarangnya berinteraksi kepercayaan dan aspirasi, termasuk pula dalam perubahan sosial.

Analisis perubahan sosial yang dikemukakan Robert H. Louer tersebut menunjukkan betapa banyaknya variabel-variabel yang dapat memengaruhi perubahan sosial. Oleh karena itu, diperlukan pemikiran atau wacana yang luas untuk memahaminya agar perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dapat meningkatkan kehidupan manusia baik secara material maupun nonmaterial.

Pada dasarnya ada empat perkara penting dalam teori perubahan sosial.

a. Perkara asal usul

Masyarakat tradisional yang masih ada sekarang ini dapat dijadikan petunjuk kondisi awal yang dapat kita gunakan untuk menelusuri perkembangan masyarakat modern atau masa kini.

b. Solidaritas mekanik dan organik

Solidaritas mekanik dapat ditemukan dalam organisasi sosial masyarakat tradisional, yang terdapat kecenderungan untuk mempertahankan ide bersama dan tata sosial yang seragam, untuk menjaga keutuhan solidaritas kolektif tersebut. Ada tiga hal yang membedakan solidaritas mekanik dan organik yaitu sebagai berikut.

- 1) Solidaritas mekanik mengikat langsung individu dengan masyarakat, solidaritas organik menyebabkan saling ketergantungan antarindividu.
 - 2) Solidaritas mekanik dalam masyarakat yang memiliki keyakinan dan sentimen bersama, solidaritas organik pada masyarakat majemuk dan berreferensi.
 - 3) Solidaritas mekanik hanya dapat bertahan sepanjang hal-hal dan kepribadian individu satu sama lain secara selektif tidak dapat dibedakan secara keseluruhan, solidaritas organik membutuhkan hal-hal yang unik.
- c. Pembagian kerja
- Pembagian kerja dalam masyarakat cenderung memiliki solidaritas organik. Hal ini disebabkan jumlah dan tingkat interaksi yang meningkat mengakibatkan peningkatan dalam pembagian kerja. Pembagian kerja menjadi penting dalam masyarakat yang berpenduduk padat karena dapat menghindari konflik. Di dalam masyarakat modern integrasi sosial sangat berkurang, sehingga untuk mempekuatnya diperlukan pengembangan organisasi profesi.
- d. Arah perkembangan masyarakat modern terjadi dari solidaritas mekanik ke solidaritas organik. Hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan yang lebih baik.

2. Perubahan Kebudayaan

Pada awal abad ke-20 mulai ada perhatian terhadap kemajuan kebudayaan manusia. Unsur-unsur kebudayaan dapat diketemukan tersebar luas di berbagai daerah. Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa perubahan kebudayaan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern atau masyarakat masa kini tidak perlu menyebabkan hilangnya keseimbangan yang mengakibatkan timbulnya konflik-konflik yang merusak. Oleh karena perubahan kebudayaan berlangsung dalam jangka panjang dan terus menerus, maka harus diupayakan agar perubahan kebudayaan dapat mengakibatkan perubahan dalam kehidupan masyarakat yang lebih baik. Hal ini dapat terjadi bila perubahan kebudayaan tersebut berlangsung secara perlahan-lahan dan terarah.

Penelitian yang menyangkut proses sosial yang terjadi bila manusia dalam suatu masyarakat dengan suatu kebudayaan tertentu dipengaruhi oleh unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing yang sedemikian berbeda sifatnya, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing lambat laun diakomodasikan dan diintegrasikan ke dalam kebudayaan itu sendiri tanpa kehilangan kepribadian dari kebudayaannya sendiri, disebut penelitian akulturasasi atau “*acculturation*” (Koentjaningrat, 1990: 91).

Dari berbagai konsep para ahli antropologi, pada dasarnya dalam topik akulturasasi sedikitnya terdapat lima masalah khusus yang harus dikaji. Masalah khusus tersebut mencakupi:

a. Mengenai Metode-metode untuk Mengamati, Melukiskan, dan Menguraikan Suatu Proses Akulturasasi dalam Suatu Masyarakat

Salah satu metode untuk mengamati proses akulturasasi yang terjadi dalam masyarakat adalah *reported observation at intervals*. Metode ini mewajibkan peneliti untuk mengamati masyarakat yang sedang mengalami pengaruh kebudayaan asing dengan beberapa kali mengunjungi masyarakat yang bersangkutan. Dengan kunjungan yang berkali-kali akan diperoleh data yang lengkap yang dapat digunakan untuk menguraikan proses akulturasasi dalam masyarakat tersebut.

b. Jalannya Suatu Proses Akulturasasi

Adanya berbagai unsur kebudayaan yang mudah berubah dan sukar berubah bila dihadapkan dengan pengaruh kebudayaan asing. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa perbedaan tersebut terletak pada: (1) inti kebudayaan (*covert cultural*), misalnya mengenai sistem nilai-nilai budaya, keyakinan-keyakinan keagamaan yang dianggap keramat, beberapa adat yang sudah dipelajari dalam proses sosialisasi individu warga masyarakat, beberapa adat yang mempunyai fungsi yang terjaring luas dalam masyarakat. Inti kebudayaan pada umumnya sulit untuk berubah; (2) bagian perwujudan lahir (*overt culture*), misalnya kebudayaan fisik, (alat-alat yang berguna), ilmu pengetahuan, tata cara, gaya hidup, dan rekreasi. Bagian ini mudah untuk berubah bila dihadapkan dengan kebudayaan asing.

Menurut Foster (1965: 45), proses akulturasi biasanya dimulai dari golongan atas dalam masyarakat yang tinggal di kota. Kenyataannya, pada masyarakat kota kebudayaan tradisional akan cepat hilang, kesatuan keluarga besar akan retak dan tumbuh nilai-nilai budaya individualistik. Meskipun tidak semua masyarakat kota demikian. Suatu penelitian menemukan bahwa orang Batak yang berurbanisasi ke Medan, adat istiadat yang mereka bawa tidak menjadi kendur, bahkan semakin ketat. Oleh karena itu, dalam menganalisis proses akulturasi harus memperhatikan keadaan lingkungan masyarakat yang bersangkutan.

c. Psikologi dalam Suatu Proses Akulturas

Dari berbagai proses akulturasi dalam suatu kebudayaan, salah satunya disebabkan oleh adanya perbedaan kepribadian dari tiap individu dalam masyarakat yang tengah mengalami proses akulturasi. Tiap-tiap individu dalam suatu masyarakat ada yang memiliki watak kolot dan ada yang memiliki karakter progresif. Dalam masyarakat majemuk Indonesia terdapat golongan-golongan sosial yang berbeda. Di dalam golongan-golongan sosial, masing-masing memiliki subkebudayaan yang berbeda. Perbedaan ini terjadi dalam menerima, mengakomodasikan, dan mengintegrasikan pengaruh kebudayaan asing dalam intensitas dan cara yang lain.

Individu dalam masyarakat yang memiliki watak kolot akan mempertahankan masyarakat tradisionalnya, sehingga menolak kebudayaan asing atau berusaha menghindari. Di samping kedua golongan tersebut, ada satu golongan lagi yang disebut sebagai golongan antara, yaitu orang-orang yang tidak diterima dalam golongan kolot tetapi kurang mampu untuk memenuhi syarat-syarat hidup dalam golongan progresif. Mereka yang termasuk golongan ini adalah orang-orang yang sukses dalam pendidikan, pekerjaan, kedudukan maupun sebagai pegawai pemerintah, tetapi mentalitasnya masih dengan sistem nilai budaya lama.

d. Timbulnya Inovasi

Terjadinya perubahan kebudayaan tidak hanya karena adanya pengaruh unsur-unsur kebudayaan asing, tetapi juga karena adanya

pembaharuan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), penggunaan teknologi baru dan cara-cara baru yang akan menghasilkan produk-produk baru. Di samping produk-produk baru dalam inovasi termasuk juga pembukaan daerah atau pasar baru, penemuan sumber-sumber baru dan perubahan organisasi industri sehingga terjadi efisiensi.

Proses perubahan yang terjadi karena adanya pembaharuan tersebut disebut inovasi. Munculnya para inovator karena adanya kreativitas dalam dirinya. Untuk mendorong kreativitas diperlukan: (1) kesadaran para individu akan adanya kekurangan-kekurangan dalam kebudayaan, (2) mutu dari keahlian para individu yang bersangkutan, (3) adanya sistem perangsang dalam masyarakat yang mendorong mutu, dan (4) adanya krisis dalam masyarakat. Inovasi pada dasarnya sangat diperlukan dalam setiap perkembangan kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, inovasi dapat dikatakan sebagai penggerak atau *motor* dalam perubahan atau pembangunan.

Bila dicermati dari sisi ekonomi, dengan adanya inovasi akan diperoleh keuntungan monopolitis, yaitu timbulnya proses imitasi. Timbulnya proses imitasi akan mengakibatkan menurunnya keuntungan monopolitis dan terjadinya penyebaran teknologi baru. Bagi inovator, hal ini tidak menjadi masalah karena mereka dengan kreativitasnya dapat menemukan hal-hal baru lagi. Penyebaran teknologi dalam masyarakat berarti ada penyerapan dan pemanfaatan teknologi baru yang dapat meningkatkan kegiatan ekonominya.

e. Gejala Penolakan atau Penghindaran Akulturasi

Suatu masyarakat yang sedang dalam proses akulturasi berada pada masa transisi dari kebudayaan tradisional ke masyarakat masa kini. Banyak permasalahan yang dihadapi pada masa transisi ini mengakibatkan timbulnya ketegangan, konflik, dan kekacauan sosial dalam masyarakat tersebut. Kondisi seperti ini lebih terasakan oleh kelompok kolot. Bila kelompok kolot ini cukup kuat, mereka akan menentang terjadinya proses akulturasi, tetapi bila mereka lemah sehingga tidak dapat menentang, biasanya mereka akan menghindari.

Pada umumnya kelompok ini akan mencari kepuasan batin. Mereka seakan-akan menarik diri dari kehidupan nyata dan memimpikan kebahagiaan. Inilah awal dari gerakan kebatinan yang kontra akulterasi. Salah satu wujud gerakan kebatinan ini adalah gerakan ratu adil. Dari analisis para antropolog, gerakan ratu adil pada umumnya mempunyai empat aspek yaitu (1) aspek keagamaan, gerakan ini biasanya disiarkan oleh seorang guru yang bertindak sebagai pesuruh Tuhan, (2) aspek psikologi, dalam upacara-upacara mereka menujukan batin mereka pada alam khayal, (3) aspek ratu adil, dalam alam khayal mereka menunggu kedatangan seorang tokoh raja atau pemimpin yang adil yang membawa kebahagiaan, dan (4) aspek keaslian kebudayaan, karena ratu adil akan membawa kebahagiaan dengan mengembalikan adat-istiadat lama dan asli warisan nenek moyangnya yang telah dikacaukan oleh pengaruh baru.

Untuk memahami perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat perlu dikemukakan penyebab dari perubahan-perubahan tersebut. Menurut Morris Ginsberg (dalam Soekanto 1983: 26), faktor-faktor penyebab perubahan tersebut adalah:

- a. keinginan-keinginan secara sadar dan keputusan para pribadi,
- b. sikap tindak pribadi yang dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang berubah,
- c. perubahan struktur dan halangan struktur,
- d. pengaruh-pengaruh eksternal,
- e. pribadi-pribadi dan kelompok-kelompok yang menonjol,
- f. unsur-unsur yang bergabung menjadi satu,
- g. peristiwa-peristiwa tertentu,
- h. munculnya tujuan bersama.

Secara umum penyebab perubahan sosial budaya dibedakan atas dua golongan besar yaitu:

- a. Perubahan yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Perubahan ini antara lain meliputi:
 - 1) Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Pengetahuan yang semakin luas akan menghasilkan teknologi yang lebih baik, yang kemudian mengubah kehidupan manusia.

Misalnya, alat transportasi zaman dulu masih sangat sederhana, sekarang alat transportasi sudah menggunakan mesin yang canggih. Penemuan-penemuan baru akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan baik berupa teknologi maupun ide-ide, teori-teori, dalil, dan sebagainya ke masyarakat sehingga dikenal, diakui, dan selanjutnya diterima dan kemudian menimbulkan perubahan sosial.

2) Jumlah Penduduk

Masalah penduduk yang menimbulkan perubahan sosial budaya pada umumnya adalah pertambahan penduduk akibat terjadinya urbanisasi. Demikian juga berkurangnya jumlah penduduk pada daerah-daerah yang ditinggalkan oleh orang-orang yang berurbanisasi. Bagi penduduk yang berurbanisasi ke kota-kota mempunyai harapan bahwa kota lebih menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Hal ini dapat dipahami karena kota pada umumnya merupakan berbagai pusat kegiatan seperti industri, perdagangan, pendidikan, hiburan, dan sebagainya. Di sisi lain, urbanisasi akan menimbulkan ketidakseimbangan antara desa yang kekurangan atau kehilangan tenaga kerja dan kota yang menjadi bertambahnya jumlah penduduk. Akibat dari kondisi tersebut, di kota timbul persaingan dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup, muncul pengangguran, serta keamanan dan ketertiban menjadi rawan. Dengan demikian, di kota ada banyak kesenjangan sosial antara penduduk yang berasal dari desa yang memiliki budaya dan kebiasaan hidup pertanian dan gotong royong menghadapi kehidupan kota yang dinamis, cermat, berpola industri, lebih individual, dan warna kebudayaannya tidak kental.

3) Pertentangan

Adanya pertentangan atau konflik mengakibatkan nilai-nilai, norma-norma, adat istiadat yang telah lama dijadikan pedoman atau penuntun dalam bersikap maupun berperilaku akan menimbulkan perubahan sosial budaya. Hal ini terjadi apabila mereka beralih dari nilai-nilai, norma-norma, adat istiadat yang telah mereka laksanakan. Misalnya pandangan umum masyarakat Indonesia bahwa “makin banyak anak makin banyak rejeki”. Untuk saat ini, pandangan tersebut sudah tidak dapat diterima

karena kenyataan menunjukkan bahwa banyak anak berarti semakin besar beban yang harus ditanggung oleh keluarga.

- b. Perubahan yang berasal dari luar masyarakat. Perubahan ini dapat berupa:

1) Pengaruh Kebudayaan Masyarakat Lain

Perubahan sosial budaya dapat terjadi baik adanya interaksi langsung antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain maupun melalui komunikasi satu arah dengan media-media massa. Pada umumnya suatu masyarakat tidak langsung menerima budaya dari masyarakat lain, tetapi menyeleksi dulu baru kemudian menyerap unsur-unsur atau budaya masyarakat lain tersebut. Respons psikologis individu terhadap kontak antarbudaya (*cross cultural contact*), menurut Furnhan dan Bochner (dalam Usman Pelly, 1994:193) dibedakan menjadi empat kemungkinan yaitu (a) *Typed Passing*, individu menolak kebudayaan asli dan mengadopsi kebudayaan baru bila statusnya lebih tinggi, (b) *Typed Chauvinist*, individu menolak sama sekali kebudayaan asing, (c) *Typed Marginal*, mereka terombang-ambing antarkebudayaan asli dan kebudayaan yang baru/asing, dan (d) *Typed Mediating*, mereka menyatukan bermacam-macam identitas budaya, mempunyai keseimbangan integrasi dan memperoleh dua atau beberapa kebudayaan.

2) Peperangan

Dampak yang ditimbulkan dengan adanya perang baik antaranggota masyarakat maupun dengan masyarakat lain adalah perubahan sosial budaya yang pada umumnya mempunyai nilai negatif. Hal ini terjadi karena peralatan perang biasanya lebih canggih, sehingga mampu menghancurkan atau menyengsarakan pihak yang kalah.

3) Penyebab dari Alam

Perubahan sosial budaya dapat berlangsung ketika di masyarakat terjadi musibah atau bencana alam, misalnya banjir, tanah longsor, dan sebagainya yang mengakibatkan penduduk harus pindah ke tempat lain. Di tempat yang baru inilah mereka harus menyesuaikan diri dengan kondisi sosial budaya yang baru, sehingga nilai-nilai dan budaya yang telah lama dilaksanakan akan berubah atau berbaur dengan yang baru.

Di samping beberapa penyebab terjadinya perubahan sosial budaya dalam suatu masyarakat, terdapat pula faktor-faktor yang menghambat atau menolak terjadinya perubahan. Hal ini disebabkan antara lain: (1) masyarakat merasa ragu-ragu terhadap sesuatu yang baru, (2) rendahnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat sehingga mereka lebih menghendaki hal-hal yang sifatnya statis, (3) adanya kecenderungan lebih menyukai atau mempertahankan hal-hal yang lama. Demikian pula sebaliknya dalam suatu masyarakat, ada beberapa faktor yang mendorong untuk terjadinya perubahan sosial seperti (a) adanya sikap terbuka, (b) menyukai hal-hal yang baru, (c) mempunyai pengalaman yang luas, dan sebagainya.

Proses perubahan sosial budaya dapat berlangsung lambat atau juga dapat secara cepat tergantung pada kondisi masyarakatnya. Perubahan sosial budaya ada yang direncanakan dan ada pula yang tidak direncanakan. Menurut Rogers dan Shoemker (1987:16) perubahan sosial budaya yang terjadi di suatu masyarakat mengikuti tiga tahapan, yaitu sebagai berikut.

1. Tahap pertama terjadi invensi, yaitu proses di mana ide-ide baru diciptakan dan dikembangkan.
2. Tahap kedua, difusi, yaitu penyebaran atau pengkomunikasian ide-ide ke dalam sistem sosial.
3. Tahap ketiga, konsekuensi, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sosial sebagai akibat pengadopsian atau penolakan.

B. KESENJANGAN SOSIAL BUDAYA

Krisis yang melanda bangsa Indonesia sampai saat ini tidak hanya krisis ekonomi, tetapi sudah merupakan multikrisis, yang meliputi krisis sosial, politik, budaya, hukum, keamanan, dan sebagainya. Kondisi seperti ini tidak mudah untuk mengatasinya karena penyelesaian harus mencakup berbagai segi kehidupan. Di sisi lain, kerusuhan-kerusuhan sosial yang terjadi semakin memprihatinkan dan menambah berat krisis yang terjadi. Hal ini semakin memperlebar kesenjangan yang ada di dalam masyarakat. Sistem nilai yang ada dalam masyarakat seharusnya dapat berfungsi sebagai patokan berperilaku seperti yang

sudah disepakati atau ditentukan. Dengan kata lain, sistem nilai mestinya dapat menjadi pedoman yang melekat erat secara emosional pada diri setiap orang atau kelompok, sehingga menjadi tujuan hidup yang diperjuangkan. Oleh karena itu, mengubah sistem nilai manusia tidaklah mudah, dibutuhkan waktu, pikiran, dan energi yang tinggi. Dengan demikian, perubahan sosial budaya yang terjadi tidak akan sama antara orang yang satu dengan orang yang lain atau kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, tergantung dari kondisi lingkungan masing-masing. Hal ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial budaya.

Mencermati masalah kesenjangan sosial budaya dapatlah dilakukan dengan memahami masalah dasar dalam hidup manusia. Masalah dasar dalam hidup manusia ini menggambarkan adanya perbedaan dalam memaknainya, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial budaya di antara mereka. Ada lima masalah dasar dalam hidup manusia yang dikemukakan oleh Kluckhohn. Hal ini dapat dipahami dari tabel berikut.

Tabel 5.2. Lima Masalah Dasar yang Menentukan Orientasi Nilai Budaya

Masalah Dasar dalam Hidup	Orientasi Nilai Budaya		
	Konservatif	Transisi	Progresif
<ul style="list-style-type: none"> • Hakikat hidup • Hakikat kerja/karya • Hubungan manusia dengan waktu • Hubungan manusia dengan alam • Hubungan manusia dengan sesama 	<ul style="list-style-type: none"> • Hidup itu buruk • Kelangsungan hidup • Orientasi ke masa lalu • Tunduk kepada alam • Vertikal 	<ul style="list-style-type: none"> • Hidup itu baik • Kedudukan dan kehormatan/prestise • Orientasi ke masa kini • Selaras dengan alam • Horisontal/Kolegial 	<ul style="list-style-type: none"> • Hidup itu sukar, tetapi harus diperjuangkan • Mempertinggi prestise • Orientasi ke masa depan • Menguasai alam • Individual/mandiri

Berbagai kebudayaan mengkonsepsikan masalah universal ini dengan berbagai variasi. Masalah pertama mengenai hakikat hidup, ada kebudayaan yang menyatakan hidup itu buruk dan menyedihkan. Sebaliknya, ada banyak kebudayaan yang berpendapat bahwa hidup itu baik, konsep-konsep kebudayaan yang berbeda ini akan berpengaruh pada sikap dan perilaku manusia.

Masalah kedua mengenai hakikat kerja atau karya manusia. Ada kebudayaan yang memandang kerja itu sebagai usaha untuk kelangsungan hidup (*survival*) semata, sehingga kerja merupakan kewajiban. Namun ada kebudayaan lain yang berpendapat kerja untuk mencapai hasil atau mempertinggi prestasi.

Masalah ketiga kedudukan manusia dalam ruang dan waktu. Ada budaya yang memandang pentingnya masa lalu, tetapi ada yang melihat masa kini sebagai fokus usaha dalam perjuangannya; ada juga yang jauh melihat ke depan. Pandangan yang berbeda ini jelas sangat mempengaruhi perencanaan hidup masyarakatnya.

Masalah keempat hubungan masyarakat dengan alam sekitarnya. Ada yang percaya bahwa alam itu “angker” hal ini memperlambat perubahan sosial budaya. Akan tetapi, ada yang menganggap alam sebagai anugerah Tuhan untuk dikuasai manusia. Ada juga kebudayaan yang ingin mencari karunia dan keselarasan dengan alam. Cara pandang ini akan berpengaruh pada aktivitas masyarakat.

Masalah kelima mengenai hubungan antarmanusia. Dalam kebudayaan yang menekankan pada hubungan horizontal, antarindividu cenderung menekankan pada hak asasi, kebebasan, dan kemandirian. Dalam pengambilan keputusan, semua orang dalam kelompok terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Sebaliknya, pada kebudayaan yang menekankan hubungan vertikal, cenderung mengembangkan orientasi ke atas dengan senioritas, penguasa atau pemimpin. Orientasi ini banyak terdapat dalam masyarakat paternalistik. Pengambilan keputusan biasanya dibuat oleh atasan atau senior untuk semua anggota kelompok. Pandangan ini tentu sangat memengaruhi proses dinamika dan mobilitas sosial budaya masyarakatnya.

Kesenjangan sosial budaya yang ada dalam masyarakat dengan berorientasi pada lima masalah kehidupan manusia menggambarkan bahwa lambat atau cepat terjadinya perubahan sosial budaya dipengaruhi oleh kondisi masyarakat. Semakin jauh jarak antara kondisi sosial budaya antar anggota masyarakat ataupun antarmasyarakat, semakin jauh pula kesenjangan yang dialami.

C. RANGKUMAN

Perubahan sosial budaya merupakan sesuatu yang niscaya dalam masyarakat. Perubahan sosial budaya disebabkan oleh beberapa faktor berikut. *Pertama*, Keinginan-keinginan secara sadar dan keputusan para pribadi. *Kedua*, Sikap tindak pribadi yang dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang berubah. *Ketiga*, Perubahan struktur dan halangan struktur. *Keempat*, Pengaruh-pengaruh eksternal. *Kelima*, Pribadi-pribadi dan kelompok-kelompok yang menonjol. *Keenam*, unsur-unsur yang bergabung menjadi satu. *Ketujuh*, Peristiwa-peristiwa tertentu. *Kedelapan*, Munculnya tujuan bersama.

Perubahan sosial budaya juga dapat disebabkan oleh faktor internal, yaitu perkembangan iptek, jumlah penduduk, serta pertentangan dan faktor eksternal, meliputi pengaruh budaya masyarakat lain, peperangan, dan alam.

Perubahan sosial budaya yang terjadi di suatu masyarakat mengikuti tiga tahapan, yaitu: (1) tahap pertama terjadi invensi yaitu proses di mana ide-ide baru diciptakan dan dikembangkan, (2) tahap kedua, difusi yaitu penyebaran atau pengkomunikasian ide-ide ke dalam sistem sosial, (3) tahap ketiga, konsekuensi yaitu perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sosial sebagai akibat pengadopsian atau penolakan.

BAB VI

INTEGRASI DAN KONFLIK

Untuk mencapai keadaan seimbang, tidaklah mudah bagi sistem sosial atau masyarakat apalagi jika masa perjalanannya relatif masih baru. Integrasi menjadi dambaan bagi masyarakat mana pun, baik masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan. Hal ini penting karena dengan adanya integrasi, segala potensi dan energi anggota masyarakat dapat diarahkan untuk mencapai cita-cita dan tujuan bersama. Namun tidak jarang masyarakat yang sudah lama sekalipun tidak dapat menghindari terjadinya konflik, baik konflik antarindividu, konflik antara individu dengan kelompok, dan konflik antara kelompok dengan kelompok. Seperti halnya integrasi, konflik juga merupakan realitas yang ada dalam masyarakat yang tidak bisa dihindari kehadirannya. Persoalan integrasi dan konflik dalam masyarakat akan dibahas dalam bab VI. Dalam Bab ini selanjutnya akan dijelaskan konsep dasar integrasi dan konflik, teori integrasi dan teori konflik, serta menunjukkan cara mengelola atau menajemen konflik.

A. KONSEP DASAR INTEGRASI DAN KONFLIK

1. Integrasi

Istilah integrasi berasal dari kata latin “*Integrate*”, artinya memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dari kata yang sama dibentuk kata sifat “*Integer*” yang berarti utuh. Dengan demikian, integrasi berarti membuat unsur-unsur tertentu menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh.

Sesuai dengan pengertian di atas, integrasi sosial berarti membuat masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang bulat. Integrasi sosial

diperlukan baik untuk masyarakat mikro, masyarakat meso, dan masyarakat makro. Sebuah keluarga yang berantakan dapat dibangun kembali atau dipersatukan karena adanya komitmen baru dalam perkawinan merupakan contoh integrasi sosial pada masyarakat mikro. Sebuah organisasi politik yang berada di ambang perpecahan dapat dipersatukan kembali berkat persatuan pimpinannya dalam mengimplementasikan ideologi organisasi, merupakan contoh integrasi sosial dalam masyarakat meso. Masyarakat Indonesia yang berlatar belakang majemuk dalam hal agama, adat istiadat, bahasa, suku bangsa, dan kebudayaan dapat dipersatukan karena digunakan ideologi Pancasila sebagai sistem nilai bersama masyarakat, merupakan contoh integrasi sosial dalam masyarakat makro.

Makin tinggi tingkatan masyarakatnya, makin tidak mudah upaya mewujudkan integrasinya. Dalam masyarakat makro, dibutuhkan beberapa faktor pendorong untuk mengikat unsur-unsurnya agar mereka dapat dipersatukan. Faktor-faktor itu diantaranya sebagai berikut.

1. Daerah-daerah yang memiliki kesamaan dalam hal flora fauna, klimatologi, dan hidrologis. Kesamaan unsur-unsur tersebut dapat membedakan suku yang satu dengan yang lain.
2. Pengalaman yang sama pada masa silam, suku-suku bangsa yang berbeda-beda di daerah-daerah yang berlainan pada masa lampau pernah mengalami suka duka yang sama dan masih tetap mengesan dalam hidup mereka. Pengalaman yang sama, seperti menderita karena bencana alam, peperangan, penjajahan, dan lain-lain semakin mendekatkan suku yang satu dengan lainnya.
3. Kemauan bersama untuk menjadi satu bangsa dengan satu sosio-budaya yang sama tanpa mengorbankan nilai-nilai budaya kedaerahan. Mula-mula kemauan bersama tersebut dicetuskan oleh sebagian kecil (golongan elit) dari bangsa tersebut, dan selanjutnya melalui proses penyadaran kepada golongan terbesar yang lain dalam waktu tertentu, gagasan persatuan, dan kesatuan dapat diterima dan disetujui bersama.
4. Adanya ideologi dan norma yuridis yang sama dalam ungkapan politik, terdapat ideologi dan Undang-Undang Dasar yang sama

yang menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan individu (warga negara), masyarakat, dan negara bangsa.

Integrasi makro sosial memiliki tujuan akhir, yaitu fungsionalisasi dan prestasi yang lebih tinggi (Hendropuspito, 1989: 379). Hal ini sesuai dengan pandangan fungsionalisme yang menyatakan bahwa suatu keseluruhan mempunyai bagian-bagian yang masing-masing memiliki fungsi sendiri. Fungsi-fungsi dari bagian tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling mengkait dan terpadu menuju tercapainya suatu prestasi besar yang selaras dengan besarnya kesatuan yang mereka inginkan bersama. Prestasi besar tidak hanya dilakukan oleh bagian-bagian untuk kepentingan kesatuan yang lebih besar. Prestasi besar tersebut juga dibutuhkan oleh bagian-bagian demi kelangsungan hidupnya. Prestasi masyarakat besar yang telah diintegrasikan adalah prestasi sosial budaya, yang mencakup prestasi di bidang budaya material, budaya spiritual, dan budaya intelektual. Tujuan lain yang lebih mendesak dari integrasi makro sosial adalah mencegah terjadinya konflik.

Konflik sering terjadi pada masyarakat majemuk atau heterogen. Suku-suku atau kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat tersebut sering berkonflik, entah karena berebut sumber daya atau karena berbeda tujuan. Pemecahan terhadap masalah tersebut tidaklah mudah. Cara yang paling memungkinkan untuk ditempuh adalah berinteraksi dengan kesatuan yang lebih besar yang dipandang mampu memberikan rasa aman dan perlindungan. Kesatuan ini merupakan badan baru di mana masing-masing bagian atau kelompok sosial menemukan tempat sebagai bagian integral. Konflik yang semula negatif mengalami transformasi ke arah konsolidasi dan integrasi.

Masyarakat menginginkan integrasi baik bersorak horizontal maupun vertikal. Dalam masyarakat besar terdapat banyak bagian dengan satuan-satuan sejenis yang mengusahakan kepentingan yang sama. Apabila kesatuan-kesatuan tersebut dikelola secara terpadu dalam satu organisasi setara, integrasi seperti itu dinamakan integrasi horizontal. Jika usaha tersebut berhasil, prestasi akan meningkat. Namun integrasi

horizontal tersebut belum sempurna, masih perlu diadakan integrasi vertikal dari satuan-satuan kegiatan yang sama meskipun taraf tinggi rendahnya berbeda.

Integrasi merupakan kebutuhan yang tak terelakkan bagi masyarakat besar, namun dalam realisasinya tidak dapat dipaksakan. Ada faktor penting yang memainkan peran utama dalam mewujudkan integrasi mesyarakat besar yaitu konsensus bersama dari semua pihak yang terlibat di dalamnya. Kesepakatan bersama tersebut terutama menyangkut ide-ide pokok atau garis-garis besar aturan permainan yang menjadi panduan bagi partisipan dalam masyarakat besar tersebut.

Masyarakat modern Indonesia sebagai contoh riil dari masyarakat makro, memerlukan tidak hanya integrasi statis, tetapi juga integrasi dinamis. Integrasi statis adalah keadaan kesatuan dan persatuan sejumlah kelompok etnis dan kelompok sosial yang bhinneka di mana masing-masing kelompok mendapat tempat yang sesuai dalam struktur dan fungsi sosio-budaya pada tingkat baru yang lebih tinggi untuk jangka waktu relatif lama (Hendropuspito, 1989: 382). Integrasi dinamis didefinisikan sebagai keadaan kesatuan dan persatuan sejumlah kelompok etnis dan kelompok sosial beserta sistem sosio-budaya mereka dalam struktur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan fungsinya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berubah-ubah demi tercapainya tujuan bersama (Hendropuspito, 1989: 382).

Penciptaan integrasi masyarakat membutuhkan dua unsur esensial, yaitu unsur-unsur sosiologis dan unsur-unsur psikologis-sosial (Hendropuspito, 1989: 384–386).

Unsur-unsur sosiologis yang berfungsi sebagai unsur material meliputi (1) sejumlah kelompok etnis, atau kelompok kepentingan yang berlainan bertempat tinggal di daerah-daerah yang relatif berdekatan, (2) terdapat sejumlah satuan sosio-budaya yang heterogen, (3) adanya kesamaan dalam heterogenitas yang terjadi karena faktor pengalaman historis, kesamaan faktor geografis dan kesamaan nasib.

Unsur-unsur psikologis-sosial sebagai unsur formal, yaitu konsensus untuk berintegrasi yang mencakup: (1) struktur penempatan nilai-nilai

sosio-budaya secara garis besar sehingga kebutuhan kultural semua pihak yang bersangkutan diharapkan dapat dipenuhi sebaik-baiknya, (2) pembagian hak dan kewajiban secara garis besar dalam sistem peraturan umum kesatuan baru, sehingga semua pihak dapat mengatahui dengan jelas batas-batas kompetensi masing-masing dan bagian hasil yang dapat diharapkan dari kerja sama tersebut, (3) konsensus tentang kesempatan untuk ambil bagian secara *de jure* dan *de facto* dalam kegiatan (fungsi) masyarakat besar yang dibangun bersama, (4) dalam masyarakat hasil integrasi yang terdiri dari suku-suku yang berbeda, perlu adanya konsensus yang mengatur pemberian hak yang sama kepada semua suku untuk berperan serta dalam kegiatan umum nonpemerintahan.

Untuk mendukung penciptaan integrasi yang kokoh dalam masyarakat besar (makro), seperti halnya di Indonesia dibutuhkan faktor-faktor penguat sebagai berikut: (1) pembinaan kesadaran akan integrasi dan partisipasi, (2) pelaksanaan asas keadilan sosial dan asas subsidiaritas secara murni, (3) pengawasan sosial secara intensif, (4) adanya tekanan dari luar, (5) adanya bahasa persatuan, (6) adanya lambang persatuan. Dari enam faktor tersebut, lima di antaranya perlu dikembangkan terus menerus mengingat kondisi Indonesia yang rawan konflik dan satu faktor lainnya, yaitu tekanan dari luar hanya signifikan ketika ada negara asing yang melakukan invasi atau intervensi terhadap kepentingan nasional Indonesia.

2. Konflik

Seperti halnya konsensus, konflik juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Ia berlaku dalam semua aspek relasi sosial yang bentuknya bisa berupa relasi antarindividu, relasi individu dengan kelompok ataupun antara kelompok dengan kelompok.

Istilah konflik disinonimkan dengan istilah lain, seperti *competition*, *disharmony*, *tensions*, *antagonism*, *friction*, *hostility*, *struggle*, atau *controversy* (Michell, 1994: 1).

Cooley menyamakan konflik dengan *tensions*, *strains* atau *psychological malfunctioning* (Coser, 1964: 20).

Putnam dan Pook sebagaimana dikutip Sujak (1990: 150) mengartikan konflik sebagai interaksi antarindividu, kelompok, atau organisasi yang membuat tujuan atau arti yang berlawanan dan merasa bahwa orang lain sebagai pengganggu potensial terhadap pencapaian tujuan mereka.

Coser mendefinisikan konflik sebagai nilai-nilai atau tuntutan yang berkenaan dengan status kekuasaan, pengumpulan sumber materi atau kekayaan yang langka, di mana pihak-pihak yang berkonflik tidak hanya ditandai oleh perselisihan, tetapi juga berusaha untuk memojokkan, merugikan atau kalau perlu menghancurkan pihak lawan (Syamsu, dkk., 1991: 57).

Konflik merupakan sesuatu fenomena wajar dan alamiah yang terjadi pada masyarakat mana pun, di mana pun dan kapan pun. Ia hadir di tengah-tengah masyarakat baik masyarakat yang bertipe tradisional maupun masyarakat yang bercorak modern (industri). Dalam pandangan Mitchell (1994: 7) konflik adalah sesuatu yang tak dapat dielakkan karena *it can originate in individual and group reactions to situations of scarce resources; to division of function within society; and to differentiation of power and resultant competition for limited supplies of goods, status valued roles and power as-an-end-in-itself.*

Menurut Watkins (dalam Chandra 1992: 20–21), konflik terjadi bila terdapat dua hal, (1) sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang secara potensial dan praktis operasional dapat saling menghambat, (2) ada suatu sasaran yang sama-sama dikejar oleh kedua pihak, namun hanya salah satu pihak yang mungkin akan mencapainya.

Konflik yang terjadi pada masyarakat mana saja, tak terkecuali masyarakat modern (industri) dapat berarti negatif maupun positif. Pihak yang memandang konflik sebagai sesuatu yang negatif, akan melihat orang atau kelompok lain sebagai oposan atau musuh, sehingga mereka sejauh mungkin menghindari konflik. Pihak yang menolak konflik yakin bahwa konflik bersifat destruktif dan membahayakan pencapaian tujuan kelompok atau organisasi. Pihak yang memandang konflik sebagai sesuatu yang negatif akan memiliki sikap selalu ingin menang sebagai prioritas utama. Di lain pihak, terdapat orang atau kelompok yang menyadari

bahwa konflik merupakan bagian integral dari kehidupan organisasi atau masyarakat. Konflik dipandang baik karena dapat merangsang orang untuk memperoleh pemecahan masalah lebih baik. Bahkan di kalangan manajer, konflik diyakini mampu meningkatkan prestasi organisasi.

Schein berpendapat bahwa konflik dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan prestasi anggota dan sekaligus prestasi kelompok (Syamsu, dkk., 1991: 58). Konflik diyakini menyumbangkan banyak hal, seperti kelestarian kelompok, menambah kohesivitas kelompok, meningkatkan kedewasaan anggota, merancang pola komunikasi yang lebih terbuka, mendinamisasikan kelompok dan merangsang anggota untuk memajukan kelompok.

Masyarakat selain dapat diintegrasikan melalui konsensus atau kerja sama, juga dapat dikembangkan melalui mekanisme konflik. Sebagaimana dikatakan Cooley (dalam Cooser, 1964: 18) bahwa konflik dan kerja sama merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Konflik sebagaimana ditulis Park, cenderung membawa integrasi (Cooser, 1964: 20). Coser (1964: 141) menulis bahwa dalam masyarakat modern, konflik akan mendorong banyak asosiasi untuk mereduksi atau mengurangi isolasi sosial atau atomisasi.

B. TEORI INTEGRASI DAN KONFLIK

1. Teori Integrasi

Dalam membahas persoalan integrasi masyarakat digunakan teori struktural-fungsional dan teori konsensus. Teori struktural-fungsional yang dipakai adalah teori struktural fungsional aliran Amerika dan Inggris. Tokoh-tokohnya di antaranya Malinowski, Talcott Parson, Robert K. Merton, Herbert Spencer, Radcliffe-Brown, dan Evans-Pritchard sedangkan teori konsensus akan meminjam pemikiran tunggal Emile Durkheim.

Cancian (dalam Zeitlin, 1995: 14–15) membedakan berbagai pendekatan fungsional berupa tiga orientasi dasar dalam menganalisis gejala-gejala sosial atau masyarakat. Tiga orientasi tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Pendekatan tradisional yang didasarkan pada suatu anggapan bahwa seluruh struktur sosial yang utama sebagaian besar beroperasi untuk menjaga integrasi atau adaptasi sistem sosial yang besar.
- b. Pendekatan sosiologis, yakni berlandaskan pada beberapa konsep dan asumsi sosiologi secara umum. Orientasi ini sama dengan analisis sosiologi murni dan sederhana sehingga tidak membutuhkan nama khusus. Orientasi ini mengarah pada suatu gambaran yang teliti, yakni menggali hubungan yang menentukan antara berbagai variabel sosiologis yang signifikan, beberapa pola dan keteraturan secara umum.
- c. Pendekatan Sibernetik, yang didasarkan pada model pengaturan diri atau sistem keseimbangan. Model yang terakhir ini tidak menjelaskan suatu pola melalui akibat atau konsekuensinya. Cincian menyebutnya fungsionalisme formal.

Struktur sosial merupakan suatu pola hubungan di dalam setiap satuan sosial yang mapan dan memiliki identitas sendiri. Struktur tersebut memiliki fungsi atau kegunaan. Sesuai pendekatan tradisional, setiap struktur sosial memiliki fungsi utama, yaitu menjaga integritas atau keutuhan dan adaptasi sistem sosial yang lebih besar. Malinowski memahami masyarakat melalui kacamata kebudayaan dimana semua unsur kebudayaan merupakan bagian yang penting dalam masyarakat karena unsur tersebut memiliki fungsi tertentu (Garna, 1996: 55). Bagi Malinowski, setiap pola adat kebiasaan merupakan sebagian dari fungsi dasar dalam kebudayaan. Jika masyarakat dilihat sebagai gabungan dari sistem sosial, sistem tersebut menyangkut unsur-unsur yang berkaitan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti keselamatan, istirahat, pakaian, makanan, tempat tinggal, dan lainnya. Dalam memenuhi kebutuhan dasar tersebut, manusia yang satu dengan yang lain bekerja sama dan berkelompok. Mereka menggunakan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama. Mereka membentuk institusi sosial sebagai alat kontrol sekaligus dinamika masyarakat, yang kesemuanya itu dibutuhkan agar elemen-elemen yang ada di masyarakat dapat dipersatukan.

Talcott Parson, sebagaimana dikutip Garna (1996: 57) memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang harus memenuhi empat

syarat atau azas agar sistem tersebut berfungsi, yaitu (1) penyesuaian masyarakat dengan lingkungan, (2) anggota masyarakat harus sepakat akan ketentuan untuk memilih, mengetahui, dan memahami tujuan kolektif dengan menyusun struktur tertentu, (3) penentuan anggota masyarakat agar mereka dapat memainkan peranan dan mematuhi nilai-nilai serta menyelesaikan konflik, (4) terjadi integrasi dari keadaan yang ada dalam masyarakat dan institusi dikontrol oleh unsur atau bagian tertentu agar sistem sosial terpelihara.

Sistem sosial akan berfungsi dengan baik atau dapat dijamin eksistensinya jika sistem tersebut memenuhi empat syarat, yaitu (1) adaptasi, (2) kemungkinan mencapai tujuan, (3) integrasi anggota-anggotanya, dan (4) kemampuan mempertahankan identitasnya terhadap kegoncangan dan ketegangan yang timbul dari dalam (Veeger, 1993: 207).

Dengan menggunakan paradigma struktural fungsional, Aberle, dkk., mengembangkan konsep prasyarat fungsional bagi masyarakat, yaitu (1) penyediaan hubungan yang memadai terhadap lingkungan dan untuk rekrutmen berdasarkan jenis kelamin, (2) perbedaan peranan dan tugas, (3) komunikasi, (4) orientasi-orientasi kognitif yang terbagi, (5) seperangkat tujuan (cita-cita) yang terakumulasi dan terbagi, (6) aturan normatif mengenai sarana, (7) peraturan tentang ungkapan afeksi, (8) sosialisasi, (9) kontrol yang efektif terhadap bentuk-bentuk perilaku yang mengganggu (Ekeh, 1974: 70).

Kelangsungan sistem sosial dalam pandangan Merton lebih didasarkan pada adaptasi tingkah laku dan peristiwa sosial dalam menyesuaikan sistem sosial tertentu, misalnya pola aturan sosial dalam politik dan keluarga sebagai bagian dari sistem sosial yang mapan dan tersusun. Merton menyusun tiga andaian dalam analisis fungsional, yaitu (1) satuan-satuan masyarakat berfungsi yang mengandaikan bahwa semua kepercayaan umum, unsur-unsur kebudayaan atau kebiasaan yang umum seperti institusi sosial dan aktivitas sosial berfungsi bagi keseluruhan sistem sosial atau sistem kebudayaan, (2) fungsional itu bersifat sejagad atau universal, di mana unsur-unsur organisasi sosial

atau tingkah laku harus memenuhi fungsi yang berfaedah apabila masih ada (berwujud) dalam jangka waktu tertentu, (3) tanpa terkecuali, dua konsep penting yaitu kebutuhan yang berfungsi dan institusi sosial yang dalam perspektif fungsional mengungkapkan suatu pendekatan tentang kehidupan sosial atau kehidupan diri kita sendiri dalam suatu masyarakat (Garna, 1996: 58–59).

Jika Parson memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial, Spencer melihatnya sebagai suatu organisme. Masyarakat diandaikan sebagai organisme hidup yang dilihat dari konsep biologi, terdiri oleh struktur dan fungsi. Masyarakat sebagai suatu sistem teratur dan berfungsi dengan unsur-unsur atau bagian-bagiannya berada dalam keadaan serasi; sedangkan struktur dalam masyarakat terwujud oleh hubungan yang tetap dan serasi di antara bagian-bagian tersebut. Organisme yang membentuk struktur masyarakat dan bagaimana ia berfungsi dalam meneruskan kehidupan organisme, menurut Spencer dapat dijelaskan dengan cara berikut: (1) masyarakat, seperti halnya organisme dapat berkembang, (2) organisme dan masyarakat berbeda struktur, tetapi sama berlaku perubahan pada fungsi, (3) pertambahan ukuran organisme dan masyarakat akan berarti berbeda karena bertambah kompleks, (4) setiap unsur dan bagian secara keseluruhan saling bergantung, karena perubahan dalam satu bagian akan memengaruhi unsur atau bagian lainnya, (5) baik pada organisme maupun pada masyarakat, setiap unsur atau bagian itu sendiri merupakan suatu organisme atau masyarakat kecil (mikro), (6) kehidupan seluruh sistem dapat hancur, tetapi unsur atau bagian akan terus berlangsung dalam kurun waktu tertentu (Garna, 1996: 60).

Radcliffe-Brown menganggap struktur sosial sebagai jaringan sosial yang benar-benar terwujud. Ia merupakan kumpulan dan hubungan yang saling tergantung di antara gejala-gejala yang membentuk unsur-unsur sosial budaya (Garna, 1996: 61). Semua posisi atau status sosial yang berlainan akan membentuk bagian-bagian dalam struktur sosial tersebut. Kelangsungan sosial ditentukan oleh orang yang satu dengan lainnya dikontrol oleh aturan atau norma, dan institusi sosial. Dengan

demikian, struktur sosial adalah penataan orang dalam institusi sosial yang dikontrol oleh norma atau menurut relasi sosial yang ditentukan.

Berbeda dengan pendapat Malinowski dan Brown, Evans Pritchard (dalam Garna, 1996: 63) memandang masyarakat sebagai suatu sistem moral. Dalam institusi sosial, yang dipentingkan bukan hanya fungsi, melainkan juga ide dan nilai-nilai kemanusiaan yang dihasilkan secara sadar. Tingkah laku dalam institusi sosial tidak ditentukan oleh tuntutan fungsional dari sistem sosial, tetapi sebaliknya dipahami dalam lingkung kepercayaan, nilai-nilai dan perasaan para individu.

Teori-teori di atas memberikan pemahaman bahwa masyarakat akan dapat berkembang dengan baik jika dipenuhi prasyarat-prasyarat fungsional, misalnya Malinowski dengan unsur kebudayaannya, Talcott Parson dengan sistem sosialnya, Spencer dengan teori organisme, Brown dengan model jaringan sosial, dan Prichard dengan sistem moralnya.

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa teori struktural-fungsional memiliki asumsi dasar, yaitu seluruh struktur sosial atau setidaknya yang diprioritaskan memberikan sumbangan terhadap suatu integrasi dan adaptasi sistem yang berlaku. Kelangsungan struktur atau pola yang telah ada dijelaskan melalui konsekuensi-konsekuensi atau efek-efek yang keduanya diduga dan perlu serta bermanfaat terhadap permasalahan masyarakat.

Masalah integrasi masyarakat selain dapat didekati dengan menggunakan paradigma *ang* dikembangkan dalam teori struktural-fungsional, dapat pula dipahami dengan memakai teori konsensus dari Emile Durkheim. Emile Durkheim (1858–1917) memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap diterimanya sosiologi sebagai sebuah disiplin otonom. Durkheim percaya bahwa memperoleh pengetahuan dalam ilmu tentang masyarakat dapat memberikan sumbangan yang penting dalam menegakkan dan memperkuat dasar-dasar moral masyarakat. Sepanjang hidupnya, perhatian Durkheim terhadap solidaritas dan integrasi sosial dilatarbelakangi oleh keadaan keteraturan sosial yang goyah pada masa republik ketiga selagi dia masih muda.

Asumsi umum yang paling fundamental yang mendasari pendekatan Durkheim terhadap sosiologi adalah gejala sosial itu riil dan memengaruhi kesadaran individu serta perilaku yang berbeda dari karakteristik psikologis, biologis, atau karakteristik individu lainnya (Johnson, 1994: 74). Dalam kaitan ini, Durkheim memperkenalkan konsep sosiologi yang cukup valid guna memahami masyarakat, yaitu fakta sosial. Menurut Durkheim, fakta sosial adalah cara-cara bertindak, berpikir, dan merasa yang berada di luar individu dan dimuati dengan sebuah kekuatan memaksa, karenanya hal-hal itu mengontrol individu (Campbell, 1994: 168). Fakta sosial tersebut, menurut Durkheim, berada di luar diri individu, dalam arti bahwa fakta itu datang kepadanya dari luar dirinya sendiri dan menguasai tingkah laku individu.

Berdasarkan konsep fakta sosial, Durkheim menjelaskan masyarakat sebagai sebuah fenomena moral atau normatif, di mana para individu diatur tingkah lakunya melalui sebuah sistem yang dipaksakan atau sistem eksternal yang memaksakan nilai-nilai dan aturan kepadanya. Individu melaksanakan kewajiban-kewajiban menurut bahasa, hukum, dan adat istiadat masyarakatnya. Semuanya itu merupakan fakta-fakta sosial yang tidak diciptakannya, melainkan dengan fakta sosial itu, individu harus menyesuaikan diri terhadapnya.

Dengan paradigma positivisme, Durkheim mendekati masyarakat sebagai sebuah kenyataan organik independen, yang memiliki hukum-hukum, perkembangan, dan hidupnya sendiri (Campbell, 1994: 170). Dalam masyarakat, konsensus mengenai nilai-nilai hidup manusia diperlukan untuk kelangsungan hidup masyarakat.

Pandangan Durkheim mengenai manusia dan masyarakat bukanlah konsep yang berdiri sendiri, terpisah satu dengan lainnya. Dalam pandangan Durkheim, tiap orang (manusia) lahir dalam suatu lingkungan sosio-budaya tertentu yang dialami seolah-olah datang dari luar dan tidak tergantung dari keberadaan individu tersebut. Masyarakat menyampaikan kepada tiap-tiap anggota baru semacam naskah yang berisi peranan-peranan yang diharapkan dari individu. Para individu lebih banyak menyesuaikan diri atau bersifat konformis bahkan konservatif,

ketimbang sebagai pembaharu atau bahkan pemberontak. Masyarakat memiliki semacam “*pouissance imperative et coercitive*”, yakni sebagai suatu kenyataan (fakta) sosial yang dari luar menekan individu dan mengatur perilakunya (Veeger, 1993: 142).

Masyarakat dengan unsur kebudayaan dan struktur sosial (yang di dalamnya menyediakan peranan yang harus dimainkan individu) dibatinkan oleh individu dan menjadi bagian kepribadiannya. Para individu bergaul satu dengan lainnya dan dari interaksi atau kerja sama antarindividu, lahirlah suatu kesadaran kolektif yang melampaui kesadaran-kesadaran individual. Kesadaran kolektif ini terdiri dari sejumlah kepercayaan, perasaan, norma, dan tekad yang dibagi bersama (Veeger, 1993: 144). Nilai-nilai yang menjadi muatan kesadaran kolektif dibatinkan dan memaksa individu, sekalipun pemaksaannya tidak langsung disarankan. Setiap kali individu melanggar nilai-nilai dan norma-norma kolektif timbul perasaan bersalah atau ketegangan dalam batin. Nilai-nilai tersebut mempunyai wewenang moral yang berperan melalui batin individu.

Konsep lain dari Durkheim yang erat kaitannya dengan persoalan integrasi masyarakat adalah solidaritas sosial. Sumber utama mengenai tipe-tipe yang berbeda dalam solidaritas dan sumber-sumber struktur sosialnya diperoleh dari buku Durkheim berjudul *The Division of Labor in Society*. Buku ini pada prinsipnya menganalisis pengaruh (fungsi) kompleksitas dan spesialisasi pembagian kerja dalam struktur sosial dan perubahan-perubahan yang diakibatkannya dalam bentuk solidaritas sosial, di mana perubahan tersebut mentransformasi solidaritas mekanik ke solidaritas organik. Durkheim menggunakan istilah solidaritas mekanik dan organik untuk menganalisis masyarakat secara keseluruhan.

Solidaritas mekanik didasarkan pada suatu kesadaran kolektif bersama yang menunjuk pada totalitas kepercayaan-kepercayaan dan sentimen-sentimen bersama yang rata-rata ada pada warga masyarakat yang sama itu (Johnson, 1994: 183). Solidaritas mekanik memiliki ciri khas: (1) ruang lingkup dan kerasnya hukum-hukum yang bersifat menekan (represif), (2) solidaritas mekanik didasarkan pada suatu tingkat

homogenitas yang tinggi dalam kepercayaan dan sentimen-sentimen. Kepercayaan yang sama dan perasaan yang sama mempersatukan orang atau individu-individu menjadi masyarakat. Kesatuan sosial ini disebut mekanik, karena anggota-anggotanya secara spontan cenderung kepada suatu pola hidup bersama yang sama. Solidaritas mekanik ini biasanya berlaku pada masyarakat tradisional atau kuno.

Masyarakat modern disatukan oleh solidaritas organik (Veeger, 1993: 147). Solidaritas ini didasarkan pada tingkat saling ketergantungan yang tinggi. Saling ketergantungan bertambah sebagai hasil dari bertambahnya spesialisasi dalam pembagian pekerjaan yang memungkinkan dan menggairahkan bertambahnya perbedaan. Justru perbedaan-perbedaan inilah yang membuat para individu bermasyarakat. Durkheim memakai istilah organis di bawah pengaruh organisme khususnya sosiologi Comte. Sebagaimana organ-organ yang berlainan fungsinya menyokong dan menjamin seluruh kehidupan badan, demikian juga perasaan dan tindakan sosial yang berlainan menyangga masyarakat. Kesadaran kolektif yang demikian penting dalam masyarakat bersolidaritas mekanik, menjadi tidak begitu penting pada masyarakat organik karena dasar keteraturan sosial justru terletak pada ketergantungan fungsional. Tentu saja masyarakat individualitas, pluralitas, dan modern tidak akan dapat bertahan tanpa adanya kesadaran kolektif, tetapi kesadaran tersebut lebih bercorak abstrak dan universal. Jika masyarakat dengan solidaritas mekanik lebih banyak dikendalikan oleh hukum yang bersifat represif, seperti hukum pidana; masyarakat dengan solidaritas organik lebih banyak berlaku hukum perdata atau hukum resitutif. Hukum tersebut tidak dimaksudkan untuk menghukum atas nama masyarakat atau membala dendam, melainkan untuk memulihkan atau melindungi hak-hak individual.

1. Teori Konflik

Dalam realitasnya, masyarakat modern tidak hanya bisa dilihat dari perspektif struktural-fungsional dan teori konsensus yang menekankan pada integrasi, tetapi juga harus dipandang dari sisi lain, yaitu muncul dan berkembangnya diferensiasi yang melahirkan konflik

atau perpecahan sebagai akibat ketidakmampuan masyarakat (sistem sosial) memenuhi (mengakomodasi) tuntutan dari berbagai komponen dalam sistem sosial tersebut. Perkembangan masyarakat yang tidak selalu menyatu (integrasi), tetapi juga sering memecah atau memisah menjadikan teori konflik relevan dalam menganalisis perkembangan masyarakat kontemporer. Kepustakaan klasik yang membahas konflik dalam masyarakat, di antaranya Jessie Bernard dengan bukunya *The Sociological Study of Conflict in Industrial Society* (1957). Dalam kaitannya dengan politik kepartaian dan hubungan antarbangsa, terdapat karya menonjol, yaitu *The Structure of International Conflict* yang ditulis oleh C.R. Mitchell.

Untuk memahami masyarakat secara utuh (dapat berintegrasi sekaligus juga mengalami konflik), Percy Cohen sebagaimana dikutip oleh Craib (1986: 91) membandingkan dua teori yang saling bertentangan, tetapi dapat dipakai untuk mengkaji secara memadai eksistensi masyarakat, yaitu teori konsensus dan teori konflik, seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.1. Perbandingan Teori Konsensus dan Teori Konflik

No.	Teori Konsensus	No.	Teori Konflik
1.	Norma-norma dan nilai-nilai adalah unsur-unsur dasar dari kehidupan sosial.	1.	Kepentingan adalah unsur dari kehidupan sosial
2.	Kehidupan sosial melibatkan komitmen	2.	Kehidupan sosial melibatkan dorongan
3.	Masyarakat perlu kohesif	3.	Kehidupan sosial perlu terbagi
4.	Kehidupan sosial tergantung pada solidaritas	4.	Kehidupan sosial melahirkan oposisi
5.	Kehidupan sosial didasarkan pada repositas dan kerja sama	5.	Kehidupan sosial melahirkan konflik struktural
6.	Sistem-sistem sosial bertahan pada konsensus	6.	Kehidupan sosial melahirkan kepentingan bagian-bagian
7.	Masyarakat mengenal otoritas legitimasi	7.	Diferensiasi sosial melibatkan kekuasaan
8.	Sistem-sistem sosial diintegrasikan	8.	Sistem sosial tidak terintegrasi dan ditimpak oleh kontradiksi-kontradiksi
9.	Sistem sosial cenderung untuk bertahan lama	9.	Sistem-sistem sosial cenderung untuk berubah

Dari dua teori di atas tidak menunjukkan bahwa yang satu lebih baik dari yang lainnya. Setiap teori berurusan dengan suatu rangkaian masalah yang berbeda. Keduanya menggunakan konsep yang sama, tetapi dalam cara yang berlawanan di mana diakui bahwa setiap unsur sosial memiliki suatu fungsi sekaligus juga disfungsi dan konsensus sekaligus juga konflik. Dalam bahasa Parson, bagaimanapun tidak ada suatu teori sistematis yang membahas segala sesuatu dan teori konflik hanyalah salah satu cara untuk melihat dunia (Craib, 1986: 92).

Konflik, menurut Coser, adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kuasa, dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi, di mana pihak-pihak yang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, melainkan juga memojokkan, merugikan, atau

menghancurkan lawan mereka (Veeger, 1993: 211). Konflik sebagai sebuah fenomena sosial yang tak dapat dielakkan karena secara alamiah, individu, atau kelompok bereaksi terhadap situasi kelangkaan sumber daya, sebagai akibat pembagian fungsi dalam masyarakat, diferensiasi kekuasaan dan kompetisi yang terbatas akan penawaran barang-barang, status, kekuasaan, dan peran-peran yang bernilai (Mitchell, 1994: 7). Dengan mengutip pendapat Robert Lee, Mitchell (1994: 8) menyatakan bahwa masyarakat tanpa konflik adalah masyarakat mati dan disukai atau tidak konflik merupakan realitas dari kehidupan manusia (*human existence*) dan dengan itu perilaku sosial dapat dipahami.

Karl Marx melihat masyarakat manusia sebagai sebuah proses perkembangan yang akan menyudahi konflik melalui konflik (Campbell, 1994: 134). Kedamaian dan harmoni akan menjadi hasil akhir sejarah perang dan revolusi kekerasan dan itu akan dicapai melalui sebuah tatanan masyarakat tanpa kelas yang disebut dengan masyarakat komunis. Bagi Marx, konflik sosial lebih terjadi di antara kelompok-kelompok atau kelas-kelas ketimbang di antara individu-individu. Konflik sosial tidak terjadi sebagai akibat sifat kompetitif, agresif, dan egois individu manusia, melainkan lebih disebabkan oleh kontradiksi dalam sistem kapitalsime. Marx percaya bahwa konflik-konflik internal atau kontradiksi-kontradiksi sistem kapitalis berkembang penuh sampai pada titik penghancuran diri, perebutan dengan kekerasan atas sarana-sarana produksi yang menjadi milik pribadi akan membuka jalan menuju kehidupan sejati yang bebas, membahagiakan, dan penuh persaudaraan bagi semua manusia (Campbell, 1994: 136).

Masyarakat modern dengan sistem kapitalisme menuntut adanya pembagian kerja dan dengan pembagian kerja lahirlah kelas-kelas dalam masyarakat kapitalis meliputi buruh upahan, kapitalis, dan pemilik tanah (Johnson, 1994: 148). Dalam perkembangannya, kelas-kelas tersebut secara bertahap akan berubah menjadi dua kelas utama yang senantiasa berhadapan, yaitu kelas borjuis dan kelas proletar. Munculnya kelas-kelas tersebut, di mana yang satu lebih dominan ketimbang yang lain menyebabkan lahirnya konflik. Kondisi-kondisi seperti itulah yang

mendorong pemikiran Marx tentang sejarah masyarakat dan ia sampai pada kesimpulan bahwa sejarah semua masyarakat sesungguhnya merupakan sejarah perjuangan kelas. Mengenai hal ini, selengkapnya Marx menyatakan:

Sejarah dari semua masyarakat yang ada hingga saat ini adalah sejarah perjuangan kelas. Orang bebas dan budak, bangsawan dan rakyat biasa, tuan dan hamba, pemimpin perusahaan dan orang luntang-lantung, dalam satu kata, penindas dan yang ditindas, selalu bertentangan satu sama lain, yang berlangsung tak putus-putusnya dalam satu pertarungan yang kadang-kadang tersembunyi, kadang-kadang terbuka, suatu pertarungan yang setiap kali berakhir baik dalam satu rekonsitusi masyarakat pada umumnya secara revolusioner maupun dalam keruntuhan umumnya dari kelas-kelas yang bercekcok itu (Johnson, 1994: 146).

Sejarah perjuangan kelas dalam pandangan Marx merupakan sejarah pertumbuhan masyarakat yang prosesnya dikendalikan oleh struktur ekonominya. Faktor-faktor ekonomi selalu merupakan faktor-faktor yang memengaruhi (Marx menyebutnya sebagai *infrastructure*), sedangkan yang lain seperti ideologi, politik, kebudayaan yang dipengaruhi. Faktor-faktor di luar ekonomi ini merupakan bangunan dari masyarakat yang dinamakan “*superstructure*”. Teori-teori yang dikemukakan Marx mengokohkan tesisnya tentang kelebihdahuluan benda atau jiwa, kelebihdahuluan kebutuhan bendawi atas kebutuhan keakalan, kelebihdahuluan masyarakat manusia atas kejiwaan manusia, dan kelebihdahuluan tindakan atas pikiran (Muthahhari, 1998: 129).

Kendali basis material (ekonomi) atas aspek kehidupan lainnya, mendorong berbagai kelompok masyarakat untuk memperebutkannya. Konflik muncul sebagai akibat ketimpangan relasi di antara kelompok-kelompok tersebut. Hukum relasi kuasa tersebut dijelaskan oleh Danrendorf sebagai berikut.

1. Ada dua tipe relasi, yaitu tipe superordinasi (relasi atasan dengan bawahan) dan tipe subordinasi (relasi bawahan dengan atasan).
2. Terdapat pengandaian bahwa pihak atasan mengontrol tingkah laku pihak bawahan melalui instruksi, perintah dan larangan.

3. Pengontrolan tersebut dianggap oleh pihak atasan menjadi kewajibannya dan sah menurut hukum.
4. Karena unsur hukum ini, baik pihak bawahan maupun pihak atasan selalu mengetahui dengan pasti sampai di mana batas-batas wewenang seseorang dan batas kewajiban untuk taat.
5. Akhirnya karena relasi-relasi superordinasi dan subordinasi mempunyai status hukum, maka setiap pelanggaran dapat menimbulkan hukuman atau tindakan disipliner bagi yang bersangkutan (Veeger, 1993: 215).

C. MANAJEMEN KONFLIK

Sebagaimana yang sudah diuraikan di depan, bahwa seseorang dapat memandang konflik sebagai sesuatu yang positif ataupun sebagai sesuatu yang negatif. Tidak selamanya konflik bersifat destruktif (negatif), demikian pula tidak selamanya konflik bersifat konstruktif (positif). Namun demikian, pandangan yang negatif terhadap konflik juga tidak realistik, sebab dalam kenyataannya dalam sistem sosial (masyarakat) ketegangan-ketegangan yang mengarah konflik sering kali muncul. Meminjam pendapat Dahrendorf, Cohen, dan Marx, konflik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu sistem sosial.

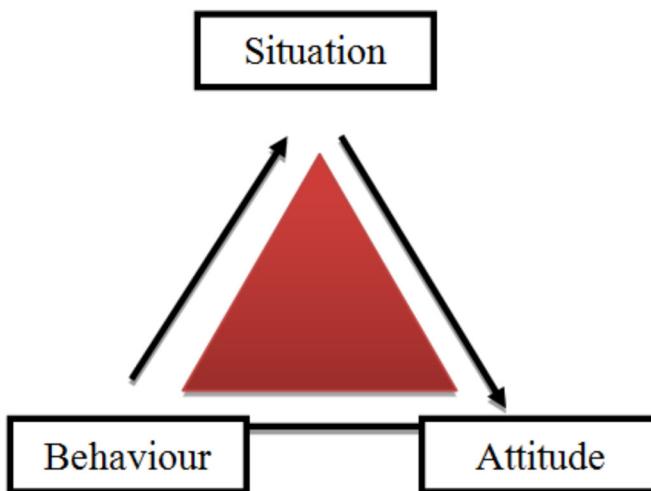
Lewis A. Coser, penulis buku *The Functions of Social Conflict* percaya bahwa konflik sosial memberikan kontribusi dalam memelihara, menyesuaikan atau adaptasi terhadap hubungan-hubungan sosial dalam struktur sosial (Cooser, 1964: 151). Konflik di dalam kelompok diyakini membantu membangun kesatuan atau membangun kembali satuan dan kohesivitas kelompok yang sebelumnya terancam oleh permusuhan atau perasaan antagonis (konflik) di antara anggota-anggotanya. Konflik juga memungkinkan penyesuaian kembali norma-norma dan hubungan-hubungan kekuasaan di dalam kelompok sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh anggota individual atau subkelompok sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh anggota individual atau subkelompok. Selain mengarahkan penyesuaian kembali terhadap norma-norma, konflik juga membantu merevitalisasi norma-norma atau bahkan menyumbang kemunculan norma-norma

baru. Dalam kaitan ini pula, konflik sosial merupakan mekanisme bagi penyesuaian norma-norma tersebut untuk kondisi-kondisi baru. Masyarakat yang fleksibel memperoleh keuntungan dari konflik karena perilaku demikian akan membantu menciptakan dan memodifikasi norma-norma, menjamin kontinuitasnya di bawah kondisi-kondisi yang berubah. Tentu saja masih banyak kelebihan atau keuntungan lain dari konflik sebagaimana dapat dibaca pada tulisan Lewis A. Coser dan C.R. Mitchell.

Di kalangan masyarakat yang sangat mendambakan harmoni sosial, seperti halnya masyarakat Jawa, konflik dimitoskan sebagai sesuatu yang negatif dan destruktif. Pandangan demikian tidak sepenuhnya salah, sebab konflik itu sendiri jika dibiarkan dan tidak ditangani secara baik, ia dapat berkembang dan mengalami eskalasi yang dampaknya dapat mengganggu atau merusak sistem. Karena itulah, para anggota kelompok (sistem) utamanya adalah mereka yang berperan sebagai pemegang kunci (*the ruler*) kelompok tersebut harus memiliki kecakapan dalam mengelola (manajemen) konflik.

Bobot konflik akan memengaruhi cara atau gaya penyelesaiannya. Makin ringan bobot konflik tersebut, makin mudah pula cara menyelesaiannya. Jarang suatu konflik berhenti pada tahap tertentu, biasanya satu konflik akan memicu munculnya konflik baru dengan intensitas yang makin tinggi.

Secara teoretis, eksistensi konflik melibatkan tiga unsur pokok, yaitu situasi (*situation*), sikap-sikap (*attitudes*), dan perilaku (*behaviour*) (Mitchell, 1994: 16). Situasi-situasi tertentu, seperti kelangkaan, kompetisi, perubahan yang terjadi di dalam struktur sosial atau nilai-nilai sosial akan mendorong munculnya sikap-sikap tertentu, seperti dorongan agresif, ketegangan, ataupun frustasi. Kondisi demikian pada gilirannya akan melahirkan perilaku yang tidak jauh berbeda dari sikap-sikap tersebut. Visualisasi mengenai keterkaitan antara tiga unsur konflik tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 6.1. Tiga Unsur Konflik

Biasanya di dalam mengelola konflik terdapat empat tahap proses yang harus dilalui. Proses manajemen konflik tersebut adalah (1) mendiagnosis konflik, (2) merumuskan masalah konflik, (3) menetapkan konsekuensi konflik dan menentukan tujuan pemecahan, dan (4) strategi manajemen konflik (Sujak, 1990: 157).

Sebelum sampai pada situasi manajemen konflik, perlu dipahami oleh para anggota kelompok tentang tujuh prinsip untuk memelihara hubungan yang positif selama terjadi konflik. Tujuh prinsip tersebut adalah (1) menciptakan pemenang melalui *voting*, (2) mengumumkan penangguhan, (3) menganjurkan partisipasi yang sederajat, (4) aktif mendengarkan, (5) memisahkan fakta dari opini, (6) memisahkan orang dari masalah, (7) memecah belah dan menaklukkan (Hendrick, 2001: 21–27).

Hendrick (2001: 27–31) memberikan rekomendasi yang juga harus diperhatikan oleh para anggota sistem, yaitu hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama menghadapi konflik. Pertama, jangan memberikan kesempatan untuk perjuangan mendapatkan kekuasaan. Kedua, jangan tidak memihak dalam konflik. Ketiga, jangan memberikan konflik menempati agenda kita. Keempat, jangan terperangkap kengerian (*awfulizing*).

Banyak cara atau strategi mengelola konflik, sebagaimana bisa dibaca dalam tulisan Winardi (1994), Abi Sujak (1990), C.R. Mitchell (1981), dan William Hendrick (2001). Umumnya strategi yang mereka kemukakan tidak jauh berbeda. Strategi manajemen konflik yang mereka ungkapkan dapat diterapkan untuk mengatasi tipe atau pola konflik baik yang menyangkut konflik intrapersonal, konflik interpersonal, konflik intragrup maupun konflik intergrup.

Hendrick (2201: 48–51) merekomendasikan lima gaya manajemen konflik, yaitu (1) gaya penyelesaian konflik dengan mempersatukan (*integrating*), (2) gaya penyelesaian konflik dengan kerelaan untuk membantu (*obliging*), (3) gaya penyelesaian konflik dengan mendominasi (*dominating*), (4) gaya penyelesaian konflik dengan menghindar (*avoiding*), (5) gaya penyelesaian konflik dengan kompromis (*compromising*).

Dalam gaya mempersatukan (*integrating*), individu yang berkonflik melakukan tukar menukar informasi. Pihak yang berkonflik memiliki keinginan untuk mengamati perbedaan dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua kelompok. Penyelesaian konflik dengan cara mempersatukan (*integrating*) mendorong tumbuhnya *creative thinking*, di mana mengembangkan alternatif merupakan bagian penting dari gaya penyelesaian konflik ini. Pengelolaan konflik dengan model *integrating* menekankan diri sendiri dan orang lain dalam mensinergikan informasi dari perspektif yang divergen. Namun demikian, penyelesaian konflik gaya ini menjadi tidak efektif bila kelompok yang berselisih kurang memiliki komitmen apalagi pihak-pihak yang berkonflik tidak memiliki kesabaran untuk menyelesaikan konflik. Penyelesaian cara ini juga dapat menimbulkan frustasi, terutama dalam konflik tingkat tinggi karena penalaran dan pertimbangan rasional sering kali dikalahkan oleh komitmen emosional untuk suatu posisi. Kelompok berbeda agama yang horizontal sering sulit menerapkan gaya ini. Karena sentimen agama acap kali menempatkan loyalitas kelompok lebih tinggi ketimbang kepada kekuatan politik nasional.

Gaya penyelesaian konflik dengan model *obliging*, mengandalkan adanya kerelaan membantu, menempatkan nilai yang tinggi untuk orang

lain, sementara dirinya sendiri dinilai rendah. Gaya ini mencerminkan rendahnya penghargaan terhadap diri sendiri oleh individu yang bersangkutan. Gaya ini dapat dipakai sebagai strategi yang sengaja digunakan untuk mengangkat atau menghargai orang lain. Penggunaan gaya ini dapat menyempitkan perbedaan antarkelompok dan mendorong pihak yang berkonflik mencari kesamaan dasar. Perhatian yang tinggi kepada orang lain menyebabkan seorang individu merasa puas dan merasa keinginannya terpenuhi oleh pihak lain. Dengan kondisi demikian, bisa mendorong yang bersangkutan mengorbankan sesuatu yang penting bagi dirinya. Bila digunakan secara efektif, gaya penyelesaian konflik ini dapat mengawetkan dan melanggengkan hubungan di antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Masyarakat Jawa secara tipikal lebih menyukai cara *obliging* apalagi mereka sangat mementingkan prinsip hormat dan rukun dalam kehidupan sosialnya.

Gaya mendominasi (*dominating*) atau pemaksaan (*forcing*) merupakan lawan dari gaya *obliging*. Gaya ini memiliki kecenderungan menggunakan kekuasaan untuk mendominasi orang lain atau memaksa orang lain untuk menyetujui atas dasar posisinya. Gaya ini efektif digunakan dalam situasi kondisi di mana dibutuhkan suatu keputusan yang cepat atau jika persoalan yang dibicarakan kurang penting. Gaya ini merefleksikan stress yang tinggi yang dialami oleh pihak yang ingin memaksakan kehendaknya. Gaya ini tercermin dalam sebuah penyerangan untuk menang yang diekspresikan melalui falsafah “lebih baik menembak daripada ditembak”. Gaya mendominasi paling banyak diasosiasikan dengan gertakan atau *hardball tactic* dari para pialang kekuasaan. Kelompok militer lebih memilih gaya ini karena hasilnya dapat dirasakan langsung.

Gaya menghindar (*avoiding*) mengandaikan bahwa seseorang menyadari adanya konflik, tetapi bereaksi menghindari, menarik diri dari situasi konflik atau bersikap netral. Gaya ini cocok jika isu yang muncul tidak begitu penting atau bersifat minor. Demikian pula, jika pihak pengambil keputusan tidak mempunyai informasi yang cukup untuk memecahkan konflik, menghindar atau menunda merupakan

cara yang tepat. Sebaliknya, gaya ini dapat pula membuat frustasi orang lain karena jawaban penyelesaian konflik mengambang atau lambat. Masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Jawa khususnya sering menggunakan cara ini untuk menyelesaikan konflik.

Gaya kompromi (*compromising*) muncul jika pihak yang berkonflik harus mengorbankan keinginan atau kebutuhannya dan terlibat bersama dalam proses mencapai sasaran untuk memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. Hal ini merupakan orientasi jalan tengah. Dalam kompromi, setiap orang memiliki sesuatu untuk diberikan dan menerima sesuatu. Kompromi dipandang efektif sebagai gaya manajemen konflik bila isu yang dikembangkan sangat kompleks atau bila ada keseimbangan kekuatan. Kompromi bisa menjadi pemecah perbedaan atau pertukaran konsesi. Kompromi cocok untuk kondisi yang tidak mungkin untuk mendapatkan persetujuan total. Suatu persetujuan memungkinkan setiap pihak menjadi lebih baik atau minimal tidak akan menjadi suatu persetujuan yang lebih jelek. Kompromi dapat menjadi pilihan bila model lain gagal dan cara ini hampir selalu dipakai oleh semua pihak yang berselisih sebagai sarana untuk saling memberi sesuatu guna mendapatkan pemecahan atau jalan keluar. Partai-partai politik di Indonesia yang berkonflik sering mengambil jalan kompromi seperti yang ditunjukkan oleh partai-partai besar, seperti Golkar, PDI-P, dan Demokrat. Cara inilah yang membuat Partai Golkar, PDI-P, dan Demokrat masih tetap kuat dan solid hingga sekarang.

D. RANGKUMAN

Untuk menjaga kelangsungan hidupnya, masyarakat membutuhkan integrasi terhadap komponen sistem yang ada di dalamnya. Masyarakat menginginkan integrasi baik bercorak horizontal maupun vertikal. Dalam masyarakat terdapat banyak bagian dengan satuan-satuan sejenis yang mengusahakan kepentingan yang sama. Apabila kesatuan-kesatuan tersebut dikelola secara terpadu dalam satu organisasi setara, integrasi seperti itu dinamakan integrasi horizontal. Jika usaha tersebut berhasil, prestasi akan meningkat. Namun integrasi horizontal tersebut belum sempurna, masih perlu diadakan integrasi vertikal dari satuan-satuan kegiatan yang sama meskipun taraf tinggi rendahnya berbeda.

Integrasi merupakan kebutuhan yang tak terelakkan bagi masyarakat, namun dalam realisasinya tidak dapat dipaksakan. Ada faktor penting yang memainkan peran utama dalam mewujudkan integrasi masyarakat besar, yaitu konsensus bersama dari semua pihak yang terlibat di dalamnya. Kesepakatan bersama tersebut terutama menyangkut ide-ide pokok atau garis-garis besar aturan permainan yang menjadi panduan bagi partisipan dalam masyarakat besar.

Masyarakat modern Indonesia sebagai contoh riil dari masyarakat makro, memerlukan tidak hanya integrasi statis, tetapi juga integrasi dinamis. Integrasi statis adalah keadaan kesatuan dan persatuan sejumlah kelompok etnis dan kelompok sosial yang berlainan di mana masing-masing kelompok mendapat tempat yang sesuai dalam struktur dan fungsi sosio-budaya pada tingkat baru yang lebih tinggi untuk jangka waktu relatif lama. Integrasi dinamis didefinisikan sebagai keadaan kesatuan dan persatuan sejumlah kelompok etnis dan kelompok sosial beserta sistem sosio-budaya mereka dalam struktur sedemikian rupa sehingga pelaksanaan fungsinya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berubah-ubah demi tercapainya tujuan bersama. Penciptaan integrasi masyarakat membutuhkan dua unsur esensial, yaitu unsur-unsur sosiologis dan unsur-unsur psikologis-sosial.

Konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Ia berlaku dalam semua aspek relasi sosial yang bentuknya bisa berupa relasi antarindividu, relasi individu dengan kelompok, ataupun antara kelompok dengan kelompok.

Konflik diartikan sebagai interaksi antarindividu, kelompok, atau organisasi yang membuat tujuan atau arti yang berlawanan dan merasa bahwa orang lain sebagai pengganggu potensial terhadap pencapaian tujuan mereka. Konflik juga dipahami sebagai nilai-nilai atau tuntutan yang berkenaan dengan status kekuasaan, pengumpulan sumber materi atau kekayaan yang langka, di mana pihak-pihak yang berkonflik tidak hanya ditandai oleh perselisihan, tetapi juga berusaha untuk memojokkan, merugikan, atau kalau perlu menghancurkan pihak lawan.

Konflik merupakan sesuatu fenomena wajar dan alamiah yang terjadi pada masyarakat mana pun, di mana pun dan kapan pun. Ia hadir di tengah-tengah masyarakat baik masyarakat yang bertipe tradisional maupun masyarakat yang bercorak modern (industri). Konflik adalah sesuatu yang tak dapat dielakkan, karena *it can originate in individual and group reactions to situations of scarce resources; to division of function within society; and to differentiation of power and resultant competition for limited supplies of goods, status valued roles and power as-an-end-in-itself.*

Konflik terjadi bila terdapat dua hal, (1) sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang secara potensial dan praktis operasional dapat saling menghambat, (2) ada suatu sasaran yang sama-sama dikehj oleh kedua pihak, namun hanya salah satu pihak yang mungkin akan mencapainya.

Konflik yang terjadi pada masyarakat mana saja, tak terkecuali masyarakat modern (industri) dapat berarti negatif maupun positif. Pihak yang memandang konflik sebagai sesuatu yang negatif, akan melihat orang atau kelompok lain sebagai oposan atau musuh, sehingga mereka sejauh mungkin menghindari konflik. Pihak yang menolak konflik yakin bahwa konflik bersifat destruktif dan membahayakan pencapaian tujuan kelompok atau organisasi. Pihak yang memandang konflik sebagai sesuatu yang negatif akan memiliki sikap selalu ingin menang sebagai prioritas utama. Di lain pihak, terdapat orang atau kelompok yang menyadari bahwa konflik merupakan bagian integral dari kehidupan organisasi atau masyarakat. Konflik dipandang baik karena dapat merangsang orang untuk memperoleh pemecahan masalah lebih baik. Bahkan di kalangan manajer, konflik diyakini mampu meningkatkan prestasi organisasi.

Konflik dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan prestasi anggota dan sekaligus prestasi kelompok. Konflik diyakini menyumbangkan banyak hal, seperti kelestarian kelompok, menambah kohesivitas kelompok, meningkatkan kedewasaan anggota, merancang pola komunikasi yang lebih terbuka, mendinamisasikan kelompok, dan merangsang anggota untuk memajukan kelompok. Masyarakat selain dapat diintegrasikan melalui konsensus atau kerja sama, juga dapat dikembangkan melalui

mekanisme konflik. Dalam masyarakat modern, konflik juga akan mendorong banyak asosiasi untuk mereduksi atau mengurangi isolasi sosial atau atomisasi.

Dalam kehidupan masyarakat, yang dikehendaki adalah integrasi dan sebanyak mungkin tidak terjadi konflik yang dapat menimbulkan disintegrasi. Namun disadari bahwa konflik tidak dapat dihindari dalam interaksi antarindividu maupun antarkelompok dalam masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan pengelolaan konflik secara baik. Pengelolaan atau manajemen konflik dapat menggunakan cara berikut: (1) gaya penyelesaian konflik dengan mempersatukan (*integrating*), (2) gaya penyelesaian konflik dengan kerelaan untuk membantu (*obliging*), (3) gaya penyelesaian konflik dengan mendominasi (*dominating*), (4) gaya penyelesaian konflik dengan menghindar (*avoiding*), (5) gaya penyelesaian konflik dengan kompromis (*compromising*).

BAB VII

LINGKUNGAN HIDUP, PENDUDUK, BUDAYA, DAN ETIKA HIDUP

"We must alert and organise the world's people to pressure world leaders to take specific steps to solve the two root causes of our environmental crises – exploding population growth and wasteful consumption of irreplaceable resources. Overconsumption and overpopulation underlie every environmental problem we face today" (**Jacques-Yves Cousteau**). Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap Warga Negara Indonesia (**UUD Pasal 28H**).

Lingkungan hidup, penduduk, dan kebudayaan saling terkait dan saling tergantung satu sama lain. Penduduk, untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya perlu beradaptasi dengan lingkungan dan kebudayaan. Keterkaitan manusia-lingkungan-dan kebudayaan merupakan satu garis yang tidak bisa diputus. Hidup mati manusia sangat tergantung kepada lingkungan hidupnya. Manusia sangat tergantung pada air, oksigen, tanaman, dan hewan untuk kelangsungan hidupnya. Kehidupan manusia juga dibentuk dan dipengaruhi lingkungannya. Sebaliknya, manusia dan kebudayaannya juga menentukan warna dan masa depan lingkungan hidup. Oleh karenanya tepat sekali, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan lingkungan hidup sebagai satu kesatuan, yaitu "kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perlakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain". Kualitas hidup manusia juga ditentukan oleh baik dan sehatnya lingkungan. UUD 1945 Pasal 28H juga menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi setiap warga negara.

Meskipun diketahui bahwa ketergantungan manusia terhadap lingkungannya, tidak semua gerak roda sosial politik ekonomi kehidupan manusia berakibat baik pada lingkungan. Kalau saat ini masyarakat dihadapkan pada berbagai masalah lingkungan hidup, seperti kekeringan, pemanasan global, longsor, rob, banjir, kerusakan alam, dan sebagainya, semua itu terjadi tidak karena alam yang menimbulkan. Sebagian besar terjadi karena tindakan manusia. Laju pertumbuhan penduduk (P), perkembangan teknologi (T), model pembangunan yang kapitalistik (P), gaya hidup yang konsumtif-materialistik (G), keserakahan (K), dan etika yang menganggap alam sebagai objek eksplorasi (E) merupakan enam faktor utama kerusakan lingkungan. Apa yang dianggap sebagai modernitas, pertumbuhan, kemajuan, dan kesejahteraan ternyata harus dibayar dengan harga yang sangat mahal yaitu lingkungan yang rusak. Saatnya menengok kembali cara masyarakat hidup saat ini, juga kebijaksanaan yang bisa dipelajari dari budaya tradisional yang menghargai lingkungan agar kita bisa mewariskan lingkungan yang kita diami ini kepada anak cucu kita dalam keadaan sama atau lebih baik.

Tujuan bab ini adalah membahas keterkaitan antara lingkungan hidup, penduduk, dan kebudayaan agar kita memahami persebaran masalah-masalah utama kependudukan, kebudayaan dan lingkungan hidup, sebab-sebabnya serta kemungkinan pemecahannya. Diharapkan setelah membaca bab ini, mahasiswa mampu menganalisis berbagai permasalahan lingkungan dan persebarannya di Indonesia, keterkaitan globalitas dengan lingkusan, mampu mengembangkan perspektif dan praktik yang sensitif terhadap lingkungan, serta mampu berinisiatif untuk menyelamatkan lingkungan untuk masa depan bangsa Indonesia.

A. LINGKUNGAN HIDUP

Indonesia memiliki kekayaan dan keanekaragaman hayati dan budaya yang luar biasa. Menurut banyak peneliti, Indonesia adalah negara mega-*biodiversity* terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Ekosistem darat dan laut luas serta garis pantai dengan panjang kurang lebih 81.000 km, ekosistem *mangrove* yang kira-kira merupakan 22% kekayaan *mangrove*

dunia, semuanya adalah kakayaan hayati bangsa. Lebih detil lagi, lihatlah Status Keanekaragaman Hayati Indonesia yang diterbitkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2011. Dalam laporan itu tercatat keragaman spesies yang dimiliki Indonesia terdiri atas:

- (1) 707 (tujuh ratus tujuh) spesies mamalia;
- (2) 1.602 (seribu enam ratus dua) spesies burung;
- (3) 1.112 (seribu seratus dua belas) spesies amfibi dan reptil;
- (4) 2.800 (dua ribu delapan ratus) spesies invertebrata;
- (5) 1.400 (seribu empat ratus) spesies ikan;
- (6) 35 (tiga puluh lima) spesies primata; dan
- (7) 120 (seratus dua puluh) spesies kupu-kupu.

Data ini tentu saja data umum. Masih banyak keanekaragaman *biodiversitas* yang belum dapat diungkap. Sebagaimana data yang dimiliki Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia memiliki 450 (empat ratus lima puluh) spesies terumbu karang dari total 700 (tujuh ratus) spesies yang dimiliki dunia. Indonesia juga memiliki hutan yang luas, menempati peringkat ketiga setelah Brazil dan Zaire dalam kekayaan hutan hujan tropis. Berdasarkan foto satelit tahun 1986-1991, diperkirakan luas hutan Indonesia adalah 120,6 juta hektar, yang artinya 69% daratan Indonesia tidak termasuk Pulau Jawa. Persebarannya adalah sebagai berikut: Kalimantan (32,0% dari keseluruhan); Irian Jaya (29,9%); Sumatra (20,8%); Sulawesi (9,7%); Maluku (5,5%); dan daerah-daerah lain (2,1%) (Sunderlin dan Resosudarmo 1997).

Kekayaan hutan tidaklah sebatas kayu. Karena dalam hutan hidup beragam flora dan fauna yang sangat beragam, yang potensinya sangat melimpah untuk kemanusiaan. Bukan hanya untuk industri, obat-obatan, kecantikan, pariwisata, tetapi juga untuk ilmu pengetahuan. Hutan juga menjaga fungsi tata air, penghasil oksigen, penyerap karbondioksida, serta sumber makanan bagi kebutuhan banyak makhluk hidup. Sayangnya, kekayaan ini lambat laun mengalami tekanan. Ir. Boby Setiawan MA., PhD, Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM, dalam sebuah seminar menyampaikan bahwa terdapat 112 jenis mamalia serta 104 jenis burung yang terancam punah di Indonesia. Di sektor kehutanan

terjadi deforestasi dan degradasi besar-besaran, sehingga digambarkan per menitnya hutan Indonesia digunduli sebesar lapangan bola. WWF, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang memusatkan perhatian pada masalah lingkungan mencatat, deforestasi terjadi sejak tahun 1970. Pada tahun 1997-2000, laju kehilangan dan kerusakan hutan Indonesia mencapai 2,8 juta hektar pertahun.

Saat ini menurut perkiraan WWF, luas hutan alam yang tersisa hanya 28%. Jika tidak segera dihentikan, hutan yang tersisa akan segera musnah. Apa penyebab kerusakan hutan nasional ini? Resosudarmo menyebut "industrialisasi" sebagai penyebab utama kerusakan hutan. Industrialisasi adalah periode perubahan sosial dan ekonomi yang mentransformasikan masyarakat dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Reorganisasi ekonomi, yang di dalamnya padat inovasi teknologi, pengembangan energi berskala besar dan produksi industri secara intensif terjadi sejak tahun 1970 hingga tahun 1997. Sunderlin dan Resosudarmo menulis:

Bermula dari pertengahan tahun 1960-an eksplorasi komersial hutan di pulau-pulau di luar pulau Jawa telah tumbuh dengan cepat dan Indonesia kini merupakan salah satu pengekspor kayu tropis yang terbesar di dunia (terutama kayu lapis). Pada tahun 1996 pemegang hak pengusahaan hutan (PHH) berjumlah 445 dan meliputi area seluas 54.060.599 ha². Pada tahun 1994 kayu dan produk-produk kayu menghasilkan sekitar US\$ 5,5 miliar pendapatan ekspor Indonesia, kira-kira 15% dari keseluruhan pendapatan ekspor (*Economist Intelligence Unit*, 1995b: 3). Ada kira-kira 700.000 orang yang dipekerjakan di sektor hutan secara resmi (World Bank, 1995: 1).

Ditulis pula oleh Sunderlin dan Resosudarmo tentang hilangnya hutan tutupan sebagai berikut.

Dalam perjalanan perkembangan industri perkayuan, terjadi peningkatan besar dalam jumlah dan laju hilangnya tutupan hutan di Indonesia. Penelitian FAO tahun 1990 menunjukkan bahwa tutupan hutan di negeri ini telah berkurang dari 74% menjadi 56% dalam jangka waktu 30-40 tahun (FAO, 1990: 3). World Bank (1990: xx), mengacu pada penelitian yang dilakukan FAO, mencatat peningkatan dalam estimasi deforestasi setiap tahun: pada tahun 1970-an 300.000

ha/tahun; pada tahun 1981, 600.000 ha/tahun; pada tahun 1990 satu juta ha/tahun. (Sunderlin dan Resosudarmo 1997: 1).

Seberapa cepat laju deforestasi di Indonesia? Forest Watch Indonesia (FWI) mencatat sebagai berikut.

Pada periode tahun 1970 hingga 1990-an, laju kerusakan hutan diperkirakan antara 0,6 sampai 1,2 juta ha per tahun. Sepuluh tahun kemudian, pemetaan yang dilakukan oleh pemerintah bersama World Bank, menyatakan bahwa laju kerusakan hutan selama periode 1986-2006 sekitar 1,7 juta per tahun dan mengalami peningkatan tajam sampai lebih dari 2 juta ha per tahun (FWI/GFW 2001). Selama periode 2000-2006 telah dipublikasikan berbagai versi perkiraan kerusakan hutan Indonesia. Angka dari Departemen Kehutanan adalah 2,83 juta ha per tahun selama 1997-2005. Pada tahun 2007, FAO dalam buku laporan State of The Worlds Forests, menempatkan Indonesia pada urutan 8 dari sepuluh negara dengan luas hutan alam terbesar di dunia. Dengan laju kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai 1,87 juta ha dalam kurun waktu 2000-2005, mengakibatkan Indonesia menempatkan peringkat ke-2 dari sepuluh negara dengan laju kerusakan tertinggi dunia (FWI, 2009).

Apa penyebab utama deforestasi secara besar-besaran? FWI mengidentifikasi empat sebab utama: (1) perkembangan industri perkayuan, terutama pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) pada hutan alam (HA) maupun hutan tanaman (HT); (2) izin pemanfaatan kayu (IPK), (3) pelepasan kawasan untuk perkebunan dan pertambangan, dan (4) maraknya pembalakan liar (*illegal logging*). Yang cukup kontroversial karena melibatkan kekerasan dan penghilangan nyawa orang seperti terjadi di Mesuji Lampung adalah perubahan hutan menjadi kebun kelapa sawit. FWI melaporkannya sebagai berikut.

Minyak sawit mentah (CPO) saat ini menjadi salah satu komoditas unggulan Indonesia. Akibatnya, kebutuhan pembukaan lahan kelapa sawit dilakukan secara masif. Sumatra dan Kalimantan merupakan wilayah yang menjadi sasaran utama. Dari kurang lebih 5,25 juta ha lahan yang dialokasikan untuk kelapa sawit tahun 2003, sekitar 19 % ada di Kalimantan dan 72% di Sumatra. Namun yang sangat mengejutkan, luas lahan kelapa sawit mengalami lonjakan yang amat besar di Kalimantan, yaitu meningkat 1.056% dari 1990 dan

2003. Perluasan areal tanaman ini dimulai sejak investasi asing dibuka kembali pada tahun 1967. Hingga tahun 2005 luas perkebunan ini mencapai 5,59 juta ha. Diperkirakan perluasan perkebunan kelapa sawit masih akan terus dilakukan sampai 13,8 juta ha pada tahun 2020. Dari luas 105.808 ha pada tahun 1967, areal perkebunan kelapa sawit kini berkembang menjadi 5,59 juta ha pada tahun 2005. Masa kejayaan sektor perkebunan ini dimulai sejak tahun 1990 hingga kini. Sayangnya, masih banyak perusahaan yang hanya tertarik untuk mengambil kayu daripada menanam kelapa sawit pada wilayah konsesinya. Menurut beberapa kajian, hampir semua perkebunan kelapa sawit berasal dari kegiatan konversi hutan produksi. Dengan prosedur untuk memperoleh lahan hutan yang relatif mudah, maka perusahaan dapat menebang habis serta menjual kayunya dan menjadi satu bisnis sampingan yang cukup menguntungkan, di luar keuntungan hasil panen kelapa sawit di masa yang akan datang. Bahkan ada di antaranya yang tidak pernah mempunyai keinginan untuk membangun perkebunan kelapa sawit, tetapi hanya mengejar izin konversi untuk memperoleh keuntungan dari kayu yang didapatkan dari kegiatan pembukaan lahan (*land clearing*).

Kelapa sawit memang komoditas yang diandalkan saat ini, tetapi bayaran yang harus diberikan juga terlalu mahal. Kebun kelapa sawit hampir dipastikan memerlukan lahan yang luas, dan pasti didahului dengan penebangan. Penebangan ini tentu saja berakibat musnahnya keanekaragaman hayati sekaligus hilangnyakekayaan budaya di mana masyarakat tradisional menjadikan hutan bukan sekadar sumber pangan mereka, tetapi juga tempat ritual dan upacara. Kebun kelapa sawit perlu lahan yang luas karena ia memerlukan tempat pengolahan di situ juga. Kalau diolah di tempat yang terlalu jauh bisa mengakibatkan turunnya kualitas minyak sawit. Fenomena deforestasi di atas mengindikasikan bahwa kebijakan pembangunan yang ditetapkan serta sistem hukum, politik, dan ekonomi yang korup dan tidak transparan, yang menganggap sumber daya alam khususnya sumber daya hutan sebagai sumber pendapatan dan keuntungan semata, merupakan sebab utama terjadinya kerusakan hutan di Indonesia. Bagaimana dengan faktor pertumbuhan penduduk?

B. PENDUDUK

Industrialisasi, terutama yang diiringi oleh keserakahan, merupakan faktor penting kerusakan hutan. Namun ancaman yang tidak boleh diremehkan terhadap lingkungan hidup, lebih dari sekadar hutan, adalah pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali mengakibatkan tekanan lingkungan yang cukup berat. Lihatlah di desa, sawah atau pekarangan yang sebelumnya menjadi sumber penghidupan, tempat menanam pepohonan penghasil oksigen dan sumber pangan dibabat habis dijadikan tempat tinggal. Di mana-mana sawah berubah menjadi perumahan dan pabrik. Akibatnya, lingkungan menjadi panas, dan sumber pangan juga menipis. Dahulu satu petak sawah cukup untuk menghidupi keluarga, tetapi kini tidak cukup lagi menghidupi anggota keluarga yang jumlahnya semakin banyak. Tempat publik seperti taman sebagai area terbuka untuk bersosialisasi warga juga tergerus oleh proyek industrialisasi. Orang sekarang cenderung bermain dan bersosialisasi di mall. Belum lagi masalah-masalah ikutan lainnya seperti limbah, kebutuhan air dan energi yang masalahnya akan bertambah kompleks.

Teori tentang dampak pertumbuhan penduduk untuk pertama kalinya dipikirkan oleh Thomas Robert Malthus dalam bukunya yang berjudul *An Essay on the Principle of Population* (1798). Sebuah buku yang sampai sekarang dianggap sebagai buku primer yang menjelaskan “hukum besi tentang kependudukan” (*iron law of population*). Menurut Malthus, pertumbuhan jumlah penduduk, bila tidak dikendalikan, akan berakibat naiknya kemiskinan dan langkanya sumber pangan. Mengapa demikian? Pertumbuhan penduduk terjadi menurut deret ukur (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, dan seterusnya), sedangkan produksi pangan meningkat hanya menurut deret hitung (1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya). Dengan kata lain, pertumbuhan penduduk terjadi secara geometris atau eksponensial, sedangkan produksi pangan terjadi secara linear atau aritmatik. Malthus (1959: 6) menulis:

This natural inequality of the two powers, of population, and of production of the earth, and that great law of our nature which

must constantly keep their effects equal, form the great difficulty that appears to me insurmountable in the way to the perfectibility of society.

Ketidaksejajaran antara dua kekuatan besar ini, yaitu kekuatan pertumbuhan penduduk dan kekuatan bumi untuk memproduksi pangan, dan hukum alam yang harus menyeimbangkan dampak-dampak dari dua kekuatan raksasa ini melahirkan kesulitan-kesulitan besar yang menurut saya akan sulit diatasi dalam mewujudkan kesempurnaan masyarakat.

Pandangan Malthus dikritik karena menganggap bahwa produksi pangan tidak bisa ditingkatkan secara signifikan dengan teknologi. Dalam batas tertentu kritik ini benar karena kita menyaksikan “revolusi hijau” telah meningkatkan produksi pangan secara substansial. Revolusi hijau adalah serangkaian penelitian dan pengembangan teknologi dalam pertanian sejak tahun 1940 sampai 1970-an yang berhasil meningkatkan produksi pertanian seluruh dunia. Penemuan varietas unggul, digunakannya pupuk dan teknologi tertentu telah memacu produksi pangan. Akan tetapi, pandangan Malthus juga benar bahwa pertumbuhan penduduk akan menimbulkan dampak yang sulit diatasi. Misalnya, karena revolusi hijau yang didorong kebutuhan pangan yang lebih besar, timbul persoalan lingkungan yang baru. Pemakaian pupuk misalnya, mengakibatkan tanah mudah longsor, sehingga terjadi banjir. Organisme penyubur tanah juga mati akibat pemakaian pestisida yang berlebihan. Semua masalah lingkungan yang menjadi dampak tumbuhnya kependudukan ini tidak dibahas Malthus dalam *An Essay on the Principle of Population*. Malthus hanya membahas dampak pertumbuhan penduduk secara umum dan akibat sosialnya termasuk ketersediaan makanan.

Namun buku Malthus membantu kita memahami persoalan kependudukan dan lingkungan. Nampak nyata, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali mengakibatkan “*environmental stress*”. Bukan hanya manusia, lingkungan juga bisa stress. Lingkungan stress karena tidak kuat menampung beban yang dimunculkan bertambahnya jumlah manusia.

Kalau demikian halnya, bagaimana postur penduduk Indonesia saat ini? Indonesia memiliki penduduk terpadat keempat dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia mencapai 237.641.326 yang terdiri atas 119.630.913 penduduk laki-laki dan 118.010.413 penduduk perempuan. Data yang dipublikasikan melalui website BPS <http://www.bps.go.id>, menyebutkan penduduk terbanyak menurut provinsi adalah provinsi Jawa Barat kemudian Jawa Timur. Lima provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Jawa Barat 43.053.732
2. Jawa Timur 37.476.757
3. Jawa Tengah 32.382.657
4. Sumatra Utara 12.982.200
5. Banten 10.632.166

Jumlah perempuan dalam struktur penduduk hampir menyamai jumlah penduduk laki-laki, bahkan di provinsi Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY jumlahnya melebihi kaum laki-laki. Jumlah penduduk tiap provinsi dilihat dari proporsi jenis kelamin laki-laki dan perempuan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.1. Jumlah Penduduk per Provinsi dilihat dari Proporsi Laki-laki dan Perempuan

No	Provinsi/Province	Jumlah Penduduk/ Population		Jumlah /Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Aceh	2,248,952	2,245,458	4,494,410
2	Sumatra Utara	6,483,354	6,498,850	12,982,204
3	Sumatra Barat	2,404,377	2,442,532	4,846,909
4	Riau	2,853,168	2,685,199	5,538,367
5	Jambi	1,581,110	1,511,155	3,092,265
6	Sumatra Selatan	3,792,647	3,657,747	7,450,394
7	Bengkulu	877,159	838,359	1,715,518
8	Lampung	3,916,622	3,691,783	7,608,405

9	Kepulauan Bangka Belitung	635,094	588,202	1,223,296
10	Kepulauan Riau	862,144	817,019	1,679,163
11	DKI Jakarta	4,870,938	4,736,849	9,607,787
12	Jawa Barat	21,907,040	21,146,692	43,053,732
13	Jawa Tengah	16,091,112	16,291,545	32,382,657
14	DIY	1,708,910	1,748,581	3,457,491
15	Jawa Timur	18,503,516	18,973,241	37,476,757
16	Banten	5,439,148	5,193,018	10,632,166
17	Bali	1,961,348	1,929,409	3,890,757
18	Nusa Tenggara Barat	2,183,646	2,316,566	4,500,212
19	Nusa Tenggara Timur	2,326,487	2,357,340	4,683,827
20	Kalimantan Barat	2,246,903	2,149,080	4,395,983
21	Kalimantan Tengah	1,153,743	1,058,346	2,212,089
22	Kalimantan Selatan	1,836,210	1,790,406	3,626,616
23	Kalimantan Timur	1,871,690	1,681,453	3,553,143
24	Sulawesi Utara	1,159,903	1,110,693	2,270,596
25	Sulawesi Tengah	1,350,844	1,284,165	2,635,009
26	Sulawesi Selatan	3,924,431	4,110,345	8,034,776
27	Sulawesi Tenggara	1,121,826	1,110,760	2,232,586
28	Gorontalo	521,914	518,250	1,040,164
29	Sulawesi Barat	581,526	577,125	1,158,651
30	Maluku	775,477	758,029	1,533,506
31	Maluku Utara	531,393	506,694	1,038,087
32	Papua Barat	402,398	358,024	760,422
33	Papua	1,505,883	1,327,498	2,833,381
Jumlah/Total		119,630,913	118,010,413	237,641,326

Dari keseluruhan jumlah penduduk (237,6 juta) tersebut, 58% hidup di pulau Jawa. Pada tahun 2020 diperkirakan penduduk Indonesia akan mencapai 264 juta dan meningkat menjadi 308 juta pada tahun 2050. Dari sensus penduduk tahun 2010, diperoleh informasi bahwa rata-rata kelahiran atau *crude birth rate* Indonesia adalah 18,22. Angka ini jauh lebih rendah daripada rata-rata kelahiran pada tahun 1960 yang mencapai 44,58. *Crude birth rate* menunjukkan jumlah kelahiran yang

hidup dari 1.000 orang. Angka ini menunjukkan keberhasilan program KB di Indonesia. Menyadari pentingnya masalah kependudukan, pemerintah memantapkan keberadaan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai lembaga yang bertugas mengkoordinasikan program kependudukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Saat ini diperkirakan angka pertumbuhan penduduk Indonesia adalah 1.49% per tahun. Angka pertumbuhan ini relatif lebih kecil dibandingkan dengan angka pertumbuhan bayi pada tahun 1970, yaitu sebesar 2,34%. Dengan jumlah penduduk sebesar 237,6 juta jiwa, maka pertambahan penduduk setiap tahunnya adalah lebih dari 3,5 juta jiwa. Jumlah itu sama dengan jumlah seluruh penduduk di Singapura. Dengan jumlah yang demikian saja, angka pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi. Tidak semua anggota masyarakat menikmati pelayanan publik yang memadai, seperti mendapatkan akses listrik, air bersih, dan sebagainya. Pada tahun 2003, hanya 33% penduduk Indonesia mempunyai akses air bersih melalui ledeng dan pompa. Tahun 2000, Jawa dan Bali telah mengalami defisit air mencapai 53.000 meter kubik dan 7.500 meter kubik, sementara di Sulawesi 42.500 meter kubik. Pada saat yang sama, terjadi penumpukan penduduk di perkotaan. Orang-orang desa berbondong-bondong ke kota, karena desa dianggap tidak lagi menjanjikan. Banyak generasi muda tidak mau menjadi petani.

Ujung dari semua ledakan penduduk itu adalah kerusakan lingkungan dengan segala dampak ikutannya, seperti (1) menurunnya kualitas pemukiman dan (2) lahan yang ditelantarkan, (3) hilangnya fungsi ruang terbuka; (4) ketersediaan bahan pangan yang semakin terbatas; (5) ketersediaan perumahan; (5) kurangnya fasilitas umum: kesehatan, pendidikan, dan transportasi; (6) pengangguran yang semakin besar karena terbatasnya lapangan pekerjaan; (7) kriminalitas yang semakin meningkat. Dampak lonjakan populasi bagi lingkungan sebenarnya tidak sederhana. Persoalannya rumit mengingat hal tersebut terkait dengan manusia dan lingkungan hidup. Butuh kesadaran besar bagi tiap warga

negara, khususnya pasangan yang baru menikah, untuk merencanakan jumlah anak.

C. URBANISASI

Masalah persebaran penduduk masih menjadi masalah yang serius. Kurang lebih 60% penduduk Indonesia tinggal di pulau Jawa, sedangkan luas Pulau Jawa hanya 7% dari luas Indonesia. Contoh persebaran yang tidak seimbang adalah Jakarta. Jumlah penduduk yang tinggi di kota besar mempunyai masalah yang serius, yaitu (1) kemacetan dan transportasi; (2) banjir; (3) kekumuhan; (4) pendidikan; (5) kesehatan; (6) sarana perdagangan; (7) ketersediaan air; (8) kawasan resapan; (9) pengangguran; (10) kriminalitas; dan (11) anak jalanan dan anak terlantar.

Litbang *Kompas* (2012) mendata masalah-masalah yang diklasifikasikan dalam Kemacetan dan Transportasi, antara lain: (1) pertumbuhan kendaraan (8% pertahun) lebih cepat dari panjang jalan yaitu 0,01% pertahun; (2) mobilitas ulang alik dari Bodetabek ke Jakarta meningkat 1,5 kali (2002–2010); (3) pengguna sepeda motor meningkat 2,75% dan angkutan umum menurun (28,4%); (4) perubahan moda transportasi pada perjalanan kerja, di mana semakin banyak yang naik motor; (5) pelayanan Bus Transjakarta belum memuaskan menurut YLKI (2011), seperti waktu tunggu, jarak tempuh yang panjang, keselamatan, kenyamanan, sistem informasi, aksesibilitas halte dan kebersihan; (6) pelayanan *commuter line* yang belum memuaskan: sering kali terlambat, armada sering mogok, jumlah armada tidak sesuai dengan jumlah penumpang sehingga jam-jam sibuk penuh sesak; (7) angkutan umum belum tertib. Problem Jakarta adalah problem kependudukan yang perlu pengelolaan serius.

Salah satu upaya konseptual dalam menangani masalah perkotaan adalah “konsep pembangunan kota yang berwawasan lingkungan hidup”. Tujuan pembangunan kota berwawasan lingkungan adalah bagaimana perkotaan bisa menjamin kehidupan manusia yang selaras dengan alam. Takashi Inoguchi, Edward Newman dan Glen Pauletto (2003) menjelaskan

perlunya kebijakan perkotaan guna memenuhi kebutuhan mendesak untuk mengurangi beban lingkungan di perkotaan, untuk mengurangi polusi udara dan air, memperkecil dan mengatur sampah rumah tangga dan sampah industri, untuk mengatur sistem air secara efisien dan seadil mungkin, untuk merawat tempat-tempat rekreasi yang alamiah dan menyenangkan, untuk memperkecil ketidakmampuan penduduk dalam menghadapi bencana alam, untuk merencanakan pembangunan perumahan yang sesuai dengan kebutuhan umat manusia, dan secara umum menekankan kesejahteraan umat manusia dan kesinambungan ekologis di wilayah perkotaan.

D. LEDAKAN PENDUDUK DAN KEMAJUAN TEKNOLOGI

Sosiolog telah membuat rumus yang sederhana untuk memahami masalah lingkungan, yaitu $I=PAT$, artinya *environmental impact* (I) atau dampak lingkungan sama dengan interaksi yang kompleks antara jumlah penduduk (P), *level of affluence* (A) atau tingkat kekayaan dan level teknologinya (T). Masyarakat berburu dan meramu sedikit berpengaruh pada lingkungan karena jumlah mereka kecil, miskin dan teknologinya juga sangat sederhana. Bahkan kehidupan mereka diombang-ambingkan oleh alam yang tidak mereka pahami misalnya kebakaran, kebanjiran, dan angin topan. Seiring berjalannya waktu, kemampuan manusia untuk menaklukkan alam semakin tinggi, misalnya gunung ditembus menjadi terowongan, gunung juga dikeruk sehingga menjadi danau. Kemajuan manusia di bidang teknologi ini berdampak pada kerusakan lingkungan. Produksi yang semakin banyak tentu saja memerlukan energi yang besar dan menghasilkan limbah yang besar. Ujungnya adalah lingkungan juga. Mengapa Malthus tidak memikirkan faktor teknologi dalam kerusakan lingkungan? Karena pada saat buku tentang kependudukan ditulis, revolusi industri baru dimulai. Saat itu, teknologi baru dirasakan manfaatnya. Setelah periode emas revolusi industri berlalu, dampak teknologi mulai dirasakan.

Dalam hal tertentu, kemajuan teknologi dapat mengendalikan jumlah penduduk, misalnya alat-alat kontrasepsi yang ditemukan (IUD,

implan, pil KB, dan lainnya) dapat digunakan untuk menunda kelahiran. Kemajuan teknologi kedokteran, misalnya dengan vasektomi dan tubektomi, dapat mencegah perempuan hamil atau sebaliknya laki-laki tidak bisa membuat sel telur perempuan. Kebijakan pemerintah di bidang kependudukan, misalnya melalui program Keluarga Berencana dengan semboyan “dua anak cukup” turut mendorong masyarakat untuk tidak memiliki anak terlalu banyak. Kebijakan tersebut telah berpengaruh secara signifikan dalam mengendalikan jumlah penduduk di Indonesia.

E. LINGKUNGAN DALAM DESAIN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Menghadapi persoalan kerusakan lingkungan alam karena faktor teknologi, para pemimpin dunia mengeluarkan resolusi dalam sidang PBB pada tahun 1987 tentang “pembangunan berkelanjutan”. Resolusi pembangunan berkelanjutan dirasa perlu dan mendesak, karena tindakan manusia jika tidak dikendalikan akan membahayakan kehidupan alam dan kehidupan manusia selanjutnya. Apa itu pembangunan berkelanjutan? Salah satu definisi tentang pembangunan berkelanjutan diambil dari definisi yang ditulis Durtland Report tahun 1987. *“Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.”* Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini dengan memperhatikan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Ahli pembangunan berkelanjutan, Michael Thomas Needham (2011) mempunyai definisi kerja yang lebih memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang, “yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan berkontribusi pada kebutuhan generasi yang akan datang.” Bagaimana kontribusi ini dilaksanakan? Ada dua cara yaitu (1) dengan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang sudah ada dan (2) membatasi diri agar apa yang dilakukan saat ini tidak menciptakan kerusakan baru.

Pembangunan berkelanjutan memiliki tiga dimensi, yakni ekonomi berkelanjutan, lingkungan berkelanjutan dan sosial politik berkelanjutan.

Domain ekonomi sangat fundamental dalam konsep pembangunan berkelanjutan, tetapi kecenderungan untuk menggunakan tiga model yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial tidak luput dari kelemahan. Pendekatan ini cenderung memperlakukan ekonomi sebagai panglima, memperlakukan lingkungan sebagai matrik alamiah dan memperlakukan yang sosial sebagai bagian yang kurang penting dan kurang pas dalam domain ekonomi dan lingkungan. Beberapa peneliti dan lembaga menambahkan bahwa dimensi keempat harus ditambahkan dalam dimensi pembangunan berkelanjutan yaitu kebudayaan (*culture*), karena tiga dimensi sebelumnya kurang bisa merefleksikan kompleksitas masyarakat kontemporer. Dalam konferensi dunia *United Cities and Local Governments* (UCLG) di Meksiko tanggal 17 November 2010 disepakai sebuah dokumen berjudul "*Culture: Fourth Pillar of Sustainable Development*". Dokumen ini menggarisbawahi sebuah perspektif baru tentang kebudayaan dan pembangunan melalui dua pendekatan: mengembangkan kebijakan kultural yang tepat dan mengadvokasikan dimensi kultural dalam semua kebijakan publik (UCLG, 2010). Keragaman kebudayaan diinterpretasikan sebagai elemen kunci dalam strategi baru untuk pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan memiliki beberapa kriteria atau indikator. Pertanyaannya, apa indikator pembangunan yang berkelanjutan atau yang dikenal dengan *sustainable development indices* (SDI)? Herman Daly, profesor kebijakan publik dari University of Maryland dan mantan ekonom Bank Dunia membuat tiga indikator yang dikenal dengan nama Daly Rules, yaitu:

1. *Renewable resources such as fish, soil, and groundwater must be used no faster than the rate at which they regenerate.*
2. *Nonrenewable resources such as minerals and fossil fuels must be used no faster than renewable substitutes for them can be put into place.*
3. *Pollution and wastes must be emitted no faster than natural systems can absorb them, recycle them, or render them harmless.*

Sebagai bagian dari negara yang turut menandatangani konvensi tentang pembangunan berkelanjutan, Indonesia mengambil bagian

dan bertanggung jawab pula dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Bagaimana perkembangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia? UUD 1945 mengamanatkan bahwa pembangunan harus mengadopsi prinsip “pembangunan berkelanjutan” dan prinsip pelestarian lingkungan. UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 mendefinisikan secara detail apa yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan. “Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.” UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 merupakan revisi terhadap UU Nomor 23 Tahun 1997 untuk mengawal proses pembangunan yang kita laksanakan didasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Dibandingkan UU sebelumnya, UU Nomor 32 ini lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan hukuman yang lebih berat terhadap pelaku tindak kejahatan yang merusak lingkungan. UU ini juga menetapkan langkah lebih detail proses dan langkah pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Jadi, proses mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan itu harus dilakukan sejak perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan hingga penegakan hukum.

UU PPLH Nomor 32 Tahun 2009 mempunyai aturan yang tegas mengenai pelanggaran-pelanggaran terhadap lingkungan. Sanksi yang dijatuhan bervariasi, baik menyangkut sanksi pidana yang dijatuhan maupun denda yang dikenakan. Daftar tentang sanksi terhadap pelanggar lingkungan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.2. Sanksi terhadap Pelanggaran Lingkungan Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009

Jenis Pelanggaran	Pidana		Denda (Rupiah)	
	Minimal	Maksimal	Minimal	Maksimal
Melakukan perbuatan mengakibatkan dilampaui baku mutu (Pasal 98)	3 tahun	10 tahun	3 milyar	10 miliar
Melakukan usaha tanpa AMDAL atau UKL-UPL dan izin lingkungan (Pasal 109)	1 tahun	3 tahun	1 miliar	3 miliar
Penjabat pemberi izin lingkungan tanpa AMDAL atau UKL-UPL (Pasal 111)	-	3 tahun	-	3 miliar
Penjabat pemberi izin lingkungan tanpa AMDAL atau UKL-UPL dan izin lingkungan (Pasal 111)	-	3 tahun	-	3 miliar
Tidak melakukan pengolahan limbah B3 (Pasal 103)	1 tahun	3 tahun	1 miliar	3 miliar
Memasukkan B3 (pasal 106)	5 tahun	15 tahun	5 miliar	15 miliar
Membakar lahan (pasal 108)	3 tahun	10 tahun	3 miliar	10 miliar
Tidak melakukan pengawasan (pasal 112)	-	1 tahun	-	500 juta
Memberikan informasi palsu (pasal 113)	-	1 tahun	-	1 miliar
Tidak melaksanakan perintah paksaan pemerintah	-	1 tahun	-	1 miliar

Menghalang-halangi pejabat pengawas dan/ atau PPNS (pasal 115)	-	1 tahun	-	500 Juta
Menyusun AMDAL tanpa sertifikat kompetensi (pasal 110)	-	3 tahun	-	3 miliar

Setiap negara, termasuk Indonesia memiliki arah kebijakan pembangunan, utamanya berkaitan dengan lingkungan hidup. Bagaimana arah pembangunan Indonesia dan kaitannya dengan lingkungan hidup? Indonesia kini tidak memiliki Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sebagai gantinya, Indonesia menetapkan Sistem Perencanaan Pembangunan, yang di dalamnya terdapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004–2009 dan masih akan berlanjut, ditetapkan tiga strategi pembangunan ekonomi, yaitu *pro growth*, *pro jobs*, dan *pro poor*. Disebutkan dalam RPJMN bahwa melalui strategi *pro growth*, diharapkan terjadi percepatan laju pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perbaikan distribusi pendapatan (*growth with equity*). Percepatan laju pertumbuhan ini ditandai dengan makin banyaknya kesempatan kerja tercipta serta memperkuat perekonomian untuk menghadapi berbagai goncangan. Hasilnya, terjadi perbaikan dalam pencapaian ekonomi. Dalam periode 1997–1999, krisis ekonomi telah menyebabkan volume perekonomian menyusut rata-rata minus 2,9 persen per tahun. Sementara itu, dalam periode 2000–2004, sebagai masa pemulihan ekonomi, perekonomian kembali tumbuh positif, sebesar 4,5 persen. Sementara itu, dalam periode 2005–2008, perekonomian tumbuh rata-rata 6 persen. Bahkan, jika sektor migas dikeluarkan, laju pertumbuhan sektor nonmigas sudah mendekati angka 7 persen per tahun yaitu 6,6 persen (2005–2008) jika dibandingkan dengan 5,4 persen dalam periode 2000–2004.

Pada tahun 2009 sampai dengan triwulan III, pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata sekitar 4,2 persen dan secara keseluruhan pada

tahun 2009 pertumbuhan ekonomi mencapai 4,3 persen. Kebutuhan untuk mengatasi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan target mempercepat laju pertumbuhan tersebut, tampaknya mendesak pemerintah untuk menggunakan strategi jangka pendek (*instant*), yaitu mengeksplorasi alam guna menghasilkan pendapatan (*income*). Sayangnya, eksplorasi alam tersebut tidak disertai upaya serius dalam pelestariannya.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan atau pertumbuhan ekonomi semata. Pembangunan juga menyangkut aspek lingkungan. Pemerintah reformasi menetapkan delapan misi pembangunan nasional, yang di dalamnya termasuk misi tentang lingkungan. Kedelapan misi tersebut adalah (1) mewujudkan masyarakat berakhhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila; (2) mewujudkan bangsa yang berdaya saing; (3) mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum; (4) mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu; (5) mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan; (6) mewujudkan Indonesia asri dan lestari; (7) mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan (8) mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. Lingkungan hidup tercakup dalam misi nomor enam dan nomor tujuh. Secara khusus, pembangunan lingkungan disebutkan secara eksplisit sebagai berikut.

Mewujudkan Indonesia asri dan lestari adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan

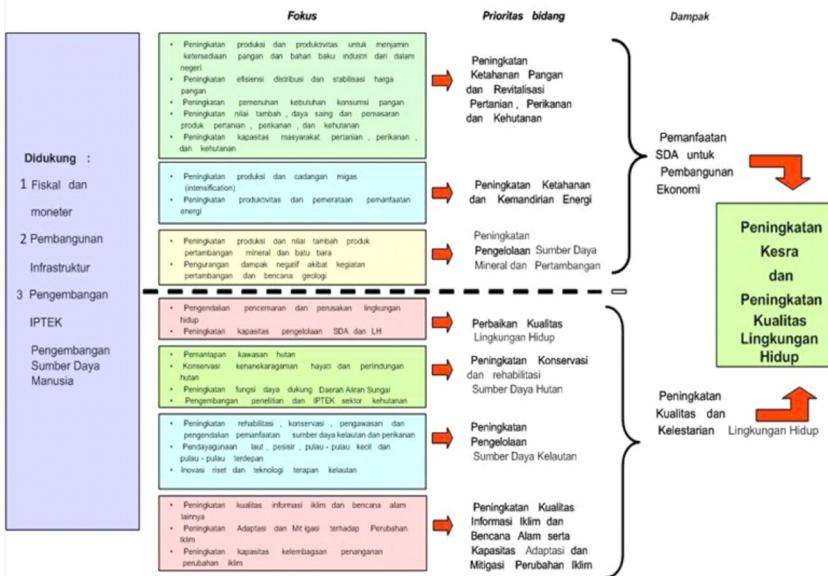
dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

Pemeliharaan lingkungan tidak hanya menyangkut ekosistem di daratan, tetapi juga menyentuh ekosistem kelautan. Hal ini beralasan, karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang dalam kebijakan pembangunan tidak hanya memanfaatkan daratan, tetapi juga wilayah laut atau lautan. Berikut ini adalah desain pembangunan yang berkenaan dengan kebaharian atau kelautan.

Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Pembangunan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan harus menjadi bagian penting dari pembangunan nasional Indonesia, karena pengelolaan yang bijak terhadap SDA dan lingkungan akan memberi manfaat pada dua hal. *Pertama*, peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Kedua*, menjaga kelestarian alam dan sumber daya yang ada di dalamnya yang dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang. Pendek kata, terdapat alur yang jelas antara peningkatan kesejahteraan dengan peningkatan lingkungan. Gambaran mengenai alur tersebut, dapat dicermati di bawah ini.

ALUR PEMBANGUNAN BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP



Gambar 7.1

Pembangunan di bidang lingkungan hidup ini merupakan perwujudan dari visi “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur” dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 butir keenam yaitu “Mewujudkan Indonesia asri dan lestari”. Dalam RPJPN, prioritas kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup pada RPJM 2010-2014 diarahkan pada: (1) penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat; (2) terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang; (3) mantapnya kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintahan; (4) terlaksananya pembangunan kelautan sebagai gerakan yang didukung oleh semua sektor.

Dalam rangka mendukung arah kebijakan dalam RPJP dan memperhatikan kondisi umum lingkungan hidup saat ini, maka

diperlukan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi dari hulu ke hilir dan didukung oleh program-program lintas sektor. Kebijakan ini diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas, yaitu mengelola daya dukung dan memulihkan kualitas daya tampung lingkungan hidup. Untuk mengelola daya dukung dan memulihkan kualitas daya tampung lingkungan hidup, kerangka regulasi diarahkan untuk mewujudkan lingkungan hidup yang dapat mendukung program pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Kebijakan pengelolaan daya dukung dan pemulihan kualitas daya tampung lingkungan hidup akan dicapai dengan strategi : (1) pengendalian dan pemantauan pencemaran pada air, lahan, udara, dan keanekaragaman hayati (kehati); (2) perbaikan kerangka regulasi dan peningkatan upaya penegakan hukum lingkungan secara konsisten; (3) perbaikan kualitas lingkungan melalui upaya rehabilitasi dan konservasi serta pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan; (4) penataan dan pengelolaan lingkungan yang harmonis dari hulu ke hilir; (5) peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan institusi pengelola lingkungan hidup; (6) peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat; (7) pengembangan penelitian pengelolaan lingkungan; (8) penyelesaian konflik pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan (9) pengembangan sumber-sumber pendanaan lingkungan alternatif.

Prioritas perbaikan kualitas lingkungan hidup difokuskan pada dua hal, yaitu: (1) pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, dengan indikator menurunnya tingkat pencemaran lingkungan dan meningkatnya usaha-usaha pengendalian perusakan lingkungan; dan (2) peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan indikator meningkatnya kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan ketersediaan data dan informasi untuk pengelolaan lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup yang baik memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan bencana. Konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang keberlanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana

untuk mengantisipasi perubahan iklim. Dalam kaitan ini, substansi inti program aksi bidang lingkungan hidup dan pengelolaan bencana adalah sebagai berikut.

1. Perubahan iklim, yaitu melalui peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut, peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500,000 ha per tahun, dan penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh di antaranya melalui kerja sama lintas kementerian terkait serta optimalisasi dan efisiensi sumber pendanaan seperti dana Iuran Hak Pemanfaatan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi.
2. Pengendalian kerusakan lingkungan, dilakukan dengan penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di 680 kegiatan industri dan jasa pada 2010 dan terus berlanjut; penurunan jumlah *hotspot* kebakaran hutan sebesar 20% per tahun dan penurunan tingkat polusi keseluruhan sebesar 50% pada 2014; penghentian kerusakan lingkungan di 11 Daerah Aliran Sungai yang rawan bencana mulai 2010 dan seterusnya.
3. Sistem Peringatan Dini, yaitu dengan penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS) dan Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) mulai 2010 dan seterusnya, serta Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) pada 2013.
4. Penanggulangan bencana, yakni melakukan peningkatan kemampuan penanggulangan bencana melalui: (a) penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi risiko serta penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 provinsi, dan (b) pembentukan tim gerak cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan peralatan dan alat transportasi yang memadai dengan basis di dua lokasi strategis (Jakarta dan Malang) yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa lingkungan sebenarnya sudah menjadi perhatian pemerintah sejak lama. Berbagai upaya serius telah dilakukan pemerintah untuk menangani persoalan lingkungan, tetapi mengapa masih dijumpai kerusakan lingkungan di berbagai wilayah? Ada tiga hal yang dapat menjelaskan persoalan tersebut. Pertama, ekonomi

masih menjadikan alam sebagai sumber penghasil pendapatan secara cepat. Kedua, program ekonomi dan program lingkungan jalan sendiri-sendiri, tidak disinergikan. Ketiga, penegakan hukum yang kurang konsisten bagi perusak lingkungan. Dalam kaitan ini, perlu ditegasan kembali prinsip pembangunan berkelanjutan dalam manajemen pembangunan. Pembuat kebijakan dan segenap komponen bangsa harus menyadari bahwa jumlah sumber daya terbatas, sedangkan kebutuhan manusia (*human needs*) cenderung tidak terbatas. Lingkungan hidup harus dilestarikan dan dipelihara agar dapat dimanfaatkan untuk generasi sekarang maupun yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan harus mewarnai esensi pembangunan nasional. Empat komponen yang harus dipenuhi dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu (1) pemenuhan kebutuhan manusia (*fulfillment of human needs*); (2) memelihara integritas ekologi (*maintenance of ecological integrity*); (3) keadilan sosial (*social equity*); (4) kesempatan menentukan nasib sendiri (*self determination*).

F. KEBUDAYAAN DAN ETIKA LINGKUNGAN

Kebudayaan tradisional lebih peduli dengan kondisi lingkungan karena masyarakat tradisional selalu mengaitkan antara tindakan yang kita lakukan dengan efeknya. Misalnya, masyarakat tradisional mempunyai keyakinan bahwa penunggu hutan akan marah, apabila kita merusak lingkungan. Contoh riil dari masyarakat yang memelihara lingkungan dengan baik adalah masyarakat Badui di Provinsi Banten. Apabila kita memasuki perkampungan suku Badui, kita merasakan udara yang segar, angin bertiup menggerakkan daun-daun hijau dari pohon-pohon yang besar dan rindang. Air sungai juga sangat jernih mengalir di antara bebatuan besar dan kecil. Masyarakat Badui tidak menggunakan listrik. Penggunaan sabun juga tidak diperkenankan. Apabila mandi, masyarakat menggunakan pembersih yang diperoleh dari alam. Selain suku Badui, di Sulawesi Selatan juga terdapat suku Kajang yang tinggal di Kabupaten Bulukumba. Masyarakat Kajang hidup sederhana dan sangat memegang adat istiadat mereka. Rumah-rumah tertata rapi di antara pohon besar. Masyarakat tidak menggunakan teknologi

modern seperti radio, televisi, atau *handphone*. Penerangan desa juga cukup menggunakan bintang-bintang di langit dan lampu-lampu di rumah ketika malam tiba. Hutan terawat dengan sangat baik. Mengapa demikian? Masyarakat memperlakukan hutan seperti seorang ibu yang harus dihormati dan dilindungi (Suriani, 2006).

Kearifan ekologis masyarakat Kajang tidak bisa dilepaskan dari prinsip hidup yang disebut *tallase kamase-masea*, yaitu perintah dari *Turie Ara'na* (Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Berkehendak) untuk hidup secara sederhana dan bersahaja. Berikut adalah beberapa ajaran kearifan tradisional masyarakat Kajang yang dicatat Restu dan Sinohadji (2008).

*Ammentengko nu kamase-mase, accidongko nu kamase-mase,
a'dakkako nu kamase-mase, a'meako nu kamase-mase,*

artinya berdiri engkau sederhana, duduk engkau sederhana, melangkah engkau sederhana, dan berbicara engkau sederhana.

*Anre kalumannyang kalupepeang, rie kamase-masea, angnganre na
rie, care-care na rie, pammalli juku na rie, koko na rie, bola situju-tuju,*
artinya kekayaan itu tidak kekal, yang ada hanya kesederhanaan, makan secukupnya, pakaian secukupnya, membeli ikan secukupnya, kebun secukupnya, rumah seadanya.

*Jagai lino lollong bonena, kammayatompa langika, rupa taua siagang
boronga,*

artinya, peliharalah dunia beserta isinya, demikian pula langit, manusia dan hutan.

Pesan-pesan di atas mengilustrasikan bagaimana masyarakat Kajang berpegang pada filosofi hidup yang menempatkan langit, dunia, manusia, dan hutan, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam suatu ekosistem yang harus dijaga keseimbangannya. Manusia dalam pandangan masyarakat Kajang hanyalah salah satu komponen dari makro kosmos yang selalu tergantung pada komponen lainnya. Manusia tidak lebih tinggi dari makhluk lainnya. Untuk itu, dalam berinteraksi dengan komponen makro kosmos lainnya, manusia tidak boleh bertindak sewenang-wenang karena akan merusak ekuilibrium yang telah tertata secara alami (Salle, 2000).

Tamsil Ibrahim (2006: 17) menjelaskan bagaimana efek prinsip hidup berdasar *kamase-masea* ini dalam pelestarian hutan. "Prinsip hidup sederhana seperti *Balla' situju-tuju* (rumah seadanya) mengakibatkan pemakaian kayu yang efisien, menjadikan hutan sebagai tempat yang multifungsi dan memiliki peran yang sangat penting dan sakral menjadikan hutan terjaga dengan lestari, meskipun bisa dimanfaatkan".

Ibrahim (2006) menjelaskan bagaimana masyarakat Kajang membagi kawasan hutan untuk melindungi hutan dari keserakahan manusia. Yang pertama adalah *Borong Karamaka* atau Hutan Keramat. Area ini adalah kawasan hutan yang terlarang untuk semua jenis kegiatan, terkecuali kegiatan atau acara-acara ritual. Penebangan, pengukuran, membunuh flora dan fauna tidak diperbolehkan. Hutan dianggap sebagai tempat kediaman leluhur. Hal ini diungkapkan secara jelas dalam sebuah *Pasang*, yaitu:

Talakullei nisambei kajua,

Iyato' minjo kaju timboa.

Talakullei nitambai nanikurangi borong karamaka.

Kasipalli tauwa a'lamung-lamung ri boronga,

Nasaba' se're wattu la rie' tau angngakui bate lamunna

Artinya,

Tidak bisa diganti kayunya,

Itu saja kayu yang tumbuh

Tidak bisa ditambah atau dikurangi hutan keramat itu.

Orang dilarang menanam di dalam hutan

Sebab suatu waktu akan ada orang yang mengakui bekas tanamannya.

Apabila peraturan tersebut dilanggar, akan dikenakan sanksi yang disebut *poko' ba'bala'*, yaitu sanksi atas pelanggaran berat, yaitu membayar Rp 1.200.000 ditambah dengan sehelai kain putih dan kayu yang diambil dari hutan keramat harus dikembalikan.

Kawasan kedua adalah *borong batasayya* (hutan perbatasan). Kawasan ini boleh diambil kayunya sepanjang persediaan kayu masih ada dan dengan seizin dari Amma Toa selaku pemimpin adat. Kayu

yang diambil dari hutan ini pun hanya boleh untuk membangun sarana umum, tidak untuk kepentingan pribadi. Hanya beberapa jenis kayu yang boleh ditebang, yaitu kayu Asa, Nyatoh, dan Pangi. Jumlahnya yang diminta harus sesuai dengan kebutuhannya, sehingga tidak jarang, kayu yang diminta akan dikurangi oleh Amma Toa, ketua adat Kajang. Dalam penebangan satu jenis pohon, maka seseorang harus menanam dua pohon yang sejenis di lokasi yang telah ditentukan oleh Amma Toa. Penebangan pohon itu memakai alat tradisional berupa kampak atau parang. Kayu yang habis ditebang harus dikeluarkan dari hutan dengan cara digotong atau dipanggul dan tidak boleh ditarik karena akan merusak tumbuhan lain yang berada di sekitarnya.

Kawasan ketiga disebut ‘borong luara’ atau hutan rakyat. Kawasan ini boleh dimanfaatkan masyarakat. Meskipun demikian, tidak boleh sewenang-wenang dalam memanfaatkan hutan ini. Menurut Ibrahim, yang ditakuti bukanlah saksi denda, tetapi sanksi sosial berupa pengucilan. Apalagi pengucilan ini akan berlaku bukan untuk si pelanggar, tetapi juga bagi seluruh keluarga sampai tujuh turunan.

Dalam kaitan ini, pertanyaan yang muncul adalah, mengapa masyarakat Kajang sangat menghargai hutan. Ibrahim menyebut empat alasan. *Pertama*, masyarakat percaya bahwa keberadaan mereka bersamaan dengan keberadaan hutan. *Kedua*, kehidupan mereka sangat erat dengan hutan, seperti pelaksanaan upacara adat yang dilakukan dalam hutan. *Ketiga*, masyarakat juga percaya bahwa hutan mereka merupakan tempat turunnya To Mariolo (manusia terdahulu). *Keempat*, mereka juga meyakini bahwa hutan adalah tempat turun naiknya arwah manusia dari langit ke bumi dan sebaliknya. Kepercayaan inilah yang menyebabkan kuatnya keterikatan antara komunitas ini dengan hutan, sehingga tidak mengherankan jika hutan mereka relatif stabil dan lestari hingga hari ini. Sebuah kearifan yang luar biasa bagaimana harus mengelola lingkungan hidup. Sayangnya, tidak banyak masyarakat yang menilai kearifan lokal sebagai suatu tindakan rasional. Padahal pandangan tersebut memiliki rasionalitas yang tinggi, karena terbukti dapat diimplementasikan oleh masyarakat. Masyarakat Badui atau Kajang

tidak mengenal istilah konservasi, tetapi perilaku mereka menunjukkan tindakan konservasi, sehingga pemeliharaan lingkungan menjadi bagian dari hidup mereka sehari-hari.

G. GAYA HIDUP KONSUMTIF

Apa yang berlangsung di pusat-pusat kota berlawanan dengan apa yang terjadi di suku Badui dan suku Kajang. Di kota, kekayaan ditumpuk-tumpuk, hidup semewah-mewahnya, dan apa saja bisa dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Karena jika tercapai, harga diri akan meningkat. Oleh karena itu, hutan pun dirusak, uang negara juga dikorupsi. Kita menyaksikan saat ini, di samping pertumbuhan pendudukan yang tidak terkendali, gaya hidup yang mengarah pada *over konsumtivisme* juga merusak lingkungan. *Over konsumsi* adalah gaya hidup untuk mengkonsumsi secara berlebihan. Konsumsi dalam hal ini tidak selalu berkaitan dengan makanan. Dalam definisi sosiologi, konsumsi adalah penggunaan sesuatu, bisa apa saja, dengan tujuan memuaskan sesuatu. Manusia modern cenderung menunjukkan kelas sosialnya dengan barang-barang yang dikonsumsinya. Orang yang memiliki mobil mewah, IPAD atau komputer canggih tentu dianggap kelas sosial yang berbeda dengan orang yang hanya menggunakan mobil atau *handphone* kuno. Orang sekarang banyak berganti alat komunikasi, rumah mewah, dan mobil juga canggih, karena ingin mengikuti perkembangan gaya hidup (*lifestyle*) di kota.

Gaya hidup tersebut dapat merusak lingkungan. Neolaka (2008) mengeksplorasi daftar gaya hidup yang merusak lingkungan: (1) gaya hidup yang menekankan pada kenikmatan, foya-foya, berpesta pora; (2) gaya hidup yang mementingkan materi; (4) gaya hidup yang konsumtif; dan (5) gaya hidup yang mementingkan diri sendiri. Ada satu gaya hidup yang semakin menggejala yaitu gaya hidup “sedenter”. Gaya hidup “sedenter” adalah gaya hidup yang enggan repot sedikit untuk selalu bergerak menggunakan tubuh. Orang-orang zaman dahulu ke sekolah, ke warung, dan ke kebun berjalan kaki. Sekarang ke mana-mana menggunakan kendaraan. Ke warung untuk belanja pun harus

naik motor. Sayangnya secara sosiologis sekarang kita hidup pada masa di mana kemampuan untuk bisa *over konsumtif* adalah menjadi ukuran kebahagiaan. Gaya hidup orang yang paling kaya biasanya akan menjadi standar untuk menentukan kebahagiaan. Mengapa sekarang banyak orang merasa sedih tanpa tahu sebabnya? Sebabnya adalah mereka tidak bisa mengikuti cara hidup bahagia yang ditetapkan oleh media atau khalayak dengan standar orang kaya.

Hal ini sejalan dengan gagasan Emil Salim (1987), yang mengatakan proses pembangunan dengan pengembangan lingkungan tidak cukup mengatur hanya pengelolaan sumber alam secara bertanggung jawab, tetapi harus dilengkapi dengan langkah usaha pengembangan konsumsi dan pola hidup yang wajar sesuai dengan kemampuan daya dukung alam menopangnya sambung sinambung untuk jangka panjang. Hakikat pembangunan adalah perubahan dan hakikat dari kebudayaan adalah upaya manusia untuk menyempurnakan diri dalam kondisi hidupnya. Oleh karena itu, manusia harus merumuskan strategi, memahami dan menginterpretasikan secara baik dari berbagai gejala dan peristiwa yang terdapat dalam suatu lingkungan tertentu. Kebudayaan, dalam hal ini, memiliki model-model kognitif yang berperan sebagai kerangka untuk memahaminya.

H. KESADARAN DAN ETIKA LINGKUNGAN

Sudah saatnya manusia modern dan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah mengembangkan pola hidup yang berdimensi lingkungan. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengembangkan model pembangunan yang berdimensi lingkungan tersebut. Akan tetapi, disadari bahwa pembangunan yang berwawasan lingkungan, dalam arti pembangunan berkontribusi pada perawatan dan perbaikan lingkungan juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Kerusakan lingkungan yang terjadi selama ini tidak bisa diserahkan tanggung jawabnya kepada pemerintah, tetapi juga sebagai akibat dari kebiasaan sehari-hari masyarakat yang tidak mendukung lingkungan. Penyebab kerusakan lingkungan dapat ditelusuri dari pola pikir masyarakat. Oleh karena itu,

persoalan lingkungan juga harus dilihat dari perspektif “*local and little drama*” atau drama kecil, dan drama lokal yang terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga kita dan dalam lingkungan belajar atau kerja kita. Semua itu memang bermula dari kehidupan komunitas dalam lingkup terkecil. Karena itulah, setiap individu ataupun kelompok masyarakat dalam komunitas terkecil hingga besar harus dapat mengubah pola pikir, dari yang berorientasi pada manusia atau antroposentis ke ekosentris. Pandangan antroposentis berbahaya bagi keberlanjutan lingkungan karena lingkungan dipandang sebagai sumber kehidupan yang dibutuhkan oleh manusia, sehingga eksploitasi besar-besaran untuk kepentingan memenuhi kebutuhan manusia tidak menjadi persoalan. Sementara itu, pandangan ekosentris memperlihatkan bahwa lingkungan harus dipelihara, dijaga, diperbaiki, dan dikembangkan agar selain dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, juga ada kontribusi dari manusia untuk menjaga kelangsungan kehidupan lingkungan yang muara akhirnya untuk kehidupan manusia. Hal ini akan menjaga kehidupan secara berkelanjutan, tidak hanya dari aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga aspek ekologi.

Dalam kaitan dengan persoalan kehidupan yang berkelanjutan, Ernest Collenbach (1999: 24–28) menuliskan tujuh kaidah untuk kehidupan yang berkelanjutan. Kaidah ini menggantikan cara lama yang dijadikan masyarakat sebagai kaidah dalam mengelola kehidupan selama ini.

1. Sampah dan Limbah

Kaidah lama: orang modern merasa bahwa membeli tisu dan membuangnya di tempat sampah lebih murah dan lebih mudah dilakukan daripada menggunakan sapu tangan yang bisa dicuci kembali. Kaidah lama mengatakan “beli murah dan buang”.

Kaidah baru: dalam kaidah alam sebenarnya tidak ada yang dibuang. Kita harus belajar meniru kaidah dan siklus alam dengan mendaur ulang apa saja, plastik, metal, beton, aspal, dan sebagainya.

2. Biaya

Kaidah lama: masyarakat modern hanya mengenal biaya ekonomi, sementara ada biaya ekologis, budaya, sosial, dan psikologis. Kaidah

lama berbunyi: "hitung biaya ekonomi!"

Kaidah baru: "hitung semua biaya, baik secara biologis, sosial, maupun ekonomi."

3. Penduduk

Kaidah lama: "banyak anak, banyak rejeki"

Kaidah baru: "dua anak cukup."

4. Energi

Kaidah lama: energi bahan bakar dari fosil lebih murah daripada tenaga buruh, oleh karenanya tidak menjadi persoalan jika menggunakan bahan bakar dari fosil.

Kaidah baru: penggunaan energi secara tradisional menimbulkan kerusakan lingkungan. Energi dari tambang batu bara merusak permukaan tanah, minyak mencemari atmosfer dengan karbondioksida, nuklir juga sangat tinggi risikonya.

Kaidah baru: "Gunakan tenaga matahari, angin, biomas, atau *geothermal*."

5. Kebahagiaan

Kaidah lama: orang modern merasa bahagia bila membeli dan memiliki barang-barang mewah.

Kaidah baru: kebahagian berasal dari hubungan dengan keluarga, teman, lingkungan, masyarakat, dan alam.

6. Hubungan dengan Makhluk Lain

Kaidah lama: kekayaan alam dieksplorasi manusia terutama oleh perusahaan. Manusia dianggap lebih tinggi daripada alam.

Kaidah baru: manusia adalah bagian dari alam. Keduanya memiliki hubungan setara sebagai makhluk Tuhan.

7. Masa Depan

Kaidah lama: hanya generasi sekaranglah yang dihargai. Biarlah generasi masa depan memikirkan masa depan.

Kaidah baru: "pikirkan dampak segala tindakan kita terhadap tujuh generasi mendatang."

Lingkungan harus dipelihara dengan baik oleh manusia. Dalam kaitan ini, Collenbach (1999: 35) juga menulis tentang sepuluh perintah lingkungan yang harus diperhatikan untuk memelihara lingkungan.

1. Kau harus mencintai dan menghormati bumi karena karunianya

- memberkahi hidupmu dan menentukan kelangsungan hidupmu.
2. Kau harus menjadikan hari-harimu suci bagi bumi dan merayakan pergantian musimnya.
 3. Kau tidak boleh menjadikan dirimu lebih tinggi dari makhluk lainnya apalagi memusnahkan mereka.
 4. Kau harus berterimakasih atas makananmu pada makhluk dan tumbuhan yang memeliharamu.
 5. Kau harus membatasi jumlah keturunanmu, karena tambahnya keturunan akan membebani bumi.
 6. Kau tidak boleh membunuh atau menya-nyiakan kekayaan bumi dengan menggunakannya untuk perang.
 7. Kau tidak boleh mencari keuntungan dari bumi, tetapi berjuang untuk memulihkan kemegahannya yang rusak.
 8. Kau tidak boleh sembunyi dari kesalahan atas tindakanmu atau orang lain terhadap bumi.
 9. Kau tidak boleh mencuri sesuatu dari generasi mendatang dengan meracuni dan mengikis bumi.
 10. Kau harus menggunakan harta benda secara tidak berlebihan agar bisa dinikmati oleh semua orang dan semua makhluk.

I. PENDEKATAN MASALAH KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN

Seperti diuraikan sebelumnya bahwa untuk memahami keterkaitan antara lingkungan dan kependudukan, ilmuwan sosial telah menjelaskan beberapa teori. Paling tidak, ada lima perspektif yang dominan: (1) perspektif linear yang dikembangkan oleh Malthus dan Boserup; (2) perspektif multiplikatif; (3) perspektif mediasi; (4) perspektif pembangunan-dependency; dan (5) perspektif sistem kompleks.

1. Perspektif Linear

Robert Malthus menyimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan mengakibatkan kelangkaan di bidang makanan. Hal ini karena pertumbuhan penduduk mengikuti sistem eksponensial (1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya), sedangkan pertumbuhan makanan mengikuti sistem linear (1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya). Kita menyaksikan

saat ini sawah tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga karena dibagi-bagi dengan banyak orang. Pekarangan yang dulu bisa diandalkan untuk mendukung ekonomi keluarga, sekarang tidak bisa lagi karena telah beralih tangan dan beralih fungsi. Setelah Malthus, Boserup datang dengan konseptualisasi yang baru, menulis setelah revolusi industri. Boserup melihat dampak teknologi terhadap lingkungan.

2. Perspektif Multiplikatif

Dalam perspektif ini, postur penduduk berinteraksi secara multiplikatif dengan faktor-faktor yang lain untuk menciptakan dampak lingkungan. Salah satu perspektif multiplikatif adalah I=PAT seperti dibahas sebelumnya. Dalam perspektif I=PAT, faktor-faktor ini berinteraksi, bukan sebagai faktor yang berdiri sendiri. Shaw (1989) telah mengembangkan sebuah alternatif dalam skema multiplikatif, di mana aspek interaktif antara penduduk, konsumsi dan teknologi lebih ditegaskan lagi. Shaw membedakan antara sebab utama (*ultimate causes*), atau faktor pendorong (*driving factors*) kerusakan lingkungan, dan faktor yang memperburuk (*aggravating factors*). Dalam kasus kerusakan lingkungan, konsumsi dan teknologi merupakan *ultimate causes*, sedangkan penduduk merupakan *aggravating factors*, yang menambah intensitas pengaruh terhadap lingkungan.

3. Perspektif Mediasi

Beberapa penelitian memfokuskan perhatian pada “konteks” di mana interaksi penduduk dan lingkungan terjadi. Konteks itu seperti faktor sosial, politik, kultural, dan institusional. Karena faktornya banyak, maka banyak model dalam perspektif ini. Bilsborrow (1992) mengembangkan perspektif mediasi untuk memahami dampak pertumbuhan penduduk terhadap produksi dan pemanfaatan lahan pertanian di Latin Amerika. Kerangka ini melihat bagaimana kondisi sosio-ekonomi seperti kemiskinan, kebijakan pemerintah, dan tuntutan pasar menentukan apakah pertumbuhan penduduk berakibat pada perubahan teknologi dalam pertanian, kerusakan tanah atau migrasi. Kajian yang lain fokus pada faktor sosial dan kultural ketimbang faktor ekonomi dan faktor kebijakan (McNicoll, 1990; Hogan, 1992).

4. Perspektif Dependensi

Perspektif dependensi melihat “pembangunan” sebagai suatu proses yang memengaruhi bagaimana kependudukan dan lingkungan berinteraksi. Perspektif ini menekankan diri pada peran sentral lembaga politik dan ekonomi transnasional dalam mendiktekan model pembangunan tertentu kepada negara-negara sedang berkembang, sehingga berakibat pada kerusakan lingkungan.

5. Perspektif Sistem Kompleks

Perspektif sistem kompleks memandang faktor mediasi serta lingkungan dan kependudukan sebagai sistem kompleks yang terkait satu sama lain. Tujuan pendekatan ini adalah untuk memahami bagaimana sistem ekologi dan sistem yang dibuat manusia (sosiolultural, demografi, dan ekonomi) berkaitan satu sama lain membentuk “sistem sosio-ekologi” yang lebih besar (Gallopin et. Al. 1988 dalam Catherine 1997). Dalam hal ini, lingkungan dan kependudukan berelasi satu sama lain. Pendekatan ini mengkaji bagaimana sistem sosial merefleksikan adaptasi pada suatu ekosistem dan bagaimana sistem sosial yang dibuat manusia membentuk ekosistem alam (Dummond 1975; Hawley 1986; Netting 1986 dalam Catherine 1997). Dalam pendekatan ini, perubahan struktural berskala besar seperti proses-proses pembangunan, berakibat pada pergeseran radikal dalam sistem sosial, sistem ekologi, dan keterkaitan antardua sistem tersebut.

Setiap pendekatan mempunyai konseptualisasi dan metodologi yang berbeda-beda. Masing-masing pendekatan juga mempunyai kelemahan dan kelebihan. Pendekatan Malthus dan Bosscher menawarkan proposisi yang jelas mengenai keterkaitan antara lingkungan dan kependudukan. Akan tetapi, sulit mengoperasikan konsep Malthus dan Bosscher, misalnya tekanan kependudukan atau perubahan teknologi sebagai variabel yang bisa diukur. Pendekatan multiplikatif memberikan rumus yang bisa dihitung untuk mengukur kerusakan lingkungan. Kendati demikian, pendekatan ini juga cenderung mereduksi fenomena kompleks dalam generasiasi, sehingga kehilangan karakteristik lokal yang

justru menjadi kunci untuk memahami keterkaitan antara lingkungan dan kependudukan. Pendekatan mediasi lebih sensitif pada faktor lokal, tetapi ide tentang mediasi sendiri bersifat ambigu karena arah, prioritas, dan bagaimana interaksi antara “*mediating socio-economic factors*”, kependudukan dan lingkungan tidak selalu jelas. Sistem kompleks memberikan spesifikasi yang lebih detail mengenai mediasi, tetapi memerlukan informasi yang komprehensif lintas sektor dan dari level yang berbeda-beda yang bisa jadi sulit dianalisis.

Untuk memahami lingkungan diperlukan sistem sensus yang tepat untuk memahami keterkaitan antara manusia dan lingkungan hidup. *Pertama*, sensus yang mencatat data kependudukan saja tidak memberikan informasi yang cukup mengenai kondisi kependudukan dan lingkungannya. *Kedua*, penelitian makro tentang kependudukan juga perlu dilengkapi dengan penelitian mikro di rumah tangga, di desa, dan satuan-satuan kecil untuk melihat dampaknya bagi lingkungan.

J. RANGKUMAN

Dari berbagai uraian di atas sangat jelas keterkaitan antara manusia, lingkungan hidup, dan kebudayaannya. Manusia hidup di dunia dengan segala fasilitas alam yang dapat dimanfaatkan. Perkembangan penduduk yang mengikuti deret ukur menyebabkan sumber daya alam dan lingkungan tidak mampu memenuhi kebutuhan manusia, sehingga eksploitasi alam dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia menyebabkan lingkungan rusak. Lingkungan rusak karena lima hal, yaitu model pembangunan yang *pro growth*, tetapi tidak *pro alam*, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, *over konsumsi*, teknologi yang tidak ramah lingkungan, keserakahan manusia, dan sikap mengeksplorasi alam yang menjadikan alam sebagai bawahan hidup manusia.

Salah satu upaya konseptual dalam menangani masalah penduduk perkotaan dan lingkungan adalah “konsep pembangunan kota yang berwawasan lingkungan hidup”. Tujuan pembangunan kota berwawasan lingkungan adalah bagaimana perkotaan bisa menjamin kehidupan

manusia yang selaras dengan alam. Takashi Inoguchi, Edward Newman, dan Glen Pauletto (2003) memandang perlunya kebijakan perkotaan guna memenuhi kebutuhan mendesak untuk mengurangi beban lingkungan di perkotaan, mengurangi polusi udara dan air, memperkecil dan mengatur sampah rumah tangga dan sampah industri, mengatur sistem air secara efisien dan seadil mungkin, merawat tempat-tempat rekreasi yang alamiah dan menyenangkan, memperkecil ketidakmampuan penduduk dalam menghadapi bencana alam, merencanakan pembangunan perumahan yang sesuai dengan kebutuhan umat manusia, dan secara umum menekankan kesejahteraan umat manusia dan kesinambungan ekologis di wilayah perkotaan.

Dalam perspektif yang lebih luas, para pengambil kebijakan harus menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pembangunan tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan atau pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga menyangkut aspek lingkungan. Pemerintah reformasi menetapkan delapan misi pembangunan nasional, yang di dalamnya termasuk misi tentang lingkungan. Kedelapan misi tersebut adalah (1) mewujudkan masyarakat berakhhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila; (2) mewujudkan bangsa yang berdaya saing; (3) mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum; (4) mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu; (5) mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan; (6) mewujudkan Indonesia asri dan lestari; (7) mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan (8) mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. Lingkungan hidup tercakup dalam misi nomor enam dan nomor tujuh. Secara khusus, pembangunan lingkungan disebutkan secara eksplisit sebagai berikut.

Mewujudkan Indonesia asri dan lestari adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam

kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

Kebudayaan dengan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat dapat menjadi salah satu strategi dalam membangun lingkungan yang ramah bagi kehidupan masyarakat. Beberapa komunitas tradisional di pedesaan memiliki kearifan lokal dalam merawat dan memelihara lingkungan. Masyarakat Badui dan Kajang merupakan contoh dari komunitas yang melaksakan misi konservasi lingkungan, utamanya hutan yang menjadi daerah kehidupan mereka. Masyarakat Kajang merupakan masyarakat yang sangat ramah dengan lingkungan kehidupannya. Masyarakat Kajang menghargai hutan karena empat alasan. *Pertama*, masyarakat percaya bahwa keberadaan mereka bersamaan dengan keberadaan hutan. *Kedua*, kehidupan mereka sangat erat dengan hutan, seperti pelaksanaan upacara adat yang dilakukan dalam hutan. *Ketiga*, masyarakat juga percaya bahwa hutan mereka merupakan tempat turunnya *To mariolo* (manusia terdahulu). *Keempat*, mereka juga meyakini bahwa hutan adalah tempat turun naiknya arwah manusia dari langit ke bumi dan sebaliknya. Kepercayaan inilah yang menyebabkan kuatnya keterikatan antara komunitas ini dengan hutan, sehingga tidak mengherankan jika hutan mereka relatif stabil dan lestari hingga hari ini. Sebuah kearifan yang luar biasa bagaimana harus mengelola lingkungan hidup. Sayangnya, tidak banyak masyarakat yang menilai kearifan lokal sebagai suatu tindakan rasional. Padahal pandangan tersebut memiliki rasionalitas yang tinggi karena terbukti dapat diimplementasikan oleh masyarakat. Masyarakat Badui atau Kajang tidak mengenal istilah konservasi, tetapi perilaku mereka menunjukkan tindakan konservasi, sehingga pemeliharaan lingkungan menjadi bagian dari hidup mereka sehari-hari.

Masyarakat Badui dan Kajang merupakan contoh masyarakat yang menghargai kehidupan dan alam yang mendukung kehidupan mereka. Mereka telah memiliki konsep bagaimana mengembangkan kehidupan yang berkelanjutan. Dalam kaitan dengan persoalan kehidupan yang berkelanjutan, Ernest Collenbach mengemukakan tujuh kaidah untuk kehidupan yang berkelanjutan. Kaidah ini menggantikan cara lama yang dijadikan masyarakat sebagai kaidah dalam mengelola kehidupan selama ini.

1. Sampah dan Limbah

Kaidah lama: orang modern merasa bahwa membeli tisu dan membuangnya di tempat sampah lebih murah dan lebih mudah dilakukan daripada menggunakan sapu tangan yang bisa dicuci kembali. Kaidah lama mengatakan “beli murah dan buang”.

Kaidah baru: dalam kaidah alam sebenarnya tidak ada yang dibuang. Kita harus belajar meniru kaidah dan siklus alam dengan mendaur ulang apa saja, plastik, metal, beton, aspal dan sebagainya.

2. Biaya

Kaidah lama: masyarakat modern hanya mengenal biaya ekonomi, sementara ada biaya ekologis, budaya, sosial dan psikologis. Kaidah lama berbunyi: “hitung biaya ekonomi!”

Kaidah baru: “hitung semua biaya, baik secara biologis, sosial, maupun ekonomi.”

3. Penduduk

Kaidah lama: “banyak anak, banyak rejeki”

Kaidah baru: “dua anak cukup.”

4. Energi

Kaidah lama: energi bahan bakar dari fosil lebih murah daripada tenaga buruh, oleh karenanya tidak menjadi persoalan jika menggunakan bahan bakar dari fosil.

Kaidah baru: penggunaan energi secara tradisional menimbulkan kerusakan lingkungan. Energi dari tambang batu bara merusak permukaan tanah, minyak mencemari atmosfer dengan karbon dioksida, nuklir juga sangat tinggi resikonya.

Kaidah baru: “Gunakan tenaga matahari, angin, biomas, atau geothermal.”

5. Kebahagiaan

Kaidah lama: orang modern merasa bahagia bila membeli dan memiliki barang-barang mewah.

Kaidah baru: kebahagian berasal dari hubungan dengan keluarga, teman, lingkungan, masyarakat, dan alam.

6. Hubungan dengan Makhluk Lain

Kaidah lama:kekayaan alam dieksplorasi manusia terutama oleh perusahaan. Manusia dianggap lebih tinggi daripada alam.

Kaidah baru: manusia adalah bagian dari alam. Keduanya memiliki hubungan setara sebagai makhluk Tuhan.

7. Masa Depan

Kaidah lama: hanya generasi sekaranglah yang dihargai. Biarlah generasi masa depan memikirkan masa depan.

Kaidah baru: “pikirkan dampak segala tindakan kita terhadap tujuh generasi mendatang.”

BAB VIII

GENDER DAN PEMBANGUNAN

Dalam bab VIII dijelaskan dua konsep pokok, yaitu gender dan pembangunan, pendekatan gender dalam pembangunan, serta ketimpangan gender dalam berbagai bidang. Dalam gender dan pembangunan dibahas konsep gender, jenis kelamin, dan kodrat, serta bagaimana gender disosialisasikan kepada masyarakat. Pendekatan gender yang dibahas dalam bab ini adalah *Women in Development* (WID) dan *Gender and Development* (GAD). Berkaitan dengan perbedaan gender tersebut, bab ini juga akan mengelaborasi berbagai kesenjangan gender, baik dalam aspek pendidikan, aspek hukum, aspek kesehatan, aspek politik, aspek ekonomi, dalam dunia kerja dan dielaborasi pula tentang konsep gender dalam era globalisasi.

A. KONSEP GENDER DAN PEMBANGUNAN

1. Pendahuluan

Dalam beberapa wacana yang berkembang di masyarakat, tidaklah salah jika ditanyakan tentang sosok perempuan ideal, jawabnya adalah sebagai ibu dan istri yang baik. Ketika pertanyaan yang sama diajukan pada sekelompok perempuan di Jawa Tengah, mereka juga menjawab dengan jawaban seperti tersebut, dan ketika ditanyakan lagi, ibu dan istri yang baik itu yang bagaimana, mereka menjawab yang menurut pada suami, yang merawat anak-anaknya (Abdullah, 1997). Perempuan sebagai istri dan ibu yang baik, harus selalu patuh dan berada di samping suami dan anak-anak serta mendorong keberhasilan suami. *Blue-print* semacam ini berkembang dan ikut dilanggengkan oleh institusi dan pranata yang ada dalam masyarakat, sehingga memengaruhi cara pandang tidak saja oleh laki-laki terhadap sosok perempuan, tetapi juga terhadap perempuan itu

sendiri dalam memandang sosok dirinya dan mengambil tempat dalam berbagai proses sosial dalam masyarakat.

Agaknya gambaran tersebut sudah tidak bisa dipertahankan terus menerus secara absolut, mengingat seiring dengan kemajuan zaman banyak perempuan ke luar rumah untuk bekerja mencari nafkah, demi menopang kehidupan ekonomi rumah tangga. Pada tataran berikutnya, mulai berkembang fenomena bahwa ada juga perempuan bekerja ke luar rumah karena aspirasi dan aktualisasi diri.

Fenomena perginya seorang perempuan ke luar rumah untuk bekerja seolah menandakan adanya “gugatan” terhadap ideologi familisme yang selama ini menjadi anggapan di masyarakat bahwa perempuan adalah sosok yang *nrimo*, selalu menurut dan merawat anak dan suami. Beban atau tugas-tugas tersebut merupakan tugas rutin perempuan yang ditempatkan sosoknya sebagai ibu dan istri.

Bagaimanapun, slogan “partisipasi perempuan dalam pembangunan” yang selalu didengungkan sejak zaman Orde Baru turut memicu semangat para perempuan untuk bekerja ke luar rumah. Era industrialisasi yang mulai dikembangkan juga mempunyai andil yang besar bagaimana perempuan berbondong-bondong meninggalkan sektor domestik ke dunia publik. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa keduanya juga telah banyak terbukti menyebabkan termarginalisasinya kaum perempuan.

Pilihan perempuan untuk keluar rumah bekerja akan membawa berbagai implikasi baik sosial, ekonomi, politis, dan psikologis. Dunia kerja yang selama ini selalu dianggap milik laki-laki sebagai dunia publik mulai mendapat “penghuni” baru yang namanya perempuan yang selama ini selalu diasumsikan “menghuni” dunia domestik, dunia “rumahan”. Tentu saja pergeseran ini akan membawa berbagai dampak pada perempuan, laki-laki dan masyarakat secara umum.

Dengan mulai maraknya perempuan bekerja ke luar rumah, menyebabkan terbentuknya pengalaman baru bagi kaum perempuan, sehingga mereka menjadi “sosok yang lain” dibandingkan jauh

sebelumnya. Oleh karenanya, kajian dan definisi baru tentang eksistensi perempuan dan pemahaman tentang konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang telah melahirkan sosok baru tersebut merupakan bidang kajian yang cukup penting. Pemahaman akan sosok perempuan akan menjadi lebih bermakna, manakala perempuan itu sendiri didengar, menyangkut bagaimana mereka memandang diri mereka, apa keinginan-keinginan mereka, atau bahkan apa ambisi mereka, sehubungan dengan perubahan eksistensi yang mereka alami.

Untuk itu, ada tiga proses dalam pembentukan realitas sosial yang perlu ditentukan: konstruksi, dekonstruksi, dan rekonstruksi. Konstruksi merupakan susunan realitas objektif yang telah diterima dan menjadi kesepakatan umum, meskipun di dalam proses konstruksi itu tersirat dinamika sosial. Dekonstruksi terjadi pada saat keabsahan realitas (objektif) perempuan mulai dipertanyakan kemudian melahirkan suatu rekonstruksi yang merupakan proses rekonsensualisasi dan redefinisi eksistensi perempuan.

2. Konsep Gender, Jenis Kelamin, dan Kodrat

Sejak lima belas tahun terakhir kata gender telah memasuki perbendaharan kata setiap diskusi dan tulisan sekitar perubahan sosial dan pembangunan dunia ketiga. Demikian juga di Indonesia, hampir semua uraian tentang program pembangunan masyarakat maupun pembangunan di kalangan organisasi nonpemerintah selalu diperbincangkan masalah gender. Kita masih terkaget-kaget manakala setiap pembicaraan tentang gender selalu membicarakan sosok perempuan dan laki-laki, yang ini sama artinya mendekonstruksi tatanan atau konstruksi sosial yang sudah mapan.

Untuk memahami konsep gender harus dibedakan dengan konsep jenis kelamin atau seks. Jenis kelamin merupakan pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu (Fakih, 1996). Misalnya, manusia jenis kelamin laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, jakun, dan memproduksi sperma, sedangkan manusia jenis kelamin perempuan adalah manusia

yang memiliki rahim, payudara, vagina, dan mempunyai indung telur. Organ-organ tersebut secara biologis melekat pada diri manusia laki-laki dan perempuan secara permanen dan tidak dapat dipertukarkan karena merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan kodrat. Berbeda dengan jenis kelamin, gender dipahami sebagai suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan karena dikonstruksikan secara sosial dan kultural. Karena konstruksi tersebut berlangsung selama terus menerus dan dilanggengkan dalam berbagai pranata sosial, maka seolah-olah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan tersebut “merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh keduanya”. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, keibuan, *nrimo*, *manut*, tidak *neko-neko*. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Sebenarnya ciri atau sifat itu sendiri merupakan sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya, ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara ada pula perempuan yang kuat, rasional, perkasa, tanpa harus saling bertukar jenis kelamin. Perubahan sifat-sifat yang dikonstruksikan pada laki-laki dan perempuan tersebut dapat berubah dari tempat ke tempat lain, dari waktu ke waktu, dan dari masyarakat yang berbeda. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat laki-laki dan perempuan, yang bisa berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat lainnya, itulah yang dikenal dengan konsep gender. Jadi, selama hal itu bisa dipertukarkan, bisa dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan namanya bukan kodrat, tetapi konstruksi gender.

Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun, yang menjadi persoalan ternyata di banyak kasus perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan. Untuk memahami bagaimana perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan gender, dapat dilihat melalui berbagai manifestasi ketidakadilan yang ada, seperti marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi perempuan, subordinasi, pembentukan stereotip atau pelabelan negatif, kekerasan, beban kerja yang lebih banyak, serta sosialisasi ideologi peran gender.

Konstruksi gender inilah yang tampaknya suka atau tidak harus mulai didekonstruksi sesuai dengan tuntutan zaman. Sosok perempuan sekarang ini sudah sangat jauh berbeda dengan sosok perempuan pada waktu lampau. Oleh karenanya, untuk memahami siapa sebenarnya sosok perempuan yang ada, maka perlu didengar juga ‘suara’ perempuan yang selama ini selalu tersembunyi. Semakin banyak perempuan ke luar rumah untuk bekerja merupakan salah satu tanda adanya ‘gugatan ideologi familialisme’ dan merupakan pertanda bahwa perempuan telah merekonstruksi sejarah hidupnya.

3. Sosialisasi Peran Gender

Sejarah perbedaan gender (*gender differences*) antara laki-laki dan perempuan sudah berlangsung melalui proses yang sangat panjang. Terbentuknya perbedaan-perbedaan gender disebabkan oleh banyak hal, di antaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksikan secara sosial dan kultural melalui ajaran keagamaan dan politik negara. Melalui proses panjang, sosialisasi gender akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan yang tak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dipahami sebagai kodrat laki-laki dan perempuan.

Sebaliknya, melalui dialektika dan konstruksi sosial, yang tersosialisasikan secara evolusional dan perlahan memengaruhi biologis masing-masing jenis kelamin. Misalnya, karena konstruksi sosial, laki-laki harus bersifat kuat dan agresif. Itulah sebabnya, kaum laki-laki terlatih dan tersosialisasi serta termotivasi untuk menjadi atau menuju ke sifat yang dikonstruksikan tersebut, yakni secara fisik lebih kuat dan lebih besar karena “harus kuat dan perkasa”. Sebaliknya, kaum perempuan harus lemah lembut dan bersikap pasif. Perempuan pun terlatih dan termotivasi untuk “menjadi sosok perempuan yang diinginkan” masyarakat, yaitu perempuan yang penurut dan lemah lembut.

Proses sosialisasi sudah dimulai sejak bayi. Bayi perempuan dibelikan pakaian yang berwarna lembut dan cerah seperti *pink*, *orange*, dan sebagainya. Bayi perempuan ditimang, digendong dengan lemah

lembut, dielus, bak porselen, dijaga sejak bayi sampai dewasa, diproteksi sedemikian rupa seolah-olah dunia luar itu begitu menakutkan bagi makhluk yang bernama perempuan. Sementara itu, bayi laki-laki selalu dipilihkan warna-warna kuat seperti biru, abu-abu, hijau, hitam, dan sebagainya. Jika menangis dikatakan “anak laki-laki tak pantas menangis”, dan tepukan-tepuhan yang sedikit keras boleh diberikan untuk bayi laki-laki karena dia harus menjadi seorang laki-laki yang kuat dan tegar. Bayi laki-laki disosialisasi dengan hal-hal yang jantan dan diperkenalkan dengan dunia yang dianggap milik laki-laki. Karena sosialisasi tersebut, maka tidak saja berpengaruh terhadap perkembangan emosi dan visi kaum perempuan dan laki-laki, tetapi juga memengaruhi perkembangan fisik biologis selanjutnya.

Dari perlakuan sehari-hari, misalnya mainan yang disediakan, semua jenis mainan diarahkan pada peran stereotip gender. Bagi anak perempuan yang dianggap cocok adalah mainan *pasaran*, boneka, berperan sebagai guru, berperan sebagai perawat, bahkan sejak anak masih kecil sudah meminjam baju, tas, dan sepatu ibunya agar dia bisa dianggap sebagai ibu. Bahkan anak perempuan juga berlatih meoles bibir dengan lipstik. Sebaliknya, bermain bola, bermain perang-perangan, bermain mobil-mobilan, bermain kapal terbang, dan bermain kelereng, dianggap permainan keras yang cocok untuk laki-laki. Peran stereotip gender ini berlanjut ketika anak-anak tersebut menjadi besar, seperti membantu ibu di dapur, membersihkan rumah, mengasuh adik, dan urusan domestik lainnya menjadi tanggung jawab anak perempuan. Hal ini berlanjut sampai dewasa meskipun perempuan bekerja dan berkariere bagus, dia tetap harus bertanggung jawab terhadap urusan domestik, semantara laki-laki tetap dianggap sebagai kepala keluarga yang urusannya mencari nafkah dan tidak bertanggung jawab terhadap urusan domestik, meskipun pada akhir-akhir ini banyak perempuan menjadi kepala keluarga yang mencari nafkah, tetapi tak pernah diakui.

Sosialisasi yang berlangsung secara mapan dan lama akhirnya menjadi sulit dibedakan, apakah yang selama ini ‘dilekatkan’ pada laki-laki dan perempuan itu kodrat atau konstruksi sosial. Namun sepanjang

setiap hal yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan itu bisa dipertukarkan, maka hal tersebut sama sekali bukan kodrat melainkan konstruksi sosial.

Dewasa ini masih banyak terjadi peneguhan yang tidak pada tempatnya di masyarakat, di mana apa yang sesungguhnya merupakan konstruksi sosial justru dianggap sebagai kodrat. Justru sebagian besar warga masyarakat yang menganggap suatu aktivitas sebagai “kodrat perempuan” sesungguhnya merupakan konstruksi sosial dan kultural. Misalnya saja sering diungkapkan bahwa mendidik anak, mengelola, dan merawat kebersihan dan keindahan rumah, atau urusan domestik lain sering dianggap sebagai ‘kodrat perempuan’. Padahal kenyataannya, kaum perempuan yang dipandang memiliki peran gender dalam hal tersebut sejatinya merupakan konstruksi sosial kultural dalam masyarakat tertentu. Oleh karena itu, boleh jadi urusan mendidik anak, membersihkan rumah, memasak, dan mencuci bisa dilakukan oleh laki-laki. Oleh karena jenis pekerjaan tersebut bisa dipertukarkan dan tidak bersifat universal, apa yang sering disebut sebagai kodrat perempuan atau takdir Tuhan atas perempuan, dalam kasus ini sesungguhnya adalah gender atau konstruksi sosial (Fakih, 1996).

Sosialisasi peran gender tersebut menimbulkan rasa bersalah dalam diri perempuan jika tidak melaksanakan tugas-tugas domestik tersebut, sedangkan bagi kaum laki-laki, tidak saja merasa bukan tanggung jawabnya, tetapi juga banyak tradisi secara adat melarang laki-laki terlibat dalam urusan domestik. Beban kerja tersebut menjadi dua kali lipat bagi kaum perempuan yang juga bekerja di luar rumah. Namun bagi mereka yang secara ekonomi cukup, pekerjaan domestik ini dilimpahkan kepada pihak lain yakni pembantu rumah tangga. Proses ini mengandung arti terjadi pemindahan marginalisasi dan subordinasi beban kerja dari istri ke para pembantu yang kebanyakan juga perempuan.

Semua manifestasi ketidakadilan gender tersebut saling terkait dan saling memengaruhi. Hal itu tersosialisasikan kepada laki-laki dan perempuan secara mantap, lambat laun akhirnya baik laki-laki maupun perempuan menjadi terbiasa. Pada akhirnya dipercaya bahwa peran

gender itu seolah-olah merupakan kodrat. Lambat laun terciptalah suatu struktur dan sistem ketidakadilan gender yang diterima dan sudah menjadi hal yang tak lagi dapat dirasakan sebagai sesuatu yang salah.

B. PENDEKATAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

1. Perempuan dan Pembangunan

Makin maraknya perempuan pergi ke luar rumah ini tak lepas dari ‘perjuangan’ panjang selama ini. Dimulai adanya gerakan *Women in Development* (WID) yang berasumsi bahwa penyebab keterbelakangan perempuan adalah karena mereka tidak berpatisipasi dalam pembangunan. WID yang dicitakan sebagai kritik atas pembangunan (*developmentalism*) juga dianggap telah gagal menjalankan tugasnya, karena program ini hanya mampu menjawab persoalan dan kebutuhan praktis jangka pendek kaum perempuan. Tanpa analisis gender, diskursus pembangunan telah gagal menjawab kebutuhan strategis kaum perempuan, yakni suatu proses jangka panjang untuk mentransformasikan baik keyakinan dan ideologi ketidakadilan gender maupun struktur kekuasaan yang tidak adil yang dibangun berlandaskan keyakinan dan ideologi gender.

Dengan cepat WID menjadi satu-satunya kebijakan yang berkaitan dengan perempuan di hampir semua negara dunia ketiga. Pada tahun 1974, PBB memproklamirkan *International Decade of Women*, dan sejak saat itulah biro WID mulai dibuka di USAID. Pada saat itulah pengetahuan, kebijakan, sumber informasi, telah diciptakan dan diekspor guna memengaruhi jutaan nasib kaum perempuan di dunia ketiga. Sejak saat itu pula hampir serentak semua pemerintah dunia ketiga memasukkan agenda WID ke dalam program pembangunan masing-masing. Departemen urusan peranan perempuan pun menjadi mode di hampir semua pemerintah dunia ketiga.

Ideologi gender di atas memengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia dan dibentuklah organisasi PKK dan Dharma Wanita mulai tingkat pusat sampai daerah. *Blue-print* semacam PKK, peranan perempuan dalam pembangunan dibawa pada nilai-nilai modernisasi

yang berorientasi pada produktivitas, efisiensi, dan rasional seperti di negara-negara industri. Mereka semata-mata hanya mengerti hidangan yang sehat bergizi, terampil bekerja, dan mendidik anak secara modern dan rasional, mengatur pengeluaran keluarga yang efisien dan efektif. Namun, tidak dipahami bahwa idealisasi semacam itu membawa keterasingan sosial, karena beratnya peran ganda yang harus mereka perankan bagi orang lain, dan bukan bagi diri mereka sendiri. Asumsi dasar semacam ini salah kaprah karena memandang kaum perempuan seakan-akan sebagai entitas yang tunggal, yaitu ibu rumah tangga. Sementara, banyak hal belum disentuh oleh Dharma Wanita dan PKK, seperti bagaimana perempuan harus ‘berkembang’ sesuai dengan perubahan realitas sosial. Bagaimana perempuan yang ‘terpaksa dan harus’ memasuki dunia kerja harus siap bersaing dengan lingkungan dan rekan kerjanya, dan bagaimana marginalisasi perempuan bekerja harus diberdayakan tidak saja secara fisik, tetapi juga secara psikis.

Gencarnya slogan WID membuat perempuan digalang dan diaktifkan agar berpartisipasi dalam pembangunan, bukannya pembangunan yang diubah menurut kebutuhan perempuan. Ketika PBB mencanangkan dasawarsa wanita 1975-1985 ada empat pendekatan yang diperkenalkan, yaitu kesejahteraan, kebutuhan praktis gender, antikemiskinan, efisiensi, dan kesetaraan. Pendekatan keempat sedikit lebih maju dan memandang usaha peningkatan martabat perempuan, yaitu pada saat apakah mereka mendapatkan kebutuhan strategis gender. Yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana posisi tawar menawar dalam masyarakat dan pembangunan. Namun, dalam program-program Dharma Wanita dan PKK, aspek kesetaraan kurang ditekankan. Dharma Wanita dan PKK cenderung mengintegrasikan perempuan dalam keseluruhan ambisi pembangunan yang pragmatis, modernis, dan berorientasi pada pertumbuhan, sehingga tidak secara substansial mengarah pada perbaikan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Secara teoretis, model tersebut tidak memandang perempuan sebagai subjek, tetapi objek pembangunan. Akibatnya dibentuklah program kebijakan secara *top down*, yang memandang perempuan sebagai bagian integral dari program pembangunan. Kebutuhan

perempuan diterjemahkan sebatas pada pertimbangan pembangunan yang masih berlandaskan pada nilai-nilai gender yang timpang.

Woman in Development (WID) tidak secara jeli melihat posisi marginal perempuan dalam pembangunan. Sebagai akibat modernisasi WID, manusia diibaratkan sebagai suatu yang serba modern dan berorientasi pada nilai-nilai modern, seperti pendidikan, keluarga kecil sejahtera, beretos pembangunan yang efisien dan produktif, terbuka terhadap informasi dan teknologi, dan lain-lain. Namun selama ini usaha dibidang politik dan struktural tidak ditangani secara serius. Kebijakan Keluarga Berencana (KB) misalnya, masih membebani kaum perempuan dan perempuan menjadi alat kontrol kelahiran. Dengan demikian, kebijakan pemerintah tentang perempuan itu sendiri belum ada, karena program-program “kewanitaan” yang dijalankan selama ini berporos pada kebijakan yang berbasis kependudukan dengan menekankan partisipasi perempuan demi terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera demi suksesnya “pembangunan negara”.

2. Gender dalam Pembangunan

Pendekatan yang diharapkan dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan WID dan diharapkan dapat memberdayakan perempuan adalah pendekatan *Gender And Development* (GAD). Akar permasalahan dalam pendekatan GAD terletak pada subordinasi perempuan yang tidak hanya disebabkan oleh laki-laki, tetapi juga karena masih adanya pola-pola tekanan dalam masyarakat akibat kolonialisme dan sisa-sisanya yang belum terhapuskan dalam neokolonialisme. Itulah sebabnya, pendekatan GAD selalu mengarah pada penyelesaian isu-isu struktural perempuan, yaitu isu-isu yang mempertanyakan dominasi pihak-pihak yang kuat terhadap yang lemah. GAD memandang pentingnya partisipasi negara dalam menunjang emansipasi perempuan dan negara memiliki tugas untuk menyediakan jasa sosial yang selama ini disediakan oleh perempuan secara individual, seperti perawatan anak dan kesehatan. Pendekatan ini diharapkan dapat memperbaiki pendekatan sebelumnya dengan mengakui pentingnya analisis kelas, ras, gender, dan

pembangunan, sebagai masalah yang harus menjadi pusat perhatian (Harsono, 1997).

Hal ini berarti, model GAD tidak hanya memperhatikan perempuan, tetapi pada konstruksi sosial gender dan pemberian peran tertentu pada perempuan dan laki-laki. Lebih jauh, model ini melihat perempuan lebih sebagai agen perubahan dari perubahan sosial dan bukan hanya sebagai penerima bantuan pembangunan yang pasif. Melalui pendekatan pemberdayaan perempuan (*empowerment*), mereka dijadikan subjek dari perencanaan program dan mengevaluasi bersama program-program tentang mereka. Dengan cara ini dapat dicari penyelesaian masalah bersama melalui metode-metode yang demokratis, bukan sekadar penyuluhan-penyuluhan yang bersifat *top down*. Transformasi sosial semacam ini hanya bisa terjadi lewat pembentukan solidaritas perempuan yang mulai terorganisasi.

Pendekatan gender dalam pembangunan pada intinya adalah kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam semua bidang pembangunan. Oleh karena itu, dalam setiap kebijakan pembangunan di berbagai bidang (poleksosbudkum hankam) harus menggunakan analisis gender dengan memperhatikan kepentingan strategis dan kepentingan praktis gender. Hal ini berarti bahwa setiap kebijakan tidak boleh merugikan salah satu pihak dan harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kedua belah pihak.

C. KETIMPANGAN GENDER DI BERBAGAI BIDANG

Meskipun pendekatan gender sudah sering dijadikan wacana, namun pada praktiknya masih belum seperti yang diharapkan. Masih banyak ketimpangan-ketimpangan gender. Hal itu sangat merugikan tidak saja bagi kaum perempuan, tetapi juga kaum laki-laki.

1. Ketimpangan Gender di Bidang Politik

Kesempatan perempuan untuk masuk dalam bidang politik sebenarnya ada dan memungkinkan, namun karena berbagai faktor hal itu jarang sekali terjadi. Faktor utamanya adalah pandangan stereotip

bahwa dunia politik adalah dunia publik, dunia yang keras, dunia yang memerlukan akal, dunia yang penuh debat, dan dunia yang membutuhkan pikiran-pikiran cerdas, kesemuanya itu diasumsikan milik laki-laki bukan milik perempuan. Perempuan tidak pantas berpolitik karena perempuan adalah ‘penghuni’ dapur, tidak bisa berpikir rasional dan kurang berani mengambil risiko, kesemuanya itu sudah menjadi stereotip perempuan. Akibatnya, baik perempuan atau laki-laki dan masyarakat secara umum sudah menarik kutub yang berbeda bahwa dunia publik milik laki-laki dan dunia domestik milik perempuan. Hal ini juga berkaitan dengan sosialisasi peran gender. Faktor lain adalah, ketimpangan-ketimpangan gender dalam sosial budaya mengakibatkan jumlah perempuan yang mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi, lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Akibatnya, karena perempuan tak mempunyai pengetahuan yang memadai, maka dia tidak bisa berkiprah dalam dunia politik. Selain itu, pemahaman politik di kalangan perempuan juga masih rendah mengingat dunia politik adalah “milik laki-laki”, sehingga masyarakat memandang tidak perlu memberi pemahaman politik kepada kaum perempuan.

Perempuan hanya dibutuhkan di bidang politik jika kaum laki-laki atau politikus akan meraih suatu posisi puncak atau jabatan politik tertentu. Perempuan digunakan sebagai martir, dikorbankan atau digunakan sebagai senjata untuk mencapai tujuan para politisi yang kebanyakan kaum pria. Misalnya, untuk kampanye mendukung suami dikalangan dharma wanita, ibu-ibu PKK, dan kelompok-kelompok pengajian.

Sejarah telah membuktikan bagaimana kaum perempuan hanya merupakan martir saja. Di kawasan Asia Selatan dan Tenggara, ada beberapa pemimpin politik bahkan presiden perempuan. Namun hal ini bukan karena mereka memang dianggap mampu menduduki jabatan tersebut, tetapi lebih pada untuk mengisi kekosongan karena pemerjaraan atau kematian salah seorang anggota keluarganya yang laki-laki (suami, adik, dan sebagainya). Contoh nyata yang bisa dilihat adalah Benazir Bhutto mengambil alih kepemimpinan *Pakistan People Party* sejak ayahnya, Zulfikar Ali Bhutto, dipenjarakan dan akhirnya

dihukum gantung oleh Presiden Zia Ul Haq, penggantinya. Kematian laki-laki anggota keluarga sebagai pemimpin politik sebagai martir juga menunjang naiknya Corazon Aquino, Sirimavo Bandanararike, Khaleda Zia, dan Aung San Suu Kyi.

Di Indonesia, naiknya Megawati sebagai presiden menggantikan Gus Dur, pertama dia ditolak meskipun sebenarnya dia merupakan pemimpin partai pemenang pemilu dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal, bahkan menggunakan dalil-dalil agama yang dipolitisasi untuk menghambat naiknya Megawati. Kemudian, pada tahap berikutnya dia ‘dijadikan presiden’ hanya untuk mengisi kekosongan dan ternyata hanya sebagai boneka para pelaku politik yang kesemuanya adalah laki-laki. Para ulama dan lawan politik yang dulu menentang mati-matian naiknya Megawati sebagai presiden dengan menggunakan dalil-dalil agama, malahan menjadi pendukung setianya. Terlepas bagaimana kepemimpinan Megawati sebagai presiden, yang jelas dia diangkat sebagai kepala partai bukan karena kepandaian berpolitiknya melainkan karena dia adalah anak Soekarno yang kharismatik. Diharapkan Megawati akan mewarisi karisma Bapaknya. Jadi, kasus Mega ini hampir sama dengan Cory di Filipina meskipun tidak sama persis. Berbeda dengan Indira Gandhi, Benazir Bhutto, dan Aung San Suu Kyi, mereka memang memiliki basis pendidikan politik dan sekaligus basis pendukung meskipun hal itu lebih sebagai upaya menggantikan anggota keluarga yang dibunuh atau dipenjara.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, pada Pasal 2 Ayat (2) disebutkan bahwa pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Demikian pula, pada Pasal 2 Ayat (5) ditentukan bahwa Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Afirmasi tentang kuota 30% bagi perempuan untuk menduduki posisi pada kepengurusan parpol ini dapat dicermati dalam dua hal. Pertama,

dilihat dari segi keberhasilan masuknya pasal keterwakilan perempuan tersebut bisa disebut sebagai suatu keberhasilan atau kemenangan kaum perempuan yang berhasil mengegolkkan pasal tersebut. *Kedua*, bisa juga dipandang sebagai kekalahan terselubung dan kebohongan politik jika parpol hanya merekrut perempuan tanpa keahlian politik masuk ke kepengurusan partai. Hal ini berarti perempuan hanya menjadi stempel partai, yang penting kuota terpenuhi dan tidak menyalahi UU. Akibat yang tampak adalah banyak pengurus partai dari kalangan perempuan yang tidak bisa berbuat apa-apa ketika mereka menjadi anggota legislatif dan mereka tidak mampu menyuarakan kaum perempuan karena kalah jumlah dan kualitas dari legislator laki-laki. Kalau demikian halnya, apalah artinya kuota 30% perempuan. Untuk apa ada kebijakan kuota 30% perempuan jika mereka tidak bisa menyuarakan kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi perempuan (tak sensitif gender). Akan lebih baik tidak usah dibatasi, tetapi kualitas dan perspektifnya adalah sensitif gender. Tak akan ada gunanya mengumpulkan banyak perempuan, tetapi mereka tidak mengetahui aspirasi dirinya dan kaumnya. Lebih baik banyak orang entah laki-laki atau perempuan yang penting mereka peka gender.

2. Ketimpangan Gender dalam Bidang Ekonomi

Banyak hal yang terkait dengan ekonomi yang menyebabkan perempuan tak diakui perannya karena kiprahnya hanya di seputar ekonomi keluarga dan rumah tangga. Masih sedikit pengakuan pada kaum perempuan ketika mereka sukses dan berhasil menjadi pelaku ekonomi karena hal itu dianggap hanya kerja main-main bukan kerja yang prestisius, seperti halnya yang dilakukan oleh laki-laki. Kiprah laki-laki di dunia ekonomi diakui karena mereka bisa masuk pada level penentu kebijakan dan duduk pada jabatan-jabatan strategis di kantor-kantor yang terkait dengan perekonomian. Sementara perempuan belum banyak yang menduduki level tersebut, akibatnya kegiatan perempuan dibidang ekonomi yang terpusat pada sekitar keluarga dan dirinya sendiri meskipun menghasilkan, bahkan menjadi penunjang hidup keluarga, tak diakui dan hanya dianggap sebagai pekerja sambilan.

Krisis ekonomi yang berakibat di-PHK-nya laki-laki menyebabkan kaum perempuan tampil menjadi penyelamat hidup keluarganya, mereka melakukan kerja apa saja asal bisa bertahan hidup, menjadi TKW, jualan makanan, menjadi tukang cuci, menjadi buruh di pabrik-pabrik, dan sebagainya. Namun jerih payah mereka tetap belum diakui sebagai nafkah utama melainkan hanya nafkah tambahan. Hal ini sebenarnya terjadi sudah sejak lama, akibat adanya revolusi hijau di mana masuk alat-alat modern dan bibit padi yang unggul, perempuan mulai tersingkir dari dunia pertanian, mereka mulai merambah industri di kota-kota sekitar.

Banyak hal lain yang masih mencerminkan ketimpangan dibidang ekonomi, misalnya upah perempuan lebih rendah daripada laki-laki untuk tanggung jawab yang sama besar karena perempuan dianggap lajang, bukan kepala keluarga. Bila akan mengajukan kredit ke bank, masih harus memerlukan tanda tangan suami, sementara jika suaminya yang mengajukan tak perlu minta tanda tangan istri, meskipun kenyataannya nanti istri yang bertanggung jawab terhadap utang tersebut. Dalam dunia kerja masih banyak hal-hal yang mendiskriminasikan kaum perempuan baik ketika rekrutmen maupun dalam tugas.

3. Ketimpangan Gender dalam Dunia Kerja

Membicarakan perempuan bekerja selalu tidak terlepas dari perdebatan ranah publik dan ranah domestik. Selama ini ranah domestik (rumah tangga) selalu diasumsikan sebagai dunia perempuan dan ranah publik (dunia kerja) selalu diasumsikan dunia laki-laki. Melihat kenyataan bahwa perempuan dalam berbagai kasus lebih *mobile* daripada laki-laki, lebih aktif dalam berbagai aktivitas, dan terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan. Sudah selayaknya pembagian dua ranah yang selalu dipertentangkan tersebut layak dipertanyakan, masihkah perlu pembedaan tersebut? Pembagian struktur yang menempatkan perempuan dalam bidang domestik dan laki-laki dalam bidang publik, sesungguhnya merupakan struktur yang membedakan wilayah kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Karena bidang publik dianggap sebagai

bidang yang lebih penting dalam keseluruhan proses sosial, maka perempuan cenderung tersubordinasi karena ia menempati bidang yang kurang penting. Statistik resmi yang tidak menghitung keterlibatan perempuan dalam pekerjaan rumah tangga, sesungguhnya merupakan salah satu bentuk diskriminasi perempuan (Abdullah, 2000). Tidak jarang perempuan berusaha di sekitar rumah untuk menyambung hidup, bahkan tak jarang hasilnya lebih besar, namun secara statistik tak akan pernah tampak.

Pergeseran dari domestik ke publik, seperti juga proses feminisasi secara umum, tidak memberikan basis penting bagi tawar menawar kekuasaan. Cara-cara semacam ini sesungguhnya ikut mereproduksi realitas tentang stratifikasi bidang kegiatan, di mana bidang publik dinilai lebih tinggi daripada bidang domestik. Usaha mendorong perempuan untuk lebih terlibat dalam bidang publik, sama halnya memaksa perempuan untuk meninggalkan dunia domestik yang dianggap kurang prestisius. Dengan kata lain, angka-angka yang diperoleh adalah angka partisipasi perempuan bukan kualitas yang semakin baik (Abdullah, 1997). Akibatnya, perempuan yang bekerja di luar rumah mencari nafkah harus bisa menampilkan dirinya dan kemampuannya yang sama dengan laki-laki, paling tidak seperti yang diinginkan laki-laki, karena dunia kerja selama ini dianggap milik laki-laki.

Masalah klasik yang kemudian muncul seiring dengan keterlibatan perempuan di dunia kerja ini adalah, bagaimana perempuan tetap dapat menjalankan peran sebagai ibu dan istri ketika dia bekerja, apakah dunia publik sudah siap menerima kehadiran perempuan dalam dunia kerja, apakah cukup kondusif dunia kerja yang ada bagi perempuan, yang akhirnya banyak kita jumpai diskriminasi-diskriminasi perempuan di dunia kerja. Sementara pertanyaan-pertanyaan yang sama tidak pernah muncul manakala yang bekerja adalah laki-laki (suami). Banyak kasus sering kita baca dan kita dengar di berbagai media, menunjukkan betapa “luar rumah” merupakan tempat yang tidak aman dan tidak nyaman. Ketidakamanan dunia kerja merupakan fakta yang dapat diamati di berbagai tempat dan kasus (pabrik, kantor, mal, dan lain-lain).

Gambaran kerasnya dunia publik tersebut menunjukkan bahwa perempuan belum diakui sebagai pekerja profesional. Konsep perempuan sebagai ibu dan istri mengalami perluasan ke sektor publik yang seharusnya menghargai profesionalisme. Perempuan sebagai objek masih mendapatkan penekanan saat mereka terlibat dalam bidang publik, padahal perempuan sudah mampu memainkan peran sebagai subjek dalam berbagai proses ekonomi. Sektor publik tampak belum disiapkan untuk menerima kehadiran perempuan dengan semestinya. Hal ini memaksa perempuan untuk selalu berusaha “menjadi laki-laki” di dunia kerja. Dia harus bersaing ketat dengan rekan sesama kerja yang tidak saja laki-laki tetapi juga perempuan. Dia harus menunjukkan kemampuannya bahwa dia tidak seperti *blue-print* yang selama ini ada, hanya bisa menjadi ibu dan istri, tetapi juga harus menunjukkan bahwa dia juga bisa menjadi pekerja yang profesional. Karena rekan kerjanya yang laki-laki belum bisa menerima kehadiran “ibu rumah tangga” di dunia kerja, kalupun sudah, pastilah masih dianggap pekerja kelas dua, yang berbeda dengan laki-laki. Untuk semua itu tentu ada nilai yang harus dibayar (*cost ideology*) dan disediakan oleh perempuan yang bekerja. Dia harus bisa mengatur waktu sedemikian rupa sehingga dia merasa tidak menyalahi kodrat sebagai perempuan. Kodrat perempuan ini juga terus direproduksi dalam diskursus-diskurus sehingga perempuan menjadi semakin terbelenggu dan terkekang oleh slogan dan harapan yang ada dalam masyarakat.

Gejala keterlibatan perempuan ke luar rumah untuk bekerja, menandakan bahwa perempuan telah berusaha merekonstruksi sejarah hidupnya dengan membangun identitas baru bagi dirinya tidak hanya sebagai istri/ibu, tetapi juga sebagai pekerja dan perempuan karier. Namun demikin, dalam keterlibatan semacam ini, bukan tanpa biaya, perempuan harus mengeluarkan banyak biaya yang tak disadari untuk memasuki dunia kerja. Kecenderungan ini sangat dipengaruhi sistem kosmologi yang memandang perempuan sebagai “pendatang” dalam dunia kerja. Ketika melamar pekerjaan seorang perempuan tidak saja dipandang kualitas intelektualitasnya, melainkan juga sosok dan

statusnya sebagai perempuan. Biaya ideologis yang harus dibayar adalah perempuan harus mampu memenuhi kriteria tersebut, tidak hanya berkualitas, tetapi dia juga berusaha menampilkan diri habis-habisan agar sebagai pendatang dia bisa diterima. Karena dalam kekuasaan kapitalisme yang cenderung patriarkat, masih memandang tubuh dan seksualitas perempuan menjadi penentu dalam melamar pekerjaan.

Media masa ikut mereproduksi kekuasaan kapitalisme dalam dunia kerja, melalui iklan dan tayangan televisi selalu ditampilkan citra seorang perempuan kerja yang punya karier bagus dengan penampilan yang wangi dan segala fasilitas yang modern. Perempuan kerja digambarkan aktif, pintar, bersih, wangi, dan atribut lain perempuan “kantoran” yang enak dan sedap dipandang. Akibat lebih jauh, iklan-iklan yang ada mereproduksi kepentingan kapitalisme dengan menampilkan sosok perempuan dalam produknya yang kadang-kadang tidak relevan dengan iklannya. Demikian pula, sosok ibu rumah tangga tak luput dari kepentingan kapitalisme, bagaimana dunia dapur dan rumah tangga dieksplorasi habis-habisan di dunia iklan, menyebabkan banyak ibu-ibu rumah tangga merasa ingin seperti yang ditampilkan dalam iklan meskipun sebenarnya tak ada kaitannya dengan peran dan fungsi dirinya. Dengan demikian, iklan di media tidak saja menguntungkan kapitalisme, tetapi juga menggelisahkan perempuan karena selalu ingin tampil seperti dalam iklan. Oleh karenanya, banyak perempuan beramai-ramai membangun citra dirinya seperti sosok yang diharapkan dunia publik, cantik, pintar, cerdas, dan elegan.

Perempuan yang bekerja menyandang banyak beban akan berimplikasi terhadap segala aspek kehidupannya. Sudah pasti ketika dia bekerja akan ada pergeseran-pergeseran peran dalam kehidupan rumah tangganya. Akan terjadi evaluasi dalam rumah tangganya. Dari seorang perempuan yang dianggap selalu berada di rumah tiba-tiba harus keluar rumah bekerja, tentu ada situasi yang memerlukan diskusi lebih jauh. Pengaruh sebagai perempuan yang punya penghasilan tersendiri juga perlu pemahaman menyeluruh karena di banyak kasus ternyata kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh perempuan tidak secara

langsung menaikkan posisi tawar menawar mereka dalam keluarga dan dalam masyarakat (Astuti, 2000)

4. Ketimpangan Gender dalam Pendidikan

Pendidikan yang dimaksud di sini adalah semua jenjang pendidikan yang ada secara umum. Pendidikan dimulai sejak anak-anak pada usia dini. Anak-anak pada usia dini seharusnya sudah menerima suatu hal yang benar, bukan lagi hal-hal yang ikut melanggengkan stereotip yang ada. Dengan cara demikian, diharapkan anak-anak menjadi lebih egaliter dan dapat menghargai sesama.

Pendidikan yang pertama dan utama adalah pendidikan di keluarga. Hal ini karena di dalam keluargalah anak lebih banyak tinggal daripada di sekolah. Dalam lingkungan keluarga proses wawasan diturunkan dan sosialisasi berlangsung. Dalam masyarakat modern sekalipun, keluarga tetap masih memainkan peran penting dalam pendidikan. Meskipun semakin banyak dukungan-dukungan yang menekan pandangan bahwa pendidikan adalah hak semua individu. Akan tetapi, dalam kenyataan orang tua tetap memegang peran penting dalam memutuskan jenis pendidikan dan kualitas pendidikan yang akan diterima anaknya (Raharjo, 1994).

Dalam waktu yang bersamaan, keluarga juga merupakan agen yang amat ampuh untuk pembaruan-pembaruan. Seorang ibu dan atau bapak, tidak selalu menurunkan pada anak-anaknya aturan, norma, dan nilai yang sama dengan yang pernah diterimanya dari orang tuanya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pendidikan, globalisasi, gaya hidup, perubahan nilai termasuk perubahan peran stereotip gender. Realitasnya menunjukkan bahwa semakin banyak pasangan muda sekarang yang tidak lagi ketat mengikuti atau mempercayai peran stereotip gender, meskipun dari yang banyak tersebut masih bisa dibilang sedikit.

Dalam hal pendidikan formal, perempuan di seluruh dunia menghadapi problem yang sama. Dibanding lawan jenisnya, kesertaan perempuan dalam pendidikan formal jauh lebih rendah. Di negara-

negara dunia ketiga di mana pendidikan dasar belum diwajibkan, jumlah murid perempuan umumnya hanya separuh atau sepertiga dari jumlah murid laki-laki. Di negara yang mewajibkan pendidikan dasar, perbedaan jumlah itu tetap ada bahkan melonjak dratis segera setelah pendidikan wajib berakhir. Jumlah murid perempuan yang tidak meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, lebih banyak dibandingkan jumlah murid laki-laki, dan umumnya mereka yang meneruskan pendidikan dari keluarga yang mampu. Demikian pula, dalam jenjang pendidikan tinggi, kesertaan perempuan sangat rendah dan umumnya terbatas pada bidang-bidang ilmu sosial, humaniora, dan bidang pendidikan.

Faktor kendala kesertaan perempuan umumnya ada dua, *pertama*, proses sosialisasi peran gender membuat perempuan merasa berkewajiban memenuhi harapan budaya dan tradisi: mengabdi pada keluarga, menjadi istri yang baik, kesadaran akan posisi subordinatnya menyebabkan perempuan sering kali menjadi submisif, membatasi atau membendung aspirasinya dan enggan mendayagunakan potensi yang dimilikinya secara optimal. *Kedua*, sistem nilai budaya dan pandangan keagamaan kurang mendukung kesertaan perempuan dalam pendidikan. Pandangan stereotip beranggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, karena semakin tinggi sekolahnya semakin sulit untuk mendapatkan jodoh. Selain itu, prioritas pendidikan masih diperuntukkan bagi laki-laki yang kelak akan menjadi pencari nafkah. Perempuan sedikit sekali dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan, sehingga kebijakan pendidikan yang dihasilkan cenderung bersifat andosentrис, semata-mata berorientasi pada kepentingan murid laki-laki.

Sistem pendidikan yang berlaku di sekolah cenderung memperkuat ketimpangan gender dan stereotip peran gender. Kegiatan belajar dalam kelas pada umumnya bersifat diskriminatif dan merugikan murid perempuan. Guru cenderung menaruh harapan dan perhatian lebih besar kepada murid laki-laki dibanding dengan murid perempuan. Hasil penelitian di beberapa negara menunjukkan bahwa murid laki-laki di sekolah dasar dan lanjutan ditanyai gurunya 3 hingga 8 kali lebih

banyak daripada murid perempuan. Kemampuan dan minat murid laki-laki, terutama terhadap ilmu atau *science* terus didorong dan dibina, sementara pengembangan kemampuan dan minat murid perempuan terabaikan. Tidak mengherankan apabila kemampuan dan kepercayaan diri murid perempuan terus menerus mengalami kemerosotan, sehingga pada akhir masa pendidikan kondisinya sering kali berbeda jauh di bawah rata-rata murid laki-laki (Sudrajad, 1994).

Anggapan bahwa ilmudan teknologi lebih cocok untuk murid laki-laki secara lambat laun mengikis minat serta perhatian murid perempuan terhadap subjek tersebut. Untuk alasan kepraktisan, mata pelajaran sering kali dikelompokkan ke dalam domain feminin (PKK, Bahasa, Seni, Sastra, Psikologi, Kedokteran Gigi, Perawat, Pendidik) dan domain maskulin (Komputer, Elektro, Perbungkelan, Mesin, Teknik). Di samping itu, *role model* perempuan yang berkarier dalam bidang ilmu dan teknologi masih sangat kurang. Ilustrasi buku pelajaran dan bacaan lain menampilkan figur laki-laki sebagai pemegang stetoskop, tabung reaksi, dan komputer, sedangkan figur perempuan sebagai pemegang alat-alat penunjang kehidupan domestik, seperti sapu, kemoceng, dan ember. Banyak sekali buku-buku pelajaran kita yang masih menggunakan kalimat dan ilustrasi klasik, seperti *Ibu memasak di dapur*, *Ibu menyapu lantai*, sedangkan *Ayah membaca Koran*, *Ayah pergi ke kantor*. Demikian juga peran gender diberikan pada siswa melalui buku pelajaran: *Ani membantu Ibu di dapur*, *Tono bermain bola*. Hal inilah yang menyebabkan konstruksi yang terbentuk dalam pikiran siswa bahwa ia diajari untuk berperan seperti itu.

Ketidaksetaraan dan ketidakadilan peran perempuan dan laki-laki yang dimanifestasikan dalam buku ajar ternyata membekas sangat kuat dalam ingatan anak-anak, sehingga membentuk mereka menjadi seperti yang digambarkan dalam buku tersebut. Akibatnya, dalam pergaulan sehari-hari dan dalam acuan mencari pekerjaan atau bidang yang akan digeluti nantinya, ketika mereka dewasa juga tak jauh dari referensi yang sudah ada dibenak mereka. Akibat lebih jauh perempuan dan laki-laki menjadi “membentuk dirinya” sesuai stereotip peran gender yang

diterimanya baik di sekolah maupun dalam lingkungan keluarga, sehingga mendorong mereka mengembangkan sikap dan pemahaman yang sama dalam dunia kerja dan dalam ber-relasi dengan lawan jenisnya.

Kesenjangan juga tampak pada rekrutmen tenaga pengajar atau guru. Secara formal aturan tidak mensyaratkan guru harus perempuan atau harus laki-laki, tetapi dalam kenyataan terjadi ketimpangan jumlah guru laki-laki dan perempuan di sekolah-sekolah. Pada tingkat dasar (guru SD), maka jumlah guru perempuan akan lebih banyak dari laki-laki. Hal ini ada beberapa faktor yang menyebabkannya. *Pertama*, stereotip pekerjaan bahwa guru adalah pekerjaan perempuan, apalagi guru TK dan SD karena diasosiasikan dengan fungsi merawat dan mengasuh cocok untuk seorang perempuan/ibu. *Kedua*, jenjang pendidikan yang dibutuhkan (pada waktu itu) tidak terlalu menuntut jenjang tertinggi untuk seorang guru SD, sehingga kaum perempuan boleh/bisa menjadi guru. Hal ini bisa dilihat bahwa sampai tingkat SMA atau SPG, jumlah siswa perempuan dan laki-laki hampir sama, bahkan untuk SPG (waktu itu) lebih banyak siswa perempuan daripada laki-laki. *Ketiga*, adanya asumsi bahwa mengajar anak TK atau SD belum menuntut kadar ilmiah yang terlalu tinggi, sehingga hal ini bisa dilakukan perempuan.

Pada tingkat SMA atau jenjang perguruan tinggi, jumlah guru atau dosen lebih banyak yang berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan. Mengapa demikian? *Pertama*, untuk bisa menjadi guru SMA atau dosen diperlukan jenjang pendidikan tinggi. Hal ini jarang dapat dipenuhi oleh kelompok perempuan karena kendala yang dihadapi perempuan dalam melanjutkan sekolah. *Kedua*, pada jenjang ini terdapat asumsi bahwa guru atau dosen harus memiliki kemampuan intelektual dan ilmiah yang tinggi, sehingga perempuan dianggap tidak mempunyai kemampuan tersebut dan “tidak pantas” masuk di dalamnya. Sementara itu, di masyarakat terdapat pandangan bahwa karena yang bisa pintar dan yang intelektualitasnya tinggi “hanya laki-laki”, demikian pula yang memiliki ilmu, pandai, dan rasional adalah “laki-laki”, maka sudah sepantasnya laki-laki memegang posisi penting di sekolah dan perguruan tinggi.

Hal ini juga berlaku untuk jabatan-jabatan tertentu dalam jenjang karier di sekolah dan perguruan tinggi. Masih sedikit perempuan yang duduk pada level penentu kebijakan, terutama di perguruan tinggi. Pada level sekolah, meskipun masih lebih sedikit jumlahnya dibandingkan laki-laki, posisi kepala sekolah dan pemilik sekolah sudah banyak yang dipegang oleh kaum perempuan. Pada level penentu kebijakan untuk pendidikan baik di tingkat pusat maupun daerah, pembuat kurikulum, anggota dewan pendidikan, semuanya laki-laki yang cenderung patriarki dalam membuat kebijakan.

5. Ketimpangan Gender di Bidang Hukum

Di bidang hukum masih banyak pasal-pasal dalam aturan hukum yang mendiskriminasikan perempuan. Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan masih diproses dengan aturan hukum yang sangat merugikan bagi kaum perempuan. Pasal 285 KUHP menyebutkan "barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". Yang dimaksud bersetubuh (pemerkosaan) dalam pasal tersebut adalah jika terjadi penetrasi alat kelamin laki-laki...." Selama bukan alat kelamin laki-laki yang melakukan penetrasi ke organ intim perempuan bukan dianggap sebagai pemerkosaan, tetapi pelecehan atau tindak kekerasan yang hukumnya sangat ringan jika dibandingkan pasal pemerkosaan. Padahal akibat yang ditimbulkan dari kasus tersebut sama beratnya bagi perempuan. Perempuan sama-sama dirugikan secara fisik dan psikis.

Selain itu, kebanyakan perempuan karena kurangnya pendidikan yang dimiliki masih buta terhadap aturan-aturan hukum. Setiap mendengar kata "hukum" mereka takut karena di dalam benak mereka hukum merupakan sesuatu yang menakutkan. Karena situasi psikologisnya sudah demikian, maka tak heran jika dia tak bisa melakukan pembelaan untuk dirinya sendiri.

Aturan-aturan hukum yang melindungi kaum perempuan sebenarnya sudah diratifikasi, misalnya UU penghapusan diskriminasi perempuan,

UU tentang *marital rape* atau tindak kekerasan dalam rumah tangga, dan yang lain. Akan tetapi, selama para penegak hukum, jaksa, hakim, dan pembela tidak menggunakan aturan tersebut sebagai acuan utama dalam proses hukum yang relevan, maka tidak akan ada artinya.

D. REKONSTRUKSI GENDER PADA ERA GLOBALISASI

Konstruksi adalah merupakan susunan realitas objektif yang diterima dan menjadi kesepakatan umum meskipun di dalam proses konstruksi itu tersirat dinamika sosial. Konstruksi gender adalah suatu realitas yang dibangun dan diterima oleh masyarakat tentang suatu sifat-sifat yang secara budaya diasosiasikan sebagai sifat yang harus dimiliki oleh perempuan atau laki-laki. Dengan demikian, konsep feminitas dan maskulinitas merupakan bentukan atau anggapan yang berlaku di masyarakat. Gender bukan kodrat, tetapi sesuatu yang ‘ diciptakan’ oleh budaya dan masyarakat yang bisa berubah dari waktu ke waktu dan dari suatu tempat ke tempat lain serta dapat dipertukarkan. Karena dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan, maka hal tersebut bukan merupakan kodrat, karena kalau kodrat bersifat tetap dan merupakan ketentuan Tuhan, di mana manusia maupun budaya tak dapat mengubahnya (Astuti, 2001).

Ketika kita membicarakan tentang sifat perempuan atau konsep feminitas, langsung tergambar di benak kita sifat-sifat tertentu yang harus dimiliki oleh perempuan. Pengkategorian tentang sifat perempuan (juga laki-laki) adalah hasil konstruksi sosial budaya oleh masyarakat tertentu karena menyangkut “apa yang pantas” dan “apa yang tidak pantas” untuk perempuan dan untuk laki-laki.

Pemahaman tentang perempuan yang bekerja juga harus dilihat bahwa sedang terjadi rekonstruksi dalam dunia kerja, selama ini selalu diasumsikan milik laki-laki. Peran-peran gender yang selama ini selalu melekat dengan perempuan mulai ada redefinisi ketika perempuan tidak bisa terus menerus berada di rumah untuk sepenuhnya merawat dan mengasuh anaknya, dan melayani suaminya. Oleh karenanya, menjadi sangat rumit manakala perempuan diharapkan memainkan berbagai peran sekaligus. Perempuan

ideal kemudian menjadi *super women* yang memiliki kapasitas yang dapat mengisi bidang domestik dengan sempurna dan bidang publik dengan baik. Perempuan yang ideal adalah yang bekerja dan menghasilkan uang, tetapi juga mampu mengurus rumah tangga dengan baik. Jika anak dan suaminya terurus, barulah dia mendapat pujian dari masyarakat sekitar. Akann tetapi, ketika salah satu hal tersebut tak terpenuhi, segera saja berbagai lontaran dan gunjingan akan dialamatkan kepada perempuan tersebut. Posisi laki-laki di sini tampak cenderung tak digugat, seolah-olah tak ada yang perlu disalahkan dengan posisi laki-laki pada gugus yang dominan selama ini.

Sudah selayaknya jika mulai dilakukan redefinisi dan rekonstruksi terhadap sosok perempuan secara menyeluruh bukan sepotong-sepotong. Sudah selayaknya laki-laki dan perempuan duduk bersama membicarakan dan menyepakati hal-hal yang bisa dilakukan laki-laki dan perempuan secara seimbang tanpa harus mengeksplorasi yang lain. Selama pemahaman tentang perempuan masih belum bergeser dari perdebatan publik domestik, maka proses sosial yang berlangsung juga masih merugikan ke dua belah pihak.

Pada era globalisasi, perempuan tak lagi menjadi sosok yang penurut, manut, dan tetap diam di rumah, tetapi sudah mulai berorientasi ke luar, berpikir global, menjadi perempuan pekerja, dan mandiri. Perubahan ini seharusnya juga diikuti dengan berbagai redefinisi umum yang terkait, misalnya, bagaimana komunitas dunia kerja, dan rumah tangga memaknai sosok perempuan yang sedang mencari identitas dirinya. Bagaimana institusi kerja dan institusi rumah tangga dalam menerima kenyataan ini adalah sangat penting untuk dicermati, jangan sampai perempuan yang sedang dalam pencarian identitas ini menjadi merasa tidak aman di luar rumah, sementara di dalam rumah pun dia juga merasa sudah tak nyaman lagi karena sudah terlanjur melangkah ke luar rumah.

Semakin banyak jumlah perempuan ke luar rumah, maka akan terjadi perubahan terhadap pola kerja dalam rumah tangganya. Cetak biru (*blue-print*) yang selama ini melekat kuat pada status dan peran laki-laki dan perempuan akan mengalami rekonsensualisasi sesuai dengan kondisi dan perubahan yang ada di masyarakat. Sudah saatnya

masyarakat tidak berharap terlalu banyak kepada perempuan untuk menjadi *super women*. Sudah waktunya dilakukan gerakan radikal untuk membongkar mitos dan pandangan masyarakat tentang perempuan, sekaligus juga melakukan rekonstruksi terhadap peran perempuan.

E. RANGKUMAN

Konsep jenis kelamin atau seks berbeda dengan konsep gender. Jenis kelamin merupakan pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, manusia jenis kelamin laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, jakun, dan memproduksi sperma, sedangkan manusia jenis kelamin perempuan adalah manusia yang memiliki rahim, payudara, vagina, dan indung telur. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia laki-laki dan perempuan secara permanen dan tidak dapat dipertukarkan karena merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan kodrat. Berbeda dengan jenis kelamin, gender dipahami sebagai suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan karena dikonstruksikan secara sosial dan kultural. Karena konstruksi tersebut berlangsung selama terus menerus dan dilanggengkan dalam berbagai pranata sosial, maka seolah-olah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan tersebut “merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh keduanya”. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, keibuan, *nrimo, manut*, tidak *neko-neko*. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Sebenarnya ciri atau sifat itu sendiri merupakan sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya, ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara ada perempuan yang kuat, rasional, perkasa, tanpa harus saling bertukar jenis kelamin. Perubahan sifat-sifat yang dikonstruksikan pada laki-laki dan perempuan tersebut dapat berubah dari tempat ke tempat lain, dari waktu ke waktu, dan dari masyarakat yang berbeda. Jadi, semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat laki-laki dan perempuan, yang bisa berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat lainnya, itulah yang dikenal dengan konsep gender.

Sebagai konstruksi sosial, konsep gender harus disosialisasikan secara benar. Hal ini penting, karena selama ini sosialisasi yang berlangsung secara evolusional cenderung menyesatkan dan memengaruhi watak biologis masing-masing jenis kelamin. Misalnya, karena konstruksi sosial, laki-laki harus bersifat kuat dan agresif, sehingga kaum laki-laki terlatih dan tersosialisasi serta termotivasi untuk menjadi atau menuju ke sifat yang dikonstruksikan tersebut, yakni secara fisik lebih kuat dan lebih besar, karena “harus kuat dan perkasa”. Sebaliknya, kaum perempuan harus lemah lembut, pasif, maka perempuan pun terlatih dan termotivasi untuk “menjadi sosok perempuan yang diinginkan” masyarakat. Proses sosialisasi sudah dimulai sejak bayi, di mana bayi perempuan dibelikan pakaian yang berwarna lembut dan cerah seperti *pink*, *orange*, dan sebagainya, bayi perempuan ditimang, digendong dengan lemah lembut, dielus, bak porselen, dijaga sejak bayi sampai dewasa, diproteksi sedemikian rupa seolah-olah dunia luar itu begitu menakutkan bagi makhluk yang namanya perempuan. Sementara itu, bayi laki-laki selalu dipilihkan warna-warna kuat seperti biru, abu-abu, hijau dan sebagainya. Jika menangis dikatakan *“anak laki-laki tak pantas menangis”*, dan tepukan-tepuhan yang sedikit keras boleh diberikan untuk bayi laki-laki, karena dia harus menjadi seorang laki-laki yang kuat dan tegar. Bayi laki-laki disosialisasi dengan hal-hal yang jantan dan diperkenalkan dengan dunia yang dianggap milik laki-laki. Karena sosialisasi tersebut, maka tidak saja berpengaruh pada perkembangan emosi dan visi kaum perempuan dan laki-laki, tetapi juga memengaruhi perkembangan fisik biologis selanjutnya.

Dalam relasi kaum perempuan dan laki-laki di ruang publik telah terjadi banyak pergeseran peran. Pergeseran peran perempuan dari peran domestik ke publik merupakan tanda penting dari perkembangan realitas sosial, ekonomi, dan politik perempuan. Kesadaran perempuan tentu semakin meningkat terhadap peran nondomestik, terlepas didasari oleh kepentingan apa dan siapa. Namun keterlibatan itu bukan berarti hak perempuan semakin diperhatikan, karena keterlibatan perempuan dimanfaatkan oleh laki-laki dan oleh berbagai kepentingan

lain, seperti negara dan kapitalisme. Perempuan menjadi faktor penting dalam ekonomi rumah tangga terutama pada saat laki-laki “kehilangan” kesempatan terlibat akibat segmentasi pasar tenaga kerja.

Selain itu, perempuan secara umum masih dipandang sebagai *the other* atau orang asing dalam dunia kerja. Hal ini tampak dari berbagai bentuk pengingkaran sosial yang dilakukan oleh laki-laki atau institusi pendukung terhadap kaum perempuan. Perempuan akhirnya melihat dunia kerja semacam dunia baru yang masih rawan dan tidak aman bagi mereka. Belum lagi kendala yang dihadapi dalam keluarga, suatu persoalan yang muncul akibat keterlibatan mereka di luar rumah. Banyak kasus menunjukkan ada ketidakseimbangan hubungan dalam keluarga manakala istri bekerja di luar rumah.

Gugatan terhadap ideologi familialisme ternyata juga menimbulkan situasi yang liminal di kalangan perempuan, meskipun hal ini jarang menjadi perhatian. Namun justru kondisi liminal inilah yang penting kita cermati untuk lebih memahami sosok perempuan secara menyeluruh. Perempuan merasa *ambigu* dengan dunianya. Hubungan antara laki-laki dan perempuan ternyata tidak hanya menjadi masalah di tempat kerja atau di luar rumah, tetapi justru di dalam rumah. Rumah di mana perempuan mendapatkan kebahagiaan akhirnya berubah menjadi “dunia lain” bagi perempuan sendiri, padahal satu kaki perempuan sudah terlanjur ke luar rumah.

Itulah sebabnya, perlu dilakukan gerakan radikal untuk mendidik masyarakat agar mitos tentang peran perempuan yang selama ini sudah terlanjur salah kaprah, dibongkar dan perempuan harus diperlakukan sebagaimana halnya perempuan sebagai manusia yang memiliki kebebasan dan hak asasi, sehingga mereka bisa berperan setara dengan kaum laki-laki dalam kegiatan di ruang domestik maupun publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan (ed). 1997. *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdullah, Irwan (ed). 2000. *Seks, Gender, dan Reproduksi Kekuasaan*. Yogyakarta: Terawang.
- Al Arifin, Akhmad Hidayatullah. 2012. "Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Praksis Pendidikan di Indonesia". Dalam *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi Volume 1 Nomor 1, Juni 2012*. Hlm. 72–82.
- Alexander, Jennifer. 1998. "Women Traders in Javanese Marketplaces: Ethnicity, Gender , and The Entrepreneurial Spirit" dalam Robert, W. Hefner (ed). *Market Cultures: Society and Morality in The New Asian Capitalism*. Page: 203–223. Boulder: Wesview.
- Amaladoss, Michael. 1991. *Making All Things New: Dialogue, Pluralism an Evangelization in Asia*. New York: Orbit.
- Anas, Zulfikri. 2002. *Ciri Kultural Masyarakat Indonesia*. Proyek Pembinaan Perguruan Agama Islam Tingkat Menengah. Departemen Agama. Jakarta.
- Astuti, Tri Marhaeni P. 2000. "Gerakan Tandingan Perempuan: Kasus Migrasi Perempuan Kelas Bawah di Grobogan, Jawa Tengah" dalam E. Kristi Poerwandari dan Rahayu Surtiati Hidayat (ed.), *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah*. Jakarta: Program Studi Kajian Wanita, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia. Hlm. 493–515
- Astuti, Tri Marhaeni P. 2001."Rekonstruksi Gender dan Seksualitas Perempuan Migran" makalah disampaikan pada *Symposium Internasional II Jurnal Antropologi Indonesia* di Universitas Andalas Padang pada tanggal 18–21 Juli 2001, kerjasama UI, Unand, dan center for South East Asian Studies, Kyoto University.
- Bachtiar, Harsya W. "Masalah Integrasi Nasional di Indonesia", dalam *Prisma* No 8 Th V Agustus 1976. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Bachtiar, Harsya W., 1979. "Struktur Masyarakat Indonesia" dalam *Majalah Ilmu dan Kebudayaan*, No. 0126-2602, Edisi Ke II –

- Januari 1979.
- Banks, J. A. 1995. Multicultural Education: Historical Development, Dimensions, and Practice. In J. A. Banks & C. A. M. Banks (Eds.). *Handbook of Research on Multicultural Education* (pp. 3-24). New York: Macmillan.
- Banks, J. A. 1997. Multicultural Education: Characteristics and Goals. In J. A. Banks & C. A. M. Banks, (Eds.). *Multicultural Education: Issues and Perspectives* (3rd ed., pp. 3-31). Boston: Allyn and Bacon.
- Barbie, E. 1989. *Economic Natural Resource Scurity and Development*. London: Eagrscarn Publication.
- Barth, Fredrik (ed.). 1988. *Kelompok Etnik dan Batasannya*. Terjemahan Nining I Soesilo. Jakarta: UI Press.
- Bennet, Charles. 1995. *Education Theory and Practice*. Boston: Allyn and Bacon.
- Bloor, Kevin. 2010. *The Definitive Guide to Political Ideologies*. London: AuthorHouse.
- Budhisantoso,S. tth. "Corak dan Kebudayaan Indonesia". *Makalah*.
- Budiawan. 1989. "Tradisi dan Globalisasi Informasi" dalam *Basis*, edisi Oktober No. XXXVIII, Yogakarta.
- Budiman, Arief. 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Burgess, Ann Carroll; Burgess, Tom. 2005. *Guide to Western Canada* (7th ed.). Montreal: Globe Pequot Press.
- Campbell, Tom. 1994. *Tujuh Teori Sosial*. Terjemahan F. Budi Hardiman. Yogyakarta: Kanisius.
- Chandra, Robby I. 1992. *Konflik dalam Hidup Sehari-hari*. Yogyakarta: Kanisius.
- Chopp, Rebecca S. 1996. *The Praxis of Suffering: An Interpretation of Liberation and Political Theologies*. New York: Orbis.
- Collenbach, Ernest. 1999. "Kaidah Ekologis Masyarakat Berkelanjutan". Dalam Takashi Inoguchi, erdaward Newman dan Glen Paoletto (editor). *Kota dan Lingkungan: Pendekatan Baru Masyarakat Berwawasan Ekologi*. Hlm. 21–36. Terjemahan Rasti Suryadani. Jakarta: LP3ES.
- Coser, Lewis A. 1964. *The Functions of Social Conflict*. London: The Free Press of Glencoe.
- Craig, Ian. 1986. *Teori-teori Sosial Modern*. Terjemahan Paul S. Baut dan

- T. Effendi. Jakarta: CV. Rajawali.
- Dewantara, Ki Hadjar. 1992. "Tentang Puncak-puncak dan Sari-sari Kebudayaan di Indonesia". *Kebudayaan* No 4. Th II. 1992. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Djojomartono, Moeljono. 1994. "Integrasi Nasional, Kerjasama Antar Golongan Etnik Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi". *Makalah*. Departemen P & K. Direktorat Jenderal Kebudayaan Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Jawa Tengah.
- Ekeh, Peter P. 1974. *Social Exchange Theory*. London: Heinemann Educational Books, Ltd.
- Fakih, Mansour. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faturidiman dan Agus Dwiyanto. 2001. *Reorientasi Kebijakan Kependudukan*. Yogyakarta: PKK UGM.
- Fitrian Ardiansyah, Neil Gunningham, Peter DrahosNeedham, M. T. 2011. *A Psychological Approach to a Thriving Resilient Community*. International Journal of Business, Humanities and Technology, vol. 1 no. 3. NY, USA.: CPI.
- FWI. 2009. *Perkembangan Tutupan Hutan Indonesia*. Diakses tanggal 28 September 2012. Url:<http://fwi.or.id/?p=82>
- Furnivall, J.S. 1944. *Netherlands India: A Study of Plural Economy*. New York: MacMillan.
- Garna, Judistira K. 1996. *Ilmu-ilmu Sosial Dasar Konsep Posisi*. Bandung: Program Pascasarjana UNPAD.
- Geertz, Hildred. 1961. *The Javanese Family: A Study of Kinship and Socialization*.Glencoe, III: Free Press.
- Goldthorpe, JE. 1992. *Sosiologi Dunia Ketiga*. Terjemahan Sukadijo. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gramsci, Antonio. 1971. *Selection From The Prison Notebooks of Antonio Gramsci*. Diterjemahkan dan diedit oleh Quintin Hoare dan Nowell Smith. New York: International.
- Haris, Abdul dan Nyoman Andika. 2002. *Dinamika Kependudukan dan Pembangunan di Indonesia*. Yogyakarta: LESPI.
- Hariyono, P. 1994. *Kultur Cina dan Jawa Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Harsono, Rebeka. 1997. "Gerakan Perempuan antara Kepentingan

- Perempuan dan Politik Gender*", dalam Irwan Abdullah (ed.) Sangran Paran Gender. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasbi. 2012. *Hidup Selaras dengan Alam sebagai Kosmologi Suku Kajang, Bulukumba, Sulawesi Selatan*. Url: <http://hasbihtc.blogspot.com/2012/01/hidup-selaras-dengan-alam-sebagai.html#ixzz27gISBzAd>.
- Hefner, Robert W. 2007. *Politik Multikulturalisme: Menggugat Realitas Kebangsaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hendrick, William. 2001. *Bagaimana Mengelola Konflik*. Terjemahan Arif Santoso. Jakarta: Bumi Aksara
- Hendropuspito OC, D. 1989. *Sosiologi Sistematik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Heywood, Andrew. 2000. *Key Concepts in Politics*. London: Palgrave Macmillan.
- Hidayah, Zulyani. 1997. *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Hidayah, Zulyani. 1999. "Kemajemukan dan Konflik: Pendekatan Kebudayaan", dalam *Wacana Antropologi* Vol. 2. No. 4, Januari 1999.
- Ibrahim, Tamzil. 2006. "Pasang" Kearifan Komunitas Ammatoa dalam Pengelolaan Hutan Adat Di Desa TanaToa, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, Makalah Penunjang pada Konferensi Badan Kerjasama Pusat Studi Lingkungan (BKPSL), Tanggal 15–16 Mei 2006 di Banjarmasin, hlm. 3.
- Jary, David and Julia Kary. 1991. "Multiculturalism" *Dictionary of Sociology*. New York: Harper.
- Johnson, Doyle Paul. 1994. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Terjemahan Robert MZ. Lawang. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Joyomartono, Mulyono. 2004. *Pengantar Antropologi Kesehatan*. Semarang: UPT UNNES Press.
- Kedourie, Eli. 1993. "Ethnicity, Majority, and Minority, in The Middle East". Dalam Milton J. Esman & Hanna Robinovich, eds. *Ethnicity, Pluralism, and The State in Middle East*. Page. 25–31. Ithaca: Cornell University Press.
- Keesing, Roger M. 1992. *Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer*. Terjemahan Samuel Gunawan. Jakarta: Penerbit PT Erlangga.
- Koentjaraningrat. 1985. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia.

- _____. 1993. *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*. Jakarta : UI Press.
- _____. 1996. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- _____. 1990. *Sejarah Teori Antropologi II*. Jakarta : UI Press.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2000. *Kebhinnekaan Masyarakat di Indonesia Suatu Problematika Filsafat Kebudayaan*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Kymlicka, Will. 2003. *Kewargaan Multikultural*. Terjemahan Edlina H. Eddin. Jakarta: LP3ES.
- Liliweri, Alo. 2001. *Gatra-Gatra Komunikasi AntarBudaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Malthus, Thomas. 1959. *Population: The First Essay*. Michigan: Michigan University Press.
- Mangunwijaya, Y.B. (ed.). 1983. *Teknologi dan Dampak Kebudayaan Jilid 1*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Mantra, Ida Bagoes. t.th. *Demografi Umum* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marquette, Catherine. 1997. *Population and Environment Relationships in Developing Countries: A Select Review of Approaches and Methods*. Working Paper. No. 15. Chr. Michelsen Institute, Development Studies and Human Rights, Bergen Norway.
- Mitchell, Bruce M. and Robert E. Salsbury. 1999. *Encyclopedia of Multiculture Education*. Westport CT: Greenwood Press.
- Mitchell, CR. 1994. *The Structural of International Conflict*. London: The Macmillan Press Ltd.
- Murdiyatmoko, Janu. 2003. *Sosiologi Untuk SMU Kelas 1*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Mustofa, Moh. Solehatul. 1996. "Pertentangan Penduduk Pribumi Dengan Etnis Cina di Wilayah Pantai Utara Jawa Akibat Diskriminasi Pemerintah Kolonial Belanda (1990–1942)", dalam *Laporan Penelitian*. FPIPS IKIP Semarang.
- Mustofa, Moh. Solehatul, 2000. "Konflik Antar Pendukung Parpol pada Masyarakat Yogyakarta Menjelang Pemilu 1999". dalam *Forum Ilmu Sosial*. Tahun XXIV No. 1. Penerbit: FIS UNNES.
- Mustofa, Moh. Solehatul. 1995. "Kewirausahaan Masyarakat Industri Pada Sebuah Desa di Jawa". Tesis S2 PPS Antropologi Universitas Indonsia. Jakarta: Tidak diterbitkan.

- Mutakin, Awan. 1998. *Studi Masyarakat Indonesia*. Jakarta : Depdikbud Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Mutakin, Awan, dkk. 2004. *Dinamika Masyarakat Indonesia*. Bandung: PT. Genesindo.
- Muthahhari, Murtadha. 1998. *Masyarakat dan Sejarah Kritik Islam atas Marxisme dan Teori Lainnya*. Terjemahan M. Hashem. Bandung: Mizan.
- Muthali'in, Ahmad. 2001. *Bias Gender dalam Pendidikan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Nasikun. 1993. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nieto, Sonia. 1991. *Affirming Diversit: The Sociopolitical Context of Multicultural Education*. New York: Longman.
- Parekh, Bhikhu. 2008. *Rethinking Multiculturalism; Keberagaman Budaya dan Teori Politik*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Pelly, Usman dan Asih Menanti. 1994. *Teori-teori Sosial Budaya*. Jakarta: Depdiknas.
- Poerwanto, Hari. 2000. *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perpektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Poloma, Margareth M. 1984. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Pyke, Karen D. 1996. "Class Based Masculinities: The Interdependency of Gender, Class and Interpersonal Power" in *Gender and Society*. Page 527-544.
- Raharjo, Yulfita. 1994. "Pendidikan Dalam Membentuk Wawasan Gender". Makalah disampaikan pada *Seminar Konsep Gender dalam Ajaran Islam* dalam rangka memperingati HUT GUPPI ke 44. di Depag. Jakarta.
- Restu, M., & Emil Sinohadji. *Borongan ri Kajang (Hutan di Kajang)*. URL :<http://www.fkkm.org/PusatData/index.php?action=detail3&page=22&lang=ind>. URL <http://hasbihtc.blogspot.com/2012/01/hidup-selaras-dengan-alam-sebagai.html#ixzz27gn7RMAN>.
- Safri. 1994. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sajoga dan Pudjiwati Sajoga. 1984. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Salim, Emil. 1987. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Salle, K. 2000. "Kebijakan Lingkungan Menurut Pasang: Sebuah Kajian

- Hukum Lingkungan Adat pada Masyarakat Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba”, dalam *Jurnal Pascasarjana Universitas Hasanuddin Vol. 1 Thn. 2000*. Diakses dari http://www.pascaunhas.net/jurnal_pdf/vol_1_2/kaimud.pdf
- Saptari, Ratna dan Brigitte Holzner. 1997. *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Grafiti.
- Schlesinger Jr., Arthur. 1997. *Kebhinnekaan Amerika Refleksi atas Sebuah Masyarakat Multikultural*. Terjemahan Pericles Katoppo. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sjafri, Sairin. 2002. *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soedjito, S. 1986. *Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Industri*. Yogyakarta: Penerbit PT Tiara Wacana Yogyakarta.
- Soemandoyo, Priyo. 1999. *Wacana Gender dan Layar Televisi; Studi Perempuan dalam Pemberitaan Televisi*. Yogyakarta: LP3Y.
- Soerjono, Soekanto. 2000. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Yayasan Penerbit – UI
- _____. 1983. *Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Ghilia Indonesia.
- Sutjipto. 2005. “Konsep Pendidikan Formal dengan Muatan Budaya Multikultural”. Dalam *Jurnal Pendidikan Penabur No. 04, Th. IV, Juli 2005*. Halaman 53-58.
- Sudradjat, Iwan. 1994. *Strategi Pengembangan Kesadaran Gender Sebagai Upaya untuk Untuk Meningkatkan Kesetaraan Wanita dalam Wajib Belajar Pendidikan Dasar*. Diselenggarakan oleh Dirjen Dikmenum. Jakarta.
- Sudrajat, Edy. 1998. “Regionalisme, Nasionalisme, dan Ketahanan Nasional: Suatu Tinjauan dari Segi Strategi Hankam” dalam, Ichlasul Amal dan Armaidiy Armawi (ed.), *Regionalisme, Nasionalisme, dan Ketahanan Nasional*. Yogyakarta, Gadjah Mada Univerty Press.
- Sujak, Abi. 1990. *Kepemimpinan Manajer*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Sunarto, Kamanto. 2000. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: FE - UI
- Sunderlin, William D. dan Resosudarmo, Ida Aju Pradnya. 1997. *Laju dan Penyebab Deforestasi di Indonesia: Penelaahan Kerancuan dan Penyelesaiannya*. Occasional Paper 9 (1). Centre for International Forestry Research.

- Suparlan. 1982. "Penelitian Bagi Menunjang Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Nasional". Dalam *ISD (Bahan Bacaan Pengajar)*. Konsorsium Antarbidang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Suparlan, Parsudi. 2008a. *Dari Masyarakat Majemuk Menuju Masyarakat Multikultural*. Jakarta: YPKIK.
- _____. 2008b. *Ilmu Kepolisian*. Jakarta: YPKIK.
- Suriani. 2006. "Tanah Laksana Ibu bagi Suku Kajang", dalam *Harian Sore Sinar Harapan Edisi 06 Februari 2006*.
- Suryadinata, Leo, dkk. 2003. *Penduduk Indonesia Etnis dan Agama dalam Era Perubahan Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Sutaryo. 1977. *Sosiologi Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Fisipol – UGM
- Sutrisno, Lukman. 2003. *Konflik Sosial: Studi Kasus Indonesia*. Yogyakarta: Tajidu Press
- Svalastoga, Kaare. 1989. *Differensiasi Sosial*. Terjemahan Alimandan. Jakarta: Bina Aksara.
- Takashi Inoguchi, Edward Newman, Glen Paulette (Ed.). 2003. *Kota dan Lingkungan, Pendekatan Baru Masyarakat Berwawasan Ekologi*. Jakarta: LP3ES.
- Tan, Mely G. "Masalah Mayoritas-Minoritas di Indonesia". *Prisma*. No 8 Tahun V Agustus 1976. Jakarta: LP3ES
- Tim Sosiologi. 2003. *Sosiologi Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat (Kelas 1 SMA)*. Jakarta: Yudhistira.
- Tukiran, dkk. 2002. *Mobilitas Penduduk Indonesia*. Yogyakarta: PSKK UGM.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Usman Sunyoto, 1998. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Veeger, KJ. 1993. *Realitas Sosial*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Waston,CW. 2000. *Multiculturalism*. Buckingham-Philadelphia: Open University Press.
- Willett, Cynthia. 1998. "Introduction" dalam Cynthia Willett (ed). *Theorizing Multiculturalism: A Guide to the Current Debate*. Oxford, UK: Blackwell.
- Yacobs, Keneddy and Elliot. 1995. *Survey Methods of Valuing The*

Conservation of Endangered Species. A Paper Presented at The 39thUnited Cites and Local Governments, "Culture: Fourth Pillar of Sustainable Development.

Yakin, Addinul, 1997. *Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan.* Teori dan Kebijaksanaan Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta: Akademika Presindo.

Yaqin, Ainul. 2005. *Pendidikan Multikultural Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan.* Yogyakarta: Pilar Media.

Zeitlin, Irving. M. 1995. *Memahami Kembali Sosiologi.* Terjemahan Anshori dan Juanda. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.

GLOSARIUM

Ammentengko nu	
Kamase-mase	: berdiri engkau sederhana.
Accidongko nu	
Kamase-mase	: duduk engkau sederhana.
A'dakkako nu	
Kamase-mase	: melangkah engkau sederhana.
A'meako nu	
Kamase-mase	: berbicara engkau sederhana.
Andosentris	: paham yang berorientasi pada kepentingan laki-laki.
Avoiding	: gaya penyelesaian konflik dengan menghindar.
Bineka Tunggal Ika	: meskipun berbeda-beda suku bangsa, tetapi tetap merasa sama-sama satu bangsa Indonesia.
Compromissing	: gaya penyelesaian konflik dengan kompromis.
Cost Ideology	: nilai yang harus dibayar.
Creative thinking	: suatu tingkatan berpikir yang tinggi; kesanggupan seseorang untuk menciptakan ide baru yang berfaedah.
Crute Birth Rate	: rata-rata kelahiran.
Dekonstruksi	: mempertanyakan keabsahan realitas objektif perempuan.
Dominating	: gaya penyelesaian konflik dengan mendominasi.
Difusi	: penyebaran atau pengkomunikasian ide-ide ke dalam sistem sosial.
Etnik	: himpunan manusia karena kesamaan ras,

	agama, asal usul bangsa ataupun kombinasi dari kategori tersebut yang terikat pada sistem nilai budayanya
Equilibrium	: proses yang terjadi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dalam upaya membentuk harmoni atau mencapai keselarasan interaksi sosial dalam suatu tatanan masyarakat yang heterogen.
Fakta Sosial	: cara-cara bertindak, berpikir, dan merasa yang berada di luar individu dan dimuati dengan sebuah kekuatan memaksa, yang karenanya hal-hal itu mengontrol individu.
Fulfillment of human Needs	: pemenuhan kebutuhan manusia.
GAD	: gender dan pembangunan.
Gaya hidup “Sedenter”	: gaya hidup yang enggan untuk repot sedikit untuk selalu bergerak menggunakan tubuh.
Gender	: suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan karena dikonstruksikan secara sosial dan kultural.
Heterogenitas	: merupakan kontraposisi dari homogenitas mengindikasikan suatu kualitas dari keadaan yang menyimpan ketidaksamaan dalam unsur-unsurnya.
Home Land	: tanah air sendiri.
Home Rule	: pemerintahan sendiri.
Integrasi Statis	: pendirian bahwa penguasa dalam masyarakat, entah bentuknya pemerintahan atau raja itu tidak diperlukan.
Integrasi Sosial	: suatu proses penyatuan antara dua unsur atau lebih yang mengakibatkan terciptanya suatu keinginan yang berjalan dengan baik dan benar.
Integrasi Dinamis	: keadaan kesatuan dan persatuan sejumlah kelompok etnis dan kelompok sosial beserta sistem sosio-budaya mereka dalam struktur

	sedemikian rupa sehingga pelaksanaan fungsinya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berubah-ubah demi tercapainya tujuan bersama.
Integrating	: gaya penyelesaian konflik dengan mempersatukan.
Invensi	: proses di mana ide-ide baru diciptakan dan dikembangkan.
Jagai lino lollong	
Bonena	: peliharalah dunia beserta isinya.
Jenis Kelamin	: pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu.
Kasipalli tauwa	
a'lamung-lamung	
ri boronga	: orang dilarang menanam di dalam hutan.
Kebudayaan	: sistem pengetahuan dan kepercayaan yang disusun sebagai pedoman manusia dalam mengatur pengalaman dan persepsi mereka, menentukan tindakan, dan memilih di antara alternatif yang ada.
Kehidupan bersama	: kehidupan yang di dalamnya kelompok-kelompok manusia hidup bersama-sama di suatu wilayah tertentu, berbagi iklim, berbagi identitas, berbagi kesenangan maupun kesedihan.
Kemajemukan budaya	: masyarakat majemuk yang timbul atas berwujudnya beberapa kelompok etnik.
Konflik	: interaksi antarindividu, kelompok, atau organisasi yang membuat tujuan atau arti yang berlawanan dan merasa bahwa orang lain sebagai pengganggu potensial terhadap pencapaian tujuan mereka.
Konsekuensi	: perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sosial sebagai akibat pengadopsian atau penolakan.

Konstruksi	: susunan realitas objektif yang telah diterima dan menjadi kesepakatan umum, meskipun di dalam proses konstruksi itu tersirat dinamika sosial.
Konstruksi Gender	: suatu realitas yang dibangun dan diterima oleh masyarakat tentang suatu sifat-sifat yang secara budaya diasosiasikan sebagai sifat yang harus dimiliki oleh perempuan atau laki-laki.
Krisis ekonomi	: perubahan ekonomi yang terjadi secara cepat, mengarah pada turunnya nilai tukar mata uang dan harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi.
Kromo Inggil	: bahasa jawa halus.
Land learing	: pembukaan lahan.
Lifestyle	: gaya hidup.
Masyarakat	: kelompok manusia yang hidup relatif sebagai kebersamaan berdasarkan suatu tatanan kebudayaan tertentu.
Masyarakat Majemuk	: suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam suatu kesatuan politik.
Model Cultural Pluralisme	: suatu kebudayaan dari banyak kebudayaan.
Maintenance of ecological integrity	: memelihara integritas ekologi.
Mozaik	: kesatuan yang terdiri atas sambungan-sambungan yang disusun sedemikian rupa sehingga menjadi satu gambaran yang utuh.
Multikulturalisme	: sebuah ideologi yang menekankan kesederajatan dalam perbedaan-perbedaan kebudayaan.
Nation Building	: pembangunan bangsa.
Nirvan	: meniuip habis.

Obliging	: gaya penyelesaian konflik dengan kerelaan untuk membantu.
Overkonsumtivisme	: konsumsi berlebihan.
Particularism	: sebuah perspektif budaya yang berorientasi kontinjenji dan menggunakan berbagai standar evaluatif yang didasarkan pada hubungan dan situasi.
Puissance imperative et coercitive	: suatu kenyataan (fakta) sosial yang dari luar menekan individu dan mengatur perilakunya.
Pemberontakan separatis	: pemberontakan untuk memerdekakan diri dari kekuasaan negara.
Pendidikan multikultural	: pendidikan multietnik, pendidikan antirasis, dan pendidikan multirasial yang digunakan oleh negara-negara di dunia yang merujuk pada usaha pendidikan untuk mananamkan nilai-nilai positif tentang pluralisme kehidupan manusia dan mengembangkan potensi belajar untuk seluruh siswa.
Rekonstruksi	: proses rekonseptualisasi dan redefinisi eksistensi perempuan.
Revolusi integratif	: proses perluasan kesadaran akan kesamaan dan perbedaan primordial ke arah kesatuan yang lebih luas dalam kerangka keterpaduan masyarakat bangsa.
Samsara	: meremehkan segala kelakuan yang hanya mengekalkan rangkaian kelahiran kembali.
Self determination	: penentuan nasib sendiri.
Sense of belonging	: perasaan ikut memiliki
Social Capital	: modal sosial.
Social equity	: keadilan sosial.
State Building	: pembangunan negara.

- Stereotip : pengetahuan yang samar-samar dan sepotong-sepotong tentang kebudayan orang lainnya itu sering kali dianggap sebagai kebenaran oleh yang bersangkutan, padahal sering kali salah atau tidak benar.
- Sistem nilai budaya : konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup.
- Survival : kelangsungan hidup.
- Universalism : aliran yang meliputi segala-galanya.
- WID : perempuan dalam pembangunan.

TENTANG PENULIS



Dr. Eko Handoyo, M.Si. Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang (FIS Unnes), yang saat ini juga mendapat tugas sebagai Pembantu Dekan Bidang Akademik FIS Unnes. Mata kuliah pokok yang diampu adalah (1) Etika Politik dan Pembangunan, dan (2) Kebijakan Publik dan Pembangunan. Lahir di Pati, Jawa Tengah pada 08 Juni 1964, lulus sarjana bidang PMP-Kn dari IKIP Semarang tahunan 1987, Magister Ketahanan Nasional dari UGM tahun 1988, dan program Doktor Studi Pembangunan dari UKSW Salatiga tahun 2012. Kurang lebih 24 judul buku yang pernah ditulis semenjak menjadi staf pengajar (1988) hingga sekarang dengan jabatan fungsional Lektor Kepala. 3 (tiga) judul buku terakhir yang ditulis diantaranya: *Sosiologi Politik* (2013), *Pendidikan Anti Korupsi* (2013), *Konservasi dan Peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia* (2014).



Prof. Dr. Tri Marhaeni Pudji Astuti, M.Hum. Menyandang jabatan Guru Besar Jurusan Sosiologi dan Antropologi FIS Unnes sejak tahun 2010, lahir di Purwodadi pada tanggal 9 Juni 1965. Lulus sarjana dari IKIP Semarang tahun 1987, Magister Humaniora bidang Kajian Wanita dari Universitas Indonesia tahun 1996, dan Doktor Antropologi UGM tahun 2005. Salah satu karya monumentalnya adalah karya ilmiah dengan judul: *Poverty, Migration, and The Loss of Womenhood Life-History and Story of Poor Women From Central Java in Malaysia and Singapore Gender Construction in Pesantren in Central Java and Malaysia (Johor)*. Banyak melakukan penelitian dan menulis buku

serta menjadi pembicara dengan tema gender dan perempuan. Salah satu judul buku yang terakhir ditulis adalah *Penghargaan Sosial Semu dan Liminalitas Perempuan Migran* (2013).



Dra. Rini Iswari, M.Si. Lahir di Yogyakarta, 7 Juli 1959. Dosen Jurusan Sosiologi dan Antropologi FIS Unnes sejak Tahun 1986. Mata kuliah pokok yang diajarnya Sosiologi Gender. Lulus sarjana (Dra.) dari UGM tahun 1985, dan Magister (M.Si.) dari UGM tahun 1998. Selain buku *Studi Masyarakat Indonesia*, buku yang pernah ditulis sebelumnya berjudul *Pengkajian dan Penulisan Upacara Tradisional di Kabupaten Cilacap* (2006).



Moh Yasir Alimi, S.Ag., M.A., Ph.D. adalah peneliti dan dosen di Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Universitas Negeri Semarang. Menyelesaikan gelar PhD di Australian National University dengan tesis berjudul *Inculcating Islam: The Public Sphere and the Islamic Traditions in South Sulawesi*. Publikasi meliputi, antara lain, 'Gerakan Perempuan di Indonesia, di *Oxford Islamic Studies online* (2011), Jenis Kelamin Tuhan (1999), Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial (2004) dan beberapa resensi buku di *Asia Pasifik Journal of Anthropology* (TAPJA). Aktif juga menulis komentar di surat kabar Indonesia seperti *Republika*, *Kompas*, khususnya *Jakarta Post*. Minat penelitiannya meliputi agama di ruang publik, agama dan internet, gender dan seksualitas, deradikalisasi, dan sosiologi dan antropologi dari masyarakat Muslim kontemporer. Di Universitas Negeri Semarang, ia saat ini memimpin Pusat Kajian Multikulturalisme, Demokrasi dan Character Building (CULDERAC) di mana ia memulai proyek rekonstruksi ilmu-ilmu sosial dan kehidupan sosial melalui cinta.



Drs. Moh Solehatul Mustofa, M.A. Adalah peneliti dan dosen pada Jurusan Sosiologi dan Antropologi FIS Unnes lahir di Cilacap pada tanggal 02 Agustus 1963. Lulus Sarjana Pendidikan dari IKIP Semarang (1987) dan Magister bidang Antropologi dari Universitas Indonesia tahun 1995, dan saat ini masih studi lanjut S3 di UNDIP. Menjadi dosen sejak tahun 1988 dengan mata kuliah pokok Antropologi Ekonomi, dan saat ini memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala, dan juga bertugas sebagai Ketua Jurusan Sosiologi dan Antropologi FIS Unnes. Buku-buku yang ditulis dalam tahun-tahun terakhir diantaranya: *Pancasila dalam Perspektif Kefilsafatan dan Praktis* (2009), *Perilaku Ekonomi Masyarakat Desa Hutan dalam Memanfaatkan Lahan di Bawah Tegakan (PLDT) di Lahan Perhutani, Kabupaten Pati* (2010), *Kewirausahaan Masyarakat Desa* (2010).